KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Buku XVIII
RPIW Provinsi Jawa Barat



Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2025-2034

Jawa Barat

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.

KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. RPIW Provinsi Aceh;
2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. RPIW Provinsi Bengkulu;
6. RPIW Provinsi Riau;
7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. RPIW Provinsi Jambi;
9. RPIW Provinsi Lampung;
10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. RPIW Provinsi Banten;
17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. RPIW Provinsi Bali;
23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. RPIW Provinsi Gorontalo;
26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. RPIW Provinsi Maluku;
33. RPIW Provinsi Papua;
34. RPIW Provinsi Papua Barat;
35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,

disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.

KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.

KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN



M. BASUKI HADIMULJONO
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PUPR terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono

SAMBUTAN



YUDHA MEDIAWAN
Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Yudha Mediawan

Tim Pengarah:

Yudha Mediawan
Rachman Arief Dienaputra
Melva Eryani Marpaung
Kuswardono

Tim Penyusun:

Entatarina Simanjuntak
Raymond Tirtoadi
Dewangga Megaloka
Cyrilus Aghista Cecarian Roby
Safira Az Zahra Pramaishma M.
Aghnia Khairani Nurhadi
Budi Prasetyo Nugroho

Tim Peninjau:

Citra Fadhilah Utami

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung G BPIW – Penyediaan Perumahan Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12110
www.bpiw.pu.go.id

DAFTAR ISI

SAMBUTAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR PETA ..... **x**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan dalam Kebijakan 2
1.3. Urgensi Penyusunan 3
1.4. Muatan RPIW 4
1.5. Manfaat RPIW 5
1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW 5
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN **7**
2.1. Kebijakan Penataan Ruang 7
2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 7
2.1.2. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa–Bali 8
2.1.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 10
2.1.4. RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung 11
2.2. Kebijakan Sektor 11
2.2.1. Visi Indonesia 2045 11
2.2.2. RPJMN Tahun 2020 – 2024 12
2.2.3. PSN 14
2.2.4. RIPIN Tahun 2015 - 2035 14
2.2.5. RIPPARNAS Tahun 2010 – 2025 16
2.2.6. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 17
2.2.7. RPJMD Provinsi Jawa Barat 18
2.2.8. Visium PUPR 2030 19
2.2.9. Rencana Strategis Kementerian PUPR (2020–2024) 20
2.3. Agenda Global 21
2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur 23
2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 23
2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas 27
BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH **31**
3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan 31
3.1.1. Profil Administrasi 31
3.1.2. Profil Topografi 33
3.1.3. Profil Geologi 33
3.1.4. Profil Klimatologi 34
3.1.5. Profil Hidrologi 34
3.1.6. Jasa Ekosistem 35
3.1.7. Tutupan Lahan 36
3.1.8. Kerawanan Bencana 42
3.2. Profil Demografi 46
3.2.1. Kependudukan 46
3.2.2. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 47
3.2.3. Pengangguran 48
3.2.4. Kemiskinan 49
3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia 50
3.3. Profil Ekonomi 50
3.3.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 51
3.3.2. Pendapatan Perkapita 51

3.3.3. Sektor Ekonomi Unggulan 52
3.3.4. Perkembangan Investasi 59
3.3.5. Kapasitas Fisikal Daerah (KFD) 61
3.4. Profil Sosial dan Budaya 62
3.5. Profil Interaksi Antarkawasan 63

BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR 67

4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air 67
4.1.1. Infrastruktur Penyediaan Air Baku 69
4.1.2. Infrastruktur Penyediaan Irigasi 70
4.1.3. Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air 71
4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan 76
4.2.1. Infrastruktur Jaringan Jalan 76
4.2.2. Infrastruktur Jembatan 78
4.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman 81
4.3.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Air Minum 83
4.3.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sanitasi 84
4.3.3. Penanganan Kawasan Kumuh 86
4.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan 89
4.4.1. *Backlog* 89
4.4.2. Rumah Tidak Layak Huni 90
4.4.3. Rumah Khusus 91
4.4.4. Rumah Susun 92
4.5. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR 94
4.5.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perhubungan 94
4.5.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jaringan Energi 94
4.5.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi 95

BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 99

BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH 115

6.1. Proyeksi Pertumbuhan 115
6.1.1. Proyeksi Demografi 115
6.1.2. Proyeksi Ekonomi 117
6.1.3. Keberlanjutan Lingkungan 121
6.2. Visi dan Strategi 122
6.2.1. Perumusan Visi Wilayah 122
6.2.2. Penyusunan Strategi Fokus Industri 122
6.2.3. Penyusunan Strategi Fokus Pertanian 129
6.2.4. Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata 135
6.2.5. Penyusunan Strategi Fokus Pelayanan Dasar 140
6.3. Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan) 145
6.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas 145
6.3.2. Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas 150

BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR 155

7.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah 155
7.1.1. Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Jawa Barat 155
7.1.2. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri 165
7.1.3. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pertanian 172
7.1.4. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata 174
7.1.5. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Kawasan Perkotaan 189
7.2. Analisis Keterpaduan Infrastruktur 211

BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 217

8.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR 217
8.1.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur SDA 217
8.1.2. Rencana AksI Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 225
8.1.3. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman 240
8.1.4. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan 250

8.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur 252
8.2.1. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri 254
8.2.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian 259
8.2.3. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata 267
8.2.4. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar 275

BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW 285

9.1. Latar Belakang 285
9.2. Tujuan 285
9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi 286

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi Jawa Barat 16
Tabel 2.2 Target Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 20
Tabel 2.3 Arahan Agenda Global untuk Provinsi Jawa Barat 21
Tabel 2.4 Rumusan Arahan Kebijakan di Provinsi Jawa Barat 24
Tabel 2.5 Infrastruktur PUPR Prioritas Provinsi Jawa Barat 29
Tabel 3.1 Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2019 37
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat 46
Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat 47
Tabel 3.4 PDRB per Kapita ADHK Provinsi Jawa Barat 51
Tabel 3.5 Interaksi Antara Metropolitan dan KSPN di Provinsi Jawa Barat 64
Tabel 4.1 Infrastruktur Bendungan di Provinsi Jawa Barat 69
Tabel 4.2 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di Provinsi Jawa Barat 70
Tabel 4.3 Infrastruktur Pengaman Pantai di Provinsi Jawa Barat 72
Tabel 4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Prioritas Provinsi Jawa Barat 73
Tabel 4.5 Ruas Tol sudah Beroperasi 2022 di Provinsi Jawa Barat 77
Tabel 4.6 Ruas Tol Akan Beroperasi di Provinsi Jawa Barat 78
Tabel 4.7 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas Provinsi Jawa Barat 80
Tabel 4.8 Kinerja Layanan Sampah Provinsi Jawa Barat 84
Tabel 4.9 Kinerja IPLT di Provinsi Jawa Barat 86
Tabel 4.10 Penetapan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat 87
Tabel 4.11 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Prioritas Provinsi Jawa Barat 88
Tabel 4.12 *Backlog* Provinsi Jawa Barat 89
Tabel 4.13 RTLH Provinsi Jawa Barat 90
Tabel 4.14 Rumah Khusus Provinsi Jawa Barat 92
Tabel 4.15 Rumah Susun Provinsi Jawa Barat 92
Tabel 5.1 Rumusan Isu Strategis Industri Provinsi Jawa Barat 102
Tabel 5.2 Rumusan Isu Strategis Pertanian Provinsi Jawa Barat 105
Tabel 5.3 Rumusan Isu Strategis Pariwisata Provinsi Jawa Barat 108
Tabel 5.4 Rumusan Isu Strategis Pelayanan Dasar Provinsi Jawa Barat 111
Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Barat 116
Tabel 6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Jawa Barat 117
Tabel 6.3 Proyeksi Wisatawan Domestik di Provinsi Jawa Barat 119
Tabel 6.4 Proyeksi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Jawa Barat 120
Tabel 6.5 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri 124
Tabel 6.6 Analisis 5-*forces* (Meso) Fokus Industri 125
Tabel 6.7 Analisis SWOT Fokus Industri 126
Tabel 6.8 *Skoring Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Industri 127
Tabel 6.9 *Skoring Opportunities* dan *Threats* Fokus Industri 128
Tabel 6.10 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pertanian 130
Tabel 6.11 Analisis 5-*forces* (Meso) Fokus Pertanian 130
Tabel 6.12 Analisis SWOT Fokus Pertanian 131
Tabel 6.13 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pertanian 132
Tabel 6.14 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pertanian 133
Tabel 6.15 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata 135
Tabel 6.16 Analisis 5-*forces* (Meso) Fokus Pariwisata 136
Tabel 6.17 Analisis SWOT Fokus Pariwisata 136
Tabel 6.18 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pariwisata 138
Tabel 6.19 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pariwisata 138
Tabel 6.20 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pelayanan Dasar 140
Tabel 6.21 Analisis 5-*forces* (Meso) Fokus Pelayanan Dasar 141
Tabel 6.22 Analisis SWOT Fokus Pelayanan Dasar 142
Tabel 6.23 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pelayanan Dasar 143
Tabel 6.24 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pelayanan Dasar 144
Tabel 6.25 Parameter Penilaian Fokus Industri 146
Tabel 6.26 Penilaian Kawasan Fokus Industri 146
Tabel 6.27 Parameter Penilaian Fokus Pertanian 147
Tabel 6.28 Penilaian Kawasan Fokus Pertanian 147
Tabel 6.29 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata 148
Tabel 6.30 Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata 148
Tabel 6.31 Parameter Penilaian Fokus Pelayanan Dasar 149
Tabel 6.32 Penilaian Kawasan Fokus Pelayanan Dasar 149

Tabel 6.33 Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat 150
Tabel 6.34 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat 150
Tabel 7.1 Bendungan Konstruksi dan Rencana di Provinsi Jawa Barat 155
Tabel 7.2 Waktu Tempuh Lintas Utama di Provinsi Jawa Barat 156
Tabel 7.3 Waktu Tempuh di Perkotaan di Provinsi Jawa Barat 157
Tabel 7.4 Proyeksi Penyediaan Air Minum Perkotaan di Provinsi Jawa Barat 158
Tabel 7.5 Proyeksi Penyediaan Air Minum Perkotaan di Provinsi Jawa Barat 158
Tabel 7.6 Proyeksi Timbulan Air Limbah di Provinsi Jawa Barat 159
Tabel 7.7 Proyeksi Layanan Air Limbah di Provinsi Jawa Barat 160
Tabel 7.8 Sampah Terkelola di Provinsi Jawa Barat 161
Tabel 7.9 Sampah Terkelola di Provinsi Jawa Barat 162
Tabel 7.10 Kepemilikan Rumah Pribadi di Provinsi Jawa Barat 163
Tabel 7.11 Ketersediaan Rumah Layak di Provinsi Jawa Barat 164
Tabel 7.12 Kawasan Industri Prioritas di Kawasan Strategis Rebana 165
Tabel 7.13 Proyeksi Okupansi KI Prioritas di Kawasan Rebana 166
Tabel 7.14 Proyeksi Kebutuhan Air Industri KI Prioritas di Kawasan Rebana 166
Tabel 7.15 Pertumbuhan Tenaga Kerja KI di Kawasan Rebana 167
Tabel 7.16 Proyeksi Kebutuhan Air Tenaga Kerja KI di Kawasan Rebana 167
Tabel 7.17 Proyeksi Kebutuhan Air KI di Kawasan Rebana 167
Tabel 7.18 Proyeksi Bangkitan Lalulintas dari KI di Kawasan Rebana 168
Tabel 7.19 Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan Kawasan Rebana (2029) 169
Tabel 7.20 Proyeksi Kebutuhan Rusun Pekerja KI di Kawasan Rebana 171
Tabel 7.21 Luas Daerah Irigasi di Kawasan Pertanian Prioritas Jawa Barat 172
Tabel 7.22 Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Rebana 173
Tabel 7.23 Luasan Kawasan Pertanian Berisiko Banjir di Kawasan Rebana 174
Tabel 7.24 Proyeksi LHRT dan VCR Geopark Ciletuh 179
Tabel 7.25 Proyeksi LHRT dan VCR KSPN Pangandaran (Setelah Tol Getaci) 181
Tabel 7.26 *Relevant Road* Jalan Nasional *Geopark* Ciletuh 182
Tabel 7.27 Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Sukabumi 185
Tabel 7.28 Proyeks Tingkat Pelayanan Air Minum KSPN Pangandaran 185
Tabel 7.29 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Ciletuh 186
Tabel 7.30 Proyeksi Persentase Pelayanan TPA di Kawasan Ciletuh 186
Tabel 7.31 Proyeksi Timbulan Sampah Terlayani TPA di Kawasan Ciletuh 187
Tabel 7.32 Proyeksi Timbulan Sampah KSPN Pangandaran 187
Tabel 7.33 Kebutuhan Air Domestik Kawasan Cekungan Bandung 193
Tabel 7.34 Kebutuhan Air Wisatawan Kawasan Cekungan Bandung 194
Tabel 7.35 Total Kebutuhan Air Kawasan Cekungan Bandung 194
Tabel 7.36 Proyeksi Jumlah Kendaraan di Metropolitan Cekungan Bandung 196
Tabel 7.37 Proyeksi LHRT dan VCR Cekungan Bandung pada Skenario 1 199
Tabel 7.38 Proyeksi LHRT dan VCR Cekungan Bandung pada Skenario 2 201
Tabel 7.39 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kota Bandung 204
Tabel 7.40 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kota Cimahi 204
Tabel 7.41 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bandung 205
Tabel 7.42 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bandung Barat 205
Tabel 7.43 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Sumedang 206
Tabel 7.44 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Strategis Cekungan Bandung 208
Tabel 7.45 GAP Sampah Terlayani Tanpa Penanganan Pada TPA Sarimukti 209
Tabel 7.46 GAP Sampah Terlayani Skenario Beroperasinya TPA Legok Nangka 209
Tabel 7.47 GAP Proyeksi Penanganan Air Limbah Cekungan Bandung 210
Tabel 7.48 Analisis Keterpaduan Infrastruktur 212
Tabel 8.1 Rencana Aksi Infrastruktur SDA Provinsi Jawa Barat 218
Tabel 8.2 Rencana Aksi Infrastruktur Bina Marga Provinsi Jawa Barat 225
Tabel 8.3 Rencana Aksi Infrastruktur Cipta Karya Provinsi Jawa Barat 240
Tabel 8.4 Rencana Aksi Infrastruktur Perumahan Provinsi Jawa Barat 250
Tabel 8.5 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri 254
Tabel 8.6 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian 259
Tabel 8.7 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata 267
Tabel 8.8 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar 275

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR 2

Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya 3
Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW 6
Gambar 2.1 Timeline Pemerataan Pembangunan Daerah 12
Gambar 2.2 Visium PUPR 2030 20
Gambar 3.1 Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Barat 36
Gambar 3.2 Mata Pencaharian Menurut Status Pekerjaan Provinsi Jawa Barat 47
Gambar 3.3 Mata Pencaharian Utama Provinsi Jawa Barat 48
Gambar 3.4 Jumlah Penduduk dan Pengangguran Provinsi Jawa Barat 49
Gambar 3.5 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 50
Gambar 3.6 Sebaran Kawasan Peruntukan Industri dan PDRB Industri 53
Gambar 3.7 Persentase Nilai Ekspor Menurut Pintu Keluar 54
Gambar 3.8 Persentase Nilai Import Menurut Pintu Masuk 54
Gambar 3.9 Persebaran Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Barat 55
Gambar 3.10 Komoditas Utama Perkebunan 56
Gambar 3.11 Klaster Wisata Provinsi Jawa Barat 58
Gambar 3.12 Perkembangan Penanaman Modal Jawa Barat 2017-2020 59
Gambar 3.13 Realisasi Penanaman Modal di Jawa Barat Pada 2022 60
Gambar 3.14 Realisasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 61
Gambar 3.15 Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Barat 2022 62
Gambar 3.16 Persebaran Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat 63
Gambar 3.17 Pola Pergerakan Orang dan Barang Provinsi Jawa Barat 65
Gambar 4.1 Indeks Penggunaan Air Provinsi Jawa Barat 69
Gambar 4.2 Tingkat Kebutuhan Air Minum Provinsi Jawa Barat 83
Gambar 5.1 Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis 99
Gambar 6.1 Kemampuan Lahan Provinsi Jawa Barat 121
Gambar 6.2 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Industri 129
Gambar 6.3 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pertanian 134
Gambar 6.4 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pariwisata 139
Gambar 6.5 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pelayanan Dasar 145
Gambar 6.6 Tahap Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat 153
Gambar 7.1 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Perumahan di Kawasan Rebana 2034 171
Gambar 7.2 Sebaran Kawasan Pertanian dengan Risiko Banjir Tinggi 174
Gambar 7.3 Administrasi Geopark Ciletuh dan Sebaran DTW 175
Gambar 7.4 Administrasi KSPN Pangandaran dan Sebaran DTW 176
Gambar 7.5 Proyeksi Jumlah Penduduk Geopark Ciletuh 177
Gambar 7.6 Proyeksi Jumlah Wisatawan Geopark Ciletuh 177
Gambar 7.7 Proyeksi Jumlah Penduduk KSPN Pangandaran 178
Gambar 7.8 Proyeksi Jumlah Wisatawan KSPN Pangandaran 178
Gambar 7.9 *Relevant Road* Menuju *Geopark* Ciletuh 180
Gambar 7.10 Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan di Kawasan Jawa Barat Selatan 2034 180
Gambar 7.11 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan DPP Bandung-Halimun-Ciletuh 2034 183
Gambar 7.12 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan Jawa Barat Selatan 2034 184
Gambar 7.13 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Limbah di Kawasan DPP Bandung-Halimun-Ciletuh 2034 188
Gambar 7.14 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Limbah di Jawa Barat Selatan 2034 . 189
Gambar 7.15 DAS Metropolitan Cekungan Bandung 191
Gambar 7.16 Skema Makro Pengendalian Banjir Citarum Hulu 192
Gambar 7.17 Kawasan Rawan Banjir di Cekungan Bandung 193
Gambar 7.18 *Origin Destination* Metropolitan Cekungan Bandung 195
Gambar 7.19 Skenario 1 Proyeksi Bangkitan Cekungan Bandung 2034 197
Gambar 7.20 Skenario 2 Proyeksi Bangkitan Cekungan Bandung 2034 198
Gambar 7.21 Proyeksi Kepadatan Penduduk Cekungan Bandung 2034 202
Gambar 7.22 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Cekungan Bandung 2034 203
Gambar 7.23 Kebutuhan Penanganan Sampah Cekungan Bandung 2034 207
Gambar 7.24 Kebutuhan Penanganan Limbah Cekungan Bandung 2034 210
Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur 253

DAFTAR PETA

Peta 2.1 Sintesis Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat 26
Peta 3.1 Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat 32
Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Jawa Barat 38
Peta 3.3 Profil Hidrologi Provinsi Jawa Barat 39
Peta 3.4 Profil Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Barat 40
Peta 3.5 Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 41
Peta 3.6 Kerawanan Bencana Provinsi Jawa Barat 45
Peta 4.1 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 68
Peta 4.2 Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat 79
Peta 4.3 Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat 82
Peta 4.4 Profil Infrastruktur Perumahan Provinsi Jawa Barat 93
Peta 4.5 Profil Infrastruktur Perhubungan Provinsi Jawa Barat 96
Peta 4.6 Profil Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Barat 97
Peta 7.1 Wilayah Administrasi Metropolitan Cekungan Bandung 190

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan pokok-pokok yang melatarbelakangi penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah (RPIW) pada setiap wilayah perencanaan. Bab ini memuat sekurangnya penjelasan tentang latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, serta kerangka pikir penyusunan RPIW.

1.1. Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional, baik dari aspek ekonomi maupun kependudukan. Dalam hal ekonomi, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga secara nasional, dengan nilai PDRB sebesar Rp1,689 Triliun atau 13,6% PDB nasional (BPS, 2022). Tiga sektor ekonomi penyumbang terbesar adalah sektor industri pengolahan/ manufaktur (19,8%), perdagangan (14,55%), dan pertanian (13,7%).

Dari segi kependudukan, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbesar secara nasional. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 51.127.700 jiwa (18,3% Nasional) dan diperkirakan menjadi 54.748.300 jiwa pada tahun 2029, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata (CAGR 2010-2020) sebesar 1,4%. Selain jumlah penduduk, kepadatan penduduk di kawasan perkotaan tergolong tinggi (>150 jiwa/Ha). Tiga kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kota Bandung (184 jiwa/Ha), Kota Cimahi (180 jiwa/Ha), dan Kota Bekasi (169 jiwa/Ha).

Peran penting Jawa Barat secara ekonomi dapat juga dilihat dari kontribusi industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Industri pengolahan menyumbang 19,8% terhadap industri nasional dengan subsektor industri utama meliputi industri otomotif, elektronik, serta makanan dan minuman. Dalam hal pertanian, Provinsi Jawa Barat merupakan lumbung pangan terbesar kedua nasional dengan kontribusi 16% dari total produksi beras nasional. Terkait pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Barat mencapai 107 juta orang/tahun dengan pergerakan wisatawan nusantara terbesar secara nasional.

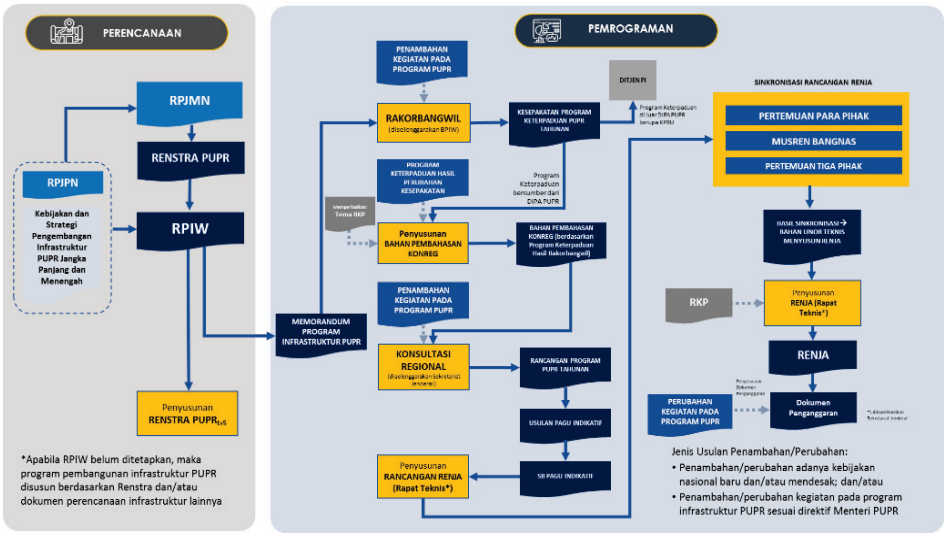
Dengan kapasitas ekonomi dan sosial yang besar tersebut, perkembangan Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan, di antaranya: (1) alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 12.000 Ha/tahun, terutama di bagian utara, (2) kesenjangan pembangunan wilayah utara-selatan karena 70% aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah utara, (3) tingkat risiko banjir tinggi terutama di wilayah metropolitan dan pesisir utara, (4) *land subsidence* yang

mencapai 20 cm/tahun di Metropolitan Cekungan Bandung akibat tingginya penggunaan air tanah, (5) rendahnya akses prasarana dasar, dan (6) neraca air yang sudah defisit terutama di wilayah utara karena tingginya kebutuhan air untuk industri dan pertanian.

Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan dalam pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, diperlukan upaya *multi-stakeholder* dan pendekatan yang holistik dan terpadu. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Jawa Barat dimaksudkan sebagai dasar dalam menterpadukan berbagai program pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

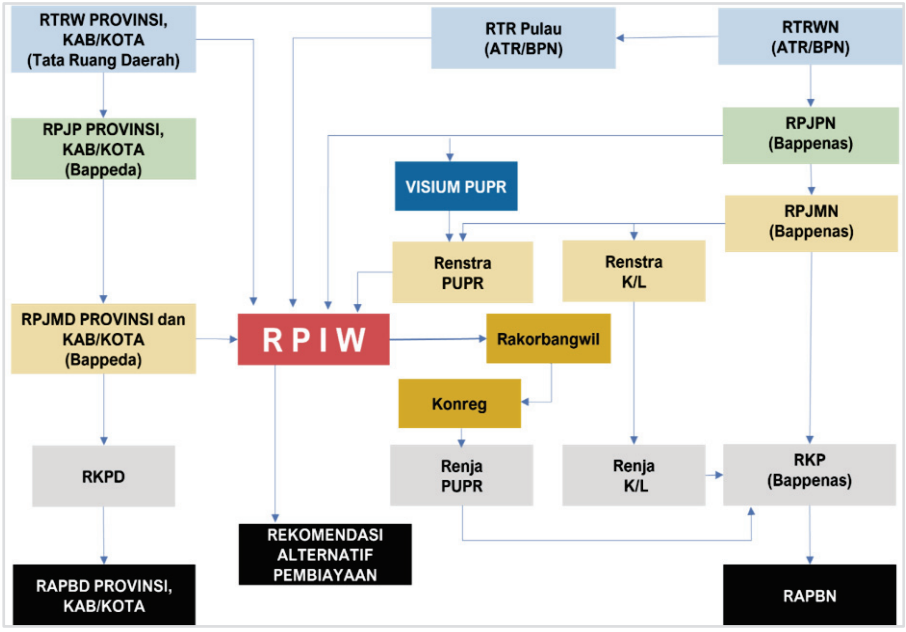
1.2. Kedudukan dalam Kebijakan

Dokumen RPIW Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan input bagi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan acuan dalam perumusan Memorandum Program Infrastruktur PUPR yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) setiap tahunnya. Memorandum Program Rakorbangwil kemudian dibahas dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang menghasilkan rancangan program tahunan Kementerian PUPR.



Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Kerangka Peraturan Menteri PUPR tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PUPR
Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2021

Dalam penyusunan RPIW Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, kebijakan dan strategi pada dokumen perencanaan nasional dan daerah menjadi acuan dasar dalam menentukan arah pengembangan wilayah. Kebijakan tersebut mencakup arahan terkait aspek spasial dan sektoral baik jangka panjang maupun jangka menengah.



Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2021

1.3. Urgensi Penyusunan

Pembangunan infrastruktur PUPR harus dapat mendorong dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dukungan ini dapat diwujudkan dengan **pembangunan infrastruktur yang sinergi dan terpadu secara internal PUPR dan lintas sektor.** Dokumen RPIW merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu lintas sektor pada tingkat nasional dan daerah.

Selain sebagai acuan pembangunan infrastruktur yang terpadu, dokumen RPIW juga dapat menjadi alat untuk memprioritaskan penanganan kawasan dan dukungan program infrastruktur. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi salah satu solusi dalam menghadapi keterbatasan pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

1.4. Muatan RPIW

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah memuat 9 Bab dengan rincian sebagai berikut.

1. **Pendahuluan**, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;
2. **Arah Kebijakan**, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global;
3. **Profil Wilayah dan Potensi Daerah**, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. **Profil dan Kinerja Infrastruktur**, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR;
5. **Permasalahan dan Isu Strategis**, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
6. **Skenario Pengembangan Wilayah**, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritisasi);
7. **Analisis Kebutuhan Infrastruktur**, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. **Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur**, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
9. **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW**, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5. Manfaat RPIW

RPIW Provinsi Jawa Barat disusun dengan manfaat sebagai berikut.

1. Memadukan kebijakan lintas sektor di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan strategi dan program pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien;
2. Memadukan proses perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR; dan
3. Menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Tahapan utama dalam penyusunan RPIW terdiri dari 5 tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan skenario pengembangan, dan penyusunan rencana aksi.

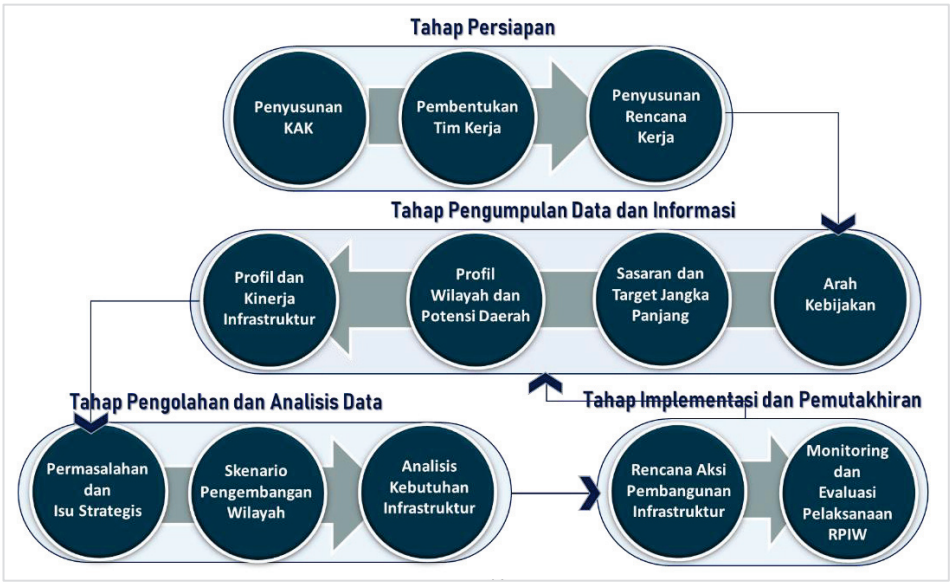
Pada tahap persiapan, dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), pembentukan tim kerja, dan penyusunan rencana kerja. Tahap pengumpulan data dan informasi dimulai dengan perumusan arah kebijakan berdasarkan tinjauan terhadap berbagai dokumen kebijakan baik secara spasial dan sektoral. Perumusan arah kebijakan akan menghasilkan fokus perencanaan dan sasaran jangka panjang pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah perumusan arah kebijakan, akan disusun profil wilayah dan profil infrastruktur yang sesuai dengan fokus perencanaan.

Tahapan selanjutnya adalah proses pengolahan dan analisis data yang dimulai dari perumusan permasalahan dan isu strategis berdasarkan arah kebijakan, kondisi eksisting wilayah, dan potensi pengembangan di masa mendatang. Berikutnya adalah penyusunan skenario pengembangan wilayah yang menghasilkan *grand strategy* masing-masing fokus perencanaan untuk menjawab isu permasalahan dan mewujudkan sasaran jangka panjang. Analisa penyusunan *grand strategy* yang digunakan adalah analisa PESTLE & 5-FORCES dan IFAS-EFAS. Dalam penyusunan skenario, juga dilakukan penentuan kawasan prioritas dengan metode *multi criteria analysis* (MCA) sesuai dengan fokus perencanaan yang akan diprioritaskan sampai dengan tahun 2029. Pada kawasan prioritas terpilih kemudian dilakukan perhitungan terkait kebutuhan infrastruktur berdasarkan strategi yang telah dihasilkan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan rencana aksi pembangunan infrastruktur dan monitoring-evaluasi pelaksanaan. *Grand strategy* yang dihasilkan dari skenario pengembangan wilayah

akan diturunkan ke dalam program-program yang memuat rencana aksi yang terpadu antar sektor. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan rencana aksi dan mendapatkan umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya.

Secara sistematis, kerangka pikir penyusunan RPIW dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2021

BAB 2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan sintesis kebijakan dan strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, dan kawasan prioritas/strategis yang menjadi acuan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat.

2.1. Kebijakan Penataan Ruang

Subbab ini berisi poin penting Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017), Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010).

2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Jawa Barat, yaitu sistem perkotaan, penguatan konektivitas dan logistik, wilayah sungai, kawasan lindung, kawasan andalan, dan kawasan strategis nasional.

Terkait sistem perkotaan, dalam RPIW ini terdapat 2 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 8 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Barat. Kedua PKN tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Wilayah yang ditetapkan sebagai PKN di Provinsi Jawa Barat adalah PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKN Cirebon. Sementara itu, kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKW adalah PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Pelabuhanratu, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, dan PKW Cidaun. Kedelapan PKW tersebut merupakan kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan skala provinsi atau melayani beberapa kabupaten/kota.

Untuk penguatan konektivitas dan logistik, RTRWN menetapkan 24 ruas jalan bebas hambatan (JBH) untuk dikembangkan. Terdapat 13 ruas JBH yang belum/sedang dibangun yaitu Sukabumi–Ciranjang, Ciranjang–Padalarang, Jatiasih–Cipularang–Sadang, Cileunyi–Tasikmalaya–Banjar, Cileunyi–Sumedang–Dawuan, Subang–Patimban, Banjar–Cilacap, Bogor Ring Road, Terusan Pasteur–Ujung Berung–Cileunyi, Ujung Berung–Gedebage–Majalaya, Bojong Gede–Dramaga–Ciawi, Bojong Gede–Balaraja, dan Akses Pelabuhan Patimban.

Simpul transportasi terdiri dari pelabuhan dan bandar udara. Pelabuhan utama ditetapkan di Pelabuhan Patimban, dengan pelabuhan

pengumpul di Pelabuhan Cirebon. Angkutan penyeberangan didukung oleh Pelabuhan Majingklak di Kabupaten Pangandaran. Simpul transportasi udara terdiri dari Bandar Udara Karawang sebagai bandar udara pengumpul primer, Bandar Udara Husein Sastranegara/Kertajati (Kabupaten Majalengka) sebagai pengumpul sekunder, dan Bandar Udara Cakrabhuwana (Kabupaten Cirebon) sebagai bandar udara pengumpul tersier.

Terkait pengelolaan sumber daya air, terdapat 5 wilayah sungai (WS) yang ditetapkan RTRWN dimana 4 diantaranya merupakan WS Lintas Provinsi (WS Cidanau–Ciujung–Cidurian, WS Ciliwung–Cisadane, WS Citanduy, dan WS Cimanuk–Cisanggarung) dan 1 merupakan WS Strategis Nasional (WS Citarum). Sementara itu, terdapat 49 kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 3 suaka margasatwa, 23 cagar alam, 2 cagar alam laut, 3 taman nasional, 3 taman hutan rakyat, 1 taman buru, dan 14 taman wisata alam.

RTRWN juga menetapkan 6 kawasan andalan yang memiliki potensi cepat tumbuh di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kawasan Sukabumi dan sekitarnya, Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka), Kawasan Cekungan Bandung, Kawasan Cirebon–Indramayu–Majalengka–Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan sekitarnya, dan Kawasan Priangan Timur–Pangandaran serta kawasan andalan lintas provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Jakarta (DKI Jakarta–Jawa Barat–Banten).

Selain itu, RTRWN juga menetapkan 6 kawasan strategis nasional (KSN) di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari kawasan dengan sudut kepentingan ekonomi (Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung), sudut kepentingan lingkungan hidup (Kawasan Pangandaran–Kalipuncang–Segara Anakan–Nusakambangan), serta sudut kepentingan pendayaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi (Kawasan Produksi dan Pengujian Roket Pamengpeuk, Kawasan Stasiun Telecommand Rancabungur, Kawasan Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin, serta Kawasan Teropong Bintang Bosscha).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arahan kebijakan RTRWN terhadap pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup **peningkatan akses pelayanan perkotaan** dan **pengembangan kawasan strategis** berbasis industri, pertanian, dan pariwisata yang didukung oleh penguatan **konektivitas dan simpul transportasi** dengan tetap mempertahankan fungsi **kawasan lindung**.

2.1.2. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa–Bali

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa–Bali menjadi strategi operasional bagi pengembangan sistem nasional yang berada di wilayah Pulau Jawa-Bali. Arahan penataan ruang Pulau Jawa-Bali terkait pengembangan Provinsi Jawa Barat adalah (1)

pemertahanan lumbung pangan utama nasional, (2) pemantapan kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana, (3) pengembangan pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan, (4) pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional, (5) pengembangan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE), (6) pemertahanan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan, (7) pengendalian perkembangan Provinsi Jawa Barat bagian selatan dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, (8) pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing, serta (9) pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan.

Dalam RTR Pulau Jawa-Bali juga diatur mengenai pengembangan jalur lintas Pulau Jawa yang terdiri dari lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Lintas utara menghubungkan Jakarta–Karawang–Cirebon, lintas tengah menghubungkan Bogor-Sukabumi–Cianjur–Bandung–Banjar, dan lintas selatan menghubungkan Pelabuhanratu–Pangandaran. Selain itu, ditetapkan juga jalur *feeder* utara–selatan untuk mengurangi ketimpangan wilayah, di antaranya Sukabumi–Cibadak, Cidaun–Ciwidey, dan Ciamis–Kuningan. Pengembangan dan pemantapan jalan nasional perlu diterpadukan dengan jalur kereta api antarkota, jalur kereta api perkotaan, dan pelabuhan penyeberangan, serta menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara.

Untuk memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Jawa Barat, ditetapkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Serang–Cilegon–Cikampek–Bandung (melayani PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan PKW Cikampek–Cikopo);
2. Tegal Gede–Bitung, Nagrak–Bogor–Gunung Putri, Bogor–Cibinong, dan Laut Jawa–Tanjung Priok (melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek);
3. Cilamaya–Tegal Gede dan Subang–Cikampek (melayani PKW Cikampek–Cikopo);
4. Laut Jawa–Cilamaya dan Cemara–Cilamaya;
5. Cemara–Indramayu dan Jatibarang–Indramayu (melayani PKW Indramayu);
6. Jatibarang–Cirebon, Jatibarang–Palimanan, dan Cirebon–Muara Bekasi (melayani PKN Cirebon);
7. Kadipaten–Cirebon (melayani PKN Cirebon dan PKW Kadipaten); dan

8. Semarang–Cirebon (melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Cirebon, PKW Tegal, dan PKW Pekalongan).

Terkait sistem jaringan sumber daya air, di Provinsi Jawa Barat terdapat 5 WS Nasional, 21 waduk, dan 33 daerah irigasi (DI). Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, di Provinsi Jawa Barat ditetapkan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana di 27 kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam RTR Pulau Jawa-Bali, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat diarahkan sebagai **lumbung pangan utama nasional**, **kawasan perkotaan yang kompak**, **industri/perdagangan**, dan **pariwisata** yang berdaya saing internasional, yang didukung oleh **konektivitas** lintas utara-tengah-selatan, **sistem jaringan energi**, dan **sumber daya air** dengan memperhatikan **kawasan lindung dan kawasan rawan bencana**.

2.1.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 menetapkan 6 wilayah pengembangan (WP) yang bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan fungsional antar wilayah dan antarpusat pengembangan. Wilayah pengembangan meliputi WP Bodebekpunjur sebagai pengendalian perkembangan fisik wilayah, WP Purwasuka sebagai kawasan berkembang dengan tetap mengendalikan sawah di pantai utara Provinsi Jawa Barat, WP Ciayumajakuning pengembangan gerbang timur Provinsi Jawa Barat, WP Priangan Timur-Pangandaran sebagai pusat pengembangan pariwisata dan pertanian, WP Sukabumi dan Sekitarnya sebagai sentra agribisnis dan pariwisata, serta WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung sebagai pusat pemerintahan dengan tetap menjaga fungsi kawasan lindung.

Selanjutnya, RTRW Provinsi Jawa Barat juga mengatur penyediaan infrastruktur jalan dan perhubungan yang handal serta terintegrasi untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan, mengatur penyediaan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi yang handal, mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air, serta peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa **RTRW Provinsi Jawa Barat** mengarahkan **pembangunan ekonomi berbasis 6 Wilayah Pengembangan (WP)** dengan sektor unggulan **pertanian, industri, pariwisata,** serta **perdagangan dan jasa,** yang didukung oleh **sistem transportasi** dan **infrastruktur dasar perkotaan/regional**, serta tetap memperhatikan **fungsi lindung dan kebencanaan**.

2.1.4. RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Perpres 45/2018 tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung menetapakan Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung yang terdiri meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkotaan inti adalah Kota Bandung yang memiliki 30 kecamatan.
2. Perkotaan sekitar meliputi Kota Cimahi (3 kecamatan), Kab. Bandung (31 kecamatan), Kab. Bandung Barat (15 kecamatan), dan sebagian Kab. Sumedang (5 kecamatan).
3. Konektivitas antara kota sekitar didukung oleh pembangunan jalan lingkar dan jalan radial yang menghubungkan Kawasan permukiman dengan kegiatan ekonomi.
4. Pengelolaan DAS Citarum khususnya penanganan banjir Citarum Hulu.

2.2. Kebijakan Sektor

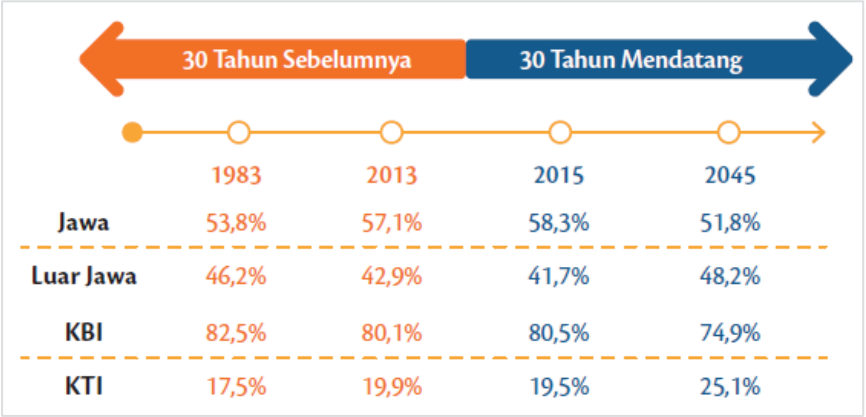
Kebijakan sektor yang dibahas dalam bagian ini mencakup Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Proyek Strategis Nasional, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010–2025, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023, Visium PUPR 2030, dan Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020–2024.

2.2.1. Visi Indonesia 2045

Terdapat 4 pilar untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Infrastruktur menjadi salah satu *prime mover* pencapaian 4 pilar tersebut. Dukungan infrastruktur untuk Pilar 1 berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; untuk Pilar 2 berupa penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan *ease of doing business/investment*; untuk Pilar 3 berupa penyediaan infrastruktur dalam upaya mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), serta Wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa; dan untuk Pilar 4 berupa reformasi birokrasi pada seluruh instansi (kementerian/lembaga pemerintah).

Terkait Pilar 3, disparitas Wilayah Jawa dan Luar Jawa menurun dari 7,6% pada tahun 1983 menjadi 3,6% pada tahun 2045. Demikian juga dengan disparitas antara KBI dan KTI akan menurun dari 65% pada

tahun 1983 menjadi 49,8% pada tahun 2045, seperti ditunjukan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Timeline Pemerataan Pembangunan Daerah
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Arahan Visi Indonesia 2045 adalah **pengembangan infrastruktur** mendukung **pendidikan, pertumbuhan ekonomi** berkelanjutan dan **kemudahan investasi**, serta **pengurangan disparitas** Jawa-Luar Jawa dan KBI-KTI.

2.2.2. RPJMN Tahun 2020 – 2024

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Jawa Barat, yaitu koridor pertumbuhan dan pemerataan, target pembangunan, arahan pengembangan wilayah, serta *major project*. Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Target pembangunan Provinsi Jawa Barat pada 2024 adalah laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00%, pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 4,75%, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,70%.

RPJMN 2020-2024 menetapkan koridor pertumbuhan Jawa Barat yang merupakan koridor logistik utama dimulai dari PKN Jabodetabekpunjur ke arah PKN Bandung hingga PKN Cirebon (Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, dan Kota Cirebon), sedangkan koridor pemerataan menjadikan PKN Bandung dan PKN Cirebon sebagai pengungkit wilayah selatan menuju Garut–Tasikmalaya–Pangandaran (Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Kuningan, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kab. Pangandaran).

Pengembangan kawasan prioritas didukung oleh penetapan *major project* (proyek prioritas) untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, peningkatan daya saing, pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan hidup, serta kemajuan aspek sosial, hukum, dan kelembagaan. Sektor unggulan yang didukung proyek prioritas, yaitu pengembangan komoditas unggulan berupa lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, emas, garam, dan perikanan tangkap dan budi daya. Selain sektor unggulan, juga terdapat proyek prioritas yang diperuntukkan untuk mengembangkan kawasan strategis di Jawa Barat, yaitu pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata di DPP Bandung–Halimun–Ciletuh, serta pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda pembangunan jalan lintas Pansela, reaktivasi KA Jalur Jawa Barat, dan pembangunan KA cepat Jakarta–Bandung.

Proyek prioritas pengembangan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas WM Bandung dan pengembangan Kota Sukabumi dan Cirebon serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di WM Jakarta (Jabodetabekpunjur) dan WM Bandung (Cekungan Bandung). Proyek prioritas pengembangan kawasan perdesaan, dan pengembangan KPPN Sukabumi.

Terdapat 7 *Major Project* di Provinsi Jawa Barat yang disusun sesuai target pembangunan yang terukur dan bertahap, yaitu: Penangangan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa (PKN Jabodetabek-Punjur dan PKN Cirebon), Pembangunan KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta–Semarang dan Jakarta–Bandung), Pembangunan Rumah Susun Perkotaan Provinsi Jawa Barat (WM Jabodetabek-Punjur, WM Cekungan Bandung, dan PKN Cirebon), Pemulihan Tiga Daerah Aliran Sungai Kritis (DAS Citarum, DAS Cisadane, dan DAS Ciliwung), , Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan (WM Jabodetabek dan WM Cekungan Bandung), Pembangunan Waduk Multiguna (Bendungan Kuningan, Bendungan Sukamahi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, dan Bendungan Sadawarna), serta akses air minum perpipaan berupa 10 juta sambungan rumah di Jawa Barat (KEK Be Creative District Karawang, DPP Baru Bandung–Halimun–Ciletuh, Kota/Kabupaten Cirebon, Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, dan Kawasan Rawan Air).

Pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Barat berdasarkan **RPJMN** memiliki prioritas pembangunan berdasarkan pengembangan **koridor pertumbuhan di utara Jawa** dan **koridor pemerataan di tengah-selatan Jawa**. Selain wilayah prioritas, juga ditentukan kegiatan-kegiatan prioritas, berupa pengembangan sektor unggulan **pertanian**, pengembangan kawasan strategis ekonomi (**industri dan pariwisata**), serta pengembangan **kawasan perkotaan dan perdesaan**, dengan memperhatikan **mitigasi bencana** terutama di wilayah Pantura.

2.2.3. PSN

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Sejak tahun 2016 daftar PSN mengalami beberapa perubahan berdasarkan penetapan berbagai Perpres. Berdasarkan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang PSN, terdapat 15 PSN yang direncanakan dibangun di Provinsi Jawa Barat dengan 13 proyek sudah/sedang dibangun yaitu Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Cipanas, Bendungan Sadawarna, Rehabilitasi D.I. Rentang, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Tol Serpong-Cinere, Tol Cinere-Jagorawi, Tol Cimanggis-Cibitung, Tol Cibitung-Cilincing, dan SPAM Jatiluhur, dimana 1 proyek sedang dalam proses persiapan yaitu SPAM Regional Jatigede dan dan 1 proyek belum dibangun yaitu Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut (BCL).

Berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN, terdapat 22 PSN yang masih berjalan di Jawa Barat, yaitu (1) Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan, (2) Jalan Tol Ciawi–Sukabumi–Ciranjang–Padalarang; (3) Jalan Tol Serpong–Cinere, (4) Jalan Tol Cinere–Jagorawi, (5) Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, (6) Jalan Tol Cibitung–Cilincing, (7) Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu, (8) Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan, (9) Jalan Tol Depok–Antasari (termasuk Bojonggede–Salabenda), (10) Jalan Tol Bogor *Ring Road* (termasuk Caringin–Salabenda), (11) Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya), (12) Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban, (13) Bendungan Kuningan Kabupaten Kuningan, (14) Bendungan Ciawi Kabupaten Bogor, (15) Bendungan Sukamahi Kabupaten Bogor, (16) Bendungan Leuwikeris Kab Cimahi, (17) Bendungan Cipanas Kab Sumedang, (18) Bendungan Sadawarna Kab Subang, (19) Rehabilitasi Jaringan D.I. Rentang Kab Majalengka, (20) SPAM Regional Jatigede, (21) SPAM Regional Jatiluhur, dan (22) SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II.

Berdasarkan uraian **PSN**, proyek strategis di Provinsi Jawa Barat berfokus pada **percepatan pertumbuhan dan pemerataan** melalui **pembangunan infrastruktur** bendungan multiguna, jalan tol, SPAM, dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung **aktivitas ekonomi dan perkotaan**.

2.2.4. RIPIN Tahun 2015 - 2035

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Nomor 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 disusun dengan

tujuan untuk mendorong industri yang kompetitif dan berwawasan Lingkungan sebagai salah satu pilar ekonomi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh yang memiliki struktur industri kuat dan berdaya saing, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI), salah satunya adalah WPI Jawa dan termasuk didalamnya Provinsi Jawa Barat. WPI sendiri terdiri atas beberapa Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI di Jawa Barat antara lain Cirebon–Indramayu–Majalengka dan Bogor–Bekasi–Purwakarta–Subang–Karawang. WPPI Jawa Barat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor Industri hingga 2 digit dan mencapai kontribusi industri hingga 60% pada tahun 2035. Industri di Jawa Barat diarahkan melalui pengembangan Industri Elektronika dan Telematika, Industri Barang Model, Komponen, dan Jasa Industri, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan turunannya, serta Industri Alat Transportasi.

Di dalam WPPI tersebut, terdapat 22 kawasan industri yang tersebar pada 8 kabupaten, yaitu:

1. Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi, yaitu Bekasi International Industrial Estate, MM2100 Industrial Town, Kawasan Industri Jababeka, East Jakarta Industrial Park, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Greenland International Industrial Center (GIIC), KIT Indonesia China, dan KI SKI;
2. Kawasan Industri di Kabupaten Karawang, yaitu KI Cimalaya, KI Indotaisei, KI Kujang Cikampek, Karawang International Industrial City, Podomoro Industrial Park Karawang, dan Karawang Jabar Industrial Estate;
3. Kawasan Industri di Kabupaten Bogor, yaitu Cibinong Center Industrial Estate dan KI Sentul;
4. Kawasan Industri di Kabupaten Subang, yaitu KI Subang;
5. Kawasan Industri di Kabupaten Majalengka, yaitu KI Majalengka dan Kertajati Industrial Estate Majalengka;
6. Kawasan Industri di Kabupaten Sukabumi, yaitu KI Sukabumi;
7. Kawasan Industri di Kabupaten Purwakarta, yaitu Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta; dan
8. Kawasan Industri di Kabupaten Bandung, yaitu KI Rancaekek.

Program pengembangan untuk mendukung WPPI Periode 2020–2035 adalah (1) pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara), (2) pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI, (3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM, (4) pembangunan sarana dan prasarana

pengembangan riset dan teknologi, (5) penguatan kerjasama antar WPPI, (6) promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI, (7) pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa, dan (8) penguatan konektivitas antar WPPI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **pengembangan industri** di Provinsi Jawa Barat **terkonsentrasi di wilayah utara** dan berfokus pada **industri pengolahan berbasis teknologi** dengan dukungan **infrastruktur yang ramah lingkungan** dan manajemen industri yang handal.

2.2.5. RIPPARNAS Tahun 2010 – 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS Tahun 2010–2025 menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam tahun 2010-2025. Prinsip pembangunan wisata nasional adalah (1) pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, (2) orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, (3) tata kelola yang baik, (4) secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, serta (5) mendorong kemitraan sektor publik dan privat. Sementara itu, fokus pengembangan manajemen kepariwisataan adalah pemasaran, industri, dan kelembagaan.

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat satu atau lebih Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Beberapa KPPN ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Terdapat 3 DPN, 10 KPPN, dan 6 KSPN di Provinsi Jawa Barat sebagaimana dituliskan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi Jawa Barat

DPN	KSPN/KPPN
Bogor–Halimun, dsk.	KSPN Halimun dsk.
	KSPN Puncak-Gede Pangrago dsk.
	KPPN Puncak-Gedepangrango dsk.
	KPPN Bogor-Ciawi dsk.
	KPPN Gn. Halimun dsk.
	KPPN Pelabuhan Ratu dsk.
Bandung–Ciwidey dsk.	KSPN Ciwidey dsk.
	KSPN Tangkuban Perahu dsk.
	KSPN Bandung Kota dsk.
	KPPN Bandung Kota dsk.
	KPPN Tangkuban Perahu dsk.

DPN	KSPN/KPPN
	KPPN Lembang dsk.
	KPPN Ciwidey dsk.
Pangandaran–Nusakambangan dsk.	KSPN Pangandaran dsk.
	KPPN Tasikmalaya dsk.
	KPPN Pangandaran dsk.

Sumber: RIPPARNAS, 2010

Berdasarkan uraian RIPPARNAS di atas, pemantapan sektor pariwisata Provinsi Jawa Barat ditekankan pada aspek **kepariwisataan berkelanjutan** serta **peningkatan ekonomi masyarakat** melalui penguatan aspek **manajemen industri kepariwisataan**.

2.2.6. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021

Berdasarkan Perpres 87/2021 tentang Pengembangan Rebana dan Jawa Barat Selatan terdapat 81 program di wilayah Rebana dengan 51 program merupakan program sektor PUPR serta 89 program di wilayah Jawa Barat Selatan dengan 27 program merupakan sektor PUPR.

Perpres Pengembangan Rebana dan Jawa Barat Selatan ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Barat melalui pengembangan kawasan industri baru di Kawasan Rebana serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Jawa Barat Selatan.

Dasar penetapan Perpres ini didasari latar belakang pengembangan wilayah dimana:

1. Jawa Barat meskipun memiliki angka usia produktif yang tinggi secara nasional, termasuk dalam 4 provinsi dengan UMP terendah di Indonesia; dan
2. Struktur ekonomi Jawa Barat didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Angka Kesenjangan Sosial di Jawa Barat tergolong tinggi yang ditunjukan dengan koefisien gini sebesar 0,403% atau berada diatas rata-rata nasional sebesar 0,381%. Hal tersebut menandakan pembangunan di Jawa Barat masih belum merata.

Kawasan Rebana meliputi 7 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam perkembangan industri ke arah timur-utara Jawa Barat yang berbasis ecoindustry. Industri tersebut masuk dalam delineasi 13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang sudah ditentukan:

- 3 titik di Kab Subang (KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, dan KPI Cipali Subang Timur);

- 6 titik di Kab Indramayu (KPI Krangkeng, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Balongan, KPI Tukdana, dan KPI Cipali Indramayu);
- 2 titik di Kab Majalengka (KPI Kertajati Jatitujuh dan KPI Jatiwangi);
- 1 titik di Kab Sumedang (KPI Butom); dan
- 1 titik di Kab Cirebon (KPI Cirebon)

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Kawasan Jawa Barat Selatan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dibandingkan dengan Kawasan Utara Jawa Barat (Rebana) karena keterbatasan geografis dan layanan infrastruktur yang belum memadai. Fokus titik pengembangan Kawasan Selatan Jawa Barat:

- Kabupaten Sukabumi: pariwisata dan perikanan;
- Kabupaten Cianjur: agribisnis dan perikanan;
- Kabupaten Garut: agribisnis dan perikanan;
- Kabupaten Tasikmalaya: perikanan;
- Kabupaten Ciamis: agribisnis; dan
- Kabupaten Pangandaran: pariwisata dan perikanan.

Pemerataan pembangunan diharapkan dapat menurunkan ketimpangan ekonomi dan sosial serta menunjang pertumbuan ekonomi Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

2.2.7. RPJMD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023, visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2023 adalah *"*Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi*"*.

Dalam rangka mencapai visi, dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu **membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa** melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, **melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif** melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, **mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan** berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, **meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi** kerakyatan yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dan **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif** dan

kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 11 agenda, yaitu reformasi pada sistem kesehatan, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan berkelanjutan, perlindungan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kebencanaan, pelayanan publik, pembangunan desa, keagamaan, infrastruktur dan konektivitas, serta pariwisata.

Untuk meningkatkan sinergi dan integrasi pengembangan wilayah, strategi pembangunan daerah dilakukan dengan (1) peningkatan kualitas WP Bodebekpunjur melalui pengembangan industri padat modal yang efisien lahan dan air, berteknologi tinggi, serta nonpolutif, (2) mendorong perkembangan WP Purwasuka melalui pengembangan industri pengolahan berorientasi ekspor dengan tetap mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Pantura, (3) mendorong perkembangan WP Ciayumajakuning melalui pengembangan industri berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan, (4) mendorong perkembangan secara terbatas di WP Priangan Timur-Pangandaran sebagai sentra produksi pertanian dan pariwisata yang mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana, (5) mengendalikan perkembangan WP Cekungan Bandung melalui industri kreatif, pariwisata, dan perdagangan/jasa yang memperhatikan fungsi konservasi, serta (6) mendorong perkembangan secara terbatas di WP Sukabumi dan Sekitarnya melalui pariwisata dan perikanan yang berwawasan lingkungan.

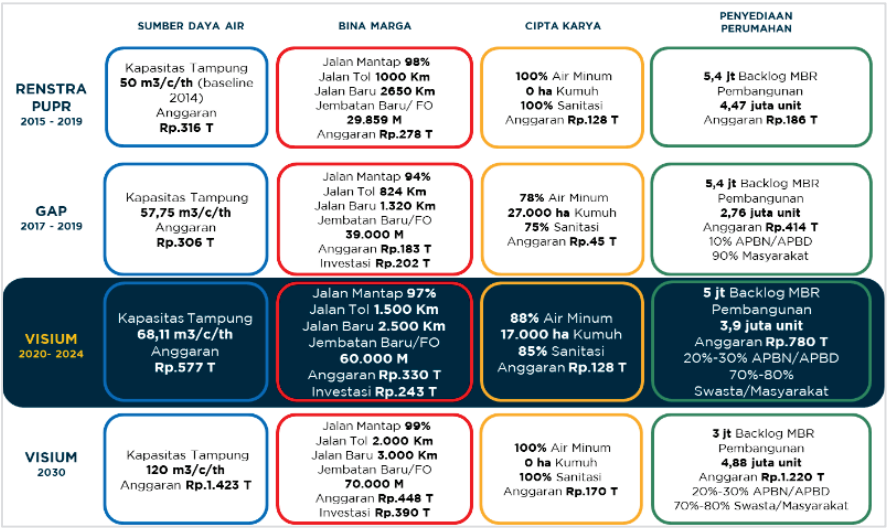
Berdasarkan uraian di atas, arah pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat diprioritaskan pada peningkatan **kapasitas sumber daya manusia**, percepatan **pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan**, dan **pengendalian risiko bencana**.

2.2.8. Visium PUPR 2030

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu: bendungan multifungsi dengan kapasitas tampung 120 m^3/kapita/tahun; kemantapan jalan mencapai 99% dengan integrasi antar moda, memanfaatkan sebanyak banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*; serta 100% *smart living* (hunian cerdas) yang didukung infrastruktur dasar yang memadai. Secara detail sasaran visium tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Visium PUPR 2030 memfokuskan pada penyediaan infrastruktur **tampungan air**,

peningkatan **kemantapan jalan**, pembangunan jalan dan jembatan baru, penyediaan **air minum**, pengurangan **kawasan kumuh**, penyediaan infrastruktur **sanitasi**, dan **penyediaan perumahan**.



Gambar 2.2 Visium PUPR 2030

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022

2.2.9. Rencana Strategis Kementerian PUPR (2020–2024)

Target pengembangan infrastruktur PUPR hingga tahun 2024 ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Target infrastruktur SDA meliputi penyediaan air baku, pengembangan daerah irigasi serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Untuk infrastruktur jalan dan jembatan mencakup pembangunan jalan tol, jalan baru (termasuk FO/UD) dan jembatan. Sedangkan infrastruktur cipta karya mencakup penyediaan air minum, sanitasi, penanganan kumuh dan pengolahan sampah, serta sarana pendidikan dan olahraga. Untuk perumahan mencakup pembangunan rusus, rusun, rumah swadaya dan PSU.

Tabel 2.2 Target Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

No.	Sektor	Target Capaian
1.	Sumber Daya Air	- Peningkatan Kapasitas tampung infrastruktur SDA 58,5 m^3/kapita/tahun; - Pembangunan 61 bendungan; - Pembangunan 500 embung; - Pembangunan 500.000 ha Daerah Irigasi; - Rehabilitasi 2 juta Daerah Irigasi; - Penyediaan 50 m^3/dt air baku; dan - Pembangunan 2.100 km pengendali banjir dan pengaman pantai
2.	Bina Marga	- Pembangunan 2.500 km jalan tol; - Pembangunan 3.000 km jalan baru; - Pembangunan 38.328 m jembatan; dan - Pembangunan 31.053 m *fly over/underpass*

No.	Sektor	Target Capaian
3.	Cipta Karya	- Penyediaan 100% air minum layak; - Penyediaan 30% air minum perpipaan; - Penyediaan 90 % sanitasi layak; - Penyediaan 15 % sanitasi aman; - Penanganan 10.000 ha permukiman kumuh; - Penyediaan 100% hunian dengan akses pengelolaan sampah; dan - Pembangunan 5.555 unit Sarana Pendidikan dan Olahraga.
4.	Perumahan	- Pembangunan 51.340 rumah susun; - Pembangunan 10.000 rumah khusus; - Dukungan bantuan 813.660 rumah swadaya; dan - Pembangunan 262.345 prasarana dan sarana umum.

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 mengarahkan peningkatan **ketahanan air**, kelancaran dan pemerataan **konektivitas**, pemenuhan kebutuhan **perumahan** dan infrastruktur **permukiman**.

2.3. Agenda Global

Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai isu yang menjadi perhatian global, yaitu terkait isu lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebencanaan. Untuk menyikapi isu tersebut, terdapat beberapa agenda global terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *New Urban Agenda* (NUA), *Paris Agreement*, *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030, *dan* UNESCO *Global Geopark*.

Tabel 2.3 Arahan Agenda Global untuk Provinsi Jawa Barat

No	Kebijakan Global	Arahan
1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)	Komitmen global yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan dengan 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dengan diterbitkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB sebagai landasan hukum pelaksanaan TPB di Indonesia dengan diintegrasikannya 169 indikator TPB ke dalam RPJMN 2020-2024.
2	*New Urban Agenda* (NUA)	NUA menjawab Tujuan 11 TPB dengan menyusun poin-poin tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan. NUA mengakui adanya keragaman budaya dan dampak negatif perubahan iklim dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
3	*Paris Agreement*	Berisi kesepakatan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pasca Tahun 2020. Paris Agreement merupakan

No	Kebijakan Global	Arahan
		pengganti kesepakatan Protocol Kyoto. Poin penting kebijakan adalah menetapkan batas aman kenaikan suhu bumi dibawah 2°C dan berupaya menekan hingga 1,5°C diatas suhu bumi pada masa pra-industri. Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen Indonesia: menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario bisnis seperti biasa pada Tahun 2030, dan 41% dengan bantuan internasional.
4	*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030	Berisi pengurangan risiko dan kerugian akibat bencana. **Tujuan:** mencegah timbulnya dan mengurangi risiko, mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan, serta meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan. **Target:** mengurangi kematian rata-rata per-100 ribu penduduk, mengurangi orang terdampak rata-rata per-100 ribu penduduk, mengurangi kerugian ekonomi/GDP, mengurangi kerusakan infrastruktur kunci, meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana PRB, meningkatkan kerjasama internasional, serta meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS. **Tindakan Prioritas:** 1. Memahami risiko bencana 2. Penguatan tata kelola risiko 3. Investasi PRB untuk resiliensi 4. Meningkatkan manajemen risiko
5	UNESCO *Global Geoparks*	UNESCO telah menetapkan Global Geopark Ciletuh sebagai warisan dunia pada April 2018 dengan warisan dunia berupa: a. Geologi (*geodiversity*): Geopark Ciletuh memiliki formasi batuan tertua di Jawa Barat yang terbentuk 145 juta tahun yang lalu. b. Keanekaragaman hayati (*biodiversity*): Geopark Ciletuh memiliki keragaman flora dan fauna yang didukung keberadaan Suaka Margasatwa Cikepuh dan Taman Nasional Halimun–Salak. Salah satu satwa yang dilindungi adalah macan tutul dan elang jawa, sedangkan flora yang dilindungi adalah berbagai macam anggrek. c. Keragaman budaya (*cultural diversity*): Geopark Ciletuh memiliki kekayaan budaya historis dan preshistoris yang ditunjukkan dengan keberadaan desa wisata (Kasepuhan), Situs Megalitikum, keunikan bentang sawah (Tatanen), dan kesenian budaya sunda.

Sumber: berbagai sumber diolah BPIW, 2022

Berdasarkan arahan kebijakan secara global, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah harus memperhatikan **kesejahteraan penduduk secara merata** dan **pembangunan berkelanjutan** dengan tetap memperhatikan **pelestarian lingkungan** dan aspek **kebencanaan**.

2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan infrastruktur memuat arah kebijakan pengembangan wilayah dan arah kebijakan pemanfaatan infrastruktur.

2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian arah kebijakan di atas, dihasilkan fokus dan lokus yaitu: Kebijakan penataan ruang berfokus pada pengembangan kawasan perkotaan, pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, pertambangan, serta ketahanan bencana; kebijakan sektor berfokus pada industri, kawasan perkotaan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, serta ketahanan bencana; serta agenda global berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana.

Setelah dilakukan iterasi terhadap seluruh fokus kebijakan, dihasilkan **empat konteks perencanaan dan kawasan prioritas, yang meliputi industrialisasi, pertanian, pariwisata, dan pelayanan dasar sebagai fokus pengembangan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat.** Fokus perencanaan ini menjadi dasar dalam menguraikan bab-bab berikutnya dalam dokumen RPIW Jawa Barat.

Masing-masing fokus mempunyai *longlist* kawasan yang diperoleh dari sintesa kebijakan. Wilayah dengan fokus industri di 38 kawasan industri yang tersebar di bagian utara; fokus pertanian di 12 kabupaten yang berada di bagian utara dan selatan; fokus pariwisata di 16 KSPN yang terutama berada di wilayah tengah dan selatan; dan fokus pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan transportasi perkotaan di 2 PKN dan 8 PKW di Provinsi Jawa Barat.

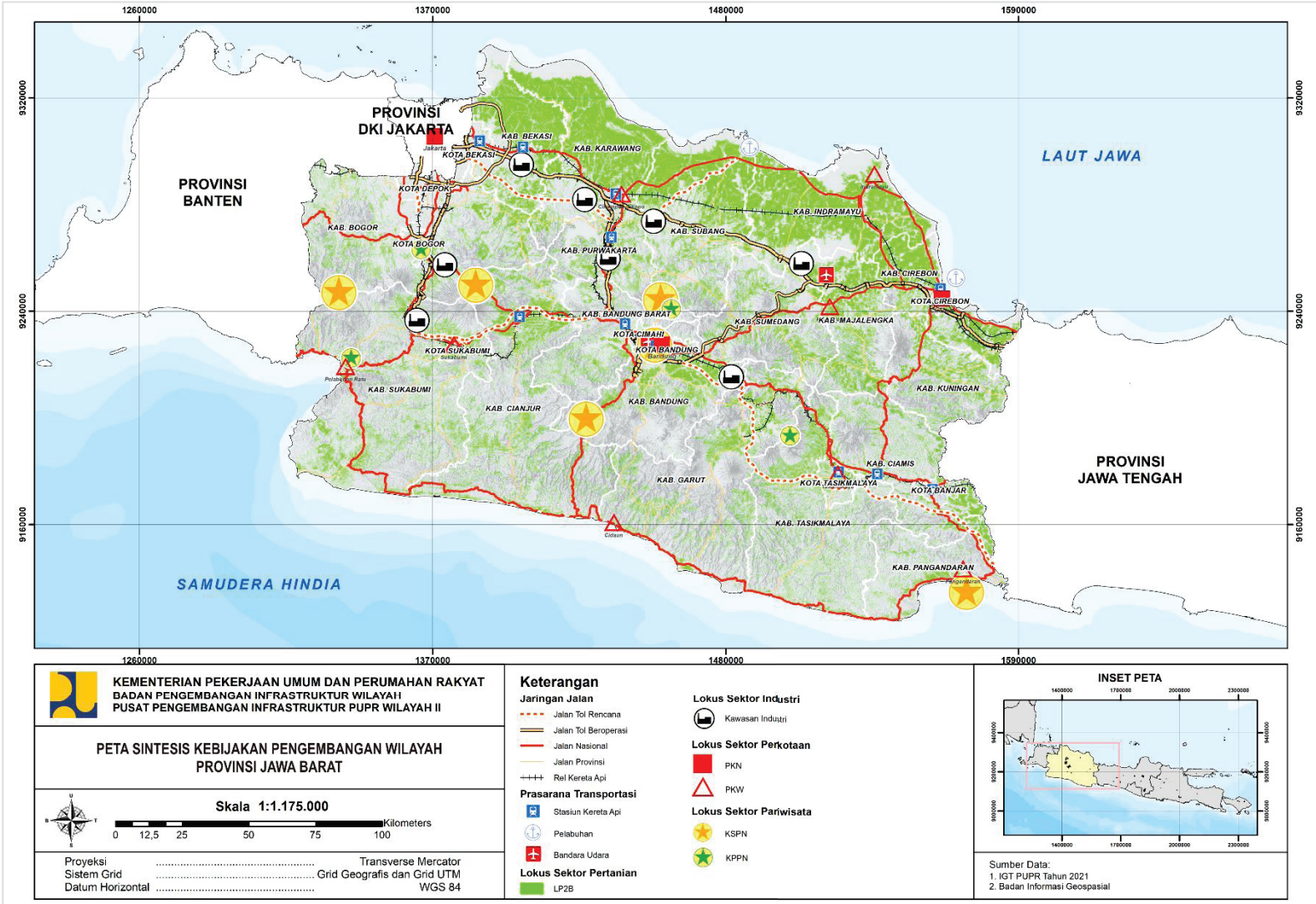
Sasaran dan target fokus industri, fokus pertanian, dan fokus pariwisata diambil dari Visi Indonesia 2045, sedangkan pelayanan perkotaan diambil dari RPJMN 2020-2024. Sasaran dan target untuk fokus industri yaitu pertumbuhan PDB industri rata-rata 6,4% per tahun, peningkatan kontribusi PDB industri 26,0% pada tahun 2045, dan biaya logistik terhadap PDB turun menjadi 8 persen pada tahun 2045. Sasaran dan target untuk fokus pertanian yaitu mempertahankan lahan pertanian dan mengembangkan tambahan lahan sekitar 7 juta ha. Sasaran dan target untuk fokus pariwisata yaitu pertumbuhan jumlah wisatawan mencapai 2-4% per tahun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 73,6 juta, dan pariwisata Indonesia menempati posisi 10 besar destinasi wisata berdaya saing dunia. Sementara untuk fokus pelayanan perkotaan yaitu akses air minum aman rumah tangga 15%, akses air minum jaringan perpipaan 30%, akses sanitasi aman rumah tangga 15%, akses 1 juta rumah susun perkotaan, dan penanganan sampah perkotaan sebanyak 80% dan pengurangan sebanyak 20%. Secara lengkap, sintesis arah kebijakan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan yang secara spasial dapat dilihat pada Peta 2.1.

Tabel 2.4 Rumusan Arahan Kebijakan di Provinsi Jawa Barat

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target
Kebijakan Penataan Ruang	**RTRW Nasional** PP 13/2017	Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pengembangan kawasan strategis berbasis industri, pertanian, pariwisata, dan pertambangan yang didukung oleh penguatan konektivitas dan simpul transportasi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung.	- Kawasan Perkotaan - Kawasan Lindung - Pertanian - Pariwisata - Industri dan Jasa - Mitigasi Bencana	**Industrialisasi** 1. Bekasi International Industrial Estate 2. MM2100 Industrial Town 3. Kawasan Industri Jababeka 4. East Jakarta Industrial Park 5. Kawasan Industri Lippo Cikarang 6. Greenland International Industrial Center (GIIC) 7. KIT Indonesia China 8. KI SKI 9. KI Cimalaya 10. KI Indotaisei 11. KI Kujang Cikampek 12. Karawang International Industrial City 13. Podomoro Industrial Park Karawang 14. Karawang Jabar Industrial Estate 15. Cibinong Center Industrial Estate 16. KI Sentul 17. Cipali West Subang 18. Butom 19. Tukdana 20. Patrol 21. Cipali East Subang (KIT Subang) 22. Losarang 23. Cirebon 24. Kertajati 25. Cipali Indramayu 26. Krangkeng 27. Balongan 28. Patimban 29. Jatiwangi 30. KI Sukabumi 31. Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta 32. KI Rancaekek 33. Kawasan Industri Gobel 34. Bekasi Fajar Industrial Estate 35. GT Tech Park - Karawang 36. Artha Industrial Hill 37. Suryacipta City of Industri 38. Marunda Center **Pertanian** Kawasan pertanian di:	**Industri:** Visi Indonesia 2045: • Pertumbuhan PDB industri rata-rata sebesar 6,4% per tahun • Peningkatan kontribusi PDB industri menjadi sebesar 26,0% pada tahun 2045 • Biaya logistik terhadap PDB turun menjadi 8 persen pada tahun 2045 **Pertanian:** Visi Indonesia 2045: Mempertahankan lahan pertanian dan mengembangkan tambahan lahan sekitar 7 juta ha sampai tahun 2045 **Pariwisata:** Visi Indonesia 2045: • Pertumbuhan jumlah wisatawan mencapai 2-4% per tahun • Jumlah kunjungan
	RTR Jawa-Bali Perpres 28/2012	Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat diarahkan sebagai lumbung pangan utama nasional, kawasan perkotaan, industri/perdagangan, dan pariwisata yang berdaya saing internasional, yang didukung oleh konektivitas lintas utara-tengah-selatan, sistem jaringan energi, dan sumber daya air dengan memperhatikan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.			
	RTRW Provinsi Jawa Barat Perda Provinsi Jawa Barat 22/2010	pembangunan ekonomi berbasis 6 Wilayah Pengembangan (WP) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, serta perdagangan dan jasa, yang didukung oleh sistem transportasi dan infrastruktur dasar perkotaan/regional, serta tetap memperhatikan fungsi lindung dan kebencanaan.			
Kebijakan Sektor	**Visi Indonesia 2045**	Pengembangan infrastruktur mendukung pendidikan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kemudahan investasi, serta pengurangan disparitas Jawa-Luar Jawa dan KBI-KTI.	- Kawasan Perkotaan - Kawasan Lindung - Industri - Pertanian - Pariwisata - Pemenuhan Infrastruktur Dasar		
	RPJMN 2020-2024 Perpres 18/2020	Pengembangan koridor pertumbuhan di utara Jawa dan koridor pemerataan di tengah-selatan Jawa. Selain juga ditentukan kegiatan prioritas, berupa pengembangan sektor unggulan pertanian, pengembangan kawasan strategis ekonomi (industri dan pariwisata), serta pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dengan memperhatikan mitigasi bencana terutama di wilayah Pantura.			
	Proyek Strategis Nasional Perpres 109/2020	Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Provinsi Jawa Barat melalui pembangunan infrastruktur bendungan multiguna, jalan tol, SPAM, dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan perkotaan			
	RIPIN 2015-2035 PP 14/2015	Pengembangan industri di Jawa Barat terkonsentrasi di wilayah utara dan berfokus pada industri pengolahan berbasis teknologi dengan dukungan infrastruktur yang ramah lingkungan dan manajemen industri			
	RIPPARNAS 2010-2025 PP 50/2011	Pemantapan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat ditekankan pada aspek kepariwisataan berkelanjutan serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan aspek manajemen industri kepariwisataan			

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target
	RPJMD Provinsi Jawa Barat Perda Jawa Barat 8/2021	Pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, dan pengendalian risiko bencana		1. Kab Bekasi 2. Kab Bogor 3. Kab Karawang 4. Kab Subang 5. Kab Indramayu 6. Kab Cirebon 7. Kab Majalengka 8. Kab Sukabumi 9. Kab Cianjur 10. Kab Garut 11. Kab Tasikmalaya 12. Kab Ciamis	wisatawan mancanegara menjadi 73,6 juta pada tahun 2045 • Pariwisata Indonesia menempati posisi 10 besar destinasi wisata berdaya saing dunia
	Visium PUPR 2030	Penyediaan infrastruktur tampungan air, peningkatan kemantapan jalan, pembangunan jalan dan jembatan baru, penyediaan air minum, pengurangan kawasan kumuh, serta penyediaan infrastruktur sanitasi dan perumahan			
	Renstra PUPR 2020-2024	Peningkatan ketahanan air, kelancaran dan pemerataan konektivitas, pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman.			
Kebijakan Kawasan Prioritas	**RTR Cekungan Bandung** Perpres 45/2018	Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, peningkatan keterkaitan kota inti dan kota sekitar, penguatan konektivitas, dan peningkatan pelayanan dasar perkotaan.	- Kawasan Perkotaan - Industri - Pemenuhan infrastruktur dasar	**Pariwisata** 1. KSPN Halimun dsk. 2. KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk. 3. KSPN Ciwidey dsk. 4. KSPN Tangkuban Perahu dsk. 5. KSPN Bandung Kota dsk. 6. KSPN Pangandaran dsk. 7. KPPN Puncak-Gede-Pangrango dsk. 8. KPPN Bogor-Ciawi dsk. 9. KPPN Gn. Halimun dsk. 10. KPPN Pelabuhan Ratu dsk. 11. KPPN Bandung Kota dsk. 12. KPPN Tangkuban Perahu dsk. 13. KPPN Lembang dsk. 14. KPPN Ciwidey dsk. 15. KPPN Tasikmalaya dsk. 16. KPPN Pangandaran dsk. **Pelayanan Dasar** 1. PKN Cekungan Bandung 2. PKN Cirebon 3. PKW Sukabumi 4. PKW Cikampek-Cikopo 5. PKW Pelabuhan Ratu 6. PKW Indramayu 7. PKW Kadipaten 8. PKW Tasikmalaya 9. PKW Pangandaran 10. PKW Cidaun	**Kawasan Perkotaan:** RPJMN 2020-2024: • Akses air minum aman rumah tangga 15% • Akses air minum jaringan perpipaan 30% • Akses sanitasi aman rumah tangga 15% • Akses 1 juta rumah susun perkotaan • Penanganan sampah perkotaan sebanyak 80% dan pengurangan sebanyak 20%
	Percepatan Rebana dan Jawa Barat Selatan Perpres 87/2021	**Rebana:** Percepatan dukungan terhadap sektor industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. **Jawa Barat Bagian Selatan**: Pemenuhan layanan dasar guna mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata untuk mengurangi ketimpangan wilayah utara-selatan Jawa Barat.			
Agenda Global	**SDG's**	**Indonesia:** Mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup, pengurangan kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi, dengan mengurangi dampak perubahan iklim	- Kawasan Lindung - Konservasi - Pariwisata - Mitigasi Bencana - Pemenuhan infrastruktur dasar ramah lingkungan		
	NUA	**Indonesia:** Optimalisasi pembangunan berkelanjutan terkait *Climate Change*			
	Paris Agreement	**Indonesia:** Penurunan tingkat emisi gas buang			
	Sendai Frameworks	**Indonesia:** Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana			
	UNESCO *Global Geopark*	**Jawa Barat**: Pelestarian cagar budaya dan alam dengan memperhatikan standar dan ketentuan UNESCO.			

Sumber: Berbagai Kebijakan, diolah BPIW, 2023



Peta 2.1 Sintesis Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat

2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2020-2024, sesuai dengan peraturan pemerintah . Infrastruktur PUPR meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (Food Estate), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara maksimal, hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- Menurunnya kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.
- Menyebabkan ketimpangan pembangunan. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.
- Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan

tanah, penurunan kualitas sumber daya air, serta peningkatan risiko bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun, seperti meningkatkan konektivitas antarinfrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.
- Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PUPR. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PUPR. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur.
- Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
- Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PUPR terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2.5 Infrastruktur PUPR Prioritas Provinsi Jawa Barat

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Provinsi	Kab/Kota	Dasar Hukum
1	Sumber Daya Air	Bendungan Jatigede	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	MP 2020-2024
2	Sumber Daya Air	Bendungan Kuningan	Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	MP dan PSN
3	Sumber Daya Air	Bendungan Sadawarna	Jawa Barat	Kabupaten Subang	MP dan PSN
4	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	Kabupaten Subang	PSN
5	Sumber Daya Air	Bendungan Leuwikeris	Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	MP dan PSN
6	Sumber Daya Air	Bendungan Cipanas	Jawa Barat	Kabupaten Subang	MP dan PSN
7	Permukiman	SPAM Regional Jatigede	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, dan Kota Cirebon	MP dan PSN
8	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Soreang - Pasirkoja	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	PSN
9	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	PSN
10	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	Kabupaten Subang	PSN
11	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang	Jawa Barat	Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Bandung Barat	PSN
12	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya - Cilacap	Jawa Barat	Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran	PSN
13	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	Kabupaten Subang	PSN
14	Sumber Daya Air	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	PSN
15	Sumber Daya Air	Normalisasi dan Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum	Jawa Barat	Kabupaten Bandung dan Kota Bandung	MP 2020-2024
16	Sumber Daya Air	Pembangunan dan Peningkatan Checkdam Penahan Banjir dan Sedimen	Jawa Barat	Kabupaten Bandung dan Kota Bandung	MP 2020-2024
17	Permukiman	Sistem Pengolahan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jawa Barat	Kota Cirebon	MP 2020-2024
18	Permukiman	Akses Air Minum Perkotaan Kawasan Perkotaan Jawa Barat	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	MP 2020-2024

Sumber: Berbagai Sumber, diolah BPIW, 2023

BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Bab ini memberikan fakta tentang profil wilayah dan potensi daerah sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis. Pada bab ini dijelaskan tentang profil fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan.

3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan

Profil fisik dan kebencanaan di Provinsi Jawa Barat menggambarkan kondisi administrasi, topografi, geologi, klimatologi, hidrologi, jasa ekosistem, tutupan lahan, serta kebencanaan.

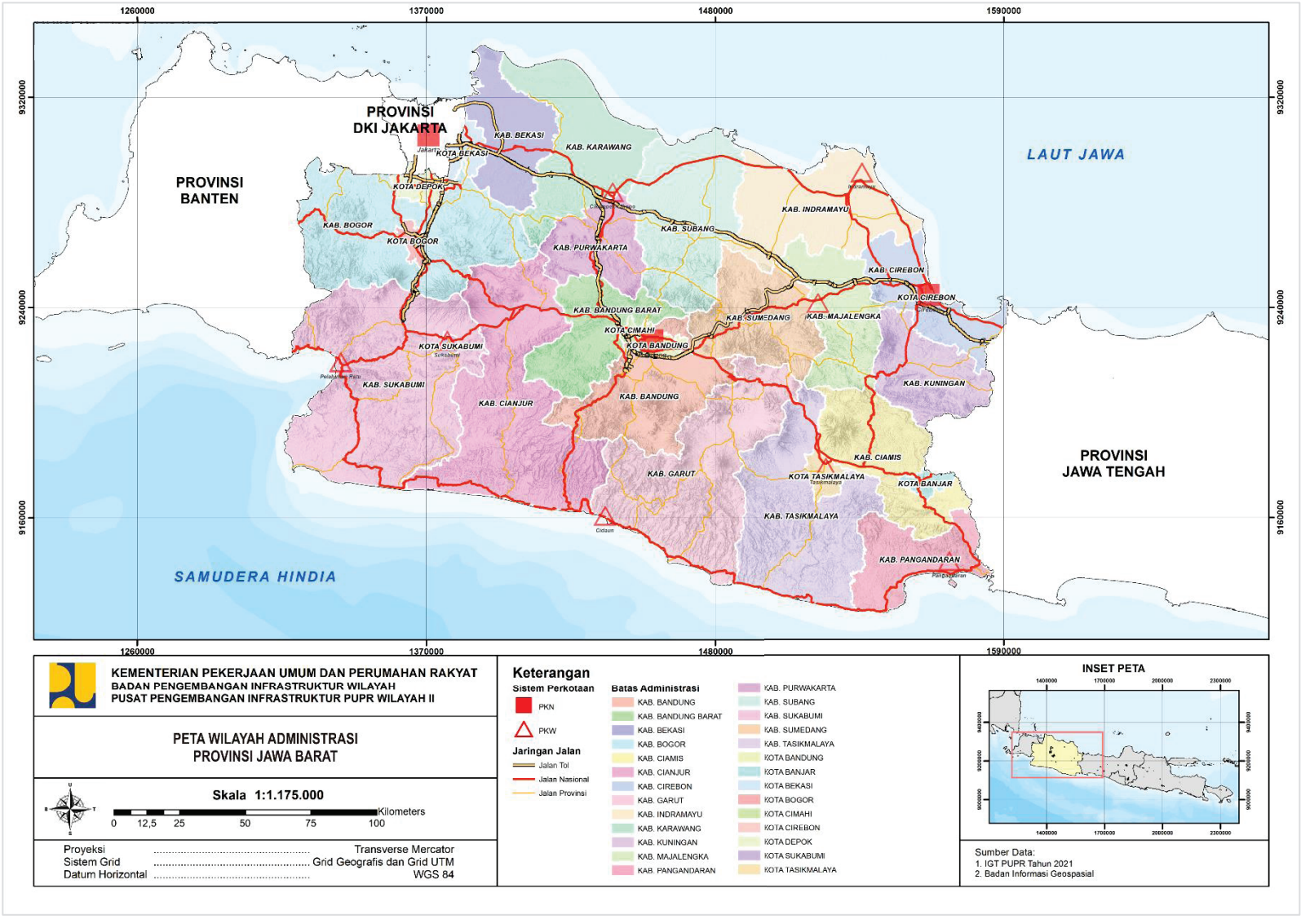
3.1.1. Profil Administrasi

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sebesar 34.816,96 km^2 dengan jumlah penduduk 49.935.858 jiwa (BPS, 2022). Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak pada koordinat 104° 48‘ BT s.d. 108° 48‘ BT dan 5° 50’ LS s.d. 7° 50’ LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- sebelah utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta;
- sebelah timur, dengan Provinsi Jawa Tengah;
- sebelah selatan, dengan Samudra Indonesia; dan
- sebelah barat, dengan Provinsi Banten.

Provinsi ini terletak pada Jalur *Circum Pacific dan Mediteran*, sehingga termasuk daerah rawan bencana yang ditandai dengan banyaknya gunung berapi yang aktif serta sering terjadi gempa Bumi. Provinsi ini beriklim tropis dengan suhu terendah 9°C di Puncak Gunung Pangrango dan tertinggi 34°C di Pantai Utara. Curah hujan rata-rata 2.000 mm/tahun, tetapi curah hujan di daerah pegunungan mencapai 3.000–5.000 mm/tahun.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota, dimana 9 diantaranya merupakan kota administratif (Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar) dan 18 lainnya merupakan kabupaten. Secara lebih rinci, di Provinsi Jawa Barat terdapat 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat dengan 30 kecamatan. Dari 27 kabupaten/kota, wilayah terluas adalah Kabupaten Sukabumi dengan luas 48,33 km^2 dan wilayah terkecil adalah Kota Cirebon dengan luas 37,36 km^2. Peta administrasi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam Peta 3.1.



Peta 3.1 Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat

3.1.2. Profil Topografi

Kemiringan lereng di Provinsi Jawa Barat berada di rentang 0-25%. Bagian utara cenderung datar dan didominasi kemiringan 0-8%, sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, permukiman, serta budi daya terbangun. Sementara itu, di bagian selatan didominasi oleh wilayah berbukit dengan kemiringan 15-25%, sesuai untuk pengembangan kawasan lindung dan budi daya tidak terbangun.

Secara umum topografi wilayah daratan Provinsi Jawa Barat dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian meliputi:

1. Ketinggian 0–100 m dari permukaan laut sebesar 32,2% dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang;
2. Ketinggian 100-500 m dari permukaan laut sebesar 31,6% dari luas wilayah dengan kondisi bergelombang dan bergunung;
3. Ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut sebesar 23,9% dari luas wilayah dengan kondisi berbukit; dan
4. Ketinggian lebih dari 1.000 m dari permukaan laut sebesar 12,3% dari seluruh luas wilayah dengan kondisi bergunung dan terjal.

3.1.3. Profil Geologi

Secara umum, kondisi geologi Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu Zona Jakarta, Zona Bogor, Zona Bandung, dan Zona Pegunungan Selatan. Jenis tanah yang ada di Provinsi Jawa Barat terdiri dari jenis tanah aluvial, endapan gunung api muda, sedimen tersier, batuan beku intrusif maupun ekstrusif, serta batuan sedimen berumur neogen yang bertumpuk dengan batuan vulkanik berumur kuarter. Jenis tanah terluas di Provinsi Jawa Barat adalah aluvial dengan luas 264.487 Ha. Sementara itu, jumlah gunung di Jawa Barat relatif banyak. Beberapa di antaranya masih aktif, sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun.

Terdapat 7 (tujuh) gunung berapi yang aktif di Jawa Barat, yaitu Gunung Galunggung (Kabupaten Tasikmalaya dan Garut), Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Cirebon), Gunung Gede (Kabupaten Cianjur, Bogor, dan Sukabumi), Gunung Salak (Kabupaten Sukabumi dan Bogor), Gunung Papandayan (Kabupaten Garut), Gunung Guntur (Kabupaten Garut) dan Gunung Tangkuban Perahu (Kabupaten Subang dan Bandung). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Barat rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan kontinu. Peta topografi dan geologi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.2.

3.1.4. Profil Klimatologi

Provinsi Jawa Barat memiliki 4 (empat) stasiun hujan yang mengukur jumlah curah hujan pada tahun 2022. Curah hujan di Provinsi Jawa Barat bervariasi, mulai yang terendah sebesar dari 30 mm hingga 492 mm/bulan. Curah hujan tertinggi di Provinsi Jawa Barat terdapat pada Oktober 2022, tercatat pada Stasiun Hujan Bogor dan Citeko yang berada di Kabupaten/Kota Bogor dengan jumlah curah hujan sebesar 492 mm. Sementara itu, curah hujan tertinggi pada awal tahun (Maret-April 2022) tercatat oleh Stasiun Hujan Citeko (Kabupaten Bogor) dan Jatiwangi (Kabupaten Majalengka) dengan jumlah curah hujan sebesar 429–458 mm. Curah hujan terendah tercatat pada Stasiun Hujan Bandung yang terjadi pada Agustus 2022 sebesar 30 mm.

Kelembapan udara di Provinsi Jawa Barat menurun dari 84,4 persen pada tahun 2021 menjadi 79 persen di tahun 2022. Hal ini mengakibatkan menurunnya curah hujan, dimana pada tahun 2022 curah hujan di Jawa Barat sebesar 2.311,4 mm, lebih rendah dari tahun 2021 yang sebesar 3.786,6 mm. Selain itu, jumlah hari hujan tercatat mengalami penurunan menjadi 212 hari pada tahun 2022 dibandingkan 262 hari pada tahun 2021.

3.1.5. Profil Hidrologi

Wilayah Jawa Barat memiliki 5 (lima) wilayah sungai (WS) kewenangan nasional yang memberikan sumber air baku untuk kegiatan pertanian, industri, dan permukiman. Wilayah sungai yang sebagian besar bermuara ke wilayah utara mendukung perkembangan wilayah utara sebagai pusat kegiatan ekonomi, dimana diperlukan pengelolaan secara lebih optimal untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi air permukaan sebesar 48 milyar m^3/tahun yang berasal dari 3.504 sungai dengan panjang 65.540 km, 831 danau dan situ, 20 waduk, 1.448 mata air. Selain itu, pantai Provinsi Jawa Barat membentang sepanjang 724,85 km dengan 356,75 km di wilayah utara dan 368,10 km di wilayah selatan.

Wilayah sungai tersebut memberikan sumber air baku untuk mendukung Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung pangan utama nasional dan perkembangan kawasan permukiman dan industri. Meskipun banyak potensi air baku dari wilayah sungai, belum terkelolanya air baku dengan baik mengakibatkan wilayah utara masih mengalami defisit air baku. Secara lengkap, profil hidrologi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.3.

3.1.6. Jasa Ekosistem

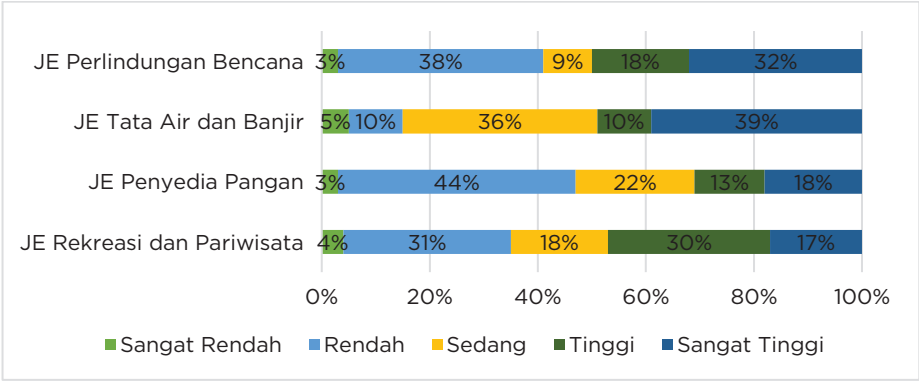
Jasa ekosistem menunjukkan kemampuan lingkungan dalam memberikan manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Jasa ekosistem Provinsi Jawa Barat menjadi dasar dalam menentukan batasan pengembangan, terutama untuk mendukung penyediaan sumber daya secara berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi. Jasa ekosistem terdiri atas:

1. JE Penyedia, terdiri dari penyediaan pangan, air, energi, serat, dan genetik;
2. JE Pengaturan, terdiri dari pengaturan iklim, tata air dan banjir, perlindungan pencegahan bencana, pemurnian air, penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan, dan pengendalian hama;
3. JE Budaya, terdiri dari tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekowisata, serta estetika; dan
4. JE Pendukung, terdiri dari pembentuk lapisan tanah dan kesuburan, siklus hara, produksi primer, serta perlindungan plasma nuftah.

Dari keseluruhan data jasa ekosistem Provinsi Jawa Barat, ditetapkan 4 jasa ekosistem yang dinilai berpengaruh besar terhadap pengembangan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, yaitu Jasa Ekosistem Penyedia Pangan, Penyedia Air, Perlindungan Pencegahan Bencana, dan Pemurnian Air.

Kondisi lingkungan Provinsi Jawa Barat masih memungkinkan memberikan dukungan sumber daya bagi penghidupan masyarakatnya. Hal itu ditunjukkan dengan luasan wilayah dengan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan tinggi, yaitu sebesar 21% dari total luasan wilayah atau 7,7 juta hektar, yang merupakan kawasan pertanian produktif. Daya dukung Provinsi Jawa Barat untuk penyediaan air baku juga masih mencukupi dengan wilayah yang memiiliki Jasa Ekosistem Pemurnian Air tinggi sebesar 52% dari total luasan wilayah atau 19 juta hektar, yang menunjukkan masih tingginya lokasi wilayah resapan air yang mendukung ketersediaan air permukaan.

Tingginya potensi bencana di Provinsi Jawa Barat didukung dengan keberadaan wilayah dengan Jasa Ekosistem Perlindungan Bencana yang cukup tinggi sebesar 40% atau 14 juta hektar dan wilayah dengan Jasa Ekosistem Tata Air dan Banjir sebesar 49% atau 18 juta hektar. Luasan wilayah dengan jasa ekosistem tinggi dalam mengendalikan bencana harus dipertahankan untuk mengurangi tingkat risiko bencana terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi.



Gambar 3.1 Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Barat
Sumber: KLHK diolah BPIW, 2022

Penilaian dalam jasa ekosistem menentukan kesesuaian pengembangan untuk masing-masing wilayah di Provinsi Jawa Barat, dengan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi untuk produksi pertanian berada di Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu. Daya dukung lingkungan tinggi untuk tata air dan banjir berada di wilayah tengah Provinsi Jawa Barat, di antaranya Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Kuningan. Wilayah yang memiliki daya dukung tinggi dalam pengendalian bencana berada di kawasan perkotaan seperti wilayah Perkotaan Bodebek, Kota Bandung, dan Kota Cirebon sehingga sesuai untuk dikembangkan sebagai permukiman dengan kepadatan tinggi.

Keberadaan wilayah dengan daya dukung sangat tinggi dan tinggi ditetapkan menjadi Wilayah Prioritas Perlindungan (WPP) untuk mempertahankan daya dukung lahan Provinsi Jawa Barat dalam menampung segala aktivitas ekonomi dan sosial yang terus berkembang. WPP tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan wilayah terbesar berada di Sukabumi, Bogor, Karawang, Subang, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang, Kuningan, dan Pangandaran. Total luas WPP yang perlu dibatasi pembangunannya adalah seluas 899.000 Ha. Secara lengkap, profil jasa ekosistem Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.4.

3.1.7. Tutupan Lahan

Tutupan lahan Provinsi Jawa Barat dengan kondisi lahan yang subur didominasi oleh lahan pertanian yang menyumbang 57% dari total luas wilayah atau sebesar 2,1 juta hektar (Tahun 2019). Lahan pertanian terbesar disumbangkan oleh Pertanian Lahan Kering Campur sebesar 890.438 Ha, diikuti dengan tutupan lahan Sawah sebesar 814.966 Ha. Dilihat dari tingkat persebarannya, tutupan lahan pertanian terutama

berada di wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan hulu sungai besar dengan tingkat elevasi yang landai. Sedangkan wilayah tengah didominasi tutupan perkebunan, lahan hutan produksi dan hutan lindung yang yang memiliki luasan 28% dari total wilayah atau 10 juta hektar. Keberadaan kawasan hutan yang berfungsi lindung ini masih sedikit di bawah ketentuan rencana tata ruang bahwa setiap provinsi di Pulau Jawa harus menyediakan setidaknya 30% dari luas wilayahnya sebagai kawasan berfungsi lindung. Untuk itu Provinsi Jawa Barat masih kurang luasan kawasan berfungsi lindungnya sebesar 70 ribu hektar untuk mencapai standar minimum kawasan lindung yang dapat mendukung kegiatan di seluruh wilayahnya.

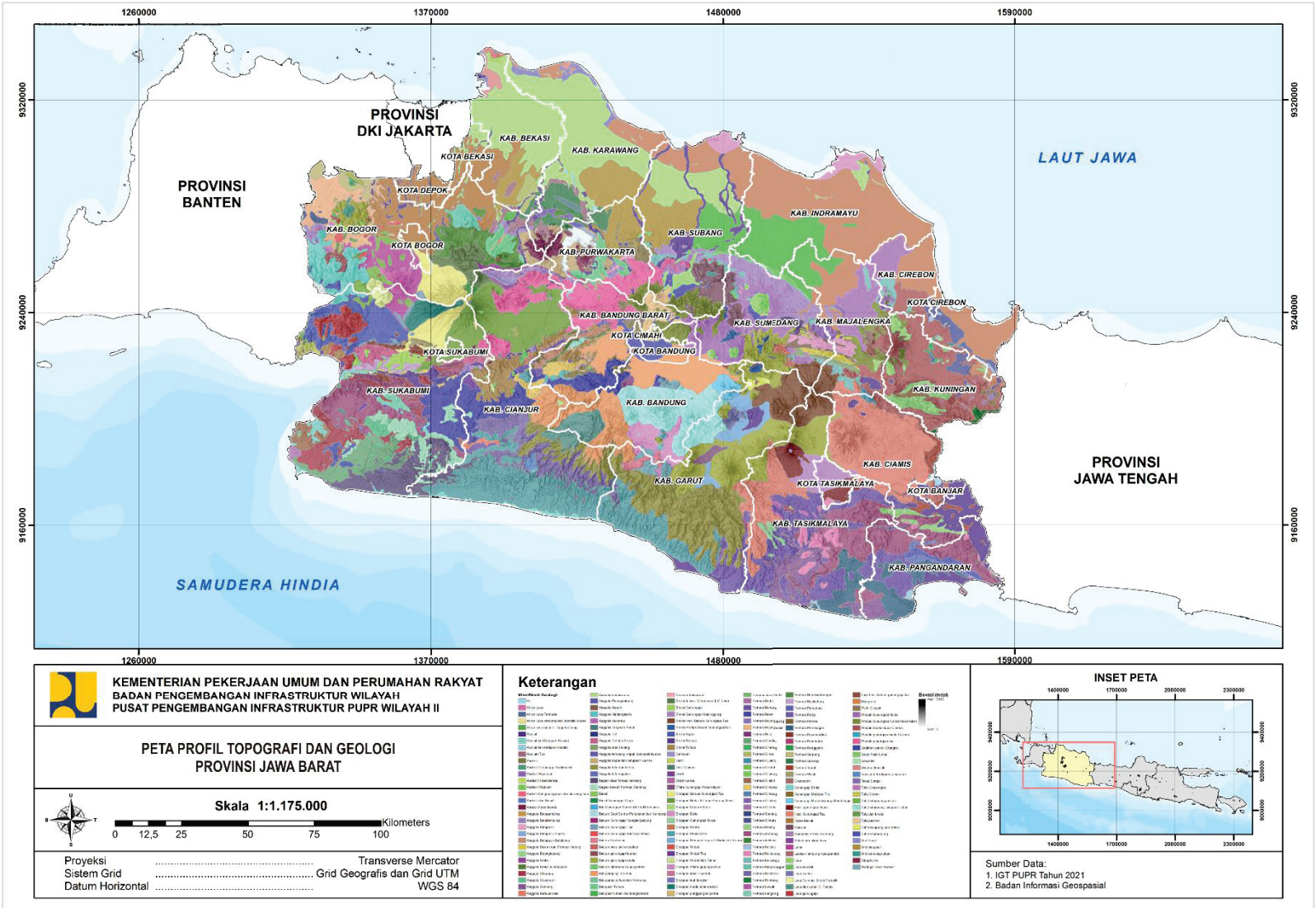
Tutupan lahan di Provinsi Jawa Barat terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup signifikan, yaitu seluas 326.182 hektar atau sebesar 13% dari total luas lahan pertanian, dimana yang terbesar berada di Kabupaten Cianjur (55.516 ha), Kabupaten Garut (29.442 ha), dan Kabupaten Bandung Barat (26.615 ha). Perubahan tutupan lahan di Provinsi Jawa Barat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2019

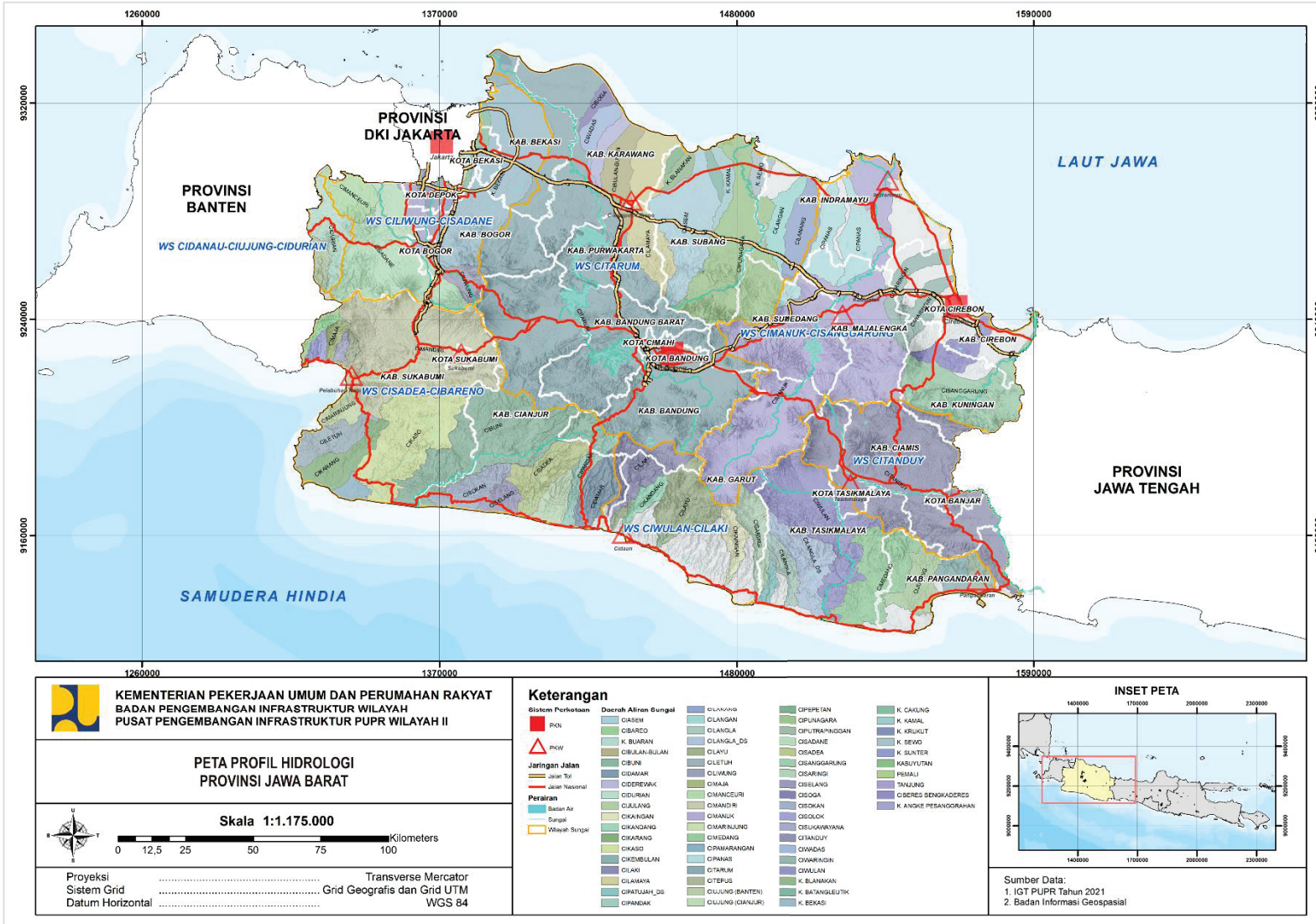
Penggunaan Lahan	Luas 2009 (ha)	Luas 2019 (ha)	Perubahan 2009-2019	Persentase perubahan
Belukar	37.062	8.615	-28.447	77%
Hutan Lahan Kering Primer	14.889	12.336	-2.553	17%
Hutan Lahan Kering Sekunder	152.932	193.311	40.379	26%
Hutan Mangrove	1.124	636	-488	43%
Hutan Tanaman	443.436	583.111	139.675	31%
Permukiman	168.604	353.399	184.795	110%
Perkebunan	302.958	250.127	-52.831	17%
Pertambangan	862	3.028	2.166	251%
Pertanian	2.450.169	2.123.987	-326.182	13%
Rawa	11	166	155	1409%
Tambak	79.094	67.648	-11.446	14%
Tanah Terbuka	19.869	74.646	54.777	276%

Sumber: BIG diolah BPIW, 2022

Guna lahan terbesar kedua pada tahun 2019 adalah hutan tanaman dengan luas 583.111 hektar (15%). Selanjutnya, guna lahan terbesar ketiga adalah permukiman dengan luas 353.399 hektar (9,6%) yang mengalami perubahan sebesar 50.441 hektar dari tahun 2009. Perubahan permukiman tertinggi berada di Kabupaten Bogor (11.460 ha), Kabupaten Bekasi (8.875 ha), dan Kabupaten Bandung (6.821 ha). Untuk kawasan lainnya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terdapat peningkatan luasan kawasan hutan sebesar 177.013 hektar, peningkatan luasan kawasan perkebunan sebesar 81.523 hektar, dan pengurangan luasan kawasan peruntukan tambak sebesar 11.446 ha. Secara lengkap, tutupan lahan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.5.



Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Jawa Barat



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR WILAYAH II

PETA PROFIL HIDROLOGI PROVINSI JAWA BARAT

Skala 1:1.175.000

0 12,5 25 50 75 100 Kilometers

Proyeksi	Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	WGS 84

Keterangan

Sistem Perkotaan
- PKN
- PKW

Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Nasional

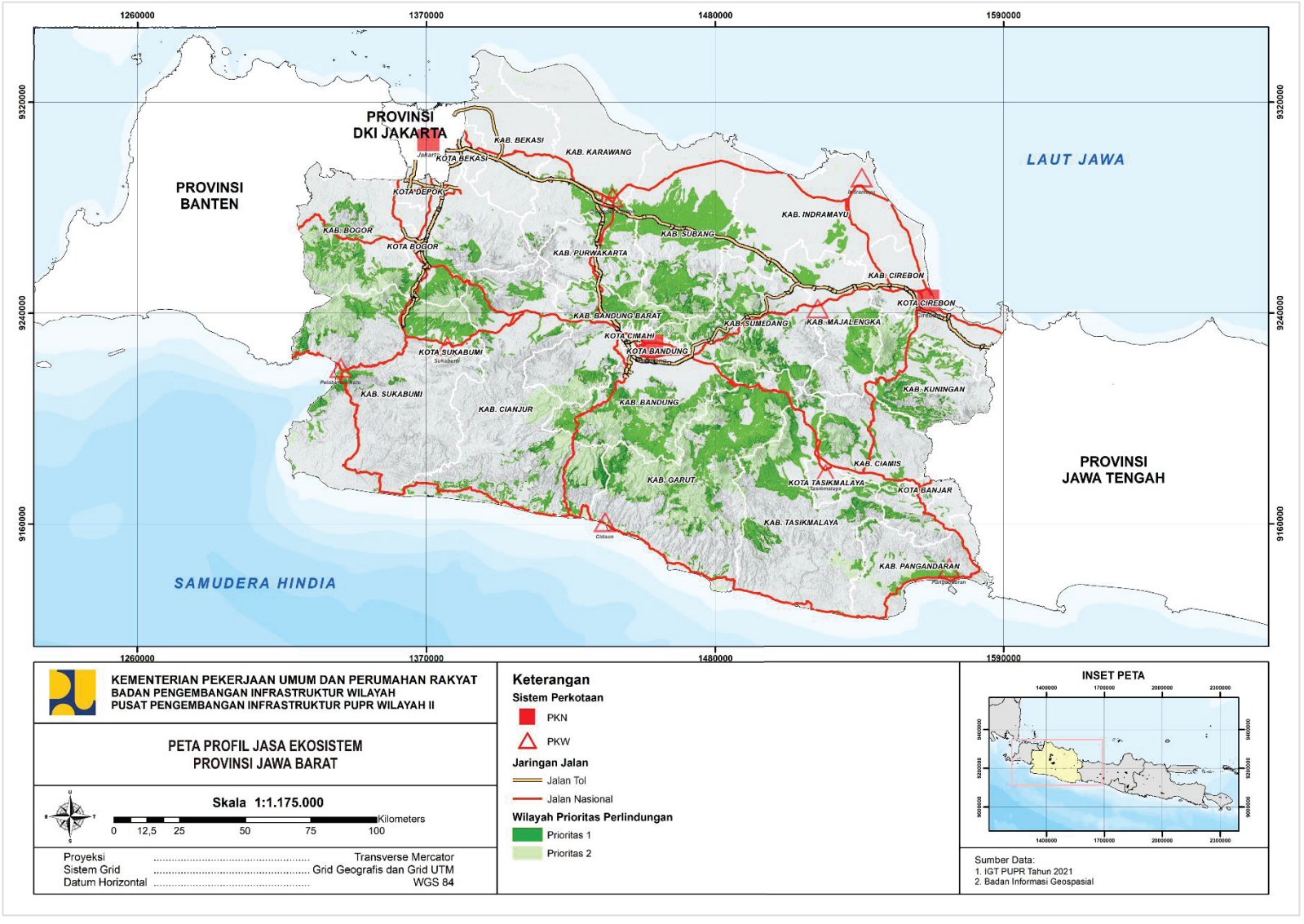
Perairan
- Badan Air
- Sungai
- Wilayah Sungai

Daerah Aliran Sungai
CIASEM, CIBAREO, K. BUARAN, CIBULAN-BULAN, CIBUNI, CIDAMAR, CIDEREWAK, CIDURIAN, CIJULANG, CIKAINGAN, CIKANDANG, CIKARANG, CIKASO, CIKEMBULAN, CILAKI, CILAMAYA, CIPATUJAH_DS, CIPANDAK, CILAWANG, CILANGAN, CILANGLA, CILANGLA_DS, CILAYU, CILETUH, CILIMUNG, CIMAJA, CIMANCEURI, CIMANDIRI, CIMANUK, CIMARINJUNG, CIMEDANG, CIPANARANGAN, CIPANAS, CITARUM, CITEPUS, CIUJUNG (BANTEN), CIUJUNG (CIANJUR), CIPEPETAN, CIPUNAGARA, CIPUTRAPINGGAN, CISADANE, CISADEA, CISANGGARUNG, CISARINGI, CISELANG, CISOGA, CISOKAN, CISOLOK, CISUKAWAYANA, CITANDUY, CIWADAS, CIWARINGIN, CIWULAN, K. BLANAKAN, K. BATANGLEUTIK, K. BEKASI, K. CAKUNG, K. KAMAL, K. KRAKUT, K. SEWO, K. SLINTER, KASUYUTAN, PEMALI, TANJUNG, CIBERES SENGKADERES, K. ANGKE PESANGGRAHAN

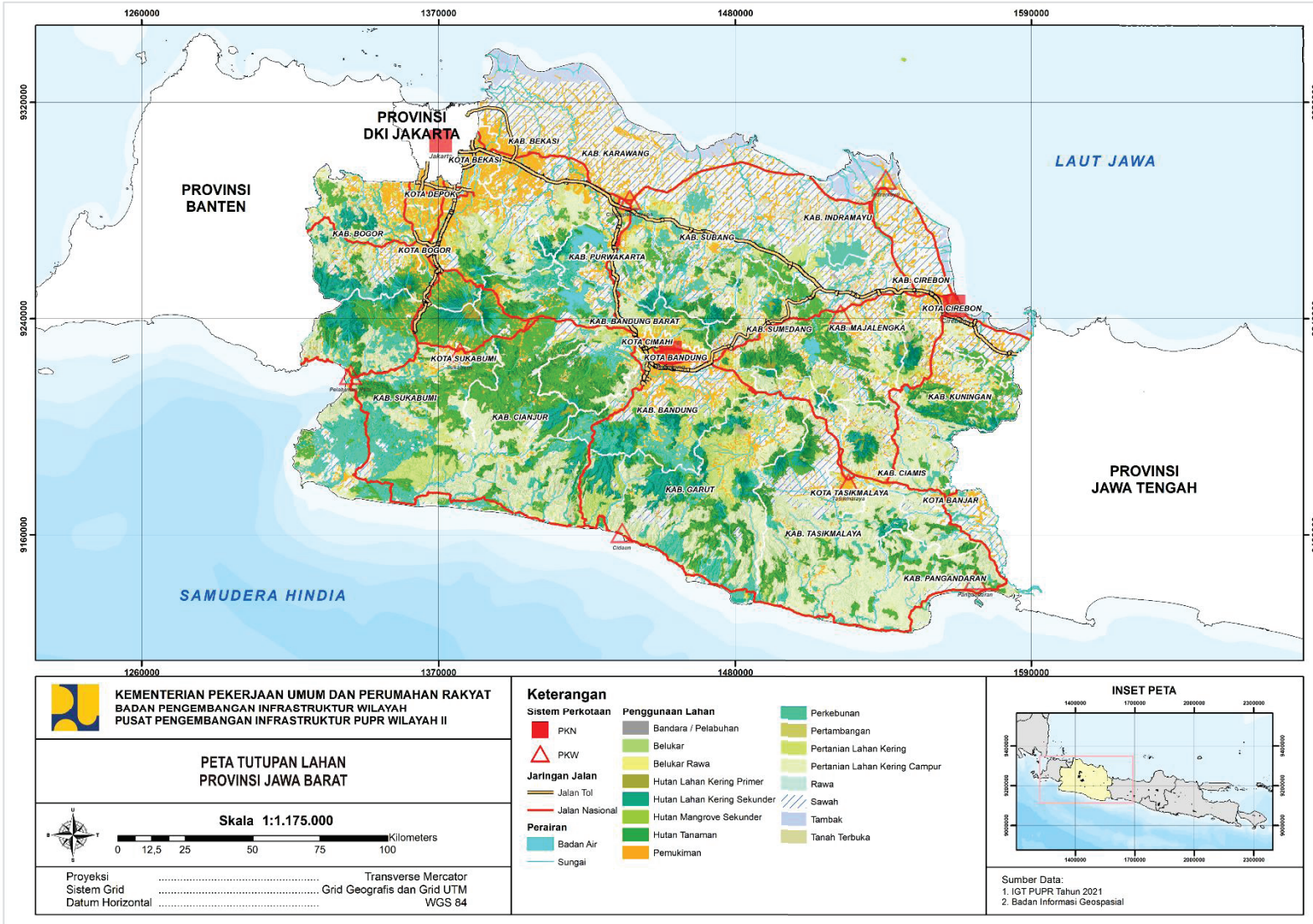
INSET PETA

Sumber Data:
1. IGT PUPR Tahun 2021
2. Badan Informasi Geospasial

Peta 3.3 Profil Hidrologi Provinsi Jawa Barat



Peta 3.4 Profil Jasa Ekosistem Provinsi Jawa Barat



Peta 3.5 Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat

3.1.8. Kerawanan Bencana

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi karena berada di pertemuan Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia dan jalur *Ring of Fire* atau deret sirkum pasifik. Dampak lainnya adalah terbentuknya patahan atau sesar yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat 5 wilayah sungai besar yang mengalir ke wilayah dengan tingkat kelandaian rendah yang mengakibatkan tingginya intensitas banjir.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dengan tingkat risiko bencana tinggi yang ditandai dengan jumlah penduduk terdampak gempa bumi tertinggi (15 juta orang), terdampak longsor tertinggi (3 juta orang), serta terdampak banjir tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur (32 juta orang). Data terkait tingkat risiko bencana tersebut dapat digunakan dalam menentukan arah pengembangan permukiman pada wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana rendah.

A. Kerawanan Bencana Gunung Api

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak gunung api dengan kondisi aktif, di antaranya Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, Ciremai di Kabupaten Kuningan, Gede di Kabupaten Bogor, Salak di Kabupaten Bogor, Papandayan di Kabupaten Garut, dan Tangkuban Perahu di Kabupaten Subang. Keberadaan gunung api, selain mengakibatkan tingginya risiko erupsi, namun juga memberikan manfaat bagi tingkat kesuburan tanah. Letusan gunung api terakhir di Provinsi Jawa Barat adalah letusan Gunung Papandayan yang terjadi pada tahun 2003 yang berdampak pada 2.951 jiwa.

Provinsi Jawa Barat memiliki luasan wilayah dengan risiko bencana gunung api sebesar 15.948 hektar, umumnya terkonsentrasi di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat hingga Cekungan Bandung. Jumlah penduduk yang terkena risiko bencana letusan gunung api sebesar 178 ribu orang, dengan tingkat kerugian kerusakan fisik sebesar Rp615 Miliar dan kerugian ekonomi sebesar Rp1,5 Miliar.

B. Kerawanan Bencana Gempa Bumi

Provinsi Jawa Barat juga memiliki tingkat risiko bencana gempa bumi yang tinggi karena adanya 7 (tujuh) sesar aktif yaitu Sesar Cimandiri mencakup Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung; Baribis mencakup Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta; Cipamingkis mencangkup Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur; Gersela mencangkup Kabupaten Garut; Citarik

mencangkup Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Bekasi; Lembang mencangkup Kabupaten Bandung; serta Cugenang mencangkup Kabupaten Cianjur. Hal ini mengakibatkan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kawasan rawan bencana (KRB) menengah yang berpotensi terlanda guncangan gempa bumi dengan intensitas VII–VIII MMI (modified Mercalli intensity) bahkan intensitas lebih besar dari VIII MM dengan intensitas tertinggi berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Cekungan Bandung.

Tingginya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat mengakibatkan besarnya penduduk yang memiliki risiko gempa bumi sebesar 15 juta penduduk. Jumlah penduduk terpapar ini merupakan tertinggi secara nasional yang menunjukkan bahwa kawasan permukiman di Provinsi Jawa Barat masih dibangun di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi. Kepadatan permukiman yang tinggi belum diikuti dengan kesesuaian struktur bangunan gedung secara SNI, sehingga mengakibatkan tingginya risiko kerugian kerusakan bangunan sebesar Rp53 Triliun dan risiko kerugian ekonomi sebesar Rp9 Triliun.

C. Kerawanan Bencana Gerakan Tanah

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan terjadinya bencana longsor yang diakibatkan oleh gerakan tanah, khususnya di wilayah tengah dan selatan. Kelerengan yang cenderung curam dan kondisi tanah lempung dengan sedikit pasir dan bersifat subur menyebabkan tingginya risiko bencana longsor pada selatan Provinsi Jawa Barat. Peningkatan lahan kritis pada kawasan dengan kecuraman tinggi juga memicu terjadinya longsor dan gerakan tanah pada saat musim hujan serta gempa bumi.

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat risiko bencana longsor tertinggi di Indonesia dengan luasan kawasan terdampak sebesar 228.940 hektar. Tingginya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat mengakibatkan tingginya penduduk dengan risiko bencana longsor yaitu sebesar 3 juta penduduk. Selain itu, tingginya kepadatan kawasan permukiman juga mengakibatkan tingginya kerugian materiil, dimana risiko kerusakan bangunan sebesar 11 triliun rupiah dan risiko kerugian ekonomi sebesar 16 triliun rupiah.

D. Kerawanan Bencana Banjir

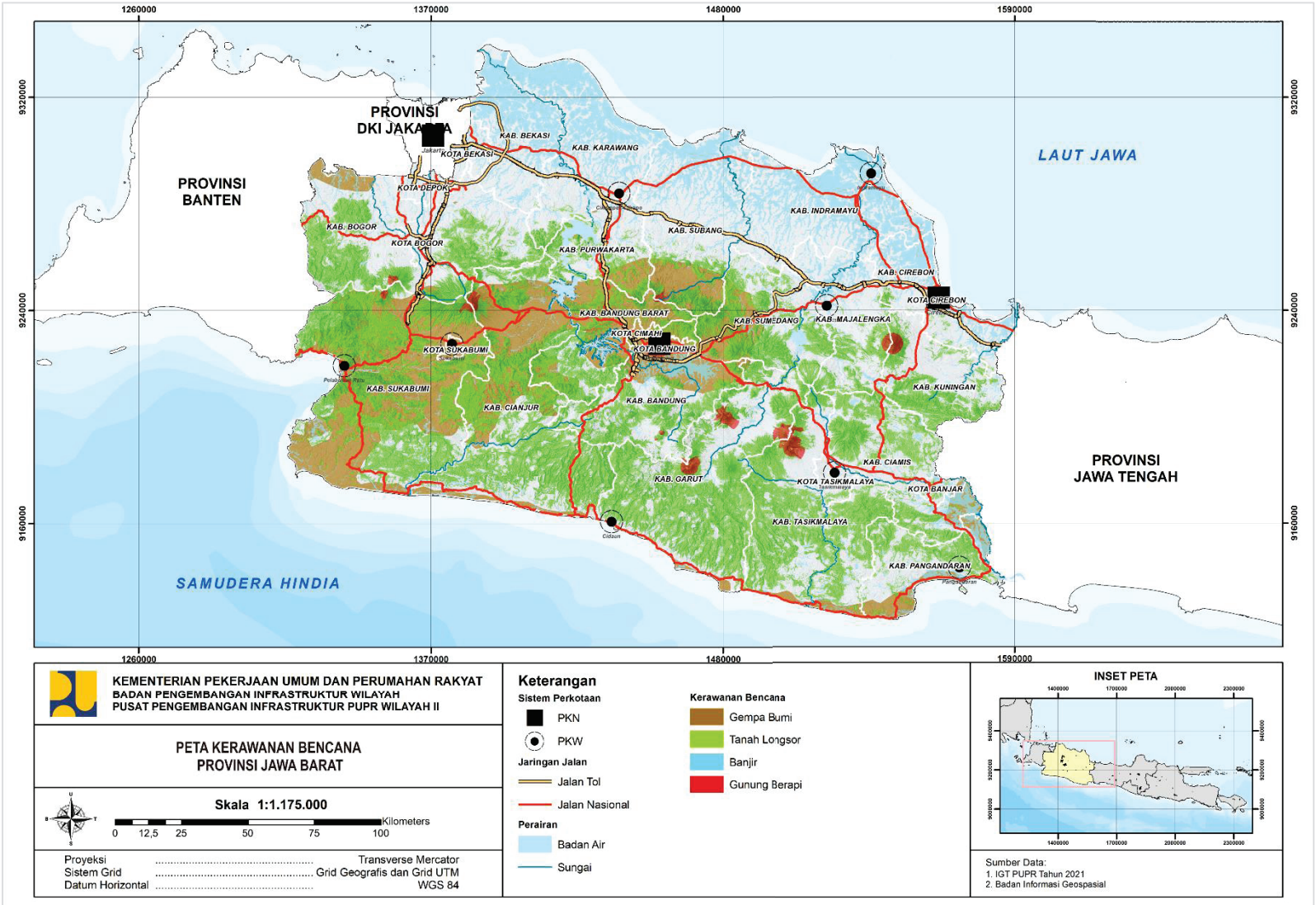
Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang cukup tinggi khususnya di wilayah utara. Wilayah Sungai Citarum merupakan wilayah dengan tingkat risiko banjir tertinggi dikarenakan tingginya jumlah penduduk yang mencapai 27 juta orang (54% Provinsi Jawa Barat). Penduduk di Wilayah Sungai Citarum terkonsentrasi di Kabupaten Bogor (20%), Kabupaten Bandung (13%), Kabupaten Bekasi

(11%), Kota Bandung (10%), Kabupaten Cianjur (8,9%), dan Kabupaten Karawang (7,1%). Konsentrasi penduduk terbanyak berada di wilayah Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung dimana tekanan perkembangan kawasan permukiman mengakibatkan terjadinya banjir setiap tahunnya.

Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung juga memiliki beberapa kawasan yang terdampak banjir seperti di Pamanukan, Kabupaten Subang. Banjir tersebut disebabkan karena

Provinsi Jawa Barat memiliki luasan kawasan risiko banjir sebesar 23.806 hektar, umunya disebabkan oleh Sungai Citarum baik di hulu sungai maupun di hilir. Wilayah dengan risiko banjir tersebut berada pada daerah dengan kepadatan tinggi sehingga yang mengakibatkan tingginya jumlah penduduk dengan risiko banjir sebesar 33 juta penduduk (69% dari total penduduk). Selain itu, tingginya kepadatan penduduk terutama di sepanjang DAS mengakibatkan tingginya kerugian materil, dimana risiko kerusakan bangunan sebesar 13 triliun rupiah dan risiko kerugian ekonomi sebesar 31 triliun rupiah.

Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat (IRBI, 2021), wilayah dengan indeks risiko tinggi berada di beberapa kabupaten yaitu, Kabupaten Cianjur (197,08), Kabupaten Sukabumi (192,40), Kabupaten Tasikmalaya (186,51), Kabupaten Garut (185,99), Kabupaten Subang (168,78), Kabupaten Karawang (165.58), Kabupaten Bandung (161.89), Kota Cirebon (157.19), Kota Banjar (152.80); dan Kabupaten Cirebon (147.51). Klasifikasi kawasan rawan bencana di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 3.6.



Peta 3.6 Kerawanan Bencana Provinsi Jawa Barat

3.2. Profil Demografi

Profil demografi memberikan gambaran kondisi kependudukan Provinsi Jawa Barat yang dilihat dari jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, kepadatan wilayah, serta kualitas hidup manusia (IPM).

3.2.1. Kependudukan

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 49.935.858 jiwa pada tahun 2020 (BPS, 2022), dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,54% per tahun. Pertumbuhan tertinggi berada di Kab. Karawang (1,93%), Kab. Bekasi (1,93%), dan Kota Bekasi (1,92%). Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kab. Bogor (6 juta jiwa) dan penduduk terendah terdapat pada Kab. Pangandaran (400 ribu jiwa).

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)		
	2018	2019	2020
Jawa Barat	**48.683**	**49.316**	**49.935**
Bogor	5.840	5.965	6.088
Sukabumi	2.460	2.466	2.470
Cianjur	2.260	2.263	2.264
Bandung	3.717	3.775	3.831
Garut	2.606	2.622	2.636
Tasikmalaya	1.751	1.754	1.755
Ciamis	1.188	1.195	1.201
Kuningan	1.074	1.080	1.087
Cirebon	2.176	2.192	2.209
Majalengka	1.199	1.205	1.210
Sumedang	1.149	1.152	1.154
Indramayu	1.719	1.728	1.737
Subang	1.579	1.595	1.612
Purwakarta	953	962	971
Karawang	2.336	2.353	2.370
Bekasi	3.630	3.763	3.899
Bandung Barat	1.683	1.699	1.714
Pangandaran	397	399	401
Kota Bogor	1.096	1 112	1.126
Kota Sukabumi	326	328	330
Kota Bandung	2.503	2.507	2.510
Kota Cirebon	316	319	322
Kota Bekasi	2.931	3.003	3.075
Kota Depok	2.330	2.406	2.484
Kota Cimahi	607	614	620
Kota Tasikmalaya	662	663	663
Kota Banjar	182	183	183

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, Hasil Analisis, 2022

Kepadatan penduduk rata-rata di Provinsi Jawa Barat adalah 14 jiwa/hektar dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Bandung (146 jiwa/hektar), Kota Cimahi (146 jiwa/hektar), dan Kota Bekasi (124 jiwa/hektar). Secara lengkap, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

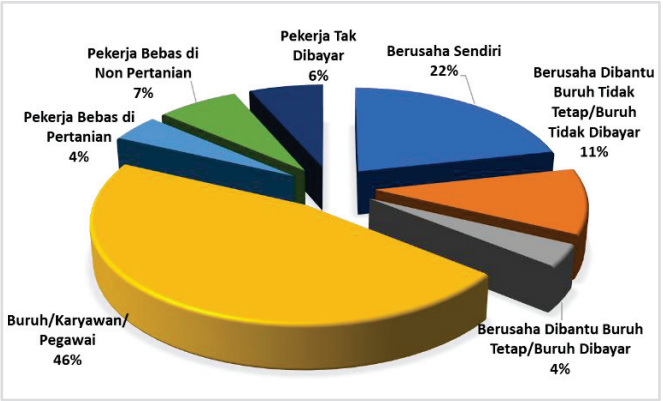
Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Kepadatan Penduduk (Ha/Jiwa)		
	2019	2020	2021
Provinsi Jawa Barat	**14**	**14**	**14**
Kabupaten Bogor	22	22	20
Kabupaten Sukabumi	6	6	7
Kabupaten Cianjur	6	6	7
Kabupaten Bandung	21	22	21
Kabupaten Garut	9	9	8
Kabupaten Tasikmalaya	7	7	7
Kabupaten Ciamis	8	8	9
Kabupaten Kuningan	10	10	11
Kabupaten Cirebon	22	22	23
Kabupaten Majalengka	10	10	11
Kabupaten Sumedang	8	8	8
Kabupaten Indramayu	8	9	9
Kabupaten Subang	8	9	8
Kabupaten Purwakarta	12	12	12
Kabupaten Karawang	14	14	15
Kabupaten Bekasi	31	32	26
Kabupaten Bandung Barat	13	13	14
Kabupaten Pangandaran	4	4	4
Kota Bogor	94	95	89
Kota Sukabumi	68	69	73
Kota Bandung	150	150	146
Kota Cirebon	85	86	90
Kota Bekasi	145	149	124
Kota Depok	120	124	104
Kota Cimahi	156	158	146
Kota Tasikmalaya	39	39	42
Kota Banjar	16	16	18

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2021

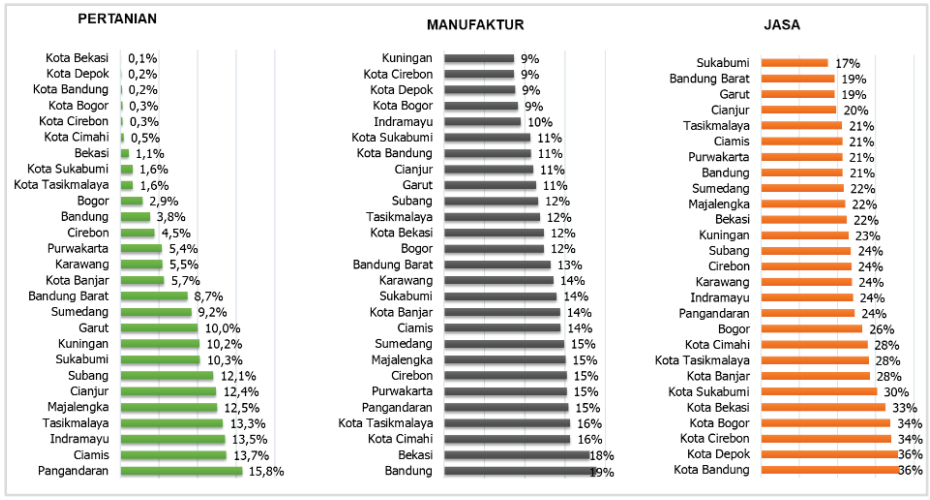
3.2.2. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Jawa Barat memiliki total Angkatan kerja adalah sebesar 21 juta jiwa, dengan sebagian besar mata pencaharian menurut lapangan pekerjaan utama berada di sektor jasa (56%), diikuti sektor manufaktur (30%), dan sektor pertanian (14%) (BPS, 2022).



Gambar 3.2 Mata Pencaharian Menurut Status Pekerjaan Provinsi Jawa Barat
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Jenis pekerjaan masyarakat Jawa Barat berdasarkan status pekerjaan terbagi menjadi 7 (tujuh) sektor dominan, yaitu buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian, pekerja tak dibayar, berusahan sendiri, buruh tidak dibayar, dan buruh dibayar. Jumlah pekerja terbanyak berasal dari buruh/karyawan. Hal ini sebanding dengan jumlah mata pencaharian terbanyak di bidang jasa dan manufaktur. Di semua kabupaten/kota, sebagian besar angkatan kerja (46%) memiliki status sebagai pegawai tetap yang didominasi oleh penduduk perkotaan, diikuti oleh wiraswasta (22%).



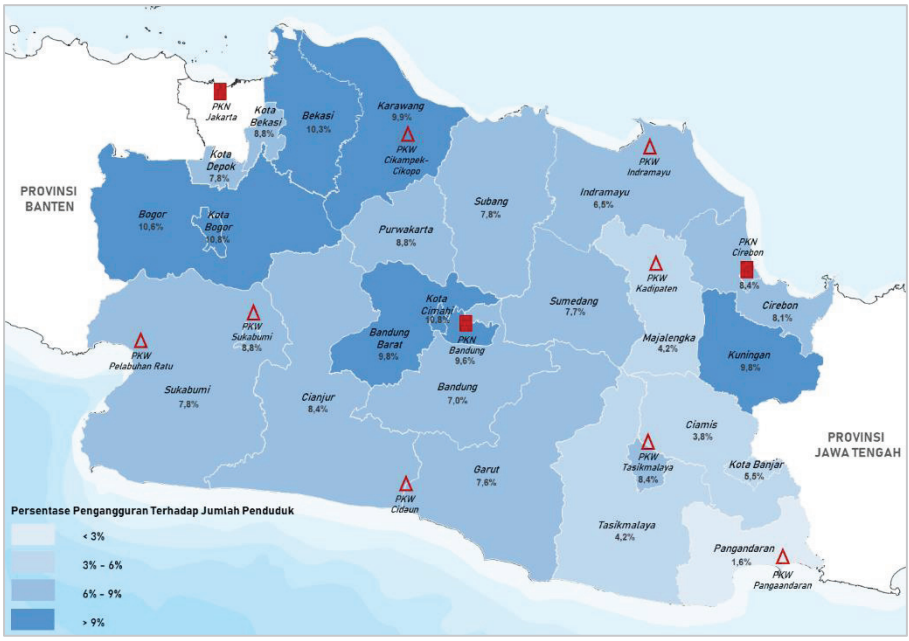
Gambar 3.3 Mata Pencaharian Utama Provinsi Jawa Barat
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

3.2.3. Pengangguran

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 8,31%. Nilai ini masih berada di atas rata-rata nasional (5,83%). Walaupun sudah mengalami penurunan 3,65% dari tahun 2020, Kota Bogor memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebesar 10,78%, Kota Cimahi sebesar 10,77%, Kabupaten Bekasi sebesai 10,64%, dan Kabupaten Bogor sebesar 10,31%.

Tingginya tingkat pengangguran diakibatkan karena tidak sesuainya ketersediaan lapangan pekerjaan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Tercatat di Provinsi Jawa Barat bahwa kegiatan ekonomi terutama berada pada sektor industri pengolahan dengan kontribusi 42% terhadap ekonomi. Sementara itu tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebagian besar didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas sebesar 67%. Hal ini mengakibatkan tidak mampunya tingkat lulusan sekolah menengah atas untuk memasuki dunia pekerjaan di sektor berteknologi tinggi, yang ditunjukkan oleh jumlah pengangguran

terbesar yang disumbangkan oleh lulusan SLTA, yaitu sebesar 965 ribu orang atau 51% dari jumlah pengangguran Provinsi Jawa Barat (BPS, 2022).



Gambar 3.4 Jumlah Penduduk dan Pengangguran Provinsi Jawa Barat
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

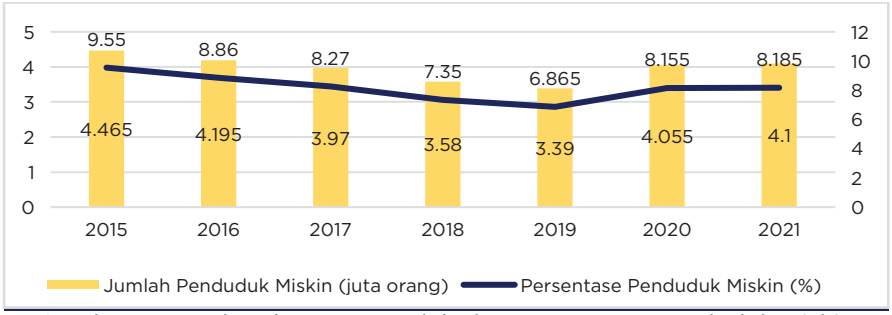
3.2.4. Kemiskinan

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 4.071.000 jiwa atau 8,3% dari total penduduk. Dari total jumlah kemiskinan tersebut, 941.860 orang atau 23% dari total penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Tingginya penduduk miskin disebabkan oleh dua kondisi, yaitu kondisi ekonomi karena peluang produksi relatif kecil akibat keterbatasan sumber daya, serta kondisi struktural karena belum meratanya distribusi hasil pembangunan.

Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat justru berada di pusat lumbung pangan. Hal ini menunjukkan belum berkontribusinya sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten penghasil padi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Indramayu (12,77%), Kabupaten Kuningan (12,76%), Kabupaten Cirebon (12,01%), Kabupaten Majalengka (11,94%), dan Kabupaten Cianjur (10,55%). Selain itu, tingkat kemiskinan juga tergolong tinggi di wilayah Jawa Barat Selatan dimana tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kota Tasikmalaya (12,72%), Kabupaten Garut (10,42%), dan Kabupaten

Tasikmalaya (10,73%) yang menunjukkan tingginya tingkat kesenjangan ekonomi antara wilayah utara-selatan.

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat tercatat mengalami penurunan linear dari 9,55% pada 2015 menjadi 6,865% pada 2018, lalu naik kembali hingga menjadi 8,185% pada 2021. Pada September 2021, juga tercatat Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 1,29% dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,31.



Gambar 3.5 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki nilai IPM sebesar 73,12 atau relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 72,91 (BPS, 2022). IPM Provinsi Jawa Barat selalu meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan mencapai 6 point dari tahun 2012 sebesar 67,32 poin. IPM tertinggi berada di Kota Bandung (82,5), Kota Bekasi (82,46), dan Kota Depok (81,86). IPM terendah berada di wilayah selatan Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Cianjur (65,94), Kabupaten Tasikmalaya (66,84), dan Kabupaten Garut (67,41).

Berdasarkan masing-masing komponen, tingkat harapan hidup terendah berada di Kab. Majalengka, Kab. Cianjur, dan Kab. Tasikmalaya. Sementara itu, tingkat harapan hidup tertinggi dimiliki Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung. Tingkat pendidikan terendah berada di Kab. Indramayu, Kab. Cianjur, dan Kab. Sukabumi, sedangkan tingkat pendidikan tertinggi berada pada Kota Bekasi, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Pengeluaran per kapita paling rendah berada di Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, dan Kab. Cianjur, sedangkan pengeluaran perkapita paling tinggi adalah Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Depok**.**

3.3. Profil Ekonomi

Profil ekonomi menunjukkan gambaran kinerja ekonomi dilihat dari besaran PDRB, pendapatan perkapita, sektor unggulan wilayah, dan perkembangan investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di Provinsi

Jawa Barat. Tiga sektor unggulan Jawa Barat akan (industri, pertanian, dan pariwisata) dijabarkan lebih lanjut dalam profil dan rantai nilai ekonomi terhadap Provinsi Jawa Barat.

3.3.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2020, PDRB Provinsi Jawa Barat (Rp1,4 Triliun) menyumbang 22,83% bagi perekonomian Pulau Jawa dan 13,41% bagi perekonomian Nasional. Sektor yang memiliki kontribusi dominan terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan, yang berkontribusi sebesar 27,73% terhadap sektor industri pengolahan nasional. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor di Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 15,47% terhadap sektor pergudangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor nasional. Sementara itu, sektor konstruksi di Jawa Barat berkontribusi sebesar 11,10% terhadap sektor konstruksi nasional.

Wilayah dengan kontribusi ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Bekasi dengan PDRB sebesar 265 triliun rupiah (16% Jawa Barat), diikuti Kota Bandung sebesar 211 triliun rupiah (13% Jawa Barat) dan Kabupaten Karawang sebesar 177 triliun rupiah (11% Jawa Barat). Sedangkan wilayah dengan kontribusi ekonomi terendah berada di Kota Banjar dengan PDRB sebesar 3,5 triliun rupiah (0,2% Jawa Barat), Kabupaten Pangandaran sebesar 8,4 triliun rupiah (0,5% Jawa Barat) dan Kota Sukabumi sebesar 9,3 triliuh rupiah (0,6% Jawa Barat).

3.3.2. Pendapatan Perkapita

Kabupaten/kota dengan pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 2020 adalah Kota Bandung (Rp76,94 Juta), Karawang (Rp66,58 Juta), dan Bekasi (Rp62,37 Juta). Sementara itu, pendapatan perkapita terendah di Tasikmalaya (Rp13,86 Juta), Cianjur (Rp14,03 Juta), dan Garut (Rp14,63 Juta).

Tabel 3.4 PDRB per Kapita ADHK Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)		
	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Barat	29.161.391	30.247.471	29.494.359
Bogor	25.373.346	26.296.550	25.310.592
Sukabumi	17.935.085	18.922.739	18.702.514
Cianjur	13.411.220	14.128.884	14.039.069
Bandung	20.877.715	21.809.417	21.095.969
Garut	14.281.948	14.907.060	14.639.158
Tasikmalaya	13.315.811	14.016.644	13.866.961
Ciamis	17.587.559	18.431.492	18.283.003
Kuningan	14.724.988	15.599.976	15.526.976
Cirebon	14.778.054	15.378.654	15.072.410
Majalengka	16.622.647	17.724.742	17.953.616
Sumedang	19.581.739	20.773.420	20.499.335
Indramayu	33.904.384	34.802.101	34.069.512
Subang	17.353.374	17.904.497	17.519.828

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)		
	2018	2019	2020
Purwakarta	46.511.036	48.071.784	46.643.854
Karawang	67.363.090	69.563.075	66.589.465
Bekasi	66.636.076	66.965.638	62.373.479
Bandung Barat	17.751.792	18.470.749	17.866.315
Pangandaran	18.417.681	19.412.058	19.275.475
Kota Bogor	27.728.664	29.000.138	28.469.912
Kota Sukabumi	25.158.551	26.346.398	25.803.658
Kota Bandung	73.924.026	78.808.426	76.947.023
Kota Cirebon	50.012.015	52.653.543	51.641.319
Kota Bekasi	22.458.188	23.104.660	21.991.182
Kota Depok	19.730.607	20.390.600	19.375.402
Kota Cimahi	34.867.095	36.857.695	36.010.338
Kota Tasikmalaya	22.421.476	23.731.278	23.238.471
Kota Banjar	16.775.233	17.589.170	17.757.544

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2021

3.3.3. Sektor Ekonomi Unggulan

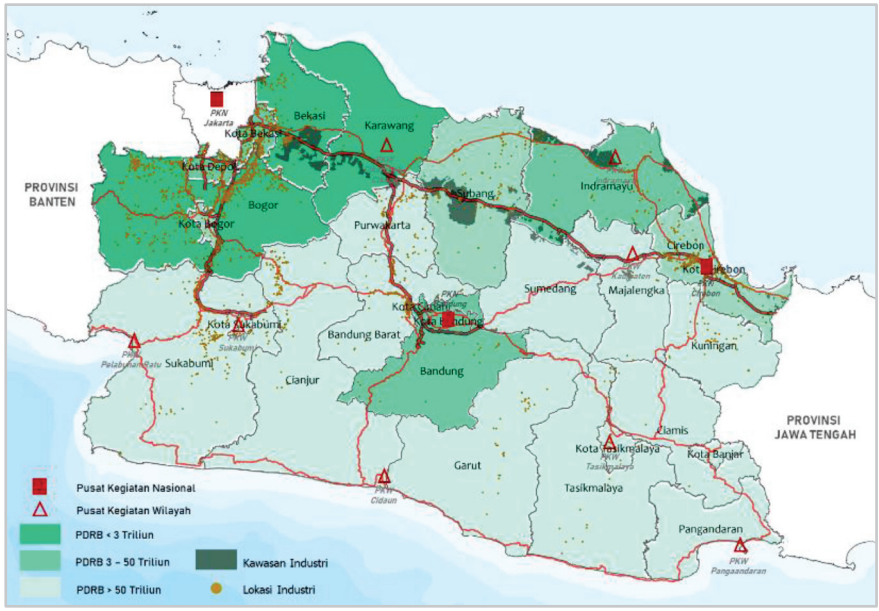
Sektor ekonomi unggulan di Provinsi Jawa Barat terdiri dari sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

A. Profil Industri

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan kontribusi industri terbesar sebesar 19,8% terhadap industri nasional (5% terhadap PDB Nasional). Industri Provinsi Jawa Barat merupakan industri berbasis ekspor dengan sebagian besar atau 96% industri atau sebesar Rp421 Triliun dialokasikan untuk pangsa ekspor. Wilayah dengan kontribusi industri terbesar berada di Kabupaten Bekasi (Rp616 Triliun), Kabupaten Karawang (Rp111 Triliun), dan Kabupaten Bogor (Rp83 Triliun). Industri yang terdaftar sebagai penanaman modal dalam negeri (PMDN) berjumlah sebanyak 3.039 (32,1%) berstatus penanaman modal asing (PMA) berjumlah 1.900 (20,1%), lainnya tidak terdaftar.

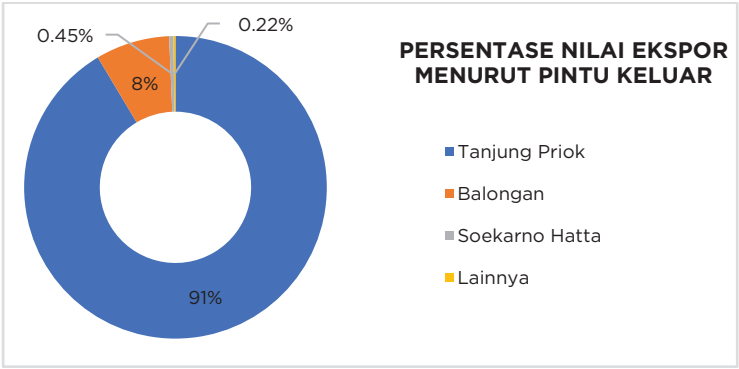
Dari total luas area kawasan industri Indonesia 28.526,86 Ha, sebanyak 44,07% di antaranya berada di Jawa Barat, yakni seluas 12.573 Ha (Himpunan Kawasan Industri, 2012). Peruntukan industri paling luas terdapat di Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 23.437 Ha dan di Kabupaten Karawang sebesar 16.368 Ha. Terdapat 21 kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Industri, yaitu KI Cilamaya, KI Subang, KI Majalengka, Bekasi International Industrial Estate, Kab. Bekasi, MM2100 Industrial Town BFIE, Kab. Bekasi, MM2100 Industrial Town MMID, Kawasan Industri Jababeka, Kab. Bekasi, East Jakarta Industrial Park dan Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kab. Bekasi, Greenland International Industrial Center (GIIC), Kab. Bekasi, KIT Indonesia China, Kab. Bekasi, KI Cilamaya,, KI Subang, KI Majalengka, Bekasi International Industrial Estate, Kab. Bekasi, MM2100 Industrial Town BFIE, Kab. Bekasi; MM2100 Industrial Town MMID, Kawasan Industri Jababeka,

Kab. Bekasi, East Jakarta Industrial Park dan Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kab. Bekasi, Greenland International Industrial Center (GIIC), Kab. Bekasi, KIT Indonesia China, Kab. Bekasi, Cibinong Center Industrial Estate, Kab. Bogor, KI Sentul, Kab. Bogor, KI Marunda Center, Kota Bekasi, KI Indotaisei, Karawang, KI Kujang Cikampek, Karawang, Karawang International Industrial City, Podomoro Industrial Park Karawang, Karawang Jabar Industrial Estate, Kertajati Industrial Estate Majalengka, Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta, KI SKI, KI Sukabumi; dan KI Rancaekek. Distribusi PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam Gambar 3.6.



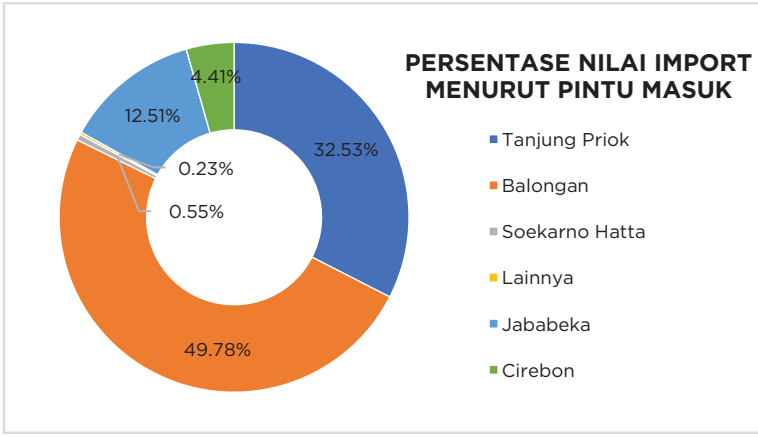
Gambar 3.6 Sebaran Kawasan Peruntukan Industri dan PDRB Industri
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Selama tahun 2013-2020, nilai total ekspor rata-rata naik 0,39% per tahun. Namun, pada 2020 pertumbuhan ekspor Migas dan Nonmigas Jawa Barat mengalami pelemahan. Antara tahun 2019-2020, terjadi penurunan ekspor Migas sebesar 11,42%, sedangkan ekspor Nonmigas turun 11,12%. Industri Pengolahan mejadi penopang utama ekspor Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 99,32% (2020) terhadap total ekspor Nonmigas. Pada 2013-2020, Impor Nonmigas mengalami penurunan 5,6% pertahun, sedangkan Minyak Mentah dan Gas mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 7,65 % pada 2 tahun terakhir.



Gambar 3.7 Persentase Nilai Ekspor Menurut Pintu Keluar
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Ekspor sektor industri pada tahun 2021 sebesar 7.349.808 Ton dengan nilai 26.209.651 Ribu USD, sektor hasil minyak dengan ekspor sebesar 646.505 Ton senilai 646.505 Ribu USD, sektor pertanian dengan ekspor sebesar 251.785 Ton senilai 174.807 Ribu USD. Dari sisi impor, sektor industri sebesar 782.950 Ton senilai 3.737.090 Ribu USD, sektor hasil minyak dengan impor sebesar 626.589 Ton senilai 256.235 Ribu USD, hasil pertanian dengan impor 74.765 Ton senilai 113.101 Ribu USD. Berdasarkan neraca perdagangan Provinsi Jawa Barat, terdapat net ekspor perdagangan pada tahun 2021 sebesar 22 Juta USD atau 6,6 juta ton



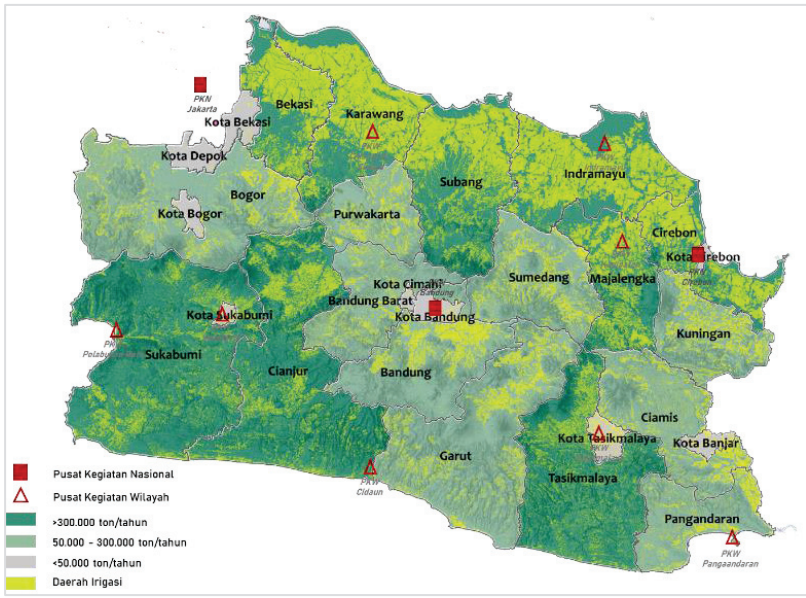
Gambar 3.8 Persentase Nilai Import Menurut Pintu Masuk
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Hampir seluruh nilai ekspor Jawa Barat (99,08%) diangkut melalui outlet di luar Jawa Barat: Tanjung Priok sebesar USD 26.829,3 Juta, Soekarna-Hatta senilai USD 2.767,1 Juta, dan Tanjung Emas senilai USD 28,9 Juta. Nilai ekspor barang Jawa Barat yang melalui outlet di Provinsi Jawa Barat (Balongan dan Husein Sastranegara) tahun 2019 hanya sebesar 0,9%.

Berdasarkan nilai komoditas impor, Pelabuhan Khusus Balongan di Tahun 2020 secara volume berkontribusi hingga 49,78%, diikuti oleh Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 32,53%, serta Kawasan Jababeka (*dry port*) sebesar 12,51%. Lain halnya bila dilihat secara nilai. Impor terbesar melalui Tanjung Priok sebesar USD 5,36 Miliar (61,70%), diikuti Bandara Soekarno Hatta sebesar USD 1,33 Miliar (15,27%), dan Kawasan Jababeka sebesar USD 1,20 Miliar (13,76%).

B. Profil Pertanian

Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil padi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Timur dengan produksi padi mencapai 9,62 juta ton atau 19% produksi nasional. Produktivitas Tanaman Padi rata-rata 56,81 kuintal/Ha, di atas rata-rata nasional sebesar 51,28 kuintal/Ha dan memiliki produktivitas tertinggi kedua setelah Provinsi Bali (BPS, 2022). Namun, nilai ini mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2015, tercatat penurunan produksi padi sebesar 1,9 juta ton atau 20% dalam 7 tahun terakhir. Produktivitas pertanian Provinsi Jawa Barat tergambarkan dalam Gambar 3.9.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Gambar 3.9 Persebaran Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Barat

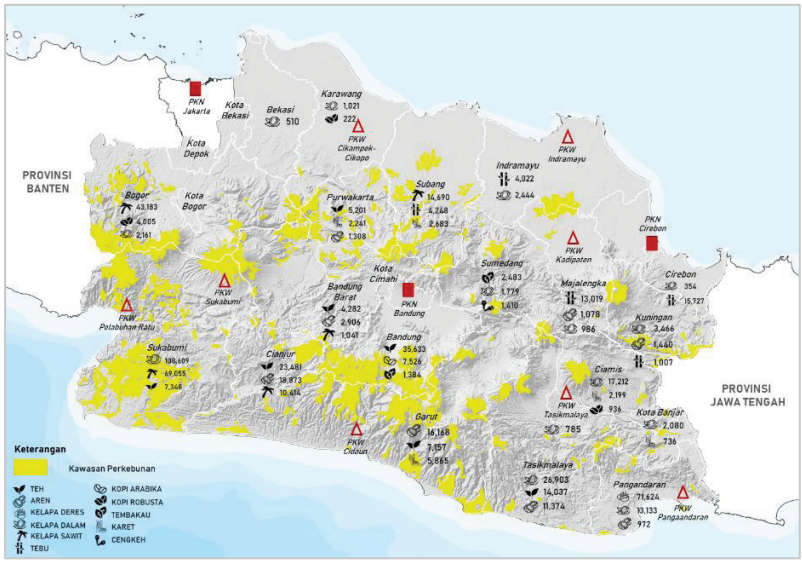
Penurunan ini disebabkan terutama karena berkurangnya lahan pertanian sebesar 602 ribu hektar jika dibandingkan luasan tahun 2015 (BPS 2022). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Garut (478 ribu ton), Kabupaten Tasikmalaya (412 ribu ton), Kabupaten Sukabumi (334 ribu ton), Kabupaten Cianjur (233 ribu ton), Kabupaten Bandung (194 ribu ton), Kabupaten Bogor (192 ribu ton), dan Kabupaten Sumedang

(135 ribu ton). Penurunan ini terjadi karena berkurangnya luas panen terutama di Kabupaten Garut (214 ribu ha), Kabupaten Sukabumi (112 ribu ha), Kabupaten Cianjur (89 ribu ha), Kabupaten Tasikmalaya (59 ribu ha), dan Kabupaten Bandung (41 ribu ha).

Kabupaten Indramayu merupakan wilayah penghasil padi terbesar di Jawa Barat, yakni sebesar 1,32 juta ton atau 14,49% dari total produksi pada 2021, dengan luas panen padi mencapai 226,18 ribu Ha dan produktivitas 60,24 kuintal/Ha. Pada peringkat kedua, terdapat Kabupaten Karawang dengan produksi 1,23 juta ton atau 13,50%, dengan luas panen mencapai 193,98 ribu Ha dan produktivitas sebesar 61,49 kuintal/Ha.

Berikutnya adalah Kabupaten Subang dengan produksi padi sebesar 959,45 ribu ton atau 10,52%, dengan luas panen sebesar 168,74 ribu Ha dan produktivitas mencapai 60,33 kuintal/Ha. Total produksi padi dari ketiga kabupaten sentra padi tersebut mencapai 3,54 juta ton atau setara dengan 38,45% dari produksi padi Provinsi Jawa Barat (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021).

Luas LP2B Provinsi Jawa Barat adalah 925.549,65 Ha, dimana 644.072,91 Ha (69%) diantaranya telah terlayani jaringan irigasi teknis. Sementara itu terdapat 281.476,74 Ha (31%) belum terlayani irigasi teknis. Kabupaten/kota dengan luas LP2B terbesar adalah Kabupaten Indramayu (86.316 Ha), Kabupaten Karawang (88.459 Ha), dan Kabupaten Subang (71.874 Ha).



Gambar 3.10 Komoditas Utama Perkebunan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan BIG diolah BPIW, 2022

Selain lahan sawah, komoditas pertanian sub sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat mencapai 488.168 Ha, yang terdiri dari perkebunan besar negara seluas 68.850 Ha, perkebunan besar swasta 54.633 Ha, dan perkebunan rakyat seluas 364.685 Ha. Tiga komoditas tertinggi adalah Kelapa Sawit sebesar 175.169 ton/tahun, Teh sebesar 92.317 ton/tahun, dan Kelapa Dalam 88.674 ton/tahun. Sub sektor perkebunan terus mengalami peningkatan dalam 10 tahun (2009-2019) sebesar 249.264 hektar, yang menunjukan bahwa perkebunan juga sangat potensial untuk dikembangkan terutama di wilayah tengah-selatan Provinsi Jawa Barat. Persebaran kawasan dan komoditas perkebunan di Provinsi Jawa Barat tergambarkan dalam Gambar 3.10 Komoditas Utama Perkebunan.

Distribusi hasil pertanian dan perkebunan menghubungkan pusat produksi hasil perkebunan di selatan ke pusat industri pengolahan di utara, serta menghubungkan pusat produksi hasil pertanian pangan menuju ke pusat permukiman perkotaan sebagai konsumen.

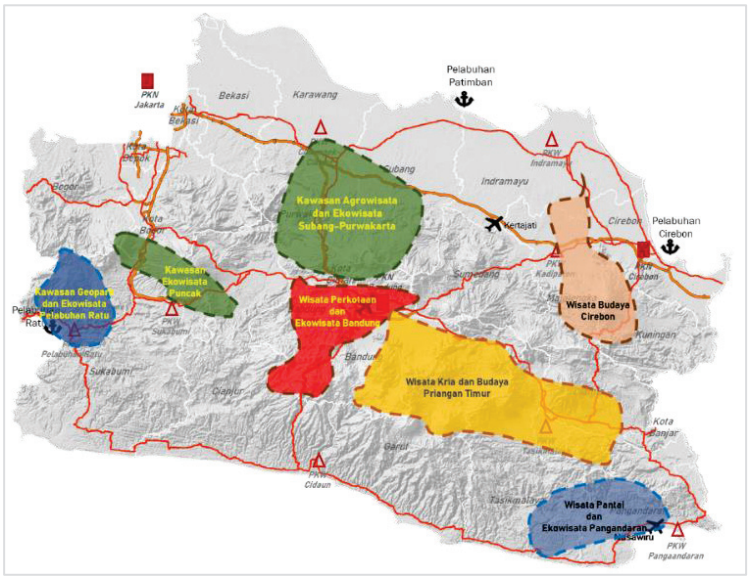
C. Profil Pariwisata

Berdasarkan data kunjungan wisatawan sebelum pandemi (2019), Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah pergerakan wisatawan nusantara terbesar se-Indonesia dengan 107 juta pergerakan/tahun (Statistik Pariwisata Jawa Barat, 2020). Hal ini diakibatkan oleh besarnya pasar wisata yang karena keberadaan dua wilayah metropolitan Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung yang memiliki jumlah dan daya beli tinggi. Selain itu, akses darat dan udara yang memadai memberikan kemudahan bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Namun, tingginya minat wisatawan yang berkunjung belum dapat didukung dengan kapasitas destinasi tujuan wisata (DTW), sehingga DTW sering mengalami kepadatan, terutama pada saat libur nasional.

Dilihat dari tingkat persebaran wisatawan, wilayah dengan jumlah kunjungan wisatawan terbesar berada di Kabupaten Bandung Barat (3,5 juta), Kabupaten Pangandaran (2,9 juta), Kota Bandung (2,4 juta), Kabupaten Garut (1,9 juta), Kabupaten Karawang (1,4 juta), serta Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Kuningan (1,3 juta). Kunjungan wisatawan di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Kuningan terutama diakibatkan adanya atraksi wisata berupa bentang alam pegunungan, sedangkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Karawang dan Kota Bandung juga didorong adanya kegiatan berupa *meeting, incentive, conference, and exibition* (MICE).

Wisatawan terutama berkunjung ke wilayah tengah dan selatan Provinsi Jawa Barat yang memiliki daya tarik alam pegunungan dan

pemandangan. Selain itu, tingginya dukungan industri kreatif berupa kuliner, belanja, dan wisata buatan mengakibatkan tingginya waktu tinggal wisatawan. Tingkat lama tinggal wisatawan di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,54 hari atau di atas rata-rata tinggal nasional. Hal ini mengakibatkan berkembangnya akomodasi berbintang, dimana Provinsi Jawa Barat berada di urutan kedua nasional dengan akomodasi berbintang sebanyak 495 hunian. Klaster wisata Provinsi Jawa Barat tergambar dalam Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Klaster Wisata Provinsi Jawa Barat
Sumber: Kementerian Pariwisata diolah BPIW, 2022

Atraksi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat sangat beragam, mulai dari wisata cagar budaya, wisata alam, wisata ilmu pengetahuan, dan wisata belanja. Bagi wisatawan mancanegara, daya tarik utama berada pada atraksi wisata belanja, MICE, wisata sejarah, dan penelitian. Atraksi tersebut tersebar di 6 KSPN, 10 KPPN, 5 Geopark, 8 Wisata Minat Khusus, serta wisata perkotaan yang mendukung kegiatan MICE dan wisata belanja. Pengembangan berbagai destinasi tersebut didukung dengan pertambahan atraksi buatan (*man-made*) yang dikembangkan oleh pelaku industri kreatif.

Berdasarkan Ripparnas (2010) dan Kajian Potensi Wisata Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat terbagi dalam beberapa klaster wisata, yaitu wilayah Bogor dsk. (10 DTW), wilayah Sukabumi-Pelabuhan Ratu (10 DTW), wilayah Bandung Barat (13 DTW), wilayah Cianjur (6 DTW), KSPN Tangkupan Perahu (3 DTW), KSPN Ciwidey (5 DTW), Garut dsk. (9 DTW), KSPN Pangandaran (7 DTW), dan Cirebon dsk. (7 DTW). Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan rata-rata waktu kunjungan

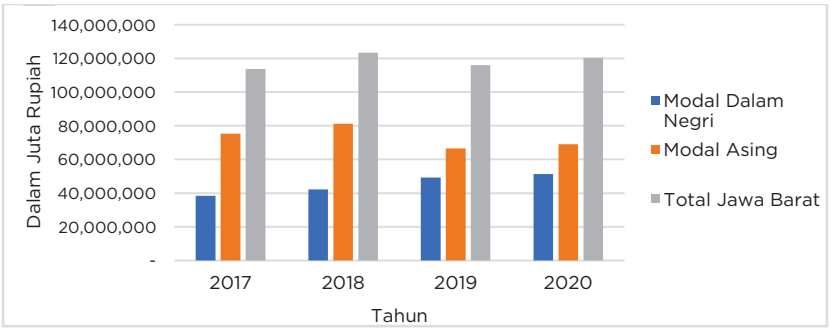
wisatawan menjadi 7,5 hari dan peningkatan pengeluaran wisatawan terutama sebesar Rp25 Juta per kunjungan untuk wisatawan nusantara dan US$1.000 per kunjungan untuk wisatawan mancanegara.

Wisatawan nusantara memiliki minat atraksi utama wisata alam sebagai tujuan wisata penduduk perkotaan yang menyukai destinasi dengan iklim pedesaan yang sejuk. Berdasarkan data wisatawan pada destinasi, terdapat dua jalur pergerakan utama di Provinsi Jawa Barat dimana wisatawan dari Metropolitan Jakarta paling banyak mengunjungi KSPN Halimun, Pelabuhan Ratu, Gede Pangrango, dan Bandung, yang memilki jarak tempuh terjangkau (3,5 jam). Sementara itu, wisatawan yang berasal dari Metropolitan Bandung, dengan kondisi kota cenderung padat terutama pada akhir pekan, cenderung memilih tempat wisata dengan tujuan Tasikmalaya, dan Pangandaran dengan daya tarik wisata pantai yang sulit ditemukan bagi masyarakat Metropolitan Bandung.

Perkembangan sektor pariwisata menjadi salah satu pemicu perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang berpengaruh juga terhadap pertumbuhan industri ekonomi kreatif. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah usaha ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat hingga menempati peringkat pertama secara nasional, terutama pada sektor diversifikasi produk, wisata belanja, festival budaya, dan kuliner. Pengaruh yang diberikan juga berdampak pada pertumbuhan sebesar 1,66% terhadap kontribusi PDRB dan nilai *share* terhadap nasional sebesar 11,81%. Banyaknya peluang usaha yang berkembang memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, mencapai 3 juta tenaga kerja yang merupakan terbesar secara nasional.

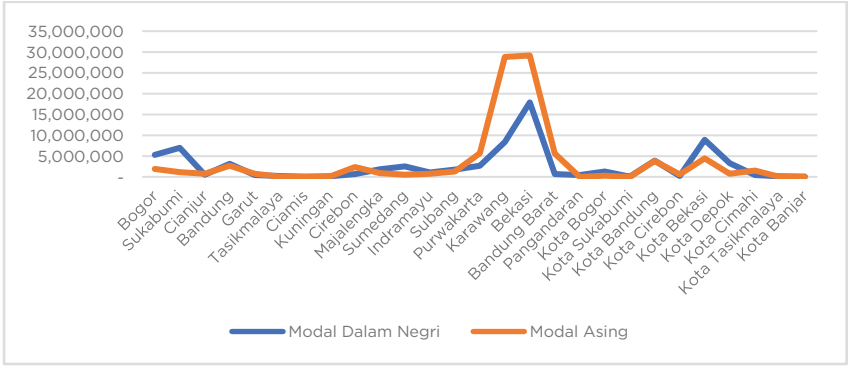
3.3.4. Perkembangan Investasi

Realisasi penanaman modal di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2020 berada pada kisaran Rp120 Triliun dengan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp60 Triliun - Rp80 Triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp40 Triliun - Rp50 Triliun. Penurunan investasi pada tahun 2019 dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.



Gambar 3.12 Perkembangan Penanaman Modal Jawa Barat 2017-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2021

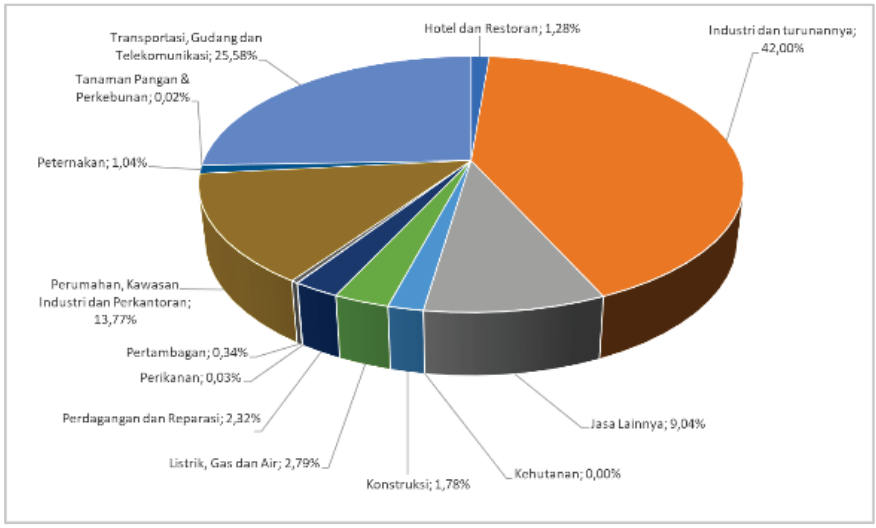
Realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik sebesar 19,72 persen dari periode yang sama di tahun 2021 (*year-on-year).* Sebagai pembanding, realisasi tahun lalu tercatat sebesar Rp107,23 Triliun. Selama triwulan III-2022 (Juli-September), tambahan investasi mencapai Rp44,9 Triliun. Selama tiga bulan itu, lima daerah di Provinsi Jawa Barat yang paling banyak menerima investasi adalah Kabupaten Karawang (Rp10,05 Triliun), Kabupaten Bekasi (Rp7,86 Triliun), Kabupaten Bogor (Rp4,92 Triliun), Kota Bekasi (Rp4,32 Triliun), dan Kabupaten Sukabumi (Rp3,58 Triliun). Penanaman modal di kota/kabupaten lainnya nilainya tidak melebihi Rp10 Triliun.



Gambar 3.13 Realisasi Penanaman Modal di Jawa Barat Pada 2022
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2021) diolah BPIW, 2022

Pada tahun 2022, jumlah proyek yang direalisasikan di Provinsi Jawa Barat adalah 27.951 proyek, naik sebesar 17,69% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 (23.749 proyek). Berdasarkan data investasi PMA dan PMDN Januari-September 2022, wilayah dengan kontribusi tertinggi terhadap pencapaian Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi (27,46%), diikuti oleh Kabupaten Karawang (19,72%), dan Kabupaten Bogor (10,25%). Jika dilihat dari sektornya, penanaman modal terbesar berada pada empat sektor yaitu sektor industri, transportasi dan pergudangan, perumahan dan kawasan industri, serta jasa lainnya seperti ditampilkan pada Gambar 3.14.

Industri dan turunannya yang mencapai (42%), diikuti oleh sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi (25,58%); perumahan, kawasan industri dan perkantoran (13,77%); dan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain (11,44%). Sektor industri dan turunannya adalah sektor yang mendominasi realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi (26,39%), Kabupaten Karawang (15,57%) dan Kota Bekasi (11,67%).



Gambar 3.14 Realisasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Industri dan turunannya yang mencapai (42%), diikuti oleh sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi (25,58%); perumahan, kawasan industri dan perkantoran (13,77%); dan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain (11,44%). Sektor industri dan turunannya adalah sektor yang mendominasi realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi (26,39%), Kabupaten Karawang (15,57%) dan Kota Bekasi (11,67%).

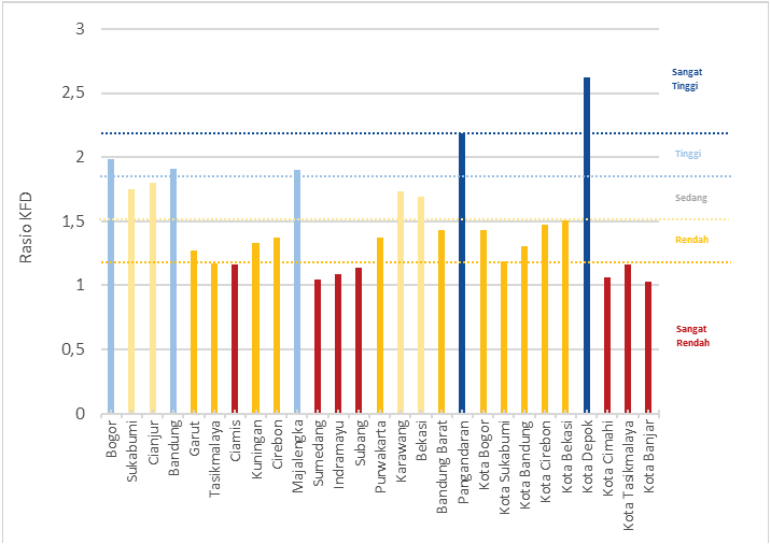
3.3.5. Kapasitas Fisikal Daerah (KFD)

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Kapasitas tersebut kemudian dipetakan untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio KFD.

Peta KFD dapat digunakan sebagai (a) pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, (b) penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika dipersyaratkan, (c) pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah, (d) pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah, dan/atau (e) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lingkup provinsi, kapasitas fiskal Provinsi Jawa Barat pada 2022 tergolong sedang, yaitu sebesar 2,546. Sementara itu, kapasitas fiskal kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat bervariasi; 7 kabupaten dengan kategori sangat rendah, 11 kota/kabupaten dengan kategori rendah, 4

kota/kabupaten dengan kategori sedang, 3 kota dengan kategori tinggi, dan 2 kota/kabupaten dengan kategori sangat tinggi.



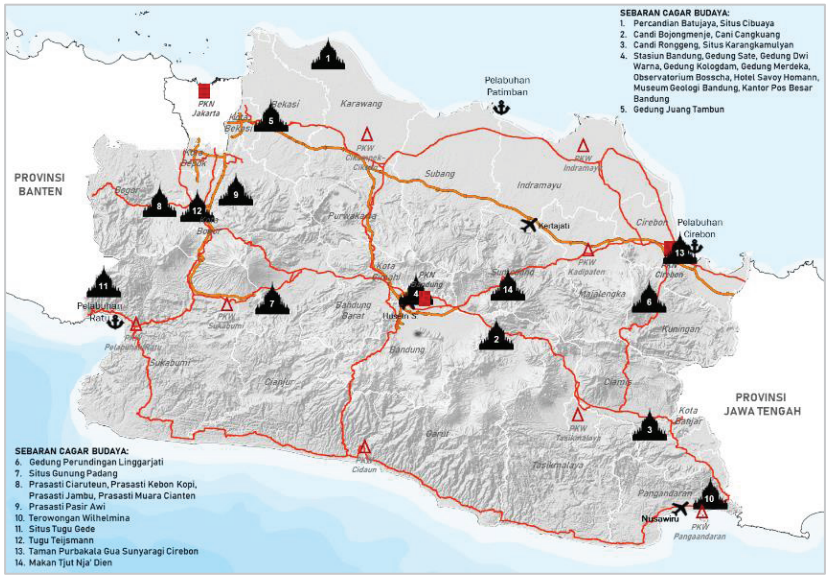
Gambar 3.15 Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Barat 2022

Sumber: Kementerian Keuangan diolah BPIW, 2023

3.4. Profil Sosial dan Budaya

Masyarakat Provinsi Jawa Barat didominasi dua kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Sunda dan kebudayaan Cirebon. Sekitar 65% penduduk Provinsi Jawa Barat adalah masyarakat dengan kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda berkembang di Tatar Sunda, Tanah Pasundan, dan Tanah Priangan, sedangkan kebudayaan Cirebon berkembang di daerah bekas karasidenan Cirebon. Kebudayaan lainnya adalah kebudayaan Jawa yang banyak dijumpai di daerah utara Jawa Barat, kebudayaan Betawi di daerah barat yang berdampingan dengan Jakarta, serta Kebudayaan Minang, Batak, dan Tionghoa.

Cagar kebudayaan yang mewarisi kebudayaan Sunda dan Cirebon banyak tersebar di Provinsi Jawa Barat seperti candi, prasasti, dan situs bersejarah lainnya. Selain itu, bangunan peninggalan pada saat penjajahan Belanda juga masih terpelihara dan dipergunakan sampai saat ini seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka, Gedung Kologdam, Gedung Juang, dan Gedung Perundingan Linggarjati di Kabupaten Kuningan. Persebaran cagar budaya Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Persebaran Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2023

Kebudayaan lain yang terdapat di Provinsi Jawa Barat diantaranya batik tradisional trusmi, kedok, rotan, lukis kaca dan kulit (Kabupaten Cirebon), tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba (Kabupaten Indramayu), payung, anyaman, batik tulis, kelom geulis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi (Kabupaten Tasikmalaya), keramik (Kabupaten Purwakarta), sepatu (Kabupaten/Kota Bandung), anyaman bambu dan pahat patung (Kabupaten Bekasi), serta kerajinan tanduk (Kabupaten Bogor).

3.5. Profil Interaksi Antarkawasan

Secara konektivitas, Provinsi Jawa Barat telah terhubung dengan provinsi lainnya, baik secara darat, laut, dan udara. Konektivitas darat berupa jalan tol super koridor Pantura Jawa Merak-Banyuwangi serta jaringan jalan nasional lintas utara dan lintas tengah dengan kemantapan >95%, serta lintas selatan yang masih dalam proses konstruksi. Terkait konektivitas laut, terdapat Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan utama di Provinsi Jawa Barat yang dikembangkan menjadi outlet ekspor/impor. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Kertajati menjadi outlet penting skala Pulau Jawa dan skala nasional untuk lalu lintas penumpang dan barang.

Interaksi antarkawasan terjadi antara kawasan metropolitan, yaitu Bodebek dan Cekungan Bandung, masing-masing dengan empat KSPN terdekat, yaitu KSPN Tangkuban Perahu, KSPN Ciwidey, KSPN Tasikmalaya, dan KSPN Pangandaran dengan Kota Bandung, serta

KSPN Halimun, KSPN Pelabuhan Ratu, KSPN Gede-Pangrango, dan KSPN Bandung dengan Kota Jakarta. Interaksi kawasan ditunjukkan dengan perkiraan jarak tempuh, waktu tempuh, dan kecepatan rata-rata yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interaksi Antara Metropolitan dan KSPN di Provinsi Jawa Barat

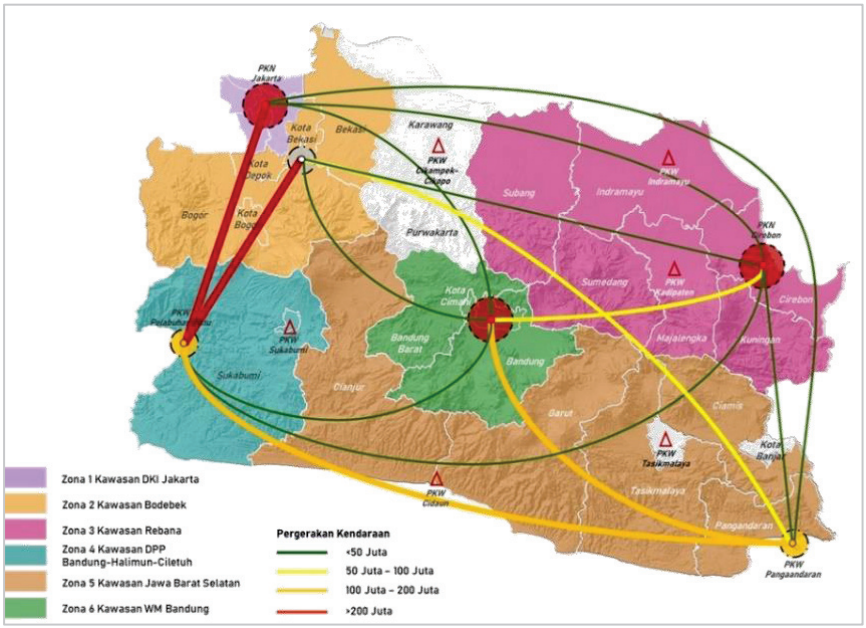
No	Kawasan Strategis		Jarak Tempuh (km)	Waktu Tempuh (jam)	Kecepatan (km/jam)
	DTW Tujuan	Dari			
1	Tangkuban Perahu	Kota Bandung	25	1,5	16,7
2	Ciwidey	Kota Bandung	35	1,5	23,3
3	Tasikmalaya	Kota Bandung	120	3,5	34,3
4	Pangandaran	Kota Bandung	210	2,5	84
5	Halimun	Jakarta	95	2,5	38
6	Pelabuhan Ratu	Jakarta	135	3,5	38,6
7	Gede-Pangrango	Jakarta	80	2	40
8	Bandung	Jakarta	150	2,5	60

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Waktu tempuh menuju DTW dari 2 Wilayah Metropolitan yang memiliki bangkitan pergerakan tinggi sangat bervariasi. Untuk DTW di sekitar kawasan perkotaan relatif mudah terjangkau karena ketersediaan jalan tol dapat mempersingkat waktu tempuh untuk jarak perjalanan yang lebih jauh. DTW yang berada di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan waktu tempuh lebih lama karena terbatasnya akses.

Secara internal Jawa Barat, pergerakan terbesar berada pada hubungan antara kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Barat. wilayah Jabodetabek dan Cekungan bandung memberikan porsi bangkitan dan tarikan terbesar terutama antara kota inti dan kota sekitar yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan. Bangkitan dari kegiatan pariwisata juga didukung oleh keberadaan pangsa pasar wisatawan terbesar yang berada di Jabodetabek dan Cekungan Bandung. Wilayah jabodetabek memiliki tujuan pergerakan wisatawan terbesar menuju KSPN Puncak-Gede Pangrango, KSPN Halimun-Salak, KPPN Pelabuhan Ratu, serta KSPN Bandung Kota. Sedangkan wilayah Cekungan Bandung memiliki tujuan pergerakan wisatawan terbesar menuju KSPN Ciwidey, KSPN Tangkuban Perahu, KSPN Pangandaran, KPPN Ciwidey, dan KPPN Pangandaran.

Wilayah Metropolitan Bodebek dan Cekungan Bandung memberikan bangkitan pergerakan terbesar, yang terdiri dari 3 kategori, yaitu rantai pasok industri, rantai pasok pertanian, dan jalur wisata. Rantai pasok industri berasal dari keterkaitan antara pusat industri pengolahan dengan pelabuhan sebagai outlet ekspor-impor, sedangkan rantai pasok pertanian berasal dari keterkaitan antara sentra pertanian dan pasar. Jalur wisata merupakan skenario pergerakan wisatawan berdasarkan destinasi unggulan. Pola pergerakan dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17 Pola Pergerakan Orang dan Barang Provinsi Jawa Barat
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2021

Berdasarkan analisis data Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN), terdapat total pergerakan 2,7 milyar pergerakan pertahun di Provinsi Jawa Barat. Pergerakan terbesar berasal dari wilayah Bodebek dengan total pergerakan 1,8 miliar pergerakan per tahun, diikuti oleh wilayah Cekungan Bandung dengan total pergerakan 465 juta pergerakan per tahun. Pada sektor pertanian, komoditas utama adalah beras dengan produksi 4,13 juta ton. Ekspor beras terbesar Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk Provinsi Jawa Tengah (969 ribu ton), DKI Jakarta (637 ribu ton), Banten (544 ribu ton), dan Jawa Timur (481 ribu ton). Pada sektor industri, Provinsi Jawa Barat mengirimkan hasil industri terutama otomotif, elektronik, telekomunikasi, tekstil, serta makanan dan minuman dari industri yang berada di wilayah utara Provinsi Jawa Barat ke provinsi lain.

Hubungan antara pasar dan destinasi serta antara pusat produksi dan outlet ekspor mengikuti jalur backbone nasional yang dilayani oleh jalan nasional dan jalan tol serta jalur kereta api. Untuk akses pariwisata, seluruh kota-kota besar di Jawa Barat sudah terlayani oleh jaringan kereta api dan jalan tol. Sedangkan untuk destinasi unggulan sudah terlayani dengan akses jalan nasional. Akses dari kawasan industri menuju outlet pelabuhan dan bandara sudah didukung dengan adanya jalan tol dengan pelayanan cukup baik. Sementara itu, akses dari pusat produksi menuju konsumen dan pusat produksi sudah didukung sebagian dengan jalan nasional, dimana sebagian masih didukung oleh jalan kabupaten dengan kapasitas yang masih di bawah standar.

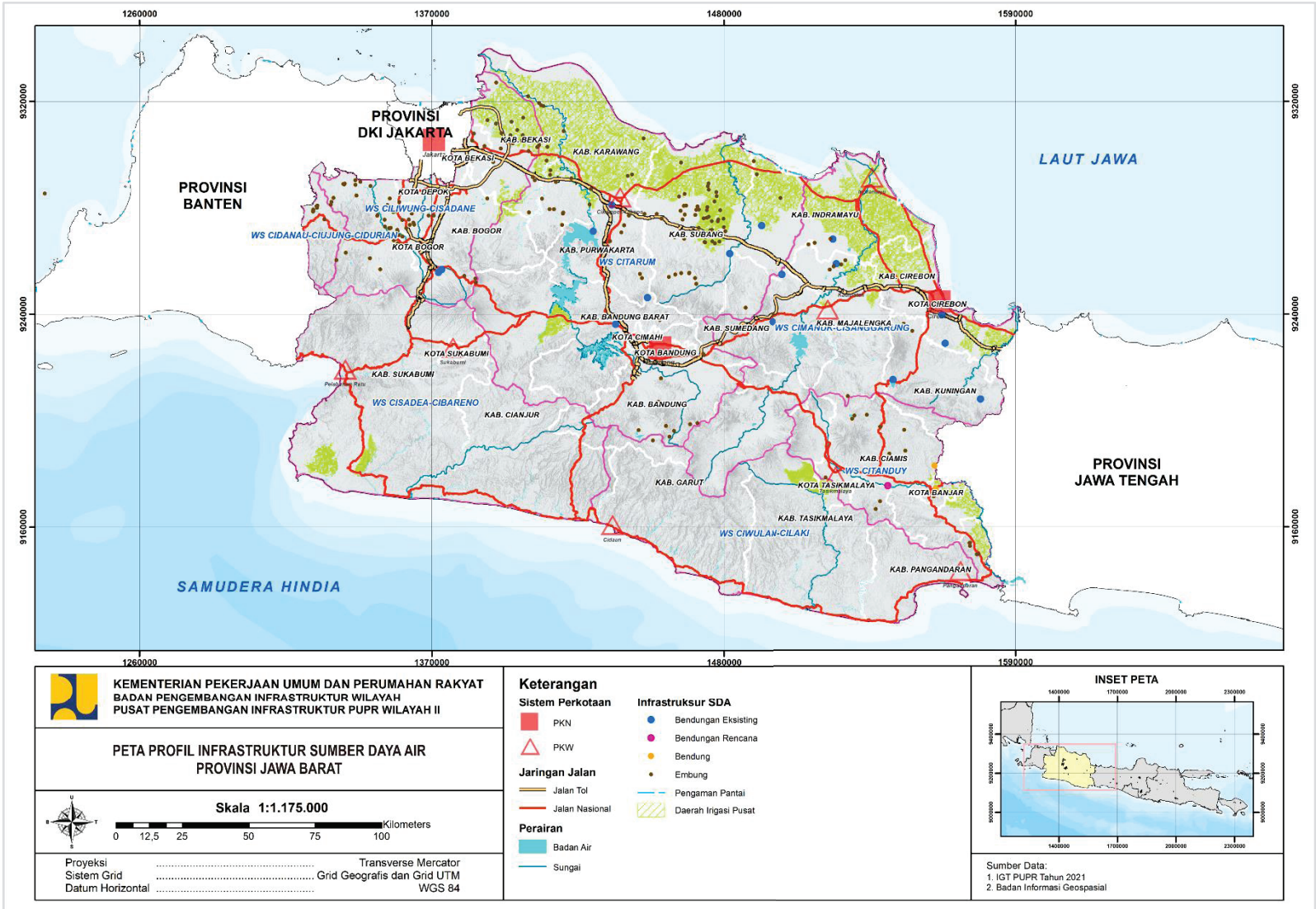
BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Profil dan kinerja infrastruktur mendeskripsikan kondisi infrastruktur didang PUPR dan non-PUPR di Provinsi Jawa Barat. Pembahasan infrastruktur bidang PUPR meliputi infrastruktur sumber daya air (SDA), infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan infrastruktur perumahan. Bidang non-PUPR terdiri dari infrastruktur perhubungan, energi, dan jaringan telekomunikasi. Profil dan kinerja dilihat berdasarkan kondisi terkini secara fisik, manfaat pelayanan yang diberikan, dan gap terhadap standar pelayanan yang diharapkan. Profil dan kinerja ini kemudian menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis serta analisis kebutuhan infrastruktur.

4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Kegiatan Pengelolaan SDA meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Sumber Daya Air. Pengembangan infrastruktur SDA dilakukan melalui pembangunan infrastruktur penyedia air baku yang terdiri dari embung, bendung, bendungan, danau, situ, serta infrastruktur penampung lainnya. Sementara itu, pengendalian daya rusak air dapat dilakukan melalui pembangunan tanggul, pompa, kolam retensi, bendungan, dan bangunan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan banjir, lahar, serta abrasi sehingga berkurangnya risiko bencana pada manusia.

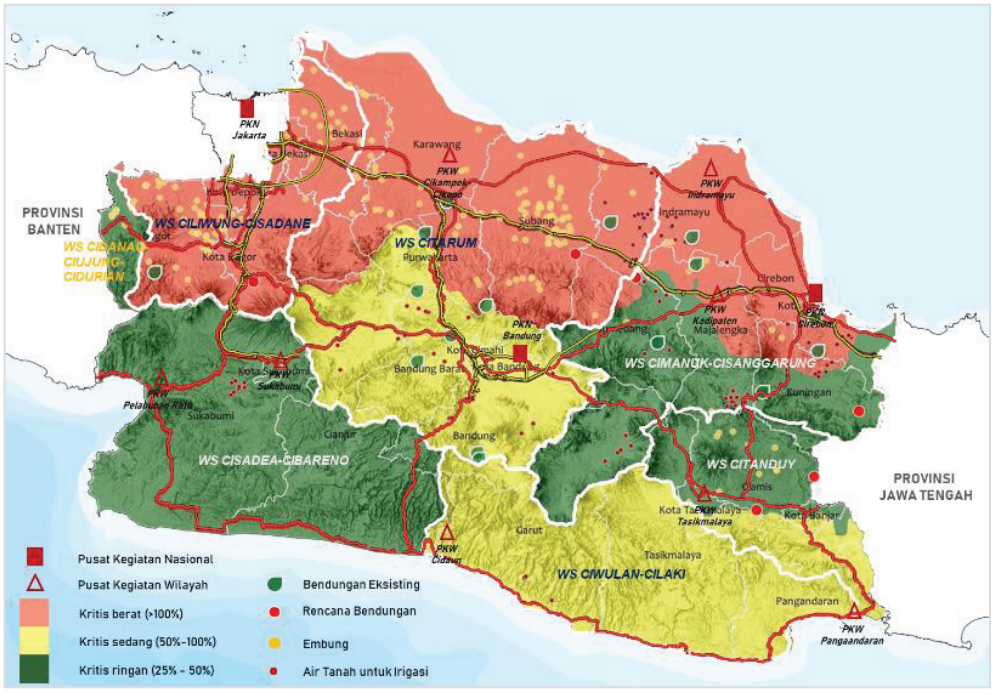
Pengelolaan SDA di Provinsi Jawa Barat didukung dengan keberadaan 4 (empat) wilayah sungai strategis nasional yaitu WS Ciliwung-Cisadane, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Citanduy, dan WS Ciujung-Cidanau-Cidurian yang memberikan ketersediaan air baku wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Jumlah infrastruktur SDA yang sudah beroperasi sebanyak 20 bendungan, 44 bendung, 30 daerah irigasi permukaan, 128 danau, 61 embung, 68 intake sungai, 41 lokasi pengaman pantai, dan 183 situ. Infrastruktur SDA, khususnya bendungan terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah Bendungan Jatiluhur, Bendungan Jatigede, Bendungan Saguling, dan Bendungan Kuningan yang berfungsi sebagai penyedia air baku, air irigasi, dan penghasil listrik tenaga air. Persebaran infrastruktur SDA seperti pada Peta 4.1.



Peta 4.1 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

4.1.1. Infrastruktur Penyediaan Air Baku

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan kebutuhan air tertinggi kedua se-Pulau Jawa dengan total kebutuhan 33 ribu m^3/tahun (total ketersediaan air 48 ribu m^3/tahun). Meskipun didukung infrastruktur penyedia air baku cukup banyak, wilayah utara Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat penggunaan air kategori kritis berat (penggunaan air diatas 100%) karena menjadi pusat industri dan permukiman berskala besar. Selain itu, terdapat 210 embung yang berfungsi sebagai sumber air baku bagi kawasan permukiman dan pertanian terutama pada wilayah dengan keterbatasan jaringan air baku. Indeks penggunaan air di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Indeks Penggunaan Air Provinsi Jawa Barat
Sumber: SISDA diolah BPIW, 2022

Provinsi Jawa Barat dilayani oleh infrastruktur penyedia air baku berupa bendungan dan situ yang dapat digunakan untuk menyediakan air irigasi, air baku domestik, serta pembangkit listrik. Kondisi infrastruktur penyedia air baku dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Infrastruktur Bendungan di Provinsi Jawa Barat

No	Nama Bendungan	Nama WS	Kab/Kota	Irigasi (Ha)	Volume (m^3)	Status
1	Cileunca	Citarum	Bogor	-	9.890.000	Eksiting
2	Cipancuh	Citarum	Indramayu	6.400	6.000.000	Eksiting
3	Cipanunjang	Citarum	Bandung	-	8.000.000	Eksiting

No	Nama Bendungan	Nama WS	Kab/Kota	Irigasi (Ha)	Volume (m^3)	Status
4	Cirata	Citarum	Purakarta	-	2.165.000	Eksiting
5	Darma	Cimanuk-Cisanggarung	Kuningan	22.060	37.900.000	Eksiting
6	Jatigede	Cimanuk-Cisanggarung	Sumedang	90.000	979.500.000	Eksiting
7	Jatiluhur/ Djuanda	Citarum	Purwakarta	227.062	1.000.000.000	Eksiting
8	Pongkor	Cimanuk-Cisanggarung	Bogor	-	588.306	Eksiting
9	Saguling	Citarum	Bandung Barat	-	875.000.000	Eksiting
10	Situ Bolang	Cimanuk-Cisanggarung	Indramayu	365	1.237.705	Eksiting
11	Situ Ciburuy	Citarum	Bandung	137	2.580.000	Eksiting
12	Situ Kamojing	Citarum	Karawang	655	2.358.000	Eksiting
13	Situ Lembang	Citarum	Bandung	0	337.000	Eksiting
14	Situ Patok	Cimanuk-Cisanggarung	Cirebon	3.000	14.000.000	Eksiting
15	Ranca Beureum	Cimanuk-Cisanggarung	Majalengka	188		Eksiting
16	Situ Sedong	Cimanuk-Cisanggarung	Cirebon	629	2.100.000	Eksiting
17	Ciawi	Ciliwung- Cisadane	Bogor	-	6.050.000	Eksiting
18	Sukamahi	Ciliwung- Cisadane	Bogor	-	1.680.000	Eksiting
19	Sadawarna	Citarum	Subang	4.284	6.794.000	Eksiting
20	Cipanas	Cimanuk-Cisanggarung	Majalengka	6.120	250.810.000	Eksiting
21	Kuningan	Cimanuk-Cisanggarung	Kuningan	3.000	25.955.000	Eksiting
22	Leuwikeris	Citanduy	Ciamis	6.219	81.440.000	2024
22	Cibeet	Citarum	Bogor	1.037	92.0129.984	*On going*
23	Cijurey	Citarum	Bogor	2.047	801.800	*On going*

Sumber: SISDA diolah BPIW, 2022

4.1.2. Infrastruktur Penyediaan Irigasi

Luas areal sawah di Provinsi Jawa Barat adalah 1.086.242 Ha, sedangkan luas area sawah dengan status LP2B adalah 925.549,659 Ha. Luas lahan LP2B yang belum terlayani daerah irigasi di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 281.476,74 Ha atau 30% dari luas lahan LP2B Jawa Barat. Terdapat 19 daerah irigasi (DI) kewenangan nasional di Provinsi Jawa Barat dengan luas mencapai 100.600 Ha, terutama tersebar di Kab Indramayu, Kab Subang, dan Kab Majalengka. Adapun 5.011 DI kewenangan kota/kabupaten dengan luas 346.920 Ha tersebar terutama di Kab. Sukabumi, Kab. Tasimalaya, dan Kab. Garut. Rincian luasan irigasi pusat Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten	Nama DI	Luas (ha)
Kota Banjar	DI Bantarheulang	482,94
Ciamis	DI Bantarheulang	405,41
Cianjur	DI Cihea	5.131,23
Sukabumi	DI Cikarangeusan	1.694,63
Cirebon	DI Cikeusik	5.812,52

Kabupaten	Nama DI	Luas (ha)
Tasikmalaya	DI Cikunten I	3.019,23
Kota Tasikmalaya	DI Cikunten I	0,02
Kota Tasikmalaya	DI Cikunten II	2.107,97
Tasikmalaya	DI Cikunten II	1.171,38
Subang	DI Cileleuy	4.397,38
Sukabumi	DI Ciletuh	3.632,38
Bogor	DI Cipamingkis	1.233,13
Indramayu	DI Cipanas II	1.822,91
Indramayu	DI Cipancuh	7.806,21
Majalengka	DI Ciwaringin	3.248,24
Cirebon	DI Ciwaringin	1.259,86
Indramayu	DI Ciwaringin	214,33
Karawang	DI Jatiluhur	94.206,43
Bekasi	DI Jatiluhur	47.155,12
Indramayu	DI Jatiluhur	22.441,18
Subang	DI Jatiluhur	18.625,61
Subang	DI Jatiluhur	13.872,24
Subang	DI Jatiluhur	12.900,00
Subang	DI Jatiluhur	9.835,06
Kota Bekasi	DI Jatiluhur	0,12
Majalengka	DI Kamun	3.192,07
Ciamis	DI Lakbok Utara	4.773,74
Kota Banjar	DI Lakbok Utara	1.403,15
Subang	DI Leuwinangka	3.425,74
Pangandaran	DI Manganti	4.984,27
Ciamis	DI Manganti	321,03
Indramayu	DI Rentang	60.026,19
Cirebon	DI Rentang	20.358,05
Majalengka	DI Rentang	634,03
Cirebon	DI Seuseupan	4.011,02
Kuningan	DI Seuseupan	0,66

Sumber: SISDA diolah BPIW, 2022

Daerah irigasi kewenangan pusat dengan cakupan layanan terbesar di Jawa Barat adalah DI Jatiluhur dan DI Rentang, dimana memiliki sumber air baku yang berasal dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Jatigede. Daerah irigasi Jatiluhur mengairi sawah terutama di Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Indramayu dan Kab Subang. Daerah irigasi terbesar berikutnya adalah DI Rentang mengairi sawah di sekitar Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, dan Kab. Majalengka. Selain DI pusat, terdapat 75.291 Ha DI Provinsi dan 201.836 Ha DI Kabupaten.

4.1.3. Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengendalian daya rusak air dimaksudkan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, terpelihara dan berkelanjutan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem yang harmonis dan seimbang.

Adapun lingkup kegiatan pengendalian daya rusak air meliputi kegiatan pencegahan, Penanggulangan dan pemulihan Kawasan beresiko banjir rob terutama di wilayah pesisir utara Jawa Barat di Kabupaten sudah mendapatkan dukungan pengaman pantai yang berada di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon.

Tabel 4.3 Infrastruktur Pengaman Pantai di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten	Pengaman Pantai	Vol	Kondisi
1	Indramayu	Pemecah Gelombang Losarang	2.630	Berfungsi
2	Indramayu	Jetty (Kanan+Kiri) Pantai Karangsong	1.500	Berfungsi
3	Indramayu	Pemecah Gelombang (Limbangan - Juntinyuat)	550	Berfungsi
4	Indramayu	Jetty (Kiri) Pantai Lombang/S. Kamal	220	Berfungsi
5	Indramayu	Jetty (Kanan) Pantai Lombang/S. Kamal	220	Berfungsi
6	Indramayu	Revetment Pantai Lombang	330	Berfungsi
7	Indramayu	Pemecah Gelombang Pantai Tirtamaya	380	Berfungsi
8	Indramayu	Jetty (Kiri) Pantai Glayem	200	Berfungsi
9	Indramayu	Jetty (Kanan) Pantai Glayem	240	Berfungsi
10	Indramayu	Breakwater Krowongan	240	Berfungsi
11	Indramayu	Jetty (Kanan + Kiri) Pantai Dadap/S. Kamal	160	Berfungsi
12	Indramayu	Dermaga Pelabuhan Pantai Dadap/S. Kamal	640	Berfungsi
13	Indramayu	Pemecah Gelombang - Dadap Juntinyuat	1.800	Berfungsi
14	Indramayu	Pemecah Gelombang Krangkeng	1.500	Berfungsi
15	Cirebon	Jetty (Kanan + Kiri) Bungko Lor/S. Kumpul Kuista	390	Berfungsi
16	Cirebon	Jetty (Kanan + Kiri) Bungko/S. Ciwaringin	1.000	Berfungsi
17	Cirebon	Pemecah Gelombang Kesenden	1.200	Berfungsi
18	Cirebon	Pemecah Gelombang Pangenan	4.900	Berfungsi
19	Cirebon	Jetty Kiri Gebang	370	Berfungsi
20	Cirebon	Jetty (Kanan + Kiri) Playangan	278	Berfungsi

Sumber: SISDA diolah BPIW, 2022

Kawasan risiko banjir tinggi berada di sebagian besar pesisir utara diantaranya Kab. Bekasi (WS Ciliwung-Cisadane), Karawang, Subang (WS Citarum), Cirebon, dan Kota Cirebon (WS Cimanuk-Cisanggarung); wilayah metropolitan Bandung (WS Citarum); serta di wilayah selatan pada Pangandaran dan Kota Banjar (WS Citanduy). Luas risiko banjir berdasarkan WS yaitu WS Cilicis seluas 138.384 Ha sama dengan 26% dari luas wilayah sungai, WS Cimanuk seluas 277.429 Ha sama dengan 30% dari luas wilayah sungai, Sungai Citanduy seluas 277.429 Ha sama dengan 6% dari luas wilayah sungai, dan WS Citarum seluas 280.975 Ha sama dengan 32% luas wilayah sungai. Kawasan risiko banjir sedang: Kab Indramayu (WS Citarum dan WS Cimanuk-Cisanggarung), Kab. Ciamis (WS Citanduy), dan Kab. Pangandaran (WS Ciwulan-Cilaki). Jumlah penduduk terkena dampak risiko banjir sebanyak 14,5 juta jiwa, 50% berada di pesisir utara Jawa Barat.

Tabel 4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur SDA Prioritas Provinsi Jawa Barat

No	Program/ Kegiatan	Status	Volume (m3)		Fungsi		Permasalahan
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	Bendungan Jatigede	Terbangun (2014)	979.500.000	976.000.000	– Direncanakan untuk mengairi DI. Rentang seluas 3 87.840 ha; – Direncanakan sebagai sumber air baku sebesar 3.500 lt/dtk; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 1.161 lt/dtk di Kabupaten Indramayu; – Direncanakan memberikan layanan *supply* listrik kepada kawasan Rebana.	– Telah digunakan untuk mengairi DI. Rentang seluas 3 87.840 ha; – Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 1.161 lt/dtk di Kabupaten Indramayu.	– Penyediaan layanan listrik tenaga air (PLTA) sebesar 110 MW belum terlaksana karena saat ini PT. PLN Indonesia Power sebagai pengelola sedang dalam tahap pembangunan power waterway; – Penyediaan air baku belum mampu memenuhi kebutuhan air baku karena intake tahap I sebesar 2.000 liter/detik yang sudah terbangun masih dalam tahap pembebasan lahan untuk IPA. Sedangkan intake tahap II akan dibangun jika IPA tahap I sudah optimal;
2	Terowongan Air Nanjung	Terbangun (2019)	Panjang 230 m (2 *tunnel*) Diameter 8 m	Panjang 230 m (2 *tunnel*) Diameter 8 m	– Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 44.280 lt/dtk di Kawasan Cekungan Bandung.	– Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 44.280 lt/dtk di Kawasan Cekungan Bandung.	– Daerah Baleendah masih mengalami fenomena banjir setelah terowongan nanjung dibangun. Hal ini diakibatkan karena daerah tersebut memang bertipe area rawa yang alaminya merupakan tempat air berkumpul
3	Bendungan Kuningan	Terbangun (2020)	25.960.000	25.960.000	– Direncanakan untuk mengairi irigasi seluas 3 9.145 ha; – Direncanakan sebagai sumber air baku sebesar 300 lt/dtk; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 419,8 m3/dtk; – Direncanakan memberikan layanan *supply* listrik sebesar 0,5 MW.	– Telah digunakan untuk mengairi DI. Rentang seluas 3 3.000 ha; – Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit menjadi 419,8 m3/dtk di sepanjang Sungai Cisanggarung; – Penyedia air baku untuk 3 Kecamatan sebesar 100 lt/dtk (target 300 lt/dtk).	– Penyediaan layanan listrik tenaga minihidro (PLTM) sebesar 0,5 MW belum terlaksana karena menunggu pembangunan pompa air; – Target pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 300 liter/detik baru tercapai 100 liter/detik karena saat ini sedang pembangunan intake air baku tahap II sebesar 200 liter/detik yang direncanakan selesai pada tahun 2025; – Belum maksimalnya luas pelayanan daerah irigasi dikarenakan belum beroperasinya

							Bendung Cileuweng baru (dibangun tahun 2025) dan Bendung Cibendung (tahap rehabilitasi).
6	Bendungan Sadawarna	Terbangun (2022)	70.800.000	70.800.000	– Direncanakan mengairi irigasi 3 4.500 ha di Kabupaten Subang dan Indramayu; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit sebesar 26,9 m3/dtk di Kabupaten Subang, Sumedang, dan Indramayu – Direncanakan sebagai penyedia air baku untuk 3 Kecamatan sebesar 100 lt/dtk (target 300 lt/dtk).	– Telah digunakan untuk mengairi irigasi 3 4.500 ha di Kabupaten Subang dan Indramayu; – Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit sebesar 26,9 m3/dtk di Kabupaten Subang, Sumedang, dan Indramayu – Penyedia air baku untuk 3 Kecamatan sebesar 100 lt/dtk (target 300 lt/dtk).	– Proses impounding bendungan menyebabkan salah satu jalan akses terpendek yang biasa dilalui masyarakat tergenang air. BBWS Cimanuk-Cisanggarung merencanakan jalan lingkar bendungan sebagai jalan akses pengganti untuk masyarakat, namun hingga saat ini pembangunan jalan tersebut masih berproses; – Biaya realisasi yang lebih besar karena ada permasalahan pembebasan lahan; – Agar reduksi banjir dapat terlaksana dengan optimal diperlukan normalisasi dan penghijauan di sekitar Sungai Cipunagara terutama pada kawasan bantaran sungai sebagai sarana pengaliran
7	Sudetan (Floodway) Cisangkuy	Terbangun (2020)	5,2 km	5,2 km	– Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 215 m3/dtk di Kawasan Cekungan Bandung.	– Sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit 215 m3/dtk di Kawasan Cekungan Bandung.	– Daerah Baleendah masih mengalami fenomena banjir setelah Floodway Cisangkuy dibangun, akan tetapi waktu genangan banjir berkurang menjadi kurang dari 7 jam; – Belum didukung dengan normalisasi drainase perkotaan yang optimal.
8	Bendungan Leuwikeris	2016 (*on going*)	81.440.000	-	– Direncanakan untuk mengairi DI. Lakbok Utara 3 6.600 ha di Kabupaten Ciamis dan DI. Manganti 3 6.600 di Kota Cilacap; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit	–	–

					sebesar 59,68 m3/dtk di Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Ciamis; – Direncanakan sebagai penyedia air baku sebesar 845 liter/detik untuk Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis		
9	Bendungan Cipanas	2018 (*on going*)	250.810.000	-	– Direncanakan untuk mengairi DI. Cipanas, Cikawung, dan Cibunut sebesar 3 9.273 ha di Kabupaten Sumedang dan Indramayu; – Direncanakan sebagai pengendali banjir dengan mengurangi debit sebesar 488 m3/dtk di Kabupaten Indramayu; – Direncanakan sebagai penyedia air baku sebesar 650 liter/detik untuk Kawasan Industri di Kabupaten Sumedang dan air baku untuk Kecamatan Terisi (Kabupaten Indramayu) sebesar 200 lt/dtk.	–	–

Sumber: Berbagai Sumber, diolah BPIW, 2023

4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Provinsi Jawa Barat memiliki panjang Jalan Nasional 1.789,2 km dengan kondisi yang relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemantapan yang mencapai 98%, lebar rata-rata di atas standar nasional sebesar 10 meter, dan tingkat layanan baik dengan VCR < 0,7. Kondisi jaringan jalan tersebut didukung dengan jalan arteri primer sepanjang 1.583,28 km yang menghubungkan antar-PKN dan antara PKN dengan PKW. Total panjang jalan kolektor primer adalah 193.368 km yang menghubungkan PKN dan PKW dengan pusat kegiatan lainnya.

4.2.1. Infrastruktur Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan Provinsi Jawa Barat terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.789,2 km, jalan provinsi sepanjang 2.360,58 km, dan jalan kabupaten sepanjang 21.593,25 km. Wilayah dengan panjang jalan tertinggi berada di Kabupaten Bogor (1.953 km), Kabupaten Karawang (1.726 km), dan Kabupaten Sukabumi (1.716 km). Berdasarkan kewenangannya, jalan nasional terpanjang berada di Kabupaten Cianjur dengan panjang 217 km, jalan provinsi terpanjang berada di Kabupaten Garut dengan panjang 286 km, dan jalan kabupaten terpanjang berada di Kabupaten Bogor dengan panjang 1.698 km.

Meskipun secara kemantapan sangat baik (98%), tingkat pelayanan jalan di Provinsi Jawa Barat tergolong rendah akibat tingginya pergerakan logistik dan penduduk dalam melakukan aktivitas ekonominya. Dari total 254 ruas jalan nasional di Provinsi Jawa Barat, terdapat 74 ruas jalan nasional yang memiliki tingkat layanan rendah (VCR > 0,85). Hal tersebut disebabkan tingkat lalu lintas harian Provinsi Jawa Barat yang tertinggi secara nasional sejumlah 3,9 juta pergerakan per hari. Sebagian besar atau 70% dari total pergerakan logistik dan jalan berada di wilayah utara Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengakibatkan tingginya kepadatan jalan di wilayah utara. Jalan nasional yang memiliki tingkat pelayanan rendah (*Level of Service* F) di antaranya Puncak-Cianjur, Cikampek-Purwakarta-Kota Bandung, DKI-Bogor-Sukabumi, Bandung-Tasikmalaya, Kertajati-Cirebon, Cianjur-Padalarang, Jalan Perkotaan Bandung, Jalan Perkotaan Bogor, Jalan Perkotaan Cianjur, Jalan Perkotaan Cimahi, Jalan Perkotaan Bekasi, Jalan Perkotaan Karawang, dan Jalan Perkotaan Sukabumi.

Wilayah Jawa Barat Selatan yang memiliki tingkat kepadatan rendah sudah terlayani oleh jalan nasional sepanjang 417 km dengan kondisi 97% mantap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan ekonomi belum berkembang, wilayah selatan sudah didukung akses untuk membuka keterisolasian. Ruas jalan pantai selatan berada di Batas Provinsi Banten – Cisolok – Pelabuhan Ratu – Bagbagan – Kiaradua – Jp.

Kulon –Surade – Tegalbeleud – Sidangbarang – Cidaun – Cilaki – Rancabuaya – Cijayana – Sp. Cilateureun – Pamengpeuk Cikaengan – Cipatujah – Kelapagenep – Cimerak – Pangandaran – Batas Provinsi Jateng. Jalan Pansela menghubungkan PKW Pelabuhan Ratu, PKW Cidaun, dan PKW Pangandaran sebagai pusat pertumbuhan di Pantai Selatan Jawa Barat.

Selain jalan nasional, Provinsi Jawa Barat juga didukung dengan layanan jalan bebas hambatan, dimana Provinsi Jawa Barat memiliki panjang jalan tol beroperasi terpanjang di Indonesia sebesar 838 km hingga tahun 2024. Jalan tol yang sudah beroperasi di Jawa Barat dapat dilihat secara rinci pada Peta 4.2 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Ruas Tol sudah Beroperasi 2022 di Provinsi Jawa Barat

No	Ruas	Panjang (km)	Operasi
1	Jakarta–Cikampek	73	Sebelum 2022
2	Jakarta–Cikampek Elev.	38	Sebelum 2022
3	Cikampek–Palimanan	117	Sebelum 2022
4	Cikampek–Purwakarta–Padalarang	59	Sebelum 2022
5	Soreang–Pasir Koja	8	Sebelum 2022
6	Padalarang–Cileunyi	64	Sebelum 2022
7	Jakarta–Bogor–Ciawi	59	Sebelum 2022
8	Ciawi–Sukabumi (seksi 1)	54	Sebelum 2022
9	Bogor Ring Road (seksi 1,2,3)	9	Sebelum 2022
10	Akses Tj Priok	11	Sebelum 2022
11	Cimanggis–Cibitung (seksi 1)	3,17	Sebelum 2022
12	Cibitung–Cilincing (seksi 1)	2,65	Sebelum 2022
13	Jakarta–Bogor–Ciawi	59	Sebelum 2022
14	Cileunyi–Sumedang–Dawuan	62,48	2022
15	Cibitung–Cilincing	31,73	2022
16	Cinere–Jagorawi (seksi 3)	5,5	2022
17	Ciawi–Sukabumi (seksi 2)	11,9	2022
18	Jakarta–Cikampek II Selatan	27,85	2022
19	Depok–Antasari (seksi 3-4)	15,9	2024
20	Cimanggis–Cibitung (seksi 2)	23,01	2024
21	Gedebage–Tasikmalaya	95,25	2024
22	Akses Patimban	37,05	2024
23	Bogor Ring Road (seksi 3b)	1,5	2024
24	Jakarta–Cikampek II Selatan (paket II)	24,85	2024

Sumber: SIGI PUPR diolah BPIW, 2022

Pembangunan jaringan jalan tol disusun berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah yang mengacu pada sistem transportasi nasional dan terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional serta kebijakan perencanaan jalan tol yang terdiri atas ruas-ruas jalan tol yang berbentuk koridor. Ruas-ruas jalan tol pada Tabel 4.5 sebagian besar dibangun untuk mengurangi beban jalan nasional maupun jalan tol eksisting pada kawasan metropolitan. Selain itu juga, terdapat jaringan jalan tol yang dibangun untuk menghubungkan dan sebagai akses logistik ke pelabuhan baru, yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Ruas Tol Akan Beroperasi di Provinsi Jawa Barat

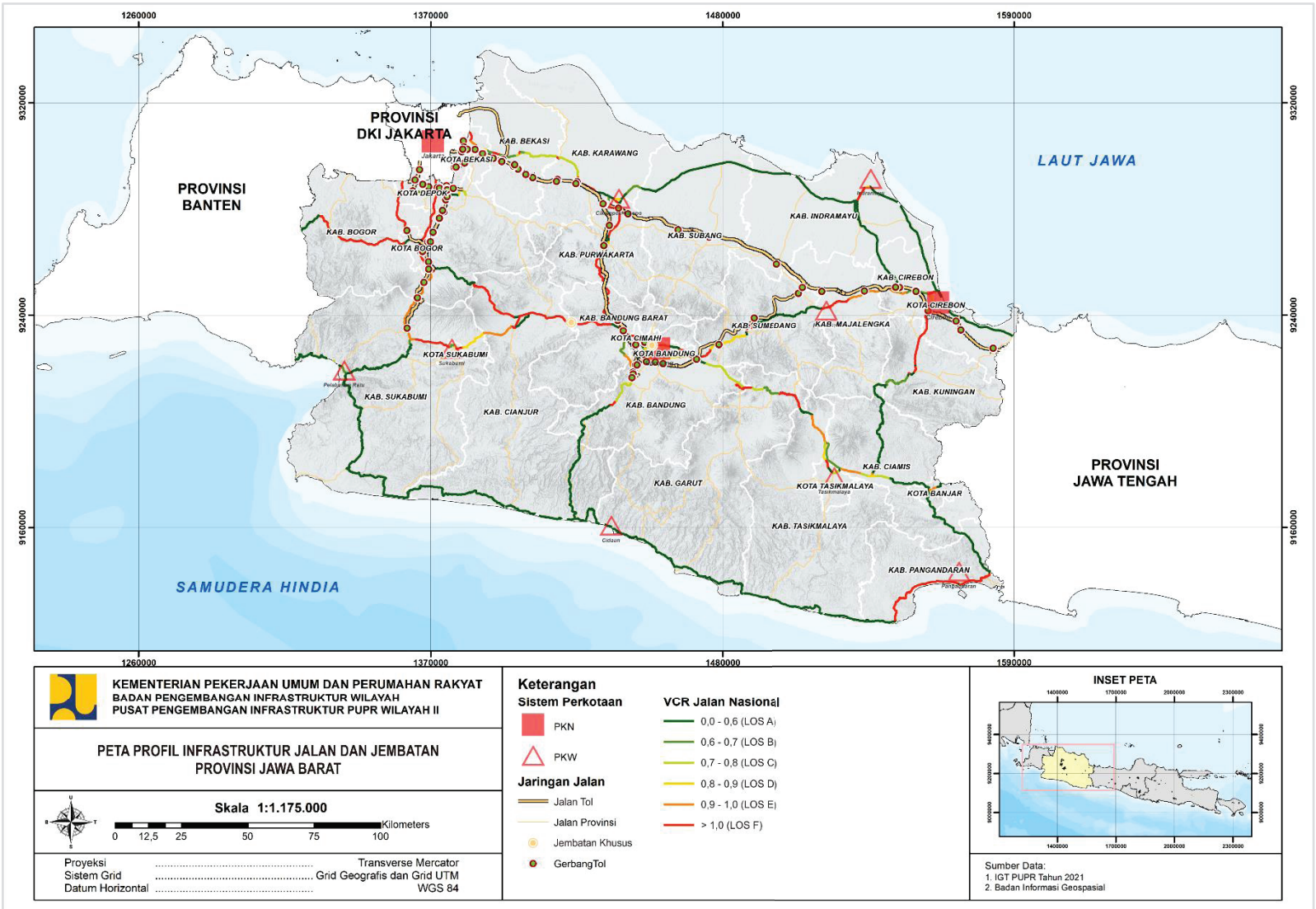
No	Ruas	Panjang (km)	Tahun Operasi
1	Cileunyi–Sumedang–Dawuan	62,48	2022
2	Cibitung–Cilincing	31,73	2022
3	Cinere–Jagorawi (seksi 3)	5,5	2022
4	Ciawi–Sukabumi (seksi 2)	11,9	2022
5	Jakarta–Cikampek II Selatan	27,85	2022
6	Depok–Antasari (seksi 3-4)	15,9	2024
7	Cimanggis–Cibitung (seksi 2)	23,01	2024
8	Gedebage–Tasikmalaya	95,25	2024
9	Akses Patimban	37,05	2024
10	Bogor Ring Road (seksi 3b)	1,5	2024
11	Jakarta–Cikampek II Selatan (paket II)	24,85	2024

Sumber: Rencana Umum Jalan Tol diolah BPIW, 2021.

4.2.2. Infrastruktur Jembatan

Infrastruktur jembatan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang berperan penting dalam memperlancar mobilitas dan efektivitas waktu tempuh pada akses yang terputus atau terpisah akibat kondisi geografis. Di Provinsi Jawa Barat, terdapat 848 unit jembatan pada jalan nasional, 71 unit jembatan gantung, dan 30 unit jembatan tol. Dari total jembatan pada jalan nasional, berdasarkan hasil survei tahun 2022 diketahui 7 jembatan dalam kondisi rusak berat, 92 jembatan dalam kondisi rusak ringan, dan sisanya dalam kondisi baik. Di samping kondisi jembatan, umur jembatan juga perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan pengguna jalan, dimana terdapat 539 jembatan yang sudah berumur di atas 30 tahun dan perlu diperbaharui.

Selain kondisi fisik jembatan, besaran lalu lintas harian dan kapasitas jalan nasional juga perlu diperhatikan, sehingga keberadaan jembatan tidak menjadi *bottleneck* bagi arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Terdapat 266 jembatan yang memiliki lebar di bawah 7 meter atau di bawah standar lebar jalan nasional. Selain itu, terdapat 55 unit jembatan yang merupakan bentang panjang untuk melewai sungai utama yang pemeliharaannya perlu diperhatikan karena membutuhkan penanganan khusus.



Peta 4.2 Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat

Tabel 4.7 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas Provinsi Jawa Barat

No	Program/ Kegiatan	Status	Volume (m3)		Fungsi		Permasalahan
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Terbangun (2023)	61,6	61,6	– Direncanakan untuk mendukung aksesibilitas menuju Bandara Kertajati dari Kawasan Cekungan Bandung	– Digunakan untuk mendukung aksesibilitas menuju Bandara Kertajati dari Kawasan Cekungan Bandung	– Pembangunan tol selesai pada waktu yang lebih lama dari perkiraan awal karena terhambat permasalahan pembebasan lahan
2	Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan	(*On going*)	64	-	– Direncanakan untuk mendukung kawasan industri, perumahan, dan pariwisata.	–	– Permasalahan yang dihadapi saat ini terkait pembebasan lahan.
3	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	(*On going*)	37,05	-	– Direncanakan untuk mendukung kawasan industri rebana menuju Pelabuhan Patimban (gerbang ekspor-impor Provinsi Jawa Barat)	–	– Permasalahan yang dihadapi saat ini terkait pembebasan lahan. – Pembangunan sempat terhambat karena dilakukannya ternder ulang akibat dari ketidaksesuaian dokumen.
4	Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Padalarang	(*On going*)	61	-	– Direncanakan untuk mendukung konektivitas Kawasan Selatan Jawa Barat yang berkembang di bidang pariwisata dan pertanian dengan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung sebagai penyumbang wisatawan terbanyak di Provinsi Jawa Barat.	–	– Pembangunan terhambat karena adanya pemutusan kontrak terhadap investor yang dinilai belum siap terkait pendanaan. Saat ini masih dalam proses lelang ulang.
5	Tol Gedebage-Tasik-Cilacap	(*On going*)	108,31	-	– Direncanakan untuk mendukung kawasan pertanian dan pariwisata di Kawasan Selatan Jawa Barat	–	– Sempat terhambatnya pelaksanaan pembangunan jalan tol karena adanya keterbatasan kapasitas BUJT dalam melaksanakan pembangunan;

Sumber: Berbagai Sumber, diolah BPIW, 2023

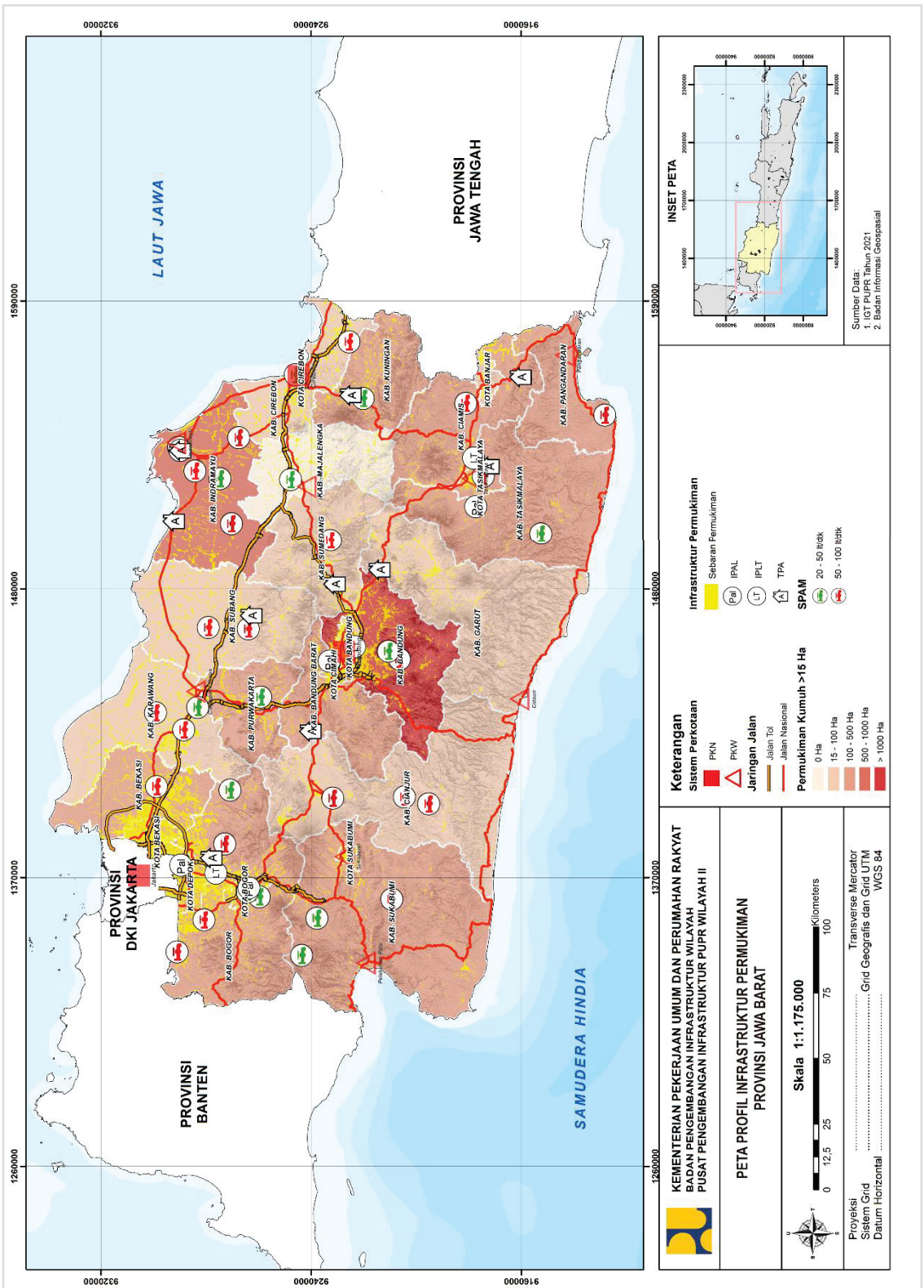
4.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi sebesar 49.935.858 (2020) dan tingkat pertumbuhan penduduk di atas rata-rata nasional sebesar 1,33% per tahun mengalami tekanan dalam penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Infrastruktur dasar yang sesuai dengan standar pelayanan minimal semakin penting untuk disediakan terutama pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti Kota Bandung (147 org/ha), Kota Cimahi (135 org/ha), dan Kota Bekasi (121 org/ha). Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi membutuhkan tingkat pelayanan minimal yang memadai karena rendahnya daya dukung lingkungan terutama untuk pengolahan limbah dan penyediaan air bersih.

Pada umumnya, infrastruktur permukiman (meliputi air minum, pengelohan limbah domestik, pengolahan sampah, dan penanganan permukiman kumuh) sudah melayani seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat pelayanan yang beragam. Seiring dengan persebaran kawasan permukiman, layanan infrastruktur permukiman di wilayah tengah-utara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah tengah-selatan yang kawasan permukimannya rendah. / Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan tingkat layanan infrastruktur dasar terendah.

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat layanan sanitasi layak terendah di Pulau Jawa dengan cakupan layanan hanya sebesar 74,02%. Tingkat pelayanan pengolahan persampahan masih di bawah standar pelayanan nasional, dimana hanya 35,67% timbulan sampah yang tertangani dan 46,53% sampah perkotaan yang tertangani. Timbulan sampah yang banyak tidak tertangani juga sebagai akibat dari tempat pembuangan akhir sampah regional yang sudah *overload,* sebagai contoh TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat yang melayani persampahan Kota Bandung dan sekitarnya. *Overload*-nya TPA Sarimukti hingga berakibat tercemarnya sungai yang berada di dekat TPA. Timbulan yang tidak ditimbun tanah atau masih *open dumping,* membuat air lindi sampah mengalir ke sungai dekat area TPA.

Jumlah kawasan kumuh perkotaan Provinsi Jawa Barat menempati posisi terluas kedua di Pulau Jawa, dengan jumlah hunian kumuh perkotaan mencapai 19,86% dari total rumah tangga. Kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar semakin tinggi pada wilayah dengan kepadatan permukiman tinggi, terutama di kawasan perkotaan Cekungan Bandung, Cirebon Raya, serta di 8 PKW yang berada di Cikampek, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Cidaun, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kadipaten. Profil dan kinerja infrastruktur permukiman di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Peta 4.3.

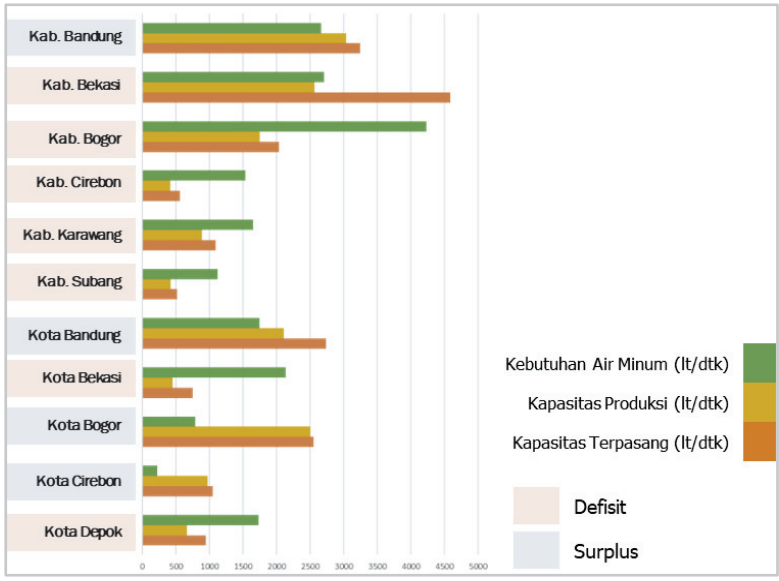


Peta 4.3 Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat

4.3.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Air Minum

Dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sebesar 49.935.858 orang, secara total terdapat kebutuhan air bersih sebesar 28,93 m^3/detik, dengan total produksi 18,1 4 m^3/detik. Kebutuhan air minum perpipaan terutama diprioritaskan pada kawasan perkotaan dimana masih terdapat 5% penduduk yang belum memilki layanan air minum layak. Berdasarkan gap antara kapasitas penyediaan air minum dan tingkat distribusi air minum, terdapat *idle capacity* sistem penyediaan air minum (SPAM) sebesar 4,9 m^3/detik yang apabila dimanfaatkan secara optimal, maka kawasan perkotaan hanya perlu menambah kapasitas instalasi pengolahan air sebesar 10,78 m^3/detik agar dapat mencapai standar pelayanan minimal perkotaan.

Selain itu, mempertimbangkan bahwa kawasan perkotaan sudah mengalami defisit ketersediaan air, kegiatan ekonomi lainnya untuk sektor industri dan komersial juga perlu didukung air perpipaan. Hal ini karena masih tingginya penggunaan air tanah oleh pelaku usaha yang akan meningkatkan risiko penurunan muka tanah yang mencapai 20 cm/tahun, terutama di Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Wilayah dengan kondisi kritis air berada di Kabupaten Karawang, Subang, Bogor, dan Bekasi.



Gambar 4.2 Tingkat Kebutuhan Air Minum Provinsi Jawa Barat
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Berdasarkan data kinerja PDAM Provinsi Jawa Barat, sebagian besar instalasi pengolahan air masih memiliki *idle capacity. Idle capacity* terbesar berada di Kabupaten Bekasi (1.202 L/detik), Kota Bandung (657 L/detik), Kabupaten Sumedang (650 L/detik), Kabupaten

Purwakarta (397 L/detik), Kota Bekasi (351 L/detik), Kabupaten Bogor (328 L/detik), Kabupaten Cianjur (321 L/detik), Kabupaten Karawang (307 L/detik), Kabupaten Sukabumi (271 L/detik), Kabupaten Kuningan (214 L/detik), dan Kabupaten Ciamis (189 L/detik).

4.3.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi meliputi infrastruktur persampahan (TPA Regional) dan pengolahan limbah berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

A. Infrastruktur Persampahan

Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 49.935.858 jiwa dapat menghasilkan timbulan sampah sebesar 55 juta m^3/tahun. Timbulan sampah terbesar berada di Kabupaten Bogor (6,8 juta m^3/tahun), Kabupaten Bekasi (4,4 juta m^3/tahun), Kabupaten Bandung (4,2 juta m^3/tahun), Kabupaten Cirebon (2,9 juta m^3/tahun), Kota Depok (2,8 juta m^3/tahun). Timbulan sampah dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4.8 Kinerja Layanan Sampah Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Timbulan m^3	Terlayani
1	Bogor	6.813.505	35,00 %
2	Bekasi	4.428.844	35,94 %
3	Bandung	4.263.846	62,40 %
4	Kota Banjar	3.453.004	76,45 %
5	Cirebon	2.906.767	16,45 %
6	Kota Depok	2.811.508	80,72 %
7	Karawang	2.754.878	25,00 %
8	Sukabumi	2.712.844	41,54 %
9	Indramayu	2.617.445	61,51 %
10	Cianjur	2.483.937	36,73 %
11	Kota Cimahi	2.438.251	77,09 %
12	Tasikmalaya	1.926.850	63,62 %
13	Garut	1.912.989	27,25 %
14	Bandung Barat	1.897.226	61,75 %
15	Subang	1.784.575	17,42 %
16	Majalengka	1.332.080	53,81 %
17	Ciamis	1.323.194	78,54 %
18	Sumedang	1.267.890	35,14 %
19	Kota Bekasi	1.252.055	59,04 %
20	Kuningan	1.197.444	65,17 %
21	Purwakarta	1.075.588	48,5 %
22	Kota Tasikmalaya	728.499	75,80 %
23	Kota Bogor	686.988	96,25 %
24	Pangandaran	442.087	2,89 %
25	Kota Sukabumi	364.925	99,86 %
26	Kota Cirebon	356.283	71,77 %
27	Kota Bandung	201.125	96,78 %

Sumber: SISPN, Open Data Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

Penanganan sampah domestik di Provinsi Jawa Barat sebesar 70%, lebih tinggi dari penanganan pelayanan sampah domestik nasional sebesar 60,63% (Bappenas, 2020). Tingkat sampah terkelola tertinggi berada di Kota Bandung (96,78%), Kota Bogor (96,25%), Kota Depok (83%), dan Kota Cimahi (79,21%). Sementara itu, tingkat pengelolaan persampahan terendah berada di Kabupaten Sumedang (30,83%), Kabupaten Garut (27,26%), Kabupaten Bandung Barat (21,44%), Kabupaten Bandung (18,14%), dan Kabupaten Cirebon (16,45%).

Rendahnya pengolahan sampah disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat, dimana dari total 43 TPA, hanya 21 TPA yang dikelola dengan baik. TPA Legok Nangka yang melayani Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, dan Kota Cimahi serta TPA Nambo yang melayani Kab. Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok saat ini belum beroperasi karena terkendala proses KPBU yang belum memiliki peminat. Jika kedua TPA ini beroperasi, kapasitas pengelolaan di Provinsi Jawa Barat akan meningkat, terutama di wilayah Cekungan bandung dengan peningkatan 1.853–2.131 ton/hari dan wilayah Bodebek dengan peningkatan 1.800 ton/hari.

Selain meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, kedua TPA ini juga akan meningkatkan kualitas lingkungan yang diakibatkan dari penggunaan sistem *waste to energy* melalui pengolahan berbasis Refused Derived Fuel (RDF). Dengan kapasitas TPA Legok Nangka dan Nambo, diharapkan pengolahan sampah dapat menghasilkan 500-600 ton RDF yang dapat dimanfaatkan oleh industri sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, akan terdapat produk olahan lainnya yang dapat bernilai ekonomi, seperti seperti kompos, bahan daur ulang, gas sintetik, minyak sintetik, dan biogas.

B. Infrastruktur Pengolahan Limbah

Penanganan limbah difokuskan pada peningkatan akses aman, terutama di kawasan perkotaan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan terutama di wilayah dengan kepadatan tinggi. Sanitasi aman merupakan sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga (sendiri), yang terhubung dengan *septic tank*. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Sementara itu, akses sanitasi layak merupakan sanitasi yang digunakan secara komunal dan sudah dilengkapi dengan kloset leher angsa dan terhubung dengan *septic tank.*

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat layanan sanitasi yang terendah di Pulau Jawa dengan tingkat sanitasi aman sebesar 7% dan tingkat sanitasi layak sebesar 74,02%. Wilayah perkotaan cenderung sudah memiliki tingkat sanitasi aman yang tinggi, seperti di Kota Bekasi

(24,18%), Kota Cirebon (24,11%), dan Kota Bandung (15,86%). Sementara itu, kawasan selatan Provinsi Jawa Barat cenderung memiliki tingkat sanitasi aman yang rendah seperti di Kabupaten Tasikmalaya (1,24%), Garut (1,55%), dan Bandung Barat (1,78%).

Untuk tingkat sanitasi layak, tingkat pelayanan yang tertinggi berada di wilayah Kota Bekasi (97,54%), Kota Depok (97,06%), Kota Cirebon (92,71%), Kabupaten Indramayu (89,75%), Kabupaten Sumedang (87,87%), dan Kabupaten Subang (85,82%). Sementara itu, tingkat pelayanan sanitasi terendah berada di Kabupaten Cianjur (58,52%), Kabupaten Tasikmalaya (49,35%), Kabupaten Garut (43,73%), dan Kota Sukabumi (39,64%). Tingkat sanitasi layak yang rendah ini disebabkan oleh jumlah layanan sanitasi komunal yang sedikit karena mayoritas sudah memiliki layanan sanitasi aman ataupun karena masih tingginya tingkat BABS pada kabupaten/kota tersebut. Kantong-kantong kemiskinan biasanya menjadi wilayah dengan tingkat sanitasi terendah. Kondisi kinerja infrastruktur sanitasi di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Kinerja IPLT di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Nama IPLT	Luas (ha)	Kapasitas (m^3)
1	Kota Bekasi	Bekasi	Sumur Batu	1,2	54
2	Kota Bogor	Bogor	Tegal Gundil	2,01	26
3	Kota Cirebon	Cirebon	Kesenden	7	80
4	Kota Depok	Depok	Kali Mulya	9,8	22
5	Kota Tasik	Tasikmalaya	Singkup	5	38
6	Kab. Majalengka	Majalengka	Kadipaten	2,5	40
7	Kab. Indramayu	Indramayu	Pecuk	-	-
8	Kab. Karawang	Karawang	Leuwi Sisir	1,5	11
9	Kab. Subang	Subang	Cibarolak	5	17
10	Kota Sukabumi	Sukabumi	Cikundul	2,2	26
11	Kab. Sukabumi	Pelabuhan Ratu	Cibadak	0,5	28
12	Kab. Cianjur	Cianjur	Bbk.Karet	2	23
13	Kab. Bandung	Soreang	Babakan	0,5	18
14	Kab. Bandung		Cibeet	0,7	28
15	Kab. Bogor	Cibinong		-	75
16	Kab. Bekasi	Kab. Bekasi	Muktiwari	-	75
17	Kota Bandung	Kota Bandung	Kompak (Strategis)	-	-

Sumber: SIGI PUPR, Bappeda Provinsi Jawa Barat diolah BPIW, 2022

4.3.3. Penanganan Kawasan Kumuh

Provinsi Jawa Barat memiliki luasan wilayah kumuh terbesar kedua di Pulau Jawa, yaitu seluas 5.794,76 ha. Luasan kumuh terbesar berada di Kabupaten Bandung seluas 1.457,45 ha, Kabupaten Bekasi seluas 443,34 ha, Kabupaten Indramayu seluas 673,52 ha, dan Kota Cirebon seluas 315,91 ha. Sementara itu, wilayah dengan luasan kumuh terkecil

berada di Kota Banjar seluas 20,60 ha, Kabupaten Cianjur seluas 34,40 ha, dan Kabupaten Subang seluas 36,90 ha.

Tabel 4.10 Penetapan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat

Kab/Kota	No. SK	Luas (ha)
Kota Banjar	650/Kpts.10.a-DCKTLH/2016	20,60
Kabupaten Cianjur	648/Kep.196-Tarkim/2014	34,40
Kabupaten Subang	663/Kep.418-Distarkimsih/2014, 30 Okt 2014	36,90
Kabupaten Garut	650/Kep.639-Bappeda/2014	42,51
Kabupaten Sumedang	NOMOR.660/KEP.196-CIPTARUM/2016	57,04
Kabupaten Karawang	640/Kep.532-Huk/2014	63,89
Kabupaten Cirebon	651.2/ Kep.632-DCKTR/2014	78,78
Kota Bandung	No. 663/Kep.544-Dispertasih/2014	91,83
Kabupaten Purwakarta	653.2/Kep705-DCKTR/2014	103,90
Kabupaten Bandung Barat	663/kep.77-DCKTR/2015	121,77
Kabupaten Sukabumi	Nomor 64 tahun 2014	131,80
Kota Depok	591/250/Kpts/Bapp/Huk/2015	132,72
Kota Sukabumi	Nomor 61 Tahun 2015	139,02
Kabupaten Kuningan	600/KPTS.397/DTRCK/2016	158,73
Kota Cimahi	653/Kep.68.PU/2015	176,76
Kabupaten Bogor	663/236/Kpts/Per-UU/2015	242,97
Kabupaten Tasikmalaya	648.11/Kep.283-Distarkim/2015	270,34
Kota Tasikmalaya	050.13/Kep.374.Bappeda/2014	276,17
Kabupaten Pangandaran	659/Kpts.87.C-Huk.Org Tahun 2014	295,30
Kota Cirebon	663/Kep.70-Bappeda/2015	315,91
Kabupaten Indramayu	648/Kep.81-DPKP2/2018	673,52
Kabupaten Bandung	No. 648/Kep.286-DisTarCip/2015	1.457,45
Kabupaten Ciamis	648/KPTS.501-HUK/2017	112,39
Kota Bogor	640.45-178.1 Tahun 2015	129,85
Kabupaten Bekasi	591/Kep.169 - Distarkim/2016	443,34
Kota Bekasi	591/Kep.169 - Distarkim/2016	186,87

Sumber: Ditjen Cipta Karya diolah BPIW, 2023

Kawasan kumuh banyak terdapat di sekitar Metropolitan Jabodetabek dan Cekungan Bandung karena tingginya kebutuhan permukiman yang mendukung aktivitas perkotaan, seperti industri dan jasa, yang tidak sebanding dengan ketersediaan perumahan layak. Salah satu kendala pemerintah dalam membantu kawasan kumuh adalah legalitas kepemilikan lahan. Tanpa adanya status kepemilikan lahan, maka bantuan pemerintah untuk penyediaan air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, dan aksesibilitas tidak bisa dialokasikan.

Tabel 4.11 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Prioritas Provinsi Jawa Barat

No	Program/ Kegiatan	Status	Volume (m3)		Fungsi		Permasalahan
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	SPAM Regional Jatigede	2023 (*On going*)	3.500	2.000	– Memberikan layanan air minum untuk Kabupaten Sumedang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon (Kawasan Rebana)	– Intake SPAM Jatigede I sebesar 2.000 lt/dtk sudah terbangun, namun air belum bisa dimanfaatkan dengan optimal karena saat ini masih dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan IPA. – Intake SPAM 1.500 lt/dtk dapat dilakukan pembangunan setelah SPAM Jatigede I dapat dimanfaatkan secara optimal.	– Intake SPAM Jatigede I sebesar 2.000 lt/dtk sudah terbangun, namun air belum bisa dimanfaatkan dengan optimal karena saat ini masih dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan IPA.

Sumber: Berbagai Sumber, diolah BPIW, 2023

4.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Infrastruktur perumahan meliputi permasalahan *backlog* perumahan dan rumah tidak layak huni yang saat ini masih menjadi permasalahan mendasar bagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

4.4.1. *Backlog*

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan kepemilikan rumah terendah kedua se-Pulau Jawa, setelah DKI Jakarta, dengan 82% penduduk tinggal di rumah milik (BPS, 2022). Sementara itu, kepemilikian rumah di pedesaan relatif lebih tinggi (92%) dibandingkan kepemilikan rumah di perkotaan (80%). Hal ini ditunjukkan dengan tercatatnya 1,85 juta keluarga yang belum memiliki rumah sendiri karena tingginya biaya hunian, terutama di perkotaan.

Wilayah dengan tingkat *backlog* tertinggi berada di Kabupaten Cirebon (30%), Kota Cirebon (26%), Kota Tasikmalaya (20%), Kabupaten Majalengka (19%), dan Kabupaten Bandung Barat (19%). Tingkat backlog yang tinggi ini berada di wilayah yang memiliki tingkat ekonomi relatif rendah. Dalam survei Penanganan Kemiskinan Ekstrem, sebagian besar warga yang tidak memiliki rumah memiliki kecenderungan menumpang ataupun tinggal pada bangunan temporer yang berada di tanah negara. Dalam survei tersebut, dipelajari bahwa keterbatasan ekonomi terjadi karena tingginya pengangguran musiman, yang disebabkan oleh jenis lapangan kerja yang bersifat musiman juga, seperti sektor pertanian dan perkebunan.

Tabel 4.12 *Backlog* Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga 2021	Backlog Kepemilikan 2021	Backlog Kepemilikan 2021 (%)
1	Bogor	1.362.226	166.273	12%
2	Sukabumi	742.642	109.268	15%
3	Cianjur	679.231	112.612	17%
4	Bandung	939.812	145.178	15%
5	Garut	650.096	105.337	16%
6	Tasikmalaya	524.460	80.365	15%
7	Ciamis	368.192	57.424	16%
8	Kuningan	301.470	20.663	7%
9	Cirebon	604.271	178.727	30%
10	Majalengka	387.399	75.186	19%
11	Sumedang	344.824	59.327	17%
12	Indramayu	538.578	95.559	18%
13	Subang	456.960	62.629	14%

No	Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga 2021	Backlog Kepemilikan 2021	Backlog Kepemilikan 2021 (%)
14	Purwakarta	264.847	35.560	13%
15	Karawang	659.659	80.926	12%
16	Bekasi	850.135	53.649	6%
17	Bandung Barat	475.931	91.697	19%
18	Pangandaran	127.204	13.377	11%
19	Kota Bogor	259.121	34.973	13%
20	Kota Sukabumi	89.263	14.991	17%
21	Kota Bandung	654.898	107.463	16%
22	Kota Cirebon	86.174	22.396	26%
23	Kota Bekasi	658.090	27.675	4%
24	Kota Depok	528.111	29.173	6%
25	Kota Cimahi	153.772	27.020	18%
26	Kota Tasikmalaya	187.530	36.675	20%
27	Kota Banjar	56.274	10.849	19%
Jawa Barat		12.951.170	1.854.972	14%

Sumber: Ditjen Perumahan diolah BPIW, 2023

4.4.2. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat RTLH terendah kedua di Pulau Jawa sebesar 1,5% dari total jumlah rumah tangga (158.718. rumah). Kualitas rumah layak dinilai berdasarkan aspek fisik, mental, dan sosial, yang terdiri dari kondisi lantai bukan tanah (98,6%), kondisi atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (99,09%), kondisi dinding terluas tembok dan kayu (94,58%), kondisi rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m^2 (81,97%), dan kondisi rata-rata luas lantai per kapita ≥ 8 m^2 (88,95%).

Secara jumlah, kondisi RTLH tertinggi berada di Kab. Indramayu (27.455 rumah), Kab. Tasikmalaya (16.829 rumah), Kota Tasikmalaya (10.233 rumah), Kota Bandung (10.232 rumah), dan Kab. Majalengka (9,964 rumah). Kondisi RTLH terendah berada di Kab. Bogor (34 rumah), Kota Bekasi (50 rumah), dan Kab. Cianjur (196 rumah). Indikator rumah layak tertinggi disumbangkan karena sudah memadainya kondisi sumber air layak dan luas lantai bukan tanah. Sedangkan indikator rumah tidak layak tertinggi disumbangkan karena rendahnya tingkat layananan sanitasi layak terutama di kawasan kumuh baik yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Tabel 4.13 RTLH Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	Jumlah RTLH	RTLH (%)
1	Bogor	1.362.226	34	0,0%
2	Sukabumi	742.642	5.411	0,7%
3	Cianjur	679.231	196	0,0%

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	Jumlah RTLH	RTLH (%)
4	Bandung	939.812	6.702	0,7%
5	Garut	650.096	6.288	1,0%
6	Tasikmalaya	524.460	16.829	3,2%
7	Ciamis	368.192	6.306	1,7%
8	Kuningan	301.470	3.200	1,1%
9	Cirebon	604.271	6.659	1,1%
10	Majalengka	387.399	9.964	2,6%
11	Sumedang	344.824	3.443	1,0%
12	Indramayu	538.578	27.445	5,1%
13	Subang	456.960	6.178	1,4%
14	Purwakarta	264.847	3.344	1,3%
15	Karawang	659.659	894	0,1%
16	Bekasi	850.135	5.907	0,7%
17	Bandung Barat	475.931	8.452	1,8%
18	Pangandaran	127.204	3.572	2,8%
19	Kota Bogor	259.121	3.252	1,3%
20	Kota Sukabumi	89.263	5.516	6,2%
21	Kota Bandung	654.898	10.232	1,6%
22	Kota Cirebon	86.174	4.362	5,1%
23	Kota Bekasi	658.090	50	0,0%
24	Kota Depok	528.111	3.749	6,4%
25	Kota Cimahi	153.772	277	0,2%
26	Kota Tasikmalaya	187.530	10.223	5,5%
27	Kota Banjar	56.274	213	0,4%
Jawa Barat		**12.951.170**	**188.698**	**1,5%**

Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

4.4.3. Rumah Khusus

Kementerian PUPR telah membangun rumah khusus di 79 lokasi dengan jumlah keseluruhan 631 unit. Akan tetapi, dalam pembahasan ini hanya rusus yang memiliki manfaat khusus sesuai dengan karakteristik pengembangan kawasan prioritas yang ada di Provinsi Jawa Barat tersebar di 9 lokasi dengan jumlah keseluruhan 416 unit yang digunakan untuk kepentingan nelayan, penanganan bencana alam, korban terdampak program pemerintah, dan program MBR. Berbeda dengan rumah susun, rumah khusus adalah kompleks perumahan landed dimana setiap unit dihuni oleh satu keluarga. Peruntukan rumah khusus yang dibangun bervariasi. Sejumlah 216 unit di 5 lokasi dibangun sebagai peruntukan rusus untuk nelayan, 150 unit rumah khusus untuk korban terdampak bencana alam, 25 unit rusus untuk korban terdampak program pembangunan pemerintah, dan 25 rusus untuk program MBR. Untuk tahun 2023, kedepan kebijakan pengembangan rumah khusus hanya ditujukan bagi relokasi warga terdampak bencana, sehingga kebutuhan perumahan bagi kepentingan lain akan dialihkan dengan pembangunan rumah susun.

Tabel 4.14 Rumah Khusus Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/ Kota	Rumah Khusus	Target Hunian	Jumlah Unit
1	Pangandaran	Rusus Nelayan Cimerak	Nelayan	28
2	Pangandaran	Rusus Nelayan Pangandaran	Nelayan	54
3	Pangandaran	Rusus Nelayan Pangandaran	Nelayan	25
4	Garut	Rusus Bencana Karang Pawitan	Korban Bencana	50
5	Kuningan	Rusus Kecamatan Ciwaru	Korban Bencana	50
6	Kuningan	(Masyarakat Relokasi Pembangunan Bendungan)	Dampak Program Pembangunan	60
7	Kuningan	Rusus Kecamatan Ciwaru	Korban Bencana	25
8	Kuningan	Rusus MBR Randusari	MBR	40
9	Indramayu	Komplek Perumahan Nelayan	Nelayan	25

Sumber: sigi.pu.go.id

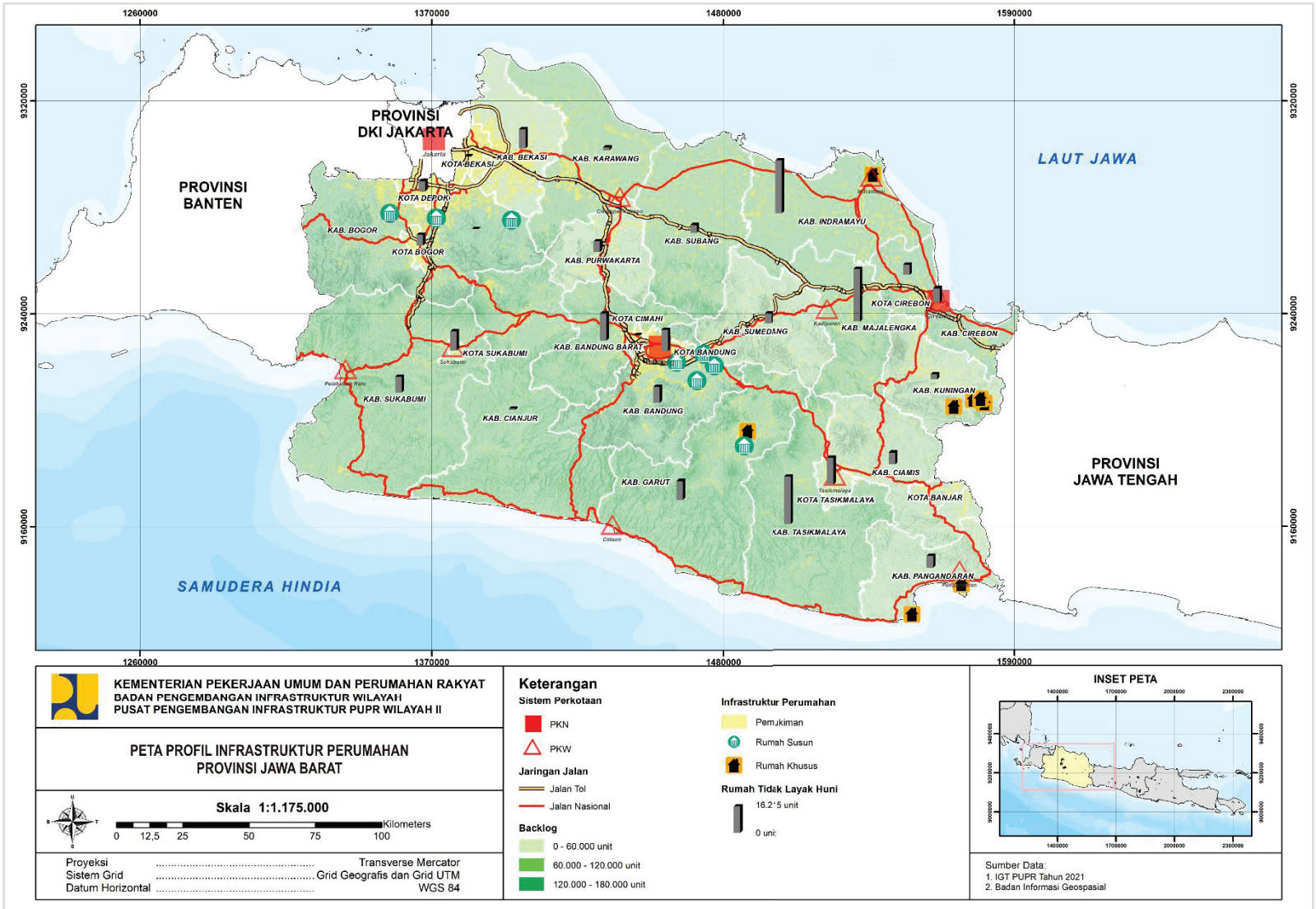
4.4.4. Rumah Susun

Kementerian PUPR telah membangun 109 rumah susun di 27 kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan 4.561 unit. Akan tetapi, dalam pembahasan ini hanya rusun yang memiliki manfaat khusus sesuai dengan karakteristik pengembangan kawasan prioritas yang ada di Provinsi Jawa Barat diantaranya rusun untuk pekerja, pekerja industri, dan MBR. Berbeda dengan rumah khusus, rumah susun adalah kompleks perumahan bertingkat/vertikal. Berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik pengembangan kawasan prioritas, sejumlah 4 rumah susun dengan total 356 unit lokasi dibangun sebagai peruntukan MBR, sejumlah 3 rusun dengan total 158 unit dibangun untuk peruntukan fasilitas pekerja, dan sejumlah 2 rusun dengan total 116 unit dibangun untuk pekerja industi. Berikut merupakan sebaran rumah susun di Jawa Barat.

Tabel 4.15 Rumah Susun Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/ Kota	Infrastruktur Rumah Susun	Jumlah Unit
1	Bandung	Rusun Pekerja Industri Pemprov Jawa Barat (Penghargaan Provinsi)	58
2	Bandung	Rusun Pekerja Industri Pemprov Jawa Barat (Penghargaan Provinsi)	58
3	Bogor	Rusun Pekerja LIPI Cibinong Bogor	50
4	Bogor	Rusun Pekerja DIKLAT BASARNAS Bogor	50
5	Bogor	Rusun Pekerja LIPI	58
6	Bogor	Rusun MBR Yayasan Madaniah	43
7	Garut	Rusun MBR Pemkab Garut	140
8	Sumedang	Rusun MBR ITB-Jatinangor	66
9	Kota Bandung	Rusun MBR Rancacili	107

Sumber: sigi.pu.go.id



Peta 4.4 Profil Infrastruktur Perumahan Provinsi Jawa Barat

4.5. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR

Infrastruktur Non-PUPR meliputi infrastruktur perhubungan, infrastruktur energi, dan infrastruktur jaringan telekonomunikasi.

4.5.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perhubungan

Persebaran infrastruktur perhubungan, terlihat bahwa pesisir selatan belum terdapat terminal dikarenakan aksesibilitas yang masih minim. Jumlah terminal di Provinsi Jawa Barat mencapai 24 terminal yang terdiri dari 11 Terminal Tipe A dan 13 Terminal Tipe B. Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan utama dibangun untuk menggantikan Pelabuhan Cirebon. Pada pesisir selatan, terdapat Pelabuhan ratu dengan kelas pelabuhan regional dan Pelabuhan Bojongselawe di Kabupaten Pangandaran dengan kelas pelabuhan lokal.

Terdapat 10 Bandara di Provinsi Jawa Barat, namun hanya 3 (tiga) bandara yang merupakan bandara pengumpul, yaitu Husein Sastranega di Kota Bandung, Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan Nusawiru di Kabupaten Pangandaran. Stasiun Kereta Api di Provinsi Jawa Barat terdapat 10 Stasiun Kereta Api besar dan 7 Stasiun Kereta Api kecil yang tersebar. Lebih dari 100 stasiun kelas lainnya di Provinsi Jawa Barat, namun pada beberapa ruas non-aktif sejak puluhan tahun lalu. Peta Simpul Transportasi dapat dilihat pada peta 4.5.

Bandara Internasional Jawa Barat: sempat beroperasi pada tahun 2019 dengan peruntukan sebagai bandara khusus haji dan umroh dengan jumlah penumpang 243.756. BIJB memiliki kapasitas sebesar 5,6 juta penumpang/tahun dengan luas lahan 96.280 m2 dan panjang runway 13.000 x 60 m.

Peta infrastruktur perhubungan dapat dilihat pada Peta 4.5.

4.5.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jaringan Energi

Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas energi terbesar kedua nasional setelah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 9.079 mega watt yang dikelola oleh PLN. Dari total kapasitas tersebut, Provinsi Jawa Barat merupakan pemasok listrik berbasis energi terbarukan terbesar nasional dengan kapasitas sebesar 8.700 mega watt. Pembangkit listrik di Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang berada di Kabupaten Bekasi, yaitu PLTGU Muara Tawar, PLTGU Cikarang Listrindo, dan PLTGU Bekasi;
2. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sunyaragi (Kota Cirebon);
3. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yaitu PLTU Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), PLTU Indramayu Baru (Kabupaten

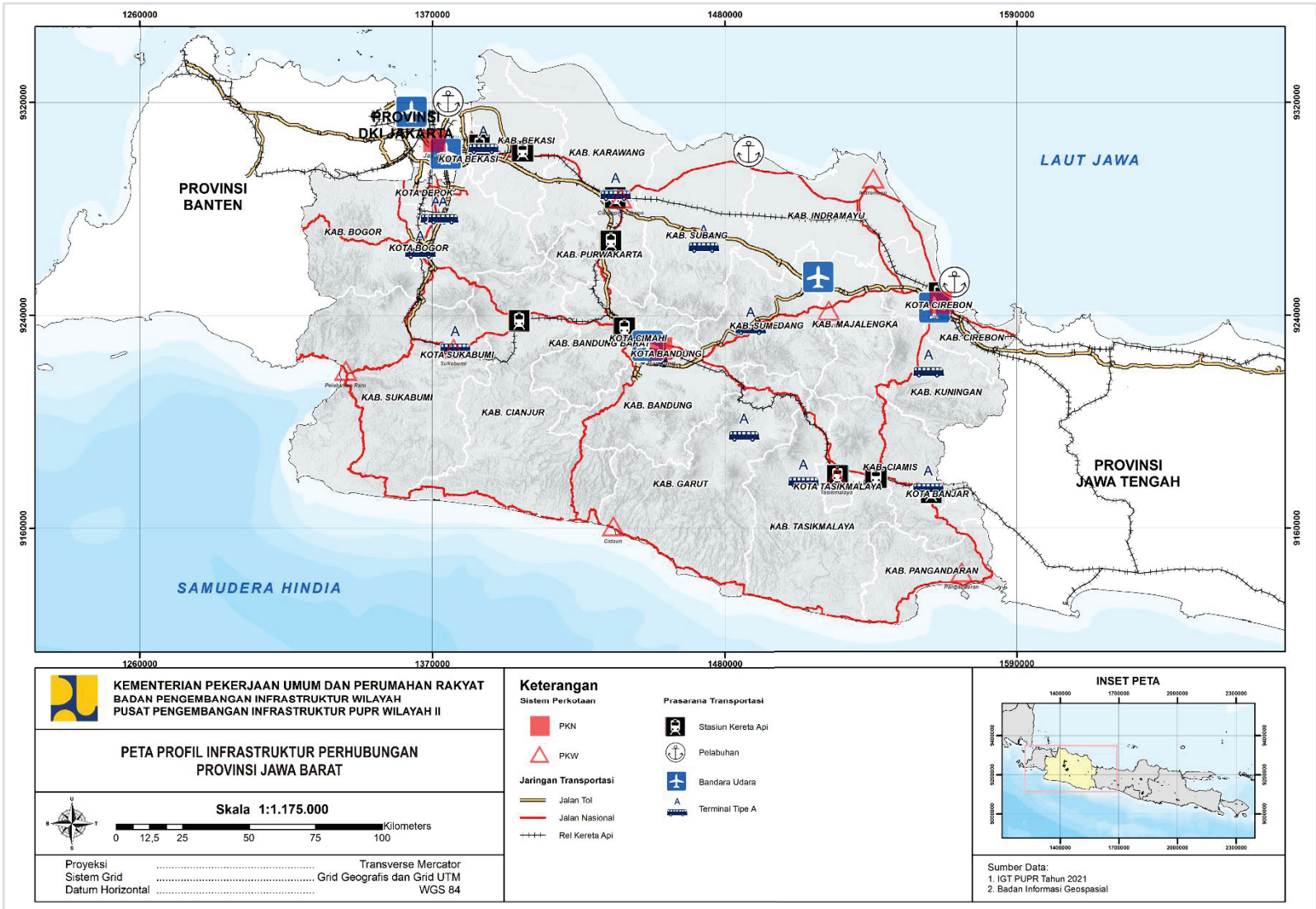
Indramayu), PLTU Indramayu (Kabupaten Indramayu), dan PLTU Jawa Barat Baru; dan
4. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di PLTA Saguling, PLTA Cirata dan PLTA Rajamandala.

Selain itu, terdapat tujuh pembangkit panas bumi yang dikelola swasta dengan kapasitas sebesar 1.504 MW yang diantaranya adalah PLTP Kamojang dan PLTP Gunung Salak. Selain itu, besarnya jumlah industri di Provinsi Jawa Barat mengakibatkan banyaknya kawasan industri yang mengelola pembangkit listrik secara swasta yang menggunakan PLTU berbasis batubara.

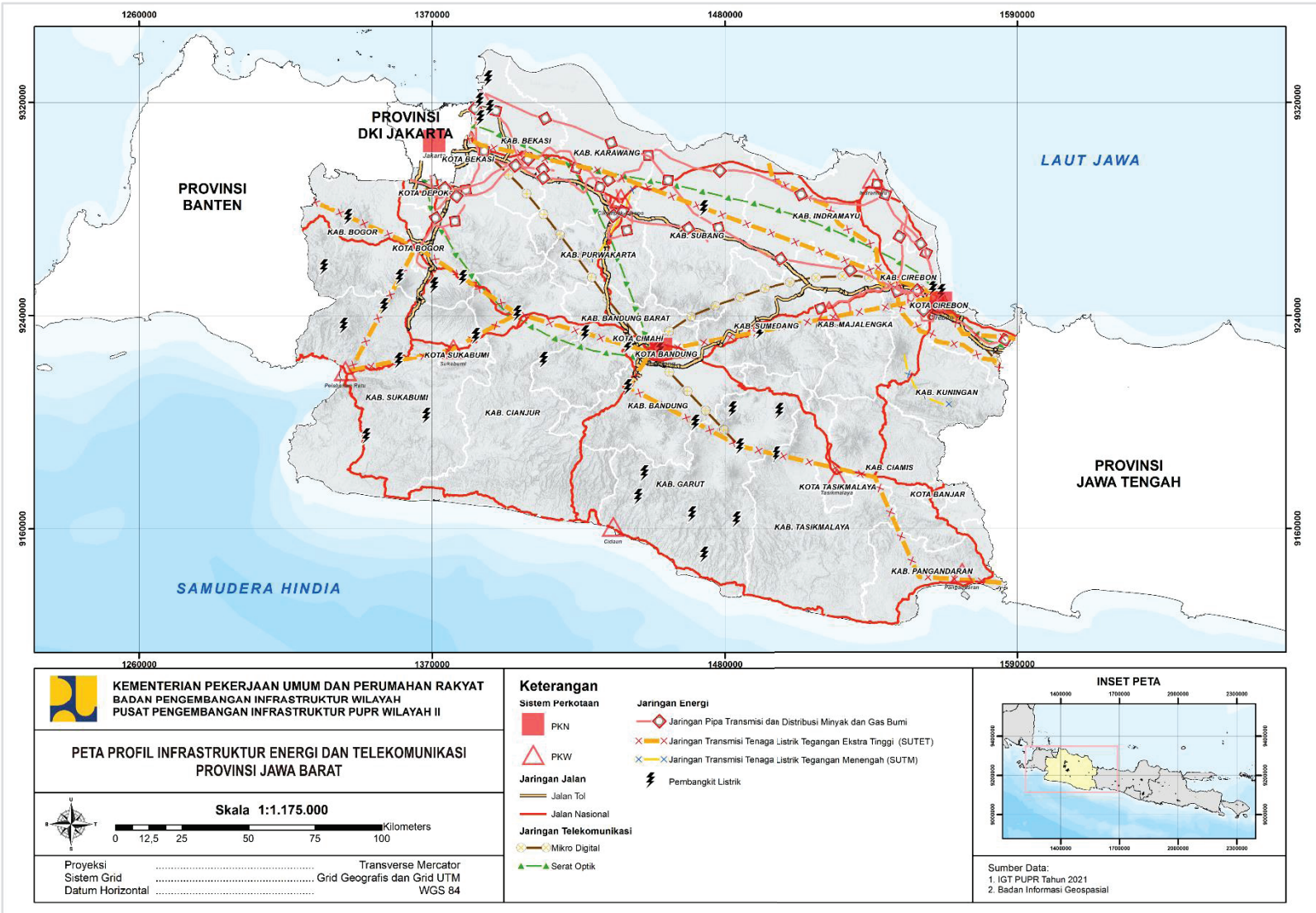
4.5.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah desa/kelurahan penerima sinyal kuat seluler terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 5.517 desa/kelurahan. Kabupaten Cirebon merupakan wilayah dengan jumlah desa/keluarahan yang terlayani sinyal dengan kecepatan tinggi 4G/LTE, yakni sebanyak 410 desa (96,7%) dari total 424 desa yang ada. Sisanya, 14 desa baru terlayani jaringan 3G/H/H+/EVDO. Kemudian sebanyak 386 desa (88%) di Kabupaten Bogor sudah terlayani jaringan 4G dari 435 desa, sisanya 49 baru terlayani jaringan 3G. Sebanyak 356 desa (81,46%) Kabupaten Garut terlayani jaringan 4G dari total 437 desa, sisanya 78 desa baru terlayani jaringan 3G.

Meski tercatat sebagai kawasan dengan utilitas internet terbanyak di Indonesia, Provinsi Jawa Barat masih memiliki *blank spot* atau kosong sinyal di sejumlah titik. Hal ini berdampak pada lambatnya adopsi digital di masyarakat. Lokasi yang dekat dengan Ibukota dan akses jalan yang telah mendukung, membuat penggelaran jaringan di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, lebih mudah dibandingkan dengan di Indonesia bagian timur. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa cakupan jaringan di Jawa Barat belum ter-*cover* sepenuhnya. Masyarakat menggunakan sinyal dari satelit yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan sinyal dari serat optik. Terdapat enam kota di Provinsi Jawa Barat, yakni Kota Depok (63 kelurahan), Kota Bekasi (56 kelurahan), Kota Sukabumi (33 kelurahan, Kota Banjar (25 keluarahan), Kota Cirebon (22 kelurahan, dan Kota Cimahi (15 kelurahan) semuanya sudah terlayani jaringan cepat 4G. Sedangkan 3 desa di Kabupaten Tasikmalaya, 1 desa di Kabupaten Kuningan, dan 1 desa di Kabupaten Sukabumi belum mendapat layanan jaringan telekomunikasi. Peta infrastruktur energi dan telekomunikasi dapat dilihat pada Peta 4.6.



Peta 4.5 Profil Infrastruktur Perhubungan Provinsi Jawa Barat



Peta 4.6 Profil Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Barat

BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menyusun suatu perencanaan terutama rencana pengembangan, pastinya tidak terlepas dari *root cause* (akar masalah) yang harus diketahui sebelumnya, kemudian dilakukan *mapping* atau pemetaan hingga analisis yang tepat, sehingga menghasilkan rencana aksi (*action plan*) yang sesuai untuk mencapai *goal* atau tujuan yang diharapkan.

Permasalahan dan isu strategis selalu muncul dalam dinamika suatu negara, apalagi dengan Indonesia sebagai negara berkembang, yang tentunya juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan adalah hal yang menjadi masalah atau persoalan; dan isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Perumusan potensi dan kendala (termasuk limitasi/daya dukung dan daya tampung) yang harus ditangani serta peluang dan ancaman yang dapat memberikan dampak dan pengaruh signifikan terhadap arahan kebijakan pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PUPR, dibahas dalam bab 5 ini, yang kemudian menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah pada bab 6.



Gambar 5.1 Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis
Sumber: SE Pedoman Muatan RPIW, 2022

Perumusan permasalahan dan isu strategis dilakukan berdasarkan fokus perencanaan yang dihasilkan dari rumusan arah kebijakan. Fokus perencanaan tersebut yaitu fokus industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Isu strategis juga menjadi dasar masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah berdasarkan masing-

masing fokus perencanaan. Berikut merupakan alur perumusan permasalahan dan isu strategis.

Permasalahan dan isu strategis pada setiap fokus ditinjau dalam 3 konteks perencanaan, yaitu konteks makro yang bersifat skala nasional, konteks meso dengan skala Pulau Jawa, serta konteks mikro dengan skala provinsi dan kawasan prioritas. Isu strategis diperoleh dengan mempertimbangkan *baseline* (kondisi eksiting dan fokus kebijakan) dan skenario (opsi masa depan dan masalah utama dalam mewujudkan opsi masa depan).

A. Industri *High-Tech* Berorientasi Ekspor

Didominasi oleh industri manufaktur, Provinsi Jawa Barat memiliki **kontribusi sektor industri terbesar** secara nasional. Industri manufaktur memiliki output sebesar Rp638 Triliun atau menyumbang 19,8% pada PDB Industri Nasional dan 5% ke PDB Nasional (BPS, 2022). Secara kebijakan, industri di Provinsi Jawa Barat diarahkan pada industri berbasis teknologi pada 5 subsektor prioritas, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB (RPJMN 2020-2024).

Sektor industri juga menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai peringkat 1 penghasil ekspor nasional (17% dari total nasional). Tingginya peringkat ekspor ini didukung oleh keberadaan ***backbone* jalan tol dan kereta api**, serta **Pelabuhan Patimban** dan **Bandara Kertajati** sebagai outlet. Namun, optimalisasi operasional Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati harus segera dilakukan karena saat ini outlet Jawa Barat masih bergantung pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan arahan pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai *hub* internasional dengan kapasitas ekspor 7,5 juta TEUs peti kemas dan 600.000 kendaraan roda empat.

Dengan adanya infrastruktur jalan tol dan kereta api, **konektivitas logistik dengan transportasi antarmoda** diharapkan dapat meningkat, sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan waktu menuju gerbang ekspor. Namun, optimalisasi ini dapat meningkatkan beban logistik pada koridor utara akibat terkonsentrasinya outlet ekspor, sehingga harus dilakukan kajian lebih lanjut untuk mempelajari dan menanggulangi potensi masalah ini.

Jika dilihat secara spasial, kawasan industri di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada wilayah utara. Hal ini disebabkan oleh keberadaan **super koridor Pantura Jawa** yang menghubungkan pusat industri di Pulau Jawa. Sesuai dengan arahan kebijakan, pengembangan wilayah Pantura Jawa sebagai koridor pertumbuhan berfokus pada pengembangan sektor unggulan industri berorientasi ekspor yang

memanfaatkan teknologi tinggi. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi antara pusat industri, kawasan perkotaan, dan sumber bahan baku.

Dengan adanya perkembangan kawasan industri, terdapat beberapa tantangan dari sektor lain, seperti pertanian. **Alih fungsi lahan pertanian** di Provinsi Jawa Barat mencapai 921 Ha/tahun di Kabupaten Karawang, 1.131 Ha/tahun di Kabupaten Bekasi, dan tertinggi 1.980 Ha/tahun di Kabupaten Majalengka. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak terkendali. Perkembangan ini juga menyebabkan Provinsi Jawa Barat bagian utara memiliki tingkat risiko **banjir** tinggi–sangat tinggi. Namun, kawasan ini juga memiliki tingkat kritis air tinggi karena tingginya aktivitas ekonomi baik pertanian, industri, maupun permukiman, sehingga pengembangan kawasan industri perlu diarahkan agar memperhatikan kemampuan penggunaan teknologi serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya.

Pada aspek **sumber daya manusia**, terdapat ketidaksesuaian kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung industri berbasis teknologi. Berdasarkan BPS (2020), sebanyak 76% dari penduduk usia produktif (15–64 tahun) di Provinsi Jawa Barat belum mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya *miss-match* antara kebutuhan industri dengan keahlian tenaga kerja. Dengan adanya pengembangan pusat pendidikan vokasi/pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan SDM inovatif, diharapkan dapat terjadi peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dari segi ekonomi, sektor industri Provinsi Jawa Barat memiliki *multiplier effect* tertinggi dengan nilai sebesar 1,5. Sektor yang memberikan dampak terbesar adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL, industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, ketenagalistrikan. Namun, hal ini dapat **menyebabkan disparitas kawasan utara dan selatan** Provinsi Jawa Barat karena kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Pantura. Permasalahan ini ditanggapi oleh arahan pengembangan Cirebon-Indramayu-Majalengka dan Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian. Harapannya, pengembangan di wilayah utara dapat menjadi motor penggerak ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karen itu, dapat disimpulkan isu strategis pada sektor industri adalah **perlunya penguatan infrastruktur dan kapasitas tenaga kerja mendukung industri *high-tech* berbasis ekspor**. Ringkasan isu fokus industri dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rumusan Isu Strategis Industri Provinsi Jawa Barat

KONTEKS PERENCANAAN		*BASELINE*		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MAKRO	**Kontribusi dan Aktivitas Ekonomi** (Mimiliki kontribusi ekspor terbesar yang didukung dengan industri pengolahan)	Jawa Barat memiliki kontribusi industri manufaktur terbesar nasional dengan menyumbangkan 19,8% PDB Industri Nasional dan 5% ekonomi nasional.	Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Subsektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB	Kawasan Industri dalam Kawasan Rebana: 1. Cipali West Subang 2. Losarang 3. Cirebon 4. Kertajati 5. Cipali Indramayu 6. Krangkeng 7. Balongan 8. Patimban Kawasan Industri Bodebekkar 1. Bekasi Industrial Estate 2. MM2100 Industrial Town 3. KI Jababeka 4. East Jakarta Industrial Park 5. KI Lippo Cikarang 6. Cibinong Center Industrial Estate	Mewujudkan industri berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri Provinsi Jawa Barat.	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan	Perlunya Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Tenaga Kerja Mendukung Industri *High-Tech* Berbasis Ekspor
		Provinsi Jawa Barat menghasilkan ekspor nasional tertinggi (17% dari total nasional) yang didukung dengan keberadaan Backbone jalan tol dan kereta api, serta Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai outlet.					
MESO	**Potensi Industri berbasis Ekspor & Distribusi Barang/ Komoditas/ Konektivitas** (Pelabuhan Patimban sebagai pintu keluar masuk barang)	Outlet kawasan industri Jawa Barat masih bergantung dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta karena belum optimalnya pengembangan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.	Pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai hub internasional dengan kapasitas ekspor peti kemas sebesar 7,5 juta teus dan 600.000 kendaraan		Peningkatan konektivitas logistik yang didukung transportasi antar moda menuju Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai gerbang ekspor Provinsi Jawa Barat.	Peningkatan beban logistik pada koridor utara akibat terkonsentrasinya outlet ekspor pada wilayah Patimban dan Kertajati	
		Kawasan Industri didukung oleh keberadaan super koridor Pantura Jawa yang mendukung penyediaan bahan baku industri terutama petrokimia dari Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur, karet dan ban dari Provinsi Banten, serta gula dari Provinsi Jawa Tengah.	Pengembangan Wilayah Pantura Jawa sebagai koridor pertumbuhan yang fokus pada pengembangan sektor unggulan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan teknologi tinggi		Meningkatkan intergrasi antara pusat industri, kawasan perkotaan, dan sumber bahan baku sebagai bagian dari koridor pertumbuhan	Ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor	
MIKRO		Wilayah utara Jawa Barat memiliki tingkat risiko banjir tinggi-sangat	Pengembangan kawasan industri dengan		Konservasi Sumber Daya Air mendukung	Terjadinya alih fungsi lahan menjadi	

KONTEKS PERENCANAAN		*BASELINE*		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kondisi Fisik Kewilayahan & Kualitas SDM (Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik yang beragam dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur)	tinggi dengan luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha.	memperhatikan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia di sekitarnya		air baku industri dan pengendalian banjir	kawasan terbangun pada kawasan rawan banjir	
		Sebesar 1,2 juta hektar Provinsi Jawa Barat bagian utara sudah terlampaui daya dukung airnya karena tingginya aktivitas ekonomi baik pertanian, industri, dan permukiman.					
		Pengembangan industri telah menumbuhkan kawasan permukiman tak terkendali yang mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan sawah sebesar 12 ribu hektar per tahun (Tertinggi di Bekasi = 1.131 ha/th; Majalengka = 1.980 ha/th; Karawang = 921 ha/th).	Pengendalian perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk menjaga keutuhan lahan pertanian		Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung industri peningkatan aktivitas dan produktivitas tenaga kerja industri	Pengembangan kawasan industri tidak mempertimbangkan bangkitan tenaga kerja yang membutuhkan infrastruktur dasar dan layanan publik	
		Ketidaksesuaian kebutuhan industri berbasis teknologi dengan ketersediaan tenaga kerja karena sebagian besar penduduk (76%) belum mengenyam pendidikan tinggi.	Pengembangan pusat pendidikan vokasi/pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan SDM inovatif		Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri	Masih terjadinya miss match antara kebutuhan industri dengan keahlian tenaga kerja	
		Sektor Industri Provinsi Jawa Barat memberikan multiplier 1,5 kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sektor yang memberikan dampak terbesar adalah: Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Ketenagalistrikan.	Pengembangan Cirebon-Indramayu-Majalengka dan Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian		Pengembangan wilayah utara sebagai motor penggerak ekonomi Provinsi Jawa Barat	Disparitas kawasan utara dan selatan Jawa Barat semakin besar akibat terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di Pantura.	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Pertanian Pangan Padi dengan Intensifikasi

Provinsi Jawa Barat merupakan **penghasil padi tertinggi kedua nasional** dengan produksi padi mencapai 5,3 juta ton atau 16% produksi nasional (2022). Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga memiliki luas baku sawah (LBS) 928.218 Ha, terluas ketiga jika dibandingkan luas LBS Indonesia (7.463.948 Ha). Sebagian besar lahan pertanian di Jawa Barat belum ditetapkan sebagai LSD. Akibatnya, alih fungsi lahan pertanian tidak dapat terpantau.

Provinsi Jawa Barat, diarahkan sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan yang diharapkan akan meningkatkan produksi tanaman pangan melalui **intensifikasi sistem pertanian**. Provinsi Jawa Barat berperan sebagai pemasok beras ke wilayah lain, seperti DKI Jakarta (sebanyak 12 ribu ton). Namun, tingginya biaya produksi dan logistik sering kali mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian. Selain itu, **sistem logistik** pertanian Provinsi Jawa Barat **belum terbentuk**, sehingga **distribusi pertanian belum optimal**.

Dari segi produktivitas lahan, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat produktivitas lahan pertanian yang tertinggi se-Pulau Jawa dengan nilai 56,75 kuintal/Ha dengan nilai Indeks Pertanaman (IP) Jawa Barat juga merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa (2,1). Saat ini, sektor pertanian menjadi penyumbang **30% jumlah penduduk miskin terbesar**, meski menempati peringkat ke-3 (14%) sebagai mata pencaharian terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Usaha pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan **teknik pertanian inovatif dan modern**.

Dengan segala potensinya, sektor pertanian Provinsi Jawa Barat juga mempunyai risiko kebencanaan. Tingginya **risiko bencana banjir dan kekeringan** yang terjadi di wilayah utara menyebabkan terganggunya produktivitas lahan. Di sisi lain, pengembangan kawasan permukiman seluas 18.000 Ha/tahun juga menyebabkan **pengurangan lahan pertanian sawah** yang tinggi (12.000 Ha/tahun). Perlu dilakukan usaha pertahanan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional.

Selain tingginya risiko bencana dan tingginya alih fungsi lahan, sistem jaringan irigasi di Jawa Barat juga **belum terintegrasi antara jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier**. Harapannya, pengembangan infrastruktur sumber daya air seperti jaringan irigasi ini dapat memenuhi kebutuhan air dan mengurangi risiko banjir. Perlunya pemantapan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan **mengendalikan alih fungsi lahan pertanian**, **mengatasi tingginya risiko bencana**, dan **mendorong berkembangnya sistem pertanian yang berbasis intensifikasi**. Ringkasan isu fokus pertanian dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Rumusan Isu Strategis Pertanian Provinsi Jawa Barat

KONTEKS PERENCANAAN		*BASELINE*		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MAKRO	**Komoditas Unggulan** (Provinsi Jawa Barat memiliki potensi lokal sektor unggulan skala nasional)	Provinsi Jawa Barat merupaan wilayah lumbung pangan utama nasional dengan produktivitas lahan pertanian tertinggi kedua nasional sebesar 56,75 kw/ha. Sebagai salah satu wilayah dengan luas baku sawah terbesar di Indonesia sebesar 928.218 ha, Provinsi Jawa barat memiliki tingkat produksi terbesar kedua nasional sebesar 9,4 juta ton.	Pengembangan Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung pangan utama nasional terutama di wilayah utara	Kawasan pertanian di: 1. Kab. Bekasi 2. Kab Karawang 3. Kab Subang 4. Kab Indramayu 5. Kab. Sukabumi 6. Kab. Cianjur	Peningkatan produksi tanaman pangan padi melalui penerapan teknologi mendorong intensifikasi sistem pertanian	Belum ditetapkannya sebagian besar lahan pertanian menjadi LSD	Perlunya Pemantapan Provinsi Jawa Barat Sebagai Lumbung Pangan Utama Nasional
MESO	**Jaringan Transportasi & Distribusi Barang/ Komoditas** (Pelabuhan Patimban sebagai pintu keluar masuk barang)	Provinsi Jawa barat sebagai pemasok beras ke wilayah lain yang didukung ketersediaan Jalan Tol Trans Jawa sebagai jalur distribusi (Ekspor beras ke Provinsi Jawa Tengah sebesar 815 ribu ton,Provinsi Banten sebesar 574 ribu ton, Provinsi DKI Jakarta sebesar 541 ribu ton).	Penguatan sistem jaringan transportasi dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan		Peningkatan aksesibilitas distribusi hasil pertanian dari sentra pertanian menuju ke sentra pengolahan dan pusat permukiman	Sistem logistik pertanian belum terbentuk sehingga distribusi pertanian belum optimal	
MIKRO	**Aktivitas Ekonomi, Komoditas Unggulan & Fisik Kewilayahan**	Penanaman padi masih tergantung dengan kondisi alam (curah hujan) yang ditunjukkan dengan Indeks Pertanaman Provinsi Jawa Barat sebesar 2,1.	Pemertahanan Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung pangan utama nasional		Pemertahanan Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung pangan utama nasional	Belum siapnya sistem pertanian untuk mewujudkan produktivitas	

KONTEKS PERENCANAAN		*BASELINE*		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(Karakteristik pertanian dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur di Jawa Barat)	Sektor pertanian berada di peringkat ke-3 (14%) sebagai mata pencaharian terbanyak di Provinsi Jawa Barat akan tetapi sektor pertanian menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar sebesar 30% dari total penduduk miskin.	Peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan teknik pertanian inovatif dan modern			berbasis intensifikasi	
		Terganggunnya produktivitas lahan pertanian di wilayah utara Provinsi Jawa Barat dikarenakan bencana banjir (luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha) dan kekeringan (luasan kawasan risiko kekeringan 154.547 ha).	Pengembangan infrastruktur pengendali banjir dan revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah		Pengembangan infrastruktur Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan air dan mengurangi risiko banjir	Belum terintegrasinya sistem jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dalam meningkatkan hasil pertanian	
		Bekurangnya lahan pertanian sawah yang tinggi sebesar 12 ribu hektar per tahun akibat pengembangan kawasan permukiman (18 ribu hektar per tahun).	Mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Daerah dan nasional				

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Pariwisata Berbasis Industri Kreatif

Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah **kunjungan wisatawan nusantara terbesar** di Indonesia, yaitu sejumlah 107 juta orang/tahun (data kunjungan wisatawan 2019, sebelum pandemi). Hal ini didukung dengan banyaknya jumlah akomodasi berbintang, dimana Provinsi Jawa Barat menempati urutan kedua nasional setelah Provinsi Bali dengan 495 hunian (BPS, 2021). Kontribusi PDRB Pariwisata Provinsi Jawa Barat juga termasuk tertinggi ke-2 (12%) di antara sebaran data PDB Pariwisata Nasional.

Kegiatan pariwisata di Provinsi Jawa Barat didukung **dengan keberadaan akses transportasi jalan tol dan jalan nasional yang sudah menjangkau kawasan daya tarik wisata (DTW)**. Pangsa pasar wisata Provinsi Jawa Barat adalah wisatawan dari perkotaan yang didukung dengan adanya 2 metropolitan besar yang menjadi asal wisatawan nusantara dengan daya beli tinggi. Perlu dilakukan pemantapan aksesibilitas tujuan wisata dengan pengembangan jaringan transportasi yang memadai.

Kegiatan pariwisata di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bandung-Halimun-Ciletuh dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bandung Kota, Ciwidey, dan Tangkuban Perahu sebagai tujuan destinasi wisata utama yang menyumbang 23% terhadap seluruh kedatangan wisatawan. Pengembangan 6 KSPN, 10 KPPN, dan 3 DPN ini dapat diarahkan pada terbentuknya **paket wisata terintegrasi** dari destinasi wisata utama hingga destinasi baru dengan mengakomodasi minat wisatawan yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata. Tantangan terbesar adalah belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, serta pelaku usaha sebagai media pemasaran.

Daya tarik utama wisata Provinsi Jawa Barat adalah **ekonomi kreatif** dengan komoditas kuliner, *fashion*, kesenian, ekowisata yang didukung alam pegunungan yang sejuk, serta budaya Sunda di daerah perdesaan. Wisata belanja sebagai 98% tujuan wisatawan Provinsi Jawa Barat turut mendukung perkembangan industri kreatif. Walaupun **kualitas produk industri kreatif belum terstandardisasi**, harapannya pengembangan industri kreatif dapat dilakukan secara terintegrasi dengan kebutuhan sektor pariwisata untuk meningkatkan *tourism spending.*

Dengan membandingkan kondisi eksisting dengan target, didapatkan isu strategis sektor pariwisata adalah **daya saing industri pariwisata yang belum didukung industri kreatif berbasis teknologi**. Industri pariwisata juga diharapkan dapat menerapkan prinsip wisata berkelanjutan. Ringkasan isu fokus pariwisata seperti pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Rumusan Isu Strategis Pariwisata Provinsi Jawa Barat

KONTEKS PERENCANAAN		*BASELINE*		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MAKRO	**Kontribusi Ekonomi** (Pariwisata Skala Nasional dan Internasional)	Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kunjungan wisatawan nusantara terbesar se-Indonesia sejumlah 107 juta org/thn (2019 sebelum pandemi).	Wilayah Jawa-Bali menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia	1. KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk. 2. KSPN dan KPPN Ciwidey dsk. 3. KSPN dan KPPN Tangkuban Perahu dsk. 4. KSPN dan KPPN Bandung Kota dsk. 5. KSPN dan KPPN Pangandaran dsk. 6. KPPN Pelabuhan Ratu dsk.	Pemantapan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Barat	Pesatnya perkembangan sektor pariwisata terutama di kawasan lindung/konservasi berpotensi meningkatkan risiko bencana	Daya Saing Industri Pariwisata yang Belum Didukung Industri Kreatif Berbasis Teknologi
		Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi PDRB Pariwisata tertinggi (12% terhadap PDB Pariwisata nasional).					
		Jumlah akomodasi berbintang berada di urutan kedua nasional setelah Provinsi Bali sebesar 495 hunian.	Pembangunan prasarana/fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional		Peningkatan kualitas akomodasi pariwisata yang memenuhi standar internasional		
MESO	**Jaringan Transportasi & Akses Pariwisata**	Kegiatan pariwisata di Jawa Barat didukung dengan keberadaan akses transportasi Jalan Tol dan Jalan Nasional Lintas Provinsi di Pulau Jawa yang sudah menjangkau kawasan pariwisata.	Pemantapan aksesibilitas tujuan wisata dengan pengembangan jaringan transportasi yang memadai		Pengembangan tourism relevant road dan sistem transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan secara efektif dan efisien	Tingginya jumlah wisatawan terutama pada hari libur tidak sebanding dengan kapasitas jalan menuju destinasi wisata sehingga menyebabkan kemacetan	
		Pangsa pasar wisatawan nusantara di Jawa Barat terutama berasal dari metropolitan jabodetabek dan cekungan bandung yang memiliki daya beli tinggi.					

KONTEKS PERENCANAAN		*BASELINE*		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MIKRO	**Aktivitas Ekonomi, Destinasi Unggulan & Fisik Kewilayahan** (Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik destinasi wisata yang beragam dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur)	Konsentrasi wisata utama Jawa Barat berada di DPP Bandung-Halimun-Ciletuh dengan KSPN Bandung Kota, KSPN Ciwidey, dan KSPN Tangkupan Perahu sebagai tujuan destinasi wisata utama menyumbang 23% terhadap seluruh kedatangan wisatawan di Jawa Barat.	Pengembangan 6 KSPN, 10 KPPN, dan 3 DPN sebagai paket wisata terintegrasi untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata		Pengembangan paket wisata yang mengintegrasikan destinasi wisata utama dan destinasi baru dengan mengakomodasi minat wisatawan	Belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, dan pelaku usaha wisata sebagai media promosi dan pemasaran	
		Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai destinasi unggulan yang dapat dikembangkan di KSPN Pangandaran, Halimun-Cisalak, Gede-Pangrango, serta 10 KPPN dan 3 DPN dengan didukung 108 DTW dan 215 desa wisata.					
		Daya tarik utama wisata Jawa Barat terutama adalah ekonomi kreatif dengan komoditas kuliner, fashion, dan kesenian dengan jumlah 1,5 juta usaha lokal dan menghasilkan 3,8 juta lapangan kerja.	Penguatan industri kreatif sebagai salah satu atraksi utama wisata dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor pariwisata		Pengembangan industri kreatif yang terintegrasi dengan kebutuhan sektor pariwisata untuk meningkatkan *tourism spending*	Belum terstandarisasinya kualitas produk industri kreatif untuk mendukung industri pariwisata	
		Dari total 2,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 98% berkunjung untuk wisata belanja yang turut mendukung perkembangan industri kreatif di Jawa Barat.					

Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. Kawasan Perkotaan Berkelanjutan

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar secara nasional (49 juta jiwa), dengan **tingkat urbanisasi tertinggi nasional** dengan 67% penduduk tinggal di wilayah metropolitan. Akibatnya, wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional; Cekungan Bandung berkontribusi 3% terhadap GDP. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, dapat dilakukan pemanfaatan dampak urbanisasi. Namun, dengan **masifnya pertumbuhan kawasan perkotaan**, potensi terjadinya *urban sprawl* yang menyebabkan **tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan** menjadi semakin besar.

Kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Barat **terkoneksi dengan kawasan perkotaan lain** di Pulau Jawa, sehingga dapat tercipta aglomerasi ekonomi dan perkembangan perkotaan yang lebih terintegrasi. Di sisi lain, peningkatan bangkitan lalulintas antarkota **membebani kapasitas jalan** yang sudah ada, sehingga dapat menyebabkan *urban* sprawl hingga memicu terbentuknya konurbasi antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Hal ini disebabkan belum berkembangnya **sistem angkutan umum massal perkotaan** yang menghubungkan pusat aktivitas ekonomi dan permukiman.

Provinsi Jawa Barat didominasi oleh kawasan budi daya tidak terbangun (43%). Provinsi Jawa Barat juga merupakan wilayah dengan **multi bahaya bencana tinggi** dengan kondisi fisik yang sulit dikembangkan. Tingginya risiko bencana di kawasan perkotaan diakibatkan belum diterapkan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan dan ketahanan terhadap bencana.

Dari segi **infrastruktur pelayanan dasar**, akses air minum aman Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 24,32%, namun **penggunaan air tanah masih tinggi** terutama di wilayah kepadatan tinggi. Akses sanitasi aman Provinsi Jawa Barat masih rendah yaitu 7,3%, sehingga mengakibatkan **pencemaran limbah pada DAS kritis** yang mengganggu ekosistem dan ketersediaan air baku permukaan. Tingkat pelayanan sampah domestik relatif tinggi (70%). Jumlah penduduk perkotaan yang sangat tinggi menyebabkan banyak **sampah yang tidak terkelola dengan baik**, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan, bencana, dan masalah kesehatan di daerah sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) dan aliran sungai.

Target infrastruktur pelayanan dasar untuk menangani masalah penurunan muka tanah, penanganan banjir perkotaan, pengolahan sampah ke *waste-to-energy*. Sebagai kesimpulan, saat ini **sistem pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan lintas wilayah belum dapat melayani tingginya kebutuhan masyarakat**. Ringkasan isu fokus pelayanan dasar dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Rumusan Isu Strategis Pelayanan Dasar Provinsi Jawa Barat

KONTEKS PERENCANAAN		*BASELINE*		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MAKRO	**Kondisi Demografi Wilayah dan Kesesuaian Kemampuan Lahan** (Jumlah Penduduk dan Kemampuan Lahan untuk pengembangan wilayah)	Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mecapai 51 juta jiwa (peringkat 1 nasional), dengan tingkat urbanisasi tertinggi nasional dimana 67% penduduk tinggal di wilayah metropolitan	Pemanfaatan dampak urbanisasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi	1. PKN Cekungan Bandung 2. PKN Cirebon	Pengembangan aktivitas ekonomi yang berkualitas sebagai lapangan usaha bagi penduduk perkotaan dari berbagai lapisan sosial dan latar belakang pendidikan	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan	Perkembangan Kawasan Perkotaan yang Belum Didukung Penyediaan Infrastruktur yang Memadai
		Wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional (Jabodetabek kontribusi 26% GDP dan Cekungan Bandung kontribusi 3% GDP)					
MESO	**Pusat Ekonomi dan Kawasan Permukiman** (Pengembangan kegiatan industri, jasa, dan pariwisata berskala internasional serta permukiman dengan kepadatan tinggi-sangat tinggi)	Kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Barat terkoneksi dengan kawasan perkotaan lain di Pulau Jawa sehingga dapat mencipakan aglomerasi ekonomi dan perkembangan perkotaan yang lebih terintegrasi	Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan pelayanan untuk mendukung sektor ekonomi utama di Provinsi Jawa Barat		Peningkatan integrasi antar kawasan perkotaan di Pulau Jawa sebagai aglomerasi yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah di Provinsi Jawa Barat	Peningkatan bangkitan lalulintas antar kota yang membebani kapasitas jalan yang sudah ada	

KONTEKS PERENCANAAN		*BASELINE*		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MIKRO	**Kondisi Fisik, Komoditas Utama & Pelayanan Infrastruktur Dasar** (Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik wilayah yang berada pada kawasan rawan bencana dengan potensi yang dapat dikembangkan melalui dukungan infrastruktur dasar)	Provinsi Jawa Barat hanya memiliki 34% dari seluruh wilayah atau sebesar 1,2 juta hektar yang memiliki kesesuaian untuk pengembangan kawasan perkotaan sehingga pengembangan perkotaan secara vertikal dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang kompak dan mendukung prinsip mitigasi bencana		Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana.	Belum siapnya sarana prasarana perkotaan untuk meminimalisir masalah lingkungan dan risiko bencana	
		Wilayah dengan Multi Bahaya Bencana Tinggi (gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tanah longsor, tsunami, serta banjir) dan kondisi fisik yang sulit dikembangkan.					
		Wilayah perkotaan memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan waktu tempuh dari kota sekitar Bodebek menuju kota inti mencapai 2,5 jam dan dari kota sekitar Cekungan Bandung menuju Kota Inti Bandung mencapai 2 jam	Penguatan konektivitas melalui pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan yang terkoneksi dengan pusat aktivitas ekonomi dan permukiman		Pengembangan sistem transportasi umum massal perkotaan yang menghubungkan antar pusat ekonomi dengan permukiman	Masih tingginya tingkat ketergantungan akan penggunaan transportasi berbasis jalan	

KONTEKS PERENCANAAN		*BASELINE*		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Akses air minum aman provinsi adalah 24,32%, akses air minum layak provinsi adalah 91,83%. Meskipun akses air minnum layak relatif tinggi, penggunaan air tanah yang berlebihan terutama di wilayah kepadatan tinggi telah mengakibatkan terjadinya penurunan muka tanah dan pencemaran air tanah secara masif	Pemenuhan layanan dasar perkotaan melalui penyediaan 10 juta akses air minum perpipaan, 1 juta rumah susun perkotaan, 90% akses sanitasi layak, pemulihan DAS kritis, serta penanganan kota-kota pesisir di Pantura Jawa		Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman untuk mendukung kegiatan ekonomi perkotaan	Belum terbentuknya sistem pengelolaan layanan infrastruktur permukiman perkotaan lintas wilayah administrasi	
		Akses sanitasi layak relatif tinggi dengan tingkat pelayanan 71,66%, akan tetapi tingkat kepadatan wilayah perkotaan yang tinggi mengakibatkan pencemaran limbah pada DAS kritis yang mengganggu ekosistem dan ketersediaan air baku permukaan					
		Tingkat pelayanan sampah domestik relatif tinggi dengan tignkat pelayanan 70%, akan tetapi dengan jumlah penduduk perkotaan yang sangat tinggi, banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan, bencana, dan masalah kesehatan di daerah sekitar TPA dan aliran sungai					

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Skenario pengembangan wilayah membahas mengenai proyeksi pertumbuhan, visi dan strategi, serta skenario perumusan kawasan prioritas. Tujuan penyusunan skenario pengembangan wilayah adalah untuk menjadi acuan dalam menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah pada bab selanjutnya.

6.1. Proyeksi Pertumbuhan

Perkembangan atau pertumbuhan wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap skenario pengembangan di masa mendatang yang ditandai dengan adanya pertumbuhan penduduk, kegiatan pariwisata, dan industri.

6.1.1. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk Provinsi Jawa Barat menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan layanan infrastruktur hingga tahun 2034. Perhitungan proyeksi penduduk di Provinsi Jawa Barat dihitung berdasarkan kecenderungan 10 tahun terakhir (2010–2020). Perhitungan proyeksi dilakukan menggunakan metode geometri dimana tingkat pertumbuhan meningkat sepanjang tahun (namun tidak konstan) di setiap tahunnya.

Penduduk terbanyak Provinsi Jawa Barat berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Penduduk di Kabupaten Bogor berjumlah 6 juta penduduk dan diperkirakan akan terus mengalami pertambahan jumlah penduduk hingga 7 juta penduduk pada tahun 2034. Penduduk di Kabupaten Bekasi berjumlah 3,9 juta jiwa pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga berjumlah hampir 4,8 juta jiwa pada tahun 2034. Selanjutnya, penduduk di Kabupaten Bandung berjumlah 3,8 juta jiwa pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 4,8 juta jiwa pada tahun 2034. Proyeksi jumlah penduduk dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 6.1.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kepadatan bruto Provinsi Jawa Barat pada 2023 berada dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 150 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kota Bandung dengan kepadatan 158 jiwa/Ha, diikuti dengan Kota Cimahi dengan kepadatan 153 jiwa/Ha dan Kota Bekasi dengan kepadatan 151 jiwa/Ha.

Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
JAWA BARAT	**54,138,021**	**55,019,969**	**55,916,286**	**56,827,204**	**57,752,961**	**58,693,800**	**59,649,966**	**60,621,708**	**61,609,281**	**62,612,942**
Bogor	6,600,565	6,708,093	6,817,373	6,928,433	7,041,303	7,156,011	7,272,587	7,391,063	7,511,469	7,633,837
Sukabumi	2,678,091	2,721,719	2,766,058	2,811,119	2,856,914	2,903,455	2,950,755	2,998,825	3,047,678	3,097,327
Cianjur	2,454,874	2,494,866	2,535,509	2,576,814	2,618,792	2,661,455	2,704,812	2,748,875	2,793,656	2,839,167
Bandung	4,153,931	4,221,601	4,290,374	4,360,268	4,431,300	4,503,489	4,576,854	4,651,415	4,727,190	4,804,199
Garut	2,858,513	2,905,080	2,952,406	3,000,503	3,049,384	3,099,060	3,149,547	3,200,855	3,252,999	3,305,993
Tasikmalaya	1,903,455	1,934,464	1,965,978	1,998,005	2,030,554	2,063,633	2,097,251	2,131,417	2,166,139	2,201,427
Ciamis	1,302,808	1,324,032	1,345,601	1,367,522	1,389,800	1,412,441	1,435,451	1,458,835	1,482,601	1,506,754
Kuningan	1,178,586	1,197,786	1,217,299	1,237,130	1,257,284	1,277,766	1,298,581	1,319,736	1,341,236	1,363,085
Cirebon	2,395,576	2,434,602	2,474,263	2,514,571	2,555,535	2,597,167	2,639,477	2,682,476	2,726,175	2,770,587
Majalengka	1,312,592	1,333,975	1,355,706	1,377,792	1,400,237	1,423,048	1,446,230	1,469,790	1,493,734	1,518,068
Sumedang	1,251,575	1,271,964	1,292,685	1,313,744	1,335,145	1,356,896	1,379,001	1,401,466	1,424,297	1,447,500
Indramayu	1,883,847	1,914,536	1,945,726	1,977,423	2,009,637	2,042,375	2,075,647	2,109,461	2,143,825	2,178,750
Subang	1,748,276	1,776,757	1,805,702	1,835,118	1,865,013	1,895,396	1,926,273	1,957,654	1,989,545	2,021,956
Purwakarta	1,053,675	1,070,840	1,088,285	1,106,014	1,124,031	1,142,343	1,160,952	1,179,865	1,199,086	1,218,620
Karawang	2,569,967	2,611,834	2,654,383	2,697,625	2,741,571	2,786,233	2,831,623	2,877,752	2,924,633	2,972,278
Bekasi	4,227,124	4,295,987	4,365,972	4,437,097	4,509,380	4,582,842	4,657,499	4,733,374	4,810,484	4,888,850
Bandung Barat	1,859,300	1,889,589	1,920,372	1,951,656	1,983,450	2,015,762	2,048,600	2,081,974	2,115,891	2,150,360
Pangandaran	435,279	442,370	449,577	456,901	464,344	471,908	479,596	487,409	495,349	503,419
Kota Bogor	1,221,759	1,241,663	1,261,890	1,282,447	1,303,339	1,324,572	1,346,150	1,368,080	1,390,367	1,413,017
Kota Sukabumi	358,519	364,360	370,295	376,328	382,458	388,689	395,021	401,456	407,996	414,643
Kota Bandung	2,721,331	2,765,664	2,810,718	2,856,507	2,903,042	2,950,334	2,998,398	3,047,244	3,096,886	3,147,336
Kota Cirebon	349,446	355,139	360,924	366,804	372,779	378,852	385,024	391,296	397,671	404,149
Kota Bekasi	3,334,513	3,388,835	3,444,041	3,500,147	3,557,167	3,615,116	3,674,009	3,733,862	3,794,689	3,856,507
Kota Depok	2,693,233	2,737,108	2,781,698	2,827,013	2,873,068	2,919,872	2,967,439	3,015,781	3,064,910	3,114,840
Kota Cimahi	672,600	683,557	694,693	706,010	717,511	729,200	741,079	753,152	765,421	777,891
Kota Tasikmalaya	719,861	731,588	743,506	755,619	767,928	780,438	793,152	806,073	819,205	832,550
Kota Banjar	198,724	201,961	205,251	208,595	211,993	215,447	218,956	222,523	226,149	229,833

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Proyeksi Kepadatan Penduduk Bruto (jiwa/Ha)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
JAWA BARAT	**43**	**44**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**48**	**49**	**50**
Bogor	22	22	23	23	23	24	24	24	25	25
Sukabumi	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Cianjur	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
Bandung	24	24	25	25	25	26	26	27	27	27
Garut	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11
Tasikmalaya	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
Ciamis	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10
Kuningan	10	10	10	10	10	11	11	12	12	12
Cirebon	22	23	23	23	24	25	25	25	26	26
Majalengka	10	10	10	10	10	11	11	12	12	12
Sumedang	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10
Indramayu	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11
Subang	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10
Purwakarta	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12
Karawang	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
Bekasi	34	34	35	35	36	37	38	38	39	39
Bandung Barat	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17
Pangandaran	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Kota Bogor	110	111	113	115	117	119	121	123	125	127
Kota Sukabumi	74	75	76	78	79	81	82	83	85	86
Kota Bandung	163	166	168	171	174	177	180	183	186	189
Kota Cirebon	89	90	92	93	95	96	98	99	101	103
Kota Bekasi	156	159	161	164	166	169	172	175	177	180
Kota Depok	134	137	139	141	143	146	148	150	153	155
Kota Cimahi	158	161	163	166	168	171	174	177	180	183
Kota Tasikmalaya	39	40	40	41	42	43	43	44	45	45
Kota Banjar	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.1.2. Proyeksi Ekonomi

Sektor ekonomi unggulan di Provinsi Jawa Barat meliputi industri, pertanian, dan pariwisata. Pada tahun 2034, PDRB ADHK memiliki persentase terbesar di sektor industri pengolahan (33,77%), sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 13,07%. Pertumbuhan PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan Provinsi Jawa Barat diproyeksikan mengalami pertumbuhan dengan nilai Rp. 32.689.919,61 pada tahun 2023 hingga mencapai Rp. 40.157.220,05 pada tahun 2034.

A. Proyeksi Pertumbuhan Industri

Provinsi Jawa Barat memiliki 2 Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI), dengan kawasan WPPI 1 mencangkup Kawasan Bogor-Bekasi-Karawang yang memiliki sektor unggulan industri alat elektronik, tekstil, otomotif, dan makanan minuman. Sementara itu, kawasan WPPI 2 yang diproyeksikan akan berkembang pesat mencangkup Kawasan Subang-Indramayu-Cirebon (Rebana), memiliki sektor unggulan mobil listrik, alas kaki, *halal hub*, dan makanan minuman.

WPPI 2 diproyeksikan akan berkembang lebih pesat dengan beberapa pertimbangan, seperti adanya keunggulan komparatif. Adanya

pelabuhan baru yakni Pelabuhan Patimban yang berperan juga sebagai pelabuhan utama dan menggantikan peran Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di Jakarta. Akses WPPI 2 juga dipermudah dengan adanya akses Tol Cipali-Patimban yang dapat mempersingkat waktu tempuh, Bandara Kertajati sebagai bandara pengumpul primer, upah pekerja yang cenderung rendah dibanding pada Kawasan WPPI 1, dan adanya dorongan dari pemerintah untuk mengembangkan KI Subang setelah permasalahan lahan selesai. Perkembangan industri yang cukup pesat dengan perkiraan 18% dari tahun 2016-2020 diprioritaskan pada kawasan industri di Kawasan Rebana yang direncanakan menjadi relokasi industri Jabodetabek dan Cekungan Bandung. Terdapat 22 kawasan industri yang beroperasi di WPPI I dan WPPI II, yaitu (Kemenperin, 2021):

1. Delapan (8) KI di Kabupaten Bekasi, yaitu Bekasi International Industrial Estate, MM2100 Industrial Town, Kawasan Industri Jababeka, East Jakarta Industrial Park, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Greenland International Industrial Center (GIIC), KIT Indonesia China, dan KI SKI;
2. Enam (6) KI di Kabupaten Karawang, yaitu KI Cimalaya, KI Indotaisei, KI Kujang Cikampek, Karawang International Industrial City, Podomoro Industrial Park Karawang, dan Karawang Jabar Industrial Estate;
3. Dua (2) KI di Kabupaten Bogor, yaitu Cibinong Center Industrial Estate dan KI Sentul;
4. Satu (1) KI di Kabupaten Subang, yaitu KI Subang;
5. Dua (2) KI di Kabupaten Majalengka, yaitu KI Majalengka dan Kertajati Industrial Estate Majalengka;
6. Satu (1) KI di Kabupaten Purwakarta, yaitu Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta;
7. Satu (1) KI di Kabupaten Sukabumi, yaitu KI Sukabumi; dan
8. Satu (1) KI di Kabupaten Bandung, yaitu KI Rancaekek.

B. Proyeksi Pertumbuhan Wisatawan

Wilayah Jawa Barat memiliki destinasi yang beragam dan pangsa pasar yang sangat besar sehingga terdapat pertumbuhan kunjungan sangat besar dan diproyeksikan mencapai 52 juta wisatawan (2034) dengan kontribusi wisnus sebesar 95%. Potensi ini cukup besar dalam menyumbang ekonomi daerah karena dengan pengeluaran rata-rata perhari wisnus 4,5 juta akan menyumbangkan bangkitan ekonomi sebesar 700 triliun rupiah. Proyeksi pertumbuhan sektor wisata dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Proyeksi Wisatawan Domestik di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/ Kota	Proyeksi Jumlah Wisatawan Domestik (orang/tahun)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bogor	13.417	14.247	15.128	16.063	17.056	18,110	19,230	20,418	21,681	23,021
Sukabumi	1.130.247	1.200.116	1.274.305	1.353.080	1.436.725	1,525,540	1,619,846	1,719,982	1,826,308	1,939,206
Cianjur	542.847	576.404	612.037	649.872	690.045	732,702	777,997	826,091	877,158	931,382
Bandung	112.570	119.529	126.918	134.764	143.095	151,941	161,334	171,307	181,897	193,141
Garut	49.542	52.605	55.857	59.310	62.976	66,869	71,003	75,392	80,053	85,001
Tasikmalaya	52.168	55.393	58.817	62.453	66.314	70,413	74,766	79,388	84,295	89,506
Ciamis	63.868	67.816	72.009	76.460	81.187	86,206	91,535	97,193	103,201	109,581
Kuningan	99.030	105.152	111.652	118.554	125.883	133,665	141,927	150,701	160,017	169,909
Cirebon	277.055	294.182	312.368	331.678	352.181	373,953	397,070	421,616	447,679	475,354
Majalengka	2.928	3.109	3.301	3.505	3.722	3,952	4,196	4,456	4,731	5,024
Sumedang	10.300	10.937	11.613	12.331	13.093	13,903	14,762	15,675	16,644	17,673
Indramayu	101.767	108.058	114.738	121.831	129.362	137,359	145,851	154,867	164,440	174,606
Subang	305.901	324.811	344.890	366.210	388.849	412,887	438,410	465,512	494,289	524,845
Purwakarta	159.956	169.844	180.343	191.492	203.329	215,899	229,245	243,417	258,464	274,442
Karawang	714.716	758.899	805.812	855.626	908.519	964,682	1,024,317	1,087,638	1,154,874	1,226,266
Bekasi	2.986.545	3.171.167	3.367.202	3.575.356	3.796.378	4,031,062	4,280,254	4,544,851	4,825,805	5,124,126
Bandung Barat	101.567	107.845	114.512	121.591	129.107	137,089	145,563	154,561	164,116	174,262
Pangandaran	5.128	5.445	5.782	6.139	6.518	6,921	7,349	7,804	8,286	8,798
Kota Bogor	7.109.061	7.548.529	8.015.164	8.510.645	9.036.756	9,595,391	10,188,559	10,818,395	11,487,167	12,197,280
Kota Sukabumi	287.274	305.032	323.889	343.911	365.171	387,745	411,715	437,166	464,191	492,886
Kota Bandung	8.547.481	9.075.869	9.636.922	10.232.657	10.865.219	11,536,886	12,250,073	13,007,348	13,811,436	14,665,232
Kota Cirebon	1.048.234	1.113.034	1.181.840	1.254.899	1.332.474	1,414,845	1,502,308	1,595,178	1,693,788	1,798,495
Kota Bekasi	1.326.632	1.408.642	1.495.722	1.588.184	1.686.363	1,790,610	1,901,302	2,018,837	2,143,637	2,276,153
Kota Depok	434	461	490	520	552	586	622	661	702	745
Kota Cimahi	39.795	42.255	44.867	47.641	50.586	53,713	57,033	60,559	64,303	68,278
Kota Tasikmalaya	796.161	845.378	897.638	953.128	1.012.049	1,074,611	1,141,042	1,211,579	1,286,476	1,366,003
Kota Banjar	49.105	52.141	55.364	58.786	62.420	66,279	70,376	74,727	79,346	84,251

Sumber: Hasil Analisis, 2023

**Rata-rata Pertumbuhan Wisatawan Domestik = 6,18%*

Tabel 6.4 Proyeksi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Jawa Barat

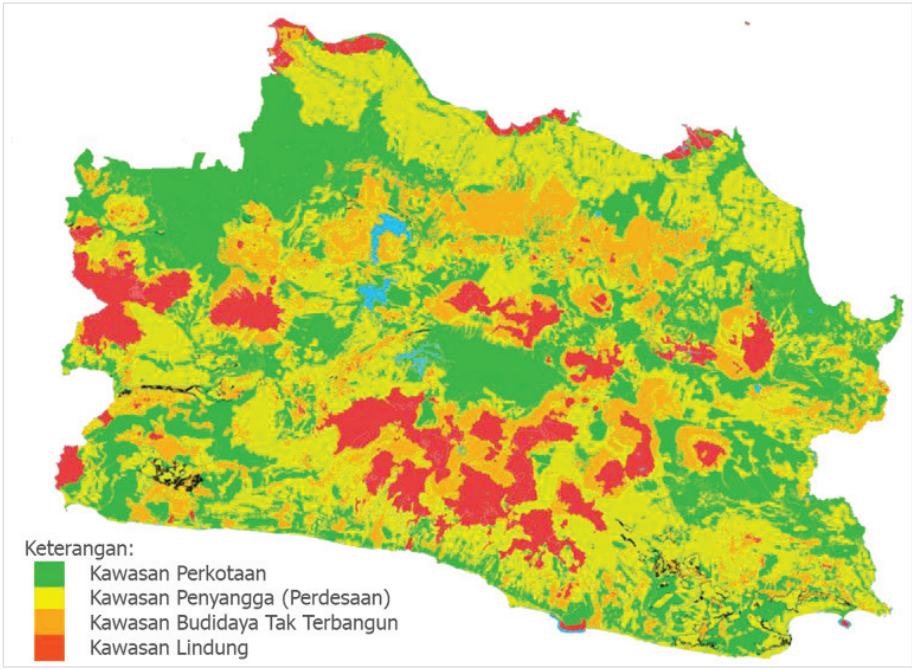
Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang/tahun)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bogor	47	50	52	55	58	61	65	68	72	76
Sukabumi	34.676	36.591	38.613	40.746	42.997	45,373	47,879	50,525	53,316	56,262
Cianjur	52.258	55.146	58.192	61.407	64.800	68,380	72,158	76,144	80,351	84,790
Bandung	14.872	15.694	16.561	17.476	18.442	19,460	20,536	21,670	22,867	24,131
Garut	49.498	52.233	55.119	58.164	61.377	64,768	68,346	72,122	76,107	80,312
Tasikmalaya	1.698	1.792	1.891	1.996	2.106	2,222	2,345	2,475	2,611	2,756
Ciamis	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7
Kuningan	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22
Cirebon	2.879	3.038	3.206	3.383	3.570	3,767	3,975	4,195	4,427	4,671
Majalengka	374	395	417	440	464	490	517	545	575	607
Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indramayu	99	105	111	117	123	130	137	145	153	161
Subang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purwakarta	21.489	22.676	23.929	25.251	26.646	28,118	29,672	31,311	33,041	34,866
Karawang	175.800	185.512	195.761	206.577	217.989	230,033	242,741	256,152	270,304	285,237
Bekasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandung Barat	8.348	8.809	9.296	9.810	10.352	10,924	11,527	12,164	12,836	13,545
Pangandaran	968	1.021	1.078	1.137	1.200	1,267	1,336	1,410	1,488	1,570
Kota Bogor	337.061	355.683	375.334	396.070	417.952	441,042	465,409	491,121	518,254	546,886
Kota Sukabumi	25	26	28	29	31	33	34	36	38	40
Kota Bandung	3.378.863	3.565.536	3.762.522	3.970.390	4.189.743	4,421,215	4,665,475	4,923,229	5,195,224	5,482,246
Kota Cirebon	133.135	140.490	148.252	156.443	165.086	174,206	183,831	193,987	204,704	216,013
Kota Bekasi	71.478	75.427	79.594	83.991	88.631	93,528	98,695	104,148	109,901	115,973
Kota Depok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Cimahi	537	567	598	631	666	703	742	783	826	871
Kota Tasikmalaya	141	149	157	165	175	184	194	205	217	229
Kota Banjar	46	48	51	54	57	60	63	66	70	74

Sumber: Hasil Analisis, 2023

**Rata-rata Laju Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara = 5,52%*

6.1.3. Keberlanjutan Lingkungan

Daya dukung lahan untuk kawasan permukiman dilihat berdasarkan analisis kemampuan lahan menampung kehidupan menggunakan metode *multicriteria analysis* (MCA). Lahan yang memiliki daya tampung tinggi sebagai kawasan perkotaan dari keseluruhan luas Provinsi Jawa Barat mencapai 11% (4.052 km^2), kawasan penyangga sebagai perdesaan mencapai 23% (8.323 km^2), kawasan budidaya tak terbangun mencapai 43% (15.759 km^2), dan kawasan lindung mencapai 24% (8.834 km^2). Berdasarkan proyeksi penduduk, wilayah Bandung Selatan hingga ke Pantai Selatan akan mengalami tingkat pertumbuhan sedang, dimana kawasan tersebut merupakan kawasan dengan kategori kawasan lindung.



Gambar 6.1 Kemampuan Lahan Provinsi Jawa Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan perhitungan daya dukung dan daya tampung, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah yang terbatas untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi atau sebesar 11% dari total luasan wilayah. Untuk itu, pengembangan budi daya terbangun perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana terlihat dari Gambar 6.1.

6.2. Visi dan Strategi

Subbab ini memuat perumusan visi Provinsi Jawa Barat dan analisis penyusunan strategi provinsi.

6.2.1. Perumusan Visi Wilayah

Visi wilayah dirumuskan dari hasil analisis arah kebijakan di Bab II, dengan meninjau kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur di Bab III dan IV, serta menjawab permasalahan dan isu strategis di Bab V. Fokus pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat meliputi pengembangan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan layanan infrastruktur dasar perkotaan.

Visi pengembangan infrastruktur Provinsi Jawa Barat adalah

"Pusat Industri Berdaya Saing, Pariwisata Berbasis Lingkungan, dan Lumbung Pangan Utama Nasional"

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 4 misi yang harus dilakukan. Keempat misi tersebut sekaligus akan menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Perkuatan daya saing sektor industri manufaktur di koridor Utara Jawa Barat melalui hilirisasi, penguatan konektivitas-logistik, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan penyediaan infrastruktur industri.
2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian komoditas unggulan padi melalui intensifikasi produksi, pemertahanan lahan, penguatan konektivitas, peningkatan nilai produk dan pengembangan sistem pertanian.
3. Pewujudan wisata berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan variasi atraksi, penguatan konektivitas-aksesibilitas, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, peningkatan SDM, serta integrasi manajemen dan bisnis pariwisata.
4. Pengembangan perkotaan yang kompak, berketahanan, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui pemenuhan layanan dasar, penguatan kelembagaan, serta pengembangan konektivitas dan angkutan umum.

6.2.2. Penysusunan Strategi Fokus Industri

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan Analisis PESTLE maupun tingkat meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang disebut

dengan Analisis 5 FORCES (*Porter Five Force Analysis*). Analisis PESTLE (Pestle Analysis) merupakan metode manajemen risiko yang digunakan agar bisa melakukan evaluasi lingkungan eksternal. Analisis ini dilakukan dengan cara membagi peluang dan risiko menjadi faktor-faktor PESTLE yaitu: *Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environment*.

Analisis 5 FORCES adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif di dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Peluang dan tantangan di level meso dijabarkan berdasarkan beberapa aspek yaitu *rivalry among existing competitor* (Persaingan Antar Kompetitor Eksisting), *bargaining power of customers* (Daya Tawar Pelanggan), *bargaining power of suppliers* (Daya Tawar Pemasok), *threat of new entrants* (Ancaman Pendatang Baru), dan *threat of substitutes* (Ancaman Produk Pengganti).

Kelima aspek tersebut masing-masing memiliki 3 parameter, yaitu: 1) Parameter untuk aspek *rivarly among existing competitor* adalah 'konversi *threat* menjadi *opportunity'*, 'kualitas yang diinginkan', dan 'inovasi'; 2) Parameter untuk aspek *bargaining power of customers* adalah 'sensitivitas target', 'trend *existing'*, dan 'penciptaan nilai'; 3) Parameter untuk aspek *bargaining power of suppliers* adalah 'ketergantungan saat ini', 'kualifikasi yang dibutuhkan', dan 'daya dukung existing'; 4) Parameter untuk aspek *threat of new entrants* adalah 'tantangan yang dihadapi', 'strategi untuk memenangkan kompetisi', dan 'ancaman terhadap *legacy*'; dan 5) Parameter untuk aspek *threat of substitutes* adalah 'trend analisis PESTLE', 'trend yang mengganggu kebijakan', dan 'peralihan *cost'*. Parameter yang digunakan pada masing-masing aspek didapatkan berdasarkan pembobotan tertinggi yang dinilai paling relevan dalam pengembangan fokus perencanaan di Provinsi Jawa Barat.

Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan SWOT). Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan yang digunakan pada masing-masing fokus perencanaan. Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT dan grand strategy sektor industri diuraikan sebagai berikut.

1.) Analisis PESTLE Fokus Industri

Analisis PESTLE fokus industri menunjukan bahwa parameter teknologi menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pengembangan industri di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti penggunaan teknologi pada sektor industri berkontribusi besar dalam perkembangan industri dan peningkatan daya saing industri di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat merebut pasar industri regional maupun global. Analisis PESTLE fokus industri secara lebih rinci dijelaskan pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri

Parameter	*Opportunities*	*Threats*	Bobot
Political	Peningkatan industri nasional melalui kebijakan peningkatan TKDN pada seluruh sektor ekonomi	Guna mengurangi ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, pengembangan industri diarahkan ke luar Pulau Jawa.	15%
Economic	Jawa Barat memiliki kontribusi industri manufaktur terbesar nasional dengan menyumbangkan 19,8% PDB Industri Nasional dan 5% ekonomi nasional.	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan	20%
Sociological	Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah Angkatan Kerja, jumlah penduduk, dan tenaga kerja tertinggi se-Indonesia, serta PDRB tertinggi ke tiga se-Indonesia	Ketidaksesuaian kebutuhan industri berbasis teknologi dengan ketersediaan tenaga kerja karena sebagian besar penduduk (76%) belum mengenyam pendidikan tinggi.	10%
Technological	"Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Subsektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB "	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan	25%
Legal	Penetapan Kawasan Utara Jawa Barat (Rebana) sebagai pusat kegiatan industri yang terintegrasi dengan outlet Patimban dan Kertajati	Perubahan agenda prioritas nasional mendukung kawasan industri	10%
Environment	Kawasan industri berada di wilayah utara Jawa Barat yang memiliki kondisi geografis yang mendukung aktivitas industri	Sebesar 1,2 juta hektar Provinsi Jawa Barat bagian utara sudah terlampaui daya dukung airnya karena tingginya aktivitas ekonomi baik pertanian, industri, dan permukiman.	20%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.) Analisis 5-*forces* Fokus Industri

Dalam analisis 5-*forces* fokus industri, 5 aspek yang ditinjau adalah pengembangan tenaga kerja industri, kemampuan ekspor, sinergisitas hulu-hilir, legal, dan pengembangan teknologi. Secara rinci analisis 5-*forces* fokus industri dapat dilihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Analisis 5-*forces* (Meso) Fokus Industri

Parameter	*Opportunities*	*Threats*
Rivalry Among Existing Competitor		
Inovasi	Kawasan Rebana sebagai klaster industri berbasis teknologi yang didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi bekerjasama dengan pelaku industri	Kemampuan *transfer of knowledge* proses industri masih terbatas pada perusahaan asing atau multinasional
Bargaining Power of Customers		
Tren Eksisting	Provinsi Jawa Barat menghasilkan ekspor nasional tertinggi (17% dari total nasional) yang didukung dengan keberadaan Backbone jalan tol dan kereta api, serta Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai outlet.	Belum optimalnya operasional Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati yang saat ini masih dalam pengembangan tahap 1 sehingga membatasi akses ekspor hasil industri dari Provinsi Jawa Barat
Bargaining Power of Supplies		
Ketergantungan Saat Ini	Sudah terbentuknya struktur industri berbasis teknologi yang mendukung keterkaitan antara industri utama dengan industri turunannya	Terbatasnya variasi bahan inputan industri dari suppliers lokal pada komoditas yang bersifat hightech sehingga masih tingginya impor komponen teknologi
Threat of New Entrants		
Tantangan yang Dihadapi	Terbentuknya badan pengelola kawasan industri rebana yang dapat meningkatkan informasi dan aturan main dalam pengembangan industri	Tingginya biaya investasi industri berbasis teknologi mengakibatkan besarnya risiko dan menurunnya minat investasi
Threat of Substitutes		
Tren Analisis PESTLE	"Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Subsektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB "	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.) Analisis SWOT Fokus Industri

Empat misi yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing grand strategi. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (*strengths),* kelemahan *(weakenesses),* peluang (*opportunities)* dan ancaman (*threats)* pada setiap fokus

pengembangan di Jawa Barat. Analisis SWOT untuk fokus industri ditampilkan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7 Analisis SWOT Fokus Industri

	Strengths		***Weaknesses***
1	Meningkatkan intergrasi antara pusat industri, kawasan perkotaan, dan sumber bahan baku sebagai bagian dari koridor pertumbuhan	1	Terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun pada kawasan rawan banjir
2	Sektor Industri Provinsi Jawa Barat memberikan multiplier 1,5 kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sektor yang memberikan dampak terbesar: Industri Mesin dan Perlengkapan, Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2	Tingkat pelayanan air minum perpipaan 19,8%
3	Jawa Barat memiliki kontribusi industri manufaktur terbesar nasional dengan menyumbangkan 19,8% PDB Industri Nasional dan 5% ekonomi nasional.	3	Wilayah utara Jawa Barat memiliki tingkat risiko banjir tinggi-sangat tinggi dengan luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha.
4	Peningkatan konektivitas logistik yang didukung transportasi antar moda menuju Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai gerbang ekspor Provinsi Jawa Barat.	4	Pengembangan industri telah menumbuhkan kawasan permukiman tak terkendali yang mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan sawah sebesar 12 ribu hektar per tahun (Bekasi = 1.131 ha/th; Majalengka = 1.980 ha/th; Karawang = 921 ha/th).
5	Pengembangan Wilayah Pantura Jawa sebagai koridor pertumbuhan yang berfokus pada pengembangan sektor unggulan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan teknologi tinggi	5	Ketidaksesuaian kebutuhan industri berbasis teknologi dengan ketersediaan SDM karena sebagian besar penduduk (76%) belum mengenyam pendidikan tinggi.
	Opportunities		***Threats***
1	Kawasan Rebana sebagai klaster industri berbasis teknolgi yang didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi bekerjasama dengan pelaku industri	1	Kemampuan *transfer of knowledge* proses industri masih terbatas pada perusahaan asing atau multinasional
2	Provinsi Jawa Barat menghasilkan ekspor nasional tertinggi (17% dari total nasional) yang didukung dengan keberadaan Backbone jalan tol dan kereta api, serta Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai *outlet*.	2	Belum optimalnya operasional Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati yang saat ini masih dalam pengembangan tahap 1 sehingga membatasi akses ekspor hasil industri dari Provinsi Jawa Barat
3	Sudah terbentuknya struktur industri berbasis teknologi yang mendukung keterkaitan antara industri utama dengan industri turunannya	3	Terbatasnya variasi bahan baku lokal pada komoditas yang bersifat *hightech* sehingga masih tingginya impor komponen teknologi
4	Terbentuknya badan pengelola kawasan industri rebana yang dapat meningkatkan informasi dan aturan main dalam pengembangan industri	4	Tingginya biaya investasi industri berbasis teknologi mengakibatkan besarnya risiko dan menurunnya minat investasi
5	Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi,	5	Sebesar 1,2 juta hektar Provinsi Jawa Barat bagian utara sudah terlampaui daya dukung airnya karena tingginya aktivitas ekonomi baik

Strengths		*Weaknesses*	
	Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi PDB		pertanian, industri, dan permukiman.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kemudian, dilakukan pembobotan dan *rating* pada setiap komponen untuk menghasilkan skor seperti pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8 *Skoring Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Industri

		Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Meningkatkan intergrasi antara pusat industri, kawasan perkotaan, dan sumber bahan baku sebagai bagian dari koridor pertumbuhan	0,27	4	1,09
	2	Sektor Industri Provinsi Jawa Barat memberikan multiplier 1,5 kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sektor yang memberikan dampak terbesar adalah: Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Ketenagalistrikan.	0,18	3	0,55
	3	Jawa Barat memiliki kontribusi industri manufaktur terbesar nasional dengan menyumbangkan 19,8% PDB Industri Nasional dan 5% ekonomi nasional.	0,18	3	0,55
	4	Peningkatan konektivitas logistik yang didukung transportasi antar moda menuju Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai gerbang ekspor Provinsi Jawa Barat.	0,18	2	0,36
	5	Pengembangan Wilayah Pantura Jawa sebagai koridor pertumbuhan yang berfokus pada sektor unggulan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan teknologi tinggi	0,18	3	0,55
		Subtotal	**1**		**3,09**
Weaknesses	1	Sebesar 1,2 juta hektar Provinsi Jawa Barat bagian utara sudah terlampaui daya dukung airnya karena tingginya aktivitas ekonomi baik pertanian, industri, dan permukiman.	0,18	-3	-0,55
	2	Tingkat pelayanan air minum perpipaan 19,8%	0,18	-1	-0,18
	3	Wilayah utara Jawa Barat memiliki tingkat risiko banjir tinggi-sangat tinggi dengan luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha.	0,27	-2	-0,55
	4	Pengembangan industri telah menumbuhkan kawasan permukiman tak terkendali yang mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan sawah sebesar 12 ribu hektar per tahun (Tertinggi di Bekasi = 1.131 ha/th; Majalengka = 1.980 ha/th; Karawang = 921 ha/th).	0,18	-1	-0,18
	5	Ketidaksesuaian kebutuhan industri berbasis teknologi dengan ketersediaan tenaga kerja karena sebagian besar penduduk (76%) belum mengenyam pendidikan tinggi.	0,18	-3	-0,55
		Subtotal	**1**		**-2,00**
		TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			**1,09**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

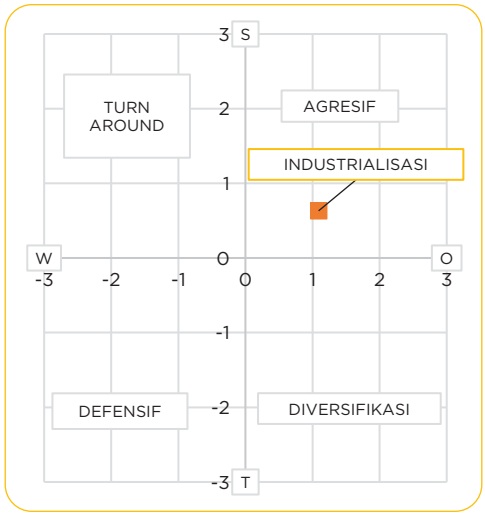
Pembobotan faktor eksternal fokus industri ditampilkan pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9 *Skoring Opportunities* dan *Threats* Fokus Industri

Faktor Eksternal			Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Kawasan Rebana sebagai klaster industri berbasis teknolgi yang didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi bekerjasama dengan pelaku industri	0,23	3	0,69
	2	Provinsi Jawa Barat menghasilkan ekspor nasional tertinggi (17% dari total nasional) yang didukung dengan keberadaan Backbone jalan tol dan kereta api, serta Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai outlet.	0,23	4	0,92
	3	Sudah terbentuknya struktur industri berbasis teknologi yang mendukung keterkaitan antara industri utama dengan industri turunannya	0,23	2	0,46
	4	Terbentuknya badan pengelola kawasan industri rebana yang dapat meningkatkan informasi dan aturan main dalam pengembangan industri	0,15	2	0,31
	5	Pengembangan Industri berbasis teknologi di 5 Subsektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi untuk meningkatkan kontribusi industri dalam PDB	0,15	3	0,46
		Subtotal	**1**		**2,85**
Threats	1	Kemampuan transfer of knowlage proses industri masih terbatas pada perusahaan asing atau multinasional	0,21	-2	-0,43
	2	Belum optimalnya operasional Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati yang saat ini masih dalam pengembangan tahap 1 sehingga membatasi akses ekspor hasil industri dari Provinsi Jawa Barat	0,21	-2	-0,43
	3	Terbatasnya variasi bahan inputan industri dari suppliers lokal pada komoditas yang bersifat hightech sehingga masih tingginya impor komponen teknologi	0,21	-2	-0,43
	4	Tingginya biaya investasi industri berbasis teknologi mengakibatkan besarnya risiko dan menurunnya minat investasi	0,21	-3	-0,64
	5	Masih banyak sektor industri yang belum beradaptasi dalam penggunaan teknologi modern dan ramah lingkungan	0,14	-2	-0,29
		Subtotal	**1**		**-2,21**
		TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL			**0,63**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus industri berada pada kuadran **agresif**, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).



Gambar 6.2 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Industri
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Strategi memperkuat daya saing sektor industri manufaktur di sepanjang koridor Utara Jawa Barat tersebut dijabarkan menjadi:

1. **Integrasi pengelolaan kawasan industri** melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan badan pengelola dalam pengembangan aktivitas ekonomi industri (S3-O4);
2. **Peningkatan konektivitas dan distibusi logistik** untuk memperkuat keterkaitan antar industri dan kemudahan proses pemasaran (S1-S4-O2-O3);
3. **Peningkatan kualitas tenaga kerja industri** melalui kerjasama dengan lembaga diklat dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi informasi (S2-S3-O1); dan
4. **Perkuatan struktur industri berbasis teknologi** dalam pelaksanaan aktivitas industri maupun inovasi manajemen industri (S1-O3-O5).

6.2.3. Penyusunan Strategi Fokus Pertanian

Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT, dan *grand strategy* sektor pertanian diuraikan sebagai berikut.

1.) Analisis PESTLE Fokus Pertanian

Analisis PESTLE fokus pertanian menunjukan bahwa parameter ekonomi menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian Provinsi Jawa Barat berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah dan perlu dipertahankan produktivitasnya agar dapat menjadi pemasok utama pada tingkat nasional. Analisis PESTLE fokus pertanian secara lebih rinci dijelaskan pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pertanian

Parameter	*Opportunities*	*Threats*	Bobot
Political	Penetapan Pulau Jawa (termasuk Provinsi Jawa Barat) sebagai lumbung pangan utama nasional	Kebijakan impor beras dapat mengancam produksi beras dalam negeri	21%
Economic	Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil beras tertinggi kedua dengan produksi mencapai 5,3 juta ton beras pada 2022 (16% dari total produksi nasional)	Tingginya biaya produksi dan logistik mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian	26%
Sociological	Tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-2 nasional dengan jumlah 3,2 juta orang	Keterbatasan kapasitas petani dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian	11%
Technological	Peningkatan produksi tanaman pangan padi melalui penerapan teknologi mendorong intensifikasi sistem pertanian	Belum terintegrasinya sistem jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dalam meningkatkan hasil pertanian	16%
Legal	Sudah ditetapkannya program peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi	Belum ditetapkannya sebagian besar lahan pertanian menjadi LSD	11%
Environment	Pertanian di Pulau Jawa berada pada wilayah yang memiliki tingkat kesuburan tinggi	Terganggunnya produktivitas lahan pertanian akibat tingginya risiko bencana banjir dan kekeringan	16%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.) Analisis 5-forces Fokus Pertanian

Dalam analisis 5-*forces* fokus pertanian, 5 aspek yang ditinjau adalah pengembangan teknologi, simpul logistik, infrastruktur, diversifikasi, pengendalian alih fungsi lahan, dan produktivitas,. Secara rinci analisis 5-*forces* fokus pertanian dapat dilihat pada Tabel 6.11.

Tabel 6.11 Analisis 5-*forces* (Meso) Fokus Pertanian

Parameter	*Opportunities*	*Threats*
Rivalry Among Existing Competitor		
Inovasi	Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai faktor dalam mendorong intensifikasi sistem pertanian	Belum siapnya sistem pertanian untuk mewujudkan produktivitas berbasis intensifikasi
Bargaining Power of Customers		
Tren Eksisting	Provinsi Jawa barat sebagai pemasok beras ke wilayah lain, didukung Jalan Tol Trans Jawa sebagai jalur distribusi (Ekspor beras ke Provinsi Jawa Tengah 815 ribu ton, Banten 574 ribu ton, DKI Jakarta 541 ribu ton).	Sistem logistik pertanian belum terbentuk sehingga distribusi pertanian belum optimal

Parameter	*Opportunities*	*Threats*
Bargaining Power of Supplies		
Ketergantungan Saat Ini	Tingginya dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur sumber daya air, penanganan kemiskinan di kawasan perdesaan, dan subsidi faktor produksi pertanian	Sektor pertanian menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar sebesar 30% dari total penduduk
Threat of New Entrants		
Tantangan yang Dihadapi	Masih luasnya lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat yang dapat menjadi lapangan usaha potensial	Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor pertanian
Threat of Substitutes		
Tren Analisis PESTLE	Provinsi Jawa Barat merupaan wilayah lumbung pangan utama nasional dengan produktivitas lahan pertanian tertinggi kedua nasional sebesar 56,75 kw/ha.	Tingginya biaya produksi dan logistik mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.) Analisis SWOT Fokus Pertanian

Empat misi yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing grand strategi. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (*strengths),* kelemahan *(weakenesses),* peluang (*opportunities)* dan ancaman (*threats)* pada setiap fokus pengembangan di Jawa Barat. Analisis SWOT untuk fokus pertanian ditampilkan pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12 Analisis SWOT Fokus Pertanian

	Strengths		***Weaknesses***
1	Sudah ditetapkannya program peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi	1	Ketersediaan air pada Kabupaten penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Utara Jawa Barat) kritis
2	Penetapan Pulau Jawa (termasuk Provinsi Jawa Barat) sebagai lumbung pangan utama nasional	2	Kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan irigasi teknis
3	Penanaman padi masih tergantung dengan kondisi alam (curah hujan) yang ditunjukkan dengan Indeks Pertanaman Provinsi Jawa Barat sebesar 2,1.	3	Bekurangnya lahan pertanian sawah yang tinggi sebesar 12 ribu hektar/tahun akibat pengembangan kawasan permukiman (18 ribu hektar/tahun)
4	Tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-2 nasional dengan jumlah 3,2 juta orang	4	Terganggunnya produktivitas lahan pertanian di wilayah utara Provinsi Jawa Barat dikarenakan bencana banjir (luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha) dan kekeringan (risiko kekeringan 154.547 ha).
5	Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat produktivitas lahan pertanian tertinggi se pulau Jawa sebesar 56,75 kw/ha	5	Biaya cetak sawah yang tinggi di Kawasan Tengah Selatan untuk melakukan pergantian lahan sawah yang beralihfungsi di Kawasan Utara

	Opportunities		*Threats*
1	Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai faktor dalam mendorong intensifikasi sistem pertanian	1	Belum siapnya sistem pertanian untuk mewujudkan produktivitas berbasis intensifikasi
2	Provinsi Jawa barat sebagai pemasok beras ke wilayah lain yang didukung ketersediaan Jalan Tol Trans Jawa sebagai jalur distribusi (Ekspor beras ke Provinsi Jawa Tengah sebesar 815 ribu ton,Provinsi Banten sebesar 574 ribu ton, Provinsi DKI Jakarta sebesar 541 ribu ton).	2	Sistem logistik pertanian belum terbentuk sehingga distribusi pertanian belum optimal
3	Tingginya dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur sumber daya air, penanganan kemiskinan di kawasan perdesaan, dan subsidi faktor produksi pertanian	3	Sektor pertanian menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar sebesar 30% dari total penduduk
4	Masih luasnya lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat yang dapat menjadi lapangan usaha potensial	4	Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor pertanian
5	Provinsi Jawa Barat merupaan wilayah lumbung pangan utama nasional dengan produktivitas lahan pertanian tertinggi kedua nasional sebesar 56,75 kw/ha.	5	Tingginya biaya produksi dan logistik mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kemudian, dilakukan pembobotan dan *rating* pada masing-masing komponen dalam SWOT untuk menghasilkan skor. Pembobotan faktor internal fokus pertanian ditampilkan pada Tabel 6.13.

Tabel 6.13 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pertanian

		Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Sudah ditetapkannya program peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi	0,23	4	0,92
	2	Penetapan Pulau Jawa (termasuk Provinsi Jawa Barat) sebagai lumbung pangan utama nasional	0,23	3	0,69
	3	Penanaman padi masih tergantung dengan kondisi alam (curah hujan) yang ditunjukkan dengan Indeks Pertanaman Provinsi Jawa Barat sebesar 2,1.	0,15	3	0,46
	4	Tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-2 nasional dengan jumlah 3,2 juta orang	0,15	2	0,31
	5	Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat produktivitas lahan pertanian tertinggi se pulau Jawa sebesar 56,75 kw/ha	0,23	3	0,69
		Subtotal	**1**		**3,08**
Weaknesses	1	Ketersediaan air pada Kabupaten penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Utara Jawa Barat) kritis	0,17	-2	-0,33
	2	Kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan Irigasi Teknis	0,25	-3	-0,75

Faktor Internal			Bobot	Rating	Skor
	3	Bekurangnya lahan pertanian sawah yang tinggi sebesar 12 ribu hektar per tahun akibat pengembangan kawasan permukiman (18 ribu hektar per tahun).	0,25	-2	-0,50
	4	Terganggunnya produktivitas lahan pertanian di wilayah utara Provinsi Jawa Barat dikarenakan bencana banjir (luasan kawasan risiko banjir 784.908 ha) dan kekeringan (luasan kawasan risiko kekeringan 154.547 ha).	0,17	-2	-0,33
	5	Biaya cetak sawah yang tinggi di Kawasan Tengah Selatan untuk melakukan pergantian lahan sawah yang beralihfungsi di Kawasan Utara	0,17	-1	-0,17
		Subtotal	**1**		**-2,08**
		TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			**0,99**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pembobotan faktor eksternal fokus pertanian seperti pada Tabel 6.14.

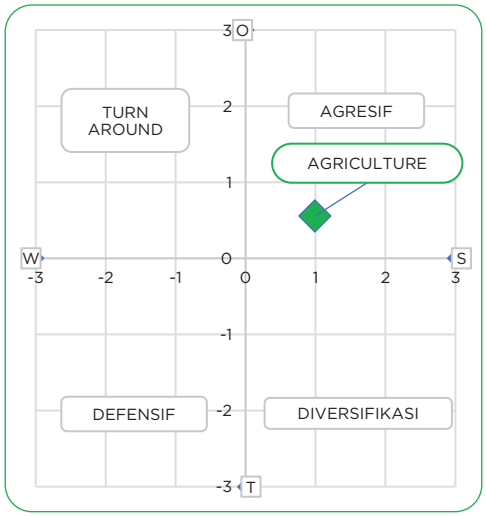
Tabel 6.14 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pertanian

Faktor Eksternal			Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai faktor dalam mendorong intensifikasi sistem pertanian	0,22	2	0,44
	2	Provinsi Jawa barat sebagai pemasok beras ke wilayah lain yang didukung ketersediaan Jalan Tol Trans Jawa sebagai jalur distribusi (Ekspor beras ke Provinsi Jawa Tengah sebesar 815 ribu ton,Provinsi Banten sebesar 574 ribu ton, Provinsi DKI Jakarta sebesar 541 ribu ton).	0,11	2	0,22
	3	Tingginya dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur sumber daya air, penanganan kemiskinan di kawasan perdesaan, dan subsidi faktor produksi pertanian	0,22	4	0,89
	4	Masih luasnya lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat yang dapat menjadi lapangan usaha potensial	0,22	3	0,67
	5	Provinsi Jawa Barat merupaan wilayah lumbung pangan utama nasional dengan produktivitas lahan pertanian tertinggi kedua nasional sebesar 56,75 kw/ha.	0,22	3	0,67
		Subtotal	**1**		**2,89**
Threats	1	Belum siapnya sistem pertanian untuk mewujudkan produktivitas berbasis intensifikasi	0,17	-2	-0,33
	2	Sistem logistik pertanian belum terbentuk sehingga distribusi pertanian belum optimal	0,17	-2	-0,33
	3	Sektor pertanian menyumbang jumlah penduduk miskin terbesar sebesar 30% dari total penduduk	0,17	-1	-0,17
	4	Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor pertanian	0,25	-3	-0,75

		Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
	5	Tingginya biaya produksi dan logistik mengakibatkan kurang kompetitifnya nilai jual produk pertanian	0,25	-3	-0,75
		Subtotal	**1**		**-2,33**
		TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL			**0,56**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pertanian berada pada kuadran **agresif**, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).



Gambar 6.3 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pertanian
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Terdapat 5 strategi memperkuat daya saing sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. **Peningkatan kapasitas tenaga kerja pertanian** untuk mendorong efektivitas pengelolaan sektor pertanian (S4-O4);
2. **Pemertahanan lahan pertanian** melalui pengendalian alih fungsi dan pemberian insentif lahan LSD (S5-O3);
3. **Pemantapan kualitas infrastruktur sumber daya air** melalui pengoptimalan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Air alternatif (S1-O1-O3);
4. **Pemanfaatan teknologi** melalui inovasi teknik penanaman dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan pertanian (S3-S5-O1); dan
5. **Peningkatan konektivitas dan jalur logistik** untuk efisiensi distribusi dan transportasi hasil pertanian (S2-S5-O2-O5).

6.2.4. Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata

Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT, dan *grand strategy* sektor pariwisata diuraikan sebagai berikut.

1.) Analisis PESTLE Fokus Pariwisata

Analisis PESTLE fokus pariwisata menunjukan bahwa parameter sosiologi dinilai menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini disebabkan karena sektor pariwisata Provinsi Jawa Barat didominasi oleh wisata ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisatawan. Analisis PESTLE fokus pariwisata dijelaskan pada Tabel 6.15.

Tabel 6.15 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata

Parameter	*Opportunities*	*Threats*	Bobot
Political	Penetapan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional	Perubahan agenda prioritas nasional menjadi sektor non pariwisata sebagai sektor unggulan	16%
Economic	Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi PDRB Pariwisata tertinggi (12% terhadap PDB Pariwisata nasional).	Kondisi ekonomi global sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata (pandemi, keamanan, bencana, krisis ekonomi) yang biasanya bersifat tentatif	21%
Sociological	Tingginya komunitas kreatif di Jawa Barat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata	Belum terbentuknya kolaborasi antar komunitas pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan	26%
Technological	Ketersediaan sistem teknologi informasi IT yang mendukung peningkatan industri pariwisata	Belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, dan pelaku usaha wisata sebagai media promosi dan pemasaran	5%
Legal	Sudah ditetapkannya wilayah Jawa-Bali menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia	Belum terintegrasinya kebijakan multisektor dalam pengembangan kawasan wisata	11%
Environment	Keunikan bentang alam yang didukung dengan keanekaragaman hayati, cagar budaya, serta geopark skala nasional dan global dalam mendukung pertumbuhan industri wisata	Provinsi Jawa Barat memiliki IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kurang Baik (peringkat ke 3 terendah setelah DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta)	21%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.) Analisis 5-forces Fokus Pariwisata

Dalam analisis 5-*forces* fokus pariwisata, 5 aspek yang ditinjau adalah ekonomi kreatif, kawasan pariwisata prioritas, jumlah pengunjung, pengembangan pariwisata, dan kolaborasi komunitas. Secara rinci analisis 5-*forces* fokus pariwisata dapat dilihat pada Tabel 6.16.

Tabel 6.16 Analisis 5-*forces* (Meso) Fokus Pariwisata

Parameter	*Opportunities*	*Threats*
Rivalry Among Existing Competitor		
Inovasi	Dari total 2,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 98% berkunjung untuk wisata belanja yang turut mendukung perkembangan industri kreatif di Jawa Barat.	Arah kebijakan yang ada belum berfokus pada pengembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata alam dan cagar budaya
Bargaining Power of Customers		
Tren Eksisting	Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai destinasi unggulan yang dapat dikembangkan di KSPN Pangandaran, Halimun-Cisalak, Gede-Pangrango, serta 10 KPPN dan 3 DPN dengan didukung 108 DTW dan 215 desa wisata.	KSPN Unggulan berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan tsunami
Bargaining Power of Supplies		
Ketergantungan Saat Ini	Penguatan industri kreatif sebagai salah satu atraksi utama wisata dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor pariwisata	Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung untuk mencari produk murah dengan kualitas rendah
Threat of New Entrants		
Tantangan yang Dihadapi	Masih besarnya pangsa pasar wisatawan di Jawa Barat mengakibatkan tingginya peluang untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif sesuai dengan keinginan konsumen	Adanya dominasi investasi berskala besar pada produk ekonomi kreatif tertentu sehingga menghambat perkembangan industri kreatif lokal
Threat of Substitutes		
Tren Analisis PESTLE	Tingginya komunitas kreatif di Jawa Barat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata	Belum terbentuknya kolaborasi antar komunitas pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.) Analisis SWOT Fokus Pariwisata

Empat misi yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing grand strategi. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (*strengths),* kelemahan *(weakenesses),* peluang (*opportunities)* dan ancaman (*threats)* pada setiap fokus pengembangan di Jawa Barat. Analisis SWOT untuk fokus pariwisata ditampilkan pada Tabel 6.17.

Tabel 6.17 Analisis SWOT Fokus Pariwisata

Strengths		*Weaknesses*	
1	Daya tarik utama wisata Jawa Barat terutama adalah ekonomi kreatif dengan komoditas kuliner, fashion, dan kesenian dengan jumlah 1,5 juta usaha lokal dan menghasilkan 3,8 juta lapangan kerja.	1	Pesatnya perkembangan sektor pariwisata terutama di kawasan lindung/konservasi berpotensi meningkatkan risiko bencana

	Strengths		***Weaknesses***
2	Pengembangan tourism relevant road dan sistem transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan secara efektif dan efisien	2	Waktu tempuh dari Wilayah Metropolitan menuju DTW Unggulan masih tergolong lama
3	Industri kreatif Jawa Barat memiliki potensi terbesar nasional dengan jumlah usaha 1,5 juta dan penyerapan tenaga kerja mencapai 3,8 juta orang	3	Tingkat pelayanan kebutuhan dasar di kawasan pariwisata masih belum optimal
4	Terdapatnya Destinasi Wisata yang diakui Unesco (Global Geopark Ciletuh) yang dapat dikembangka menjadi Destinasi Unggulan	4	Belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, dan pelaku usaha wisata sebagai media promosi dan pemasaran
5	Ketersediaan sistem teknologi informasi IT yang mendukung peningkatan industri pariwisata	5	Kawasan Wisata yang belum tertata dengan baik
	Opportunities		***Threats***
1	Dari total 2,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 98% berkunjung untuk wisata belanja yang turut mendukung perkembangan industri kreatif di Jawa Barat.	1	Arah kebijakan yang ada belum berfokus pada pengembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata alam dan cagar budaya
2	Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai destinasi unggulan yang dapat dikembangkan di KSPN Pangandaran, Halimun-Cisalak, Gede-Pangrango, serta 10 KPPN dan 3 DPN dengan didukung 108 DTW dan 215 desa wisata.	2	KSPN Unggulan berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan tsunami
3	Penguatan industri kreatif sebagai salah satu atraksi utama wisata dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor pariwisata	3	Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung untuk mencari produk murah dengan kualitas rendah
4	Masih besarnya pangsa pasar wisatawan di Jawa Barat mengakibatkan tingginya peluang untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif sesuai dengan keinginan konsumen	4	Adanya dominasi investasi berskala besar pada produk ekonomi kreatif tertentu sehingga menghambat perkembangan industri kreatif lokal
5	Tingginya komunitas kreatif di Jawa Barat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata	5	Belum terbentuknya kolaborasi antar komunitas pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kemudian, dilakukan pembobotan dan *rating* pada masing-masing komponen dalam SWOT untuk menghasilkan skor. Pembobotan faktor internal fokus pariwisata ditampilkan pada Tabel 6.18.

Tabel 6.18 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pariwisata

		Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Daya tarik utama wisata Jawa Barat adalah ekonomi kreatif dengan komoditas kuliner, fashion, dan kesenian	0,27	3	0,82
	2	Pengembangan *tourism relevant road* dan sistem transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan secara efektif dan efisien	0,18	4	0,73
	3	Industri kreatif Jawa Barat memiliki potensi terbesar nasional dengan jumlah usaha 1,5 juta dan penyerapan tenaga kerja mencapai 3,8 juta orang	0,18	3	0,55
	4	Terdapatnya destinasi wisata yang diakui UNESCO (Global Geopark Ciletuh) yang dapat dikembangka menjadi destinasi unggulan	0,18	3	0,55
	5	Ketersediaan sistem teknologi informasi yang mendukung peningkatan industri pariwisata	0,18	2	0,36
		Subtotal	**1**		**3,00**
Weaknesses	1	Pesatnya perkembangan sektor pariwisata terutama di kawasan lindung/konservasi berpotensi meningkatkan risiko bencana	0,2	-2	-0,40
	2	Waktu tempuh dari wilayah metropolitan menuju DTW unggulan masih tergolong lama	0,2	-1	-0,20
	3	Tingkat pelayanan kebutuhan dasar di kawasan pariwisata masih belum optimal	0,2	-3	-0,60
	4	Belum terintegrasinya informasi destinasi, atraksi, dan pelaku usaha wisata sebagai media promosi dan pemasaran	0,2	-2	-0,40
	5	Kawasan wisata yang belum tertata dengan baik	0,2	-2	-0,40
		Subtotal	**1**		**-2,00**
		TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			**1,00**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pembobotan faktor eksternal fokus pariwisata ditampilkan pada Tabel 6.19.

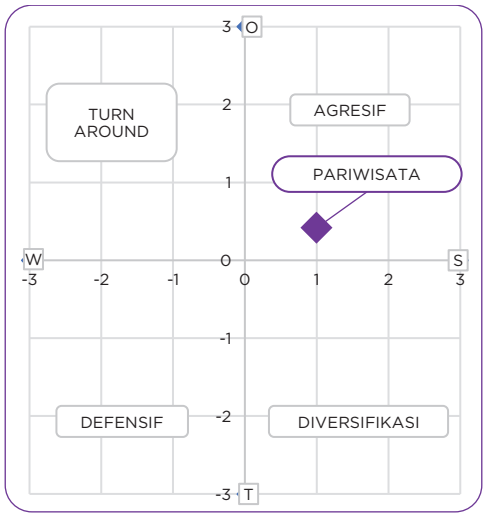
Tabel 6.19 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pariwisata

		Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Dari total 2,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 98% berkunjung untuk wisata belanja yang turut mendukung perkembangan industri kreatif di Jawa Barat.	0,25	4	1,00
	2	Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai destinasi unggulan yang dapat dikembangkan di KSPN Pangandaran, Halimun, Puncak-Gede-Pangrango, serta 10 KPPN dan 3 DPN dengan didukung 108 DTW dan 215 desa wisata.	0,17	3	0,50
	3	Penguatan industri kreatif sebagai salah satu atraksi utama wisata dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor pariwisata	0,25	2	0,50
	4	Masih besarnya pangsa pasar wisatawan di Jawa Barat mengakibatkan tingginya peluang untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif sesuai dengan keinginan konsumen	0,17	3	0,50
	5	Tingginya komunitas kreatif di Jawa Barat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata	0,17	2	0,33
		Subtotal	**1**		**2,83**

		Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Threats	1	Arah kebijakan yang ada belum berfokus pada pengembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata alam dan cagar budaya	0,25	-2	-0,50
	2	KSPN unggulan berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan tsunami	0,25	-3	-0,75
	3	Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung untuk mencari produk murah dengan kualitas rendah	0,17	-2	-0,33
	4	Adanya dominasi investasi berskala besar pada produk ekonomi kreatif tertentu yang menghambat perkembangan industri kreatif lokal	0,17	-3	-0,50
	5	Belum terbentuknya kolaborasi antarkomunitas pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan	0,17	-2	-0,33
		Subtotal	**1**		**-2,42**
		TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL			**0,42**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pariwisata berada pada kuadran **agresif**, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).



Gambar 6.4 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pariwisata
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Terdapat 4 strategi memperkuat daya saing sektor pariwisata, yaitu:

1. **Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri kreatif** melalui peningkatan kerjasama dan kelembagaan serta pengembangan bisnis dan pemasaran (S1-S3-O4-O5);
2. **Penguatan konektivitas dan transportasi** untuk mendukung peningkatan pergerakan wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan moda transportasi wisata (S2-O1-O2);

3. **Peningkatan keterkaikan destinasi pariwisata** melalui manajemen bisnis dan destinasi wisata untuk mengakomodasi minat wisatawan (S1-S4-O2-O3); dan
4. **Pemanfaatan kemajuan teknologi** untuk memperkuat kualitas industri dan pangsa pasar pariwisata berbasis ekonomi kreatif (S5-O2-O3).

6.2.5. Penyusunan Strategi Fokus Pelayanan Dasar

Analisis PESTLE, 5 FORCES, IFAS EFAS, SWOT, dan *grand strategy* sektor pariwisata diuraikan sebagai berikut.

1.) Analisis PESTLE Fokus Pelayanan Dasar

Analisis PESTLE fokus pelayanan dasar menunjukan bahwa parameter lingkungan dinilai menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pemenuhan pelayanan dasar perkotaan Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan. Analisis PESTLE fokus pelayanan dasar secara lebih rinci dijelaskan pada Tabel 6.20.

Tabel 6.20 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pelayanan Dasar

Parameter	*Opportunities*	*Threats*	Bobot
Political	Kawasan Metropolitan di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat merupakan motor penggerak ekonomi nasional	Belum jelasnya kewenangan pengelolaan kawasan perkotaan terutama metropolitan yang multisektor dan administrasi	6%
Economic	Wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional (Jabodetabek kontribusi 26% GDP dan Cekungan Bandung kontribusi 3% GDP)	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan	12%
Sociological	Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mecapai 51 juta jiwa (peringkat 1 nasional), dengan tingkat urbanisasi tertinggi nasional dimana 67% penduduk tinggal di wilayah metropolitan	Tidak tersedianya aktivitas ekonomi yang berkualitas sebagai lapangan usaha bagi penduduk perkotaan dari berbagai lapisan sosial dan latar belakang pendidikan	12%
Technological	Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan kawasan perkotaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkotaan	Ketergantungan terhadap teknologi dapat meningkatkan kerentanan kejahatan cyber dalam sistem pelayanan perkotaan	24%
Legal	Telah ditetapkannya rencana induk pengembangan perkotaan (RTR KSN) sebagai arah pengembangan perkotaan kedepan	Rendahnya aspek pengendalian dalam pengembangan kawasan perkotaan sehingga tidak sesuainya pembangunan dengan rencana pengembangan	18%
Environment	Tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan sehingga kapasitas	Perkembangan perkotaan yang tidak didukung dengan penyediaan	29%

Parameter	*Opportunities*	*Threats*	Bobot
	kawasan dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan	infrastruktur yang memadai dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.) Analisis 5-forces Fokus Pelayanan Dasar

Dalam analisis 5-*forces* fokus pelayanan dasar, 5 aspek yang ditinjau adalah aksesibilitas, kependudukan, aktivitas perkotaan, pengembangan kawasan, dan infrastruktur. Secara rinci analisis 5-*forces* fokus pelayanan dasar dapat dilihat pada Tabel 6.21.

Tabel 6.21 Analisis 5-*forces* (Meso) Fokus Pelayanan Dasar

Parameter	*Opportunities*	*Threats*
Rivalry Among Existing Competitor		
Inovasi	Keberadaan 2 Metropolitan meningkatkan peluang aglomerasi ekonomi perkotaan yang memberikan tingginya akses terhadap peluang usaha dan informasi terkini	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan
Bargaining Power of Customers		
Trend Eksisting	Besarnya kesempatan kerja kawasan perkotaan yang terdiri dari berbagai sektor dengan beragam kebutuhan keahlian yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik	Tingginya urbanisasi menyebabkan besarnya kebutuhan infrastruktur yang belum diimbangi dengan kemampuan penyediaan layanan perkotaan
Bargaining Power of Supplies		
Ketergantungan Saat Ini	Tingginya kemampuan ekonomi perkotaan untuk mengakomodir pengembangan aktivitas perkotaan	Keterbatasan daya dukung lingkungan dalam pengembangan aktivitas perkotaan mengakibatkan minimnya ruang gerak untuk pengembangan
Threat of New Entrants		
Tantangan yang Dihadapi	Tingginya urbanisasi dapat mendorong aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah ekonomi di kawasan perkotaan	Migrasi penduduk di kawasan perkotaan tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan ekonomi kawasan perkotaan
Threat of Substitutes		
Trend Analisis PESTLE	Tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan sehingga kapasitas kawasan dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan	Perkembangan perkotaan yang tidak didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.) Analisis SWOT Fokus Pelayanan Dasar

Empat misi yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing *grand* strategi. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (*strengths),* kelemahan *(weakenesses),* peluang

(*opportunities)* dan ancaman (*threats)* pada setiap fokus pengembangan di Jawa Barat. Analisis SWOT untuk fokus pelayanan dasar ditampilkan pada Tabel 6.22

Tabel 6.22 Analisis SWOT Fokus Pelayanan Dasar

	Strengths		***Weaknesses***
1	Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan kawasan perkotaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkotaan	1	Wilayah dengan Multi Bahaya Bencana Tinggi (gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tanah longsor, tsunami, serta banjir) dan kondisi fisik yang sulit dikembangkan.
2	Tingginya daya tampung lingkungan perkotaan sehingga kapasitas kawasan dapat mengakomodir perkembangan perkotaan	2	Akses Air Minum Perpipaan dan Pengolahan Limbah Aman masih jauh dari target RJMN 2024.
3	Ketersediaan idle capacity di Provinsi Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih hingga 2030	3	Wilayah perkotaan memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan waktu tempuh dari kota sekitar Bodebek menuju kota inti mencapai 2,5 jam dan dari kota sekitar Cekungan Bandung menuju Kota Inti Bandung mencapai 2 jam
4	Wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional (Jabodetabek kontribusi 26% GDP dan Cekungan Bandung kontribusi 3% GDP)	4	Belum siapnya sarana prasarana perkotaan untuk meminimalisir masalah lingkungan dan risiko bencana
5	Ketersediaan lahan untuk membentuk permukiman vertikal baru untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk	5	Telah terbentuk beberapa infrastruktur pengolahan persampahan yang masih belum dimanfaatkan karena terkenda masalah lahan
	Opportunities		***Threats***
1	Keberadaan 2 Metropolitan meningkatkan peluang aglomerasi ekonomi perkotaan yang memberikan tingginya akses terhadap peluang usaha dan informasi terkini	1	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan
2	Besarnya kesempatan kerja kawasan perkotaan yang terdiri dari berbagai sektor dengan beragam kebutuhan keahlian yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik	2	Tingginya urbanisasi menyebabkan besarnya kebutuhan infrastruktur yang belum diimbangi dengan kemampuan penyediaan layanan perkotaan
3	Tingginya kemampuan ekonomi perkotaan untuk mengakomodir pengembangan aktivitas perkotaan	3	Keterbatasan daya dukung lingkungan dalam pengembangan aktivitas perkotaan mengakibatkan minimnya ruang gerak untuk pengembangan
4	Tingginya urbanisasi dapat mendorong aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah ekonomi di kawasan perkotaan	4	Migrasi penduduk di kawasan perkotaan tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan ekonomi kawasan perkotaan
5	Telah ditetapkannya rencana induk pengembangan perkotaan (RTR KSN) sebagai arah pengembangan perkotaan ke depan	5	Rendahnya aspek pengendalian dalam pengembangan kawasan perkotaan sehingga tidak sesuainya pembangunan dengan rencana pengembangan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kemudian, dilakukan pembobotan dan *rating* pada masing-masing komponen dalam SWOT untuk menghasilkan skor. Pembobotan faktor internal fokus pelayanan dasar ditampilkan pada Tabel 6.23.

Tabel 6.23 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pelayanan Dasar

Faktor Internal			Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan kawasan perkotaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkotaan	0,25	3	0,75
	2	Tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan sehingga kapasitas kawasan dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan	0,17	2	0,33
	3	Ketersediaan idle capacity di Provinsi Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih hingga 2030	0,25	3	0,75
	4	Wilayah perkotaan memiliki kontribusi ekonomi sangat tinggi bagi ekonomi nasional (Jabodetabek kontribusi 26% GDP dan Cekungan Bandung kontribusi 3% GDP)	0,17	2	0,33
	5	Ketersediaan lahan untuk membentuk permukiman vertikal baru untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk	0,17	2	0,33
		Subtotal	**1**		**2,50**
Weaknesses	1	Wilayah dengan Multi Bahaya Bencana Tinggi (gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tanah longsor, tsunami, serta banjir) dan kondisi fisik yang sulit dikembangkan.	0,25	-2	-0,50
	2	Akses Air Minum Perpipaan dan Pengolahan Limbah Aman masih jauh dari target RJMN 2024.	0,25	-2	-0,50
	3	Wilayah perkotaan memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan waktu tempuh dari kota sekitar Bodebek menuju kota inti mencapai 2,5 jam dan dari kota sekitar Cekungan Bandung menuju Kota Inti Bandung mencapai 2 jam	0,17	-2	-0,33
	4	Belum siapnya sarana prasarana perkotaan untuk meminimalisir masalah lingkungan dan risiko bencana	0,17	-2	-0,33
	5	Telah terbentuk beberapa infrastruktur pengolahan persampahan yang masih belum dimanfaatkan karena terkenda masalah lahan	0,17	-3	-0,50
		Subtotal	**1**		**-2,17**
		TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			**0,33**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

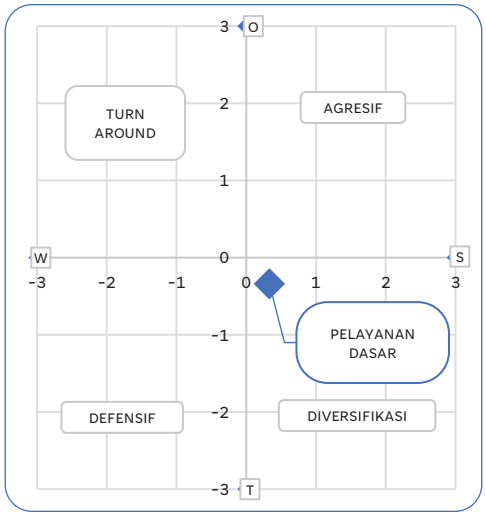
Pembobotan faktor eksternal fokus pelayanan dasar ditampilkan pada Tabel 6.24.

Tabel 6.24 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pelayanan Dasar

Faktor Eksternal			Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Keberadaan 2 Metropolitan meningkatkan peluang aglomerasi ekonomi perkotaan yang memberikan tingginya akses terhadap peluang usaha dan informasi terkini	0,20	3	0,60
	2	Besarnya kesempatan kerja kawasan perkotaan yang terdiri dari berbagai sektor dengan beragam kebutuhan keahlian yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur perkotaan dan fasilitas publik	0,13	2	0,27
	3	Tingginya kemampuan ekonomi perkotaan untuk mengakomodir pengembangan aktivitas perkotaan	0,27	4	1,07
	4	Tingginya urbanisasi dapat mendorong aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah ekonomi di kawasan perkotaan	0,20	2	0,40
	5	Tingginya daya tampung lingkungan kawasan perkotaan sehingga kapasitas kawasan dapat mengakomodasi perkembangan perkotaan	0,20	2	0,40
		Subtotal	**1**		**2,73**
Threats	1	Potensi terjadinya urban sprawl yang menyebabkan tidak efisiennya penyediaan infrastruktur dan prasarana perkotaan	0,15	-2	-0,31
	2	Tingginya urbanisasi menyebabkan besarnya kebutuhan infrastruktur yang belum diimbangi dengan kemampuan penyediaan layanan perkotaan	0,23	-4	-0,92
	3	Keterbatasan daya dukung lingkungan dalam pengembangan aktivitas perkotaan mengakibatkan minimnya ruang gerak untuk pengembangan	0,15	-3	-0,46
	4	Migrasi penduduk di kawasan perkotaan tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan ekonomi kawasan perkotaan	0,23	-3	-0,69
	5	Rendahnya aspek pengendalian dalam pengembangan kawasan perkotaan sehingga tidak sesuainya pembangunan dengan rencana pengembangan	0,23	-3	-0,69
		Subtotal	**1**		**-3,08**
		TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL			**-0,34**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pelayanan dasar berada pada kuadran **diversifikasi**, yang berarti strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan ancaman (*threats*).



Gambar 6.5 Kuadran Penentuan Strategi Fokus Pelayanan Dasar
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Strategi pemenuhan standar pelayanan sektor pelayanan dasar dijabarkan menjadi:

1. **Pengembangan permukiman secara polisentris** melalui revitalisasi kawasan dan ekonomi bernilai tambah (S4-S5-T1-T3);
2. **Peningkatan layanan dasar** melalui penyediaan infrastruktur permukiman dengan sistem pengelolaan terpusat dan teknologi ramah lingkungan (S2-S3-T2-T3);
3. **Peningkatan ketahanan terhadap bencana** malalui sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana (S2-T5);
4. **Peningkatan layanan transportasi publik dan kemasyarakatan** dengan memanfaatkan teknologi informasi (S1-T5); dan
5. **Peningkatan integrasi pengelolaan** melalui penguatan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan (S4-T4).

6.3. Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan)

Skenario perumusan kawasan prioritas meliputi penentuan kawasan prioritas dan tahapan pengembangannya.

6.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas

Dalam menentukan kawasan prioritas disusun penilaian kawasan berdasarkan metode *multicriteria analysis*. Daftar panjang kawasan prioritas yang telah disusun diberikan bobot berdasarkan kriteria-kriteria yang sesuai untuk mendapatkan daftar kawasan prioritas yang akan ditangani hingga tahun 2034.

A. Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Industri

Parameter penilaian untuk fokus industri adalah sebagai berikut.

Tabel 6.25 Parameter Penilaian Fokus Industri

Kode	Parameter	Keterangan	Penilaian	
			Tidak	Ya
A	RIPIN 2015-2035	Tercantum dalam RIPIN	0	1
B	Perpres 87/2021	Tercantum dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	0	1
C	Kedekatan dengan jalan tol	Berjarak <10 km	0	1
D	Kedekatan dengan pelabuhan utama	Berjarak <50 km	0	1
E	WPPI	Termasuk dalam delineasi WPPI	0	1
F	Kondisi eksisting	Sudah beroperasi	0	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Parameter tersebut kemudian digunakan untuk menilai lokasi kawasan industri yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.26.

Tabel 6.26 Penilaian Kawasan Fokus Industri

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter						Total
			A	B	C	D	E	F	
1	Bekasi International Industrial Estate	Bodebekkar	1	0	1	1	1	1	5
2	MM2100 Industrial Town	Bodebekkar	1	0	1	1	1	1	5
3	Kawasan Industri Jababeka	Bodebekkar	1	0	1	1	1	1	5
4	East Jakarta Industrial Park	Bodebekkar	1	0	1	1	1	1	5
5	Kawasan Industri Lippo Cikarang	Bodebekkar	1	0	1	1	1	1	5
6	Greenland International Industrial Center (GIIC)	Bodebekkar	1	0	1	0	1	1	4
7	KIT Indonesia China	Bodebekkar	1	0	0	0	1	1	3
8	KI SKI	Bodebekkar	1	0	0	0	1	0	2
9	KI Cilamaya	Bodebekkar	1	0	0	1	1	1	4
10	KI Indotaisei	Bodebekkar	1	0	1	0	1	0	3
11	KI Kujang Cikampek	Bodebekkar	1	0	1	0	1	1	4
12	Karawang International Industrial City	Bodebekkar	1	0	1	0	1	1	4
13	Podomoro Industrial Park Karawang	Bodebekkar	1	0	0	0	1	1	3
14	Karawang Jabar Industrial Estate	Bodebekkar	1	0	1	0	1	0	3
15	Cibinong Center Industrial Estate	Bodebekkar	1	0	1	1	1	1	5
16	KI Sentul	Bodebekkar	1	0	0	0	1	1	3
17	Cipali West Subang	Rebana	1	1	1	0	1	1	5
18	Butom	Rebana	0	1	1	0	1	0	3
19	Tukdana	Rebana	1	1	0	0	1	0	3
20	Patrol	Rebana	1	1	0	1	1	0	4
21	Cipali East Subang (KIT Subang)	Rebana	1	1	1	0	1	0	4
22	Losarang	Rebana	1	1	0	1	1	1	5
23	Cirebon	Rebana	1	1	1	0	1	1	5
24	Kertajati	Rebana	1	1	1	1	1	0	5
25	Cipali Indramayu	Rebana	1	1	1	0	1	1	5

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter						Total
			A	B	C	D	E	F	
26	Krangkeng	Rebana	1	1	0	1	1	1	5
27	Balongan	Rebana	1	1	0	1	1	1	5
28	Patimban	Rebana	1	1	1	1	1	0	5
29	Jatiwangi	Rebana	1	1	1	0	1	0	4
30	KI Sukabumi	DPP Bandung-Halimun-Ciletuh	1	1	1	0	0	1	4
31	Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta		1	0	1	0	1	1	4
32	KI Rancaekek	Cekungan Bandung	1	0	1	0	0	1	3
33	Kawasan Industri Gobel	Bodebekkar	0	0	1	1	1	1	4
34	Bekasi Fajar Industrial Estate	Bodebekkar	0	0	1	1	1	1	4
35	GT Tech Park - Karawang	Bodebekkar	0	0	0	0	1	0	1
36	Artha Industrial Hill	Bodebekkar	0	0	1	0	1	0	2
37	Suryacipta City of Industri	Bodebekkar	0	0	1	0	1	0	2
38	Marunda Center	Bodebekkar	0	0	1	0	1	1	3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian di atas, kawasan prioritas untuk **fokus industri** adalah kawasan industri dalam Kawasan Rebana, yaitu **(1) Cipali West Subang, (2) Losarang, (3) Cirebon, (4) Kertajati, (5) Cipali Indramayu, (6) Krangkeng, (7) Balongan,** dan **(8) Patimban**, serta dalam kawasan industri Bodebek, yaitu **(1) Bekasi Industrial Estate, (2) MM2100 Industrial Town, (3) KI Jababeka, (4) East Jakarta Industrial Park,** dan **(5) KI Lippo Cikarang.**

B. Penentuan Kawasan Prioritas Fokus Pertanian

Parameter penilaian untuk fokus pertanian adalah sebagai berikut.

Tabel 6.27 Parameter Penilaian Fokus Pertanian

Kode	Parameter	Penilaian		
		0	1	2
A	Indeks Penanaman (IP)	< 1	1–2	> 2
B	Jumlah produksi pertanian (2021)	< 500 ribu ton/tahun	500 ribu–1 juta ton/tahun	> 1 juta ton/tahun
C	Produktivitas tanam padi	< 50 kuintal/Ha	50–60 kuintal/Ha	> 60 kuintal/Ha
D	Luas Tanam Padi 2021	< 50.000 Ha	50.000-150.000 Ha	> 150.000 Ha
E	Luas Daerah Irigasi Teknis	< 20.000 Ha	20.000-50.000 Ha	> 50.000 Ha

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Parameter tersebut kemudian digunakan untuk menilai lokasi kawasan pertanian yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.28.

Tabel 6.28 Penilaian Kawasan Fokus Pertanian

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter					Total
			A	B	C	D	E	
1	Kab. Bekasi	Bodebekkar	1	1	2	1	1	6
2	Kab. Bogor	Bodebekkar	1	1	1	1	0	4
3	Kab. Karawang	Bodebekkar	1	2	2	2	2	9

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter					Total
			A	B	C	D	E	
4	Kab. Subang	Rebana	2	1	1	2	2	8
5	Kab. Indramayu	Rebana	1	2	2	2	2	9
6	Kab. Cirebon	Rebana	1	0	1	1	1	4
7	Kab. Majalengka	Rebana	1	1	1	1	1	5
8	Kab. Sukabumi	Pansela Jawa Barat	2	1	1	2	1	7
9	Kab. Cianjur	Pansela Jawa Barat	2	1	1	2	1	7
10	Kab. Garut	Pansela Jawa Barat	2	0	1	1	0	4
11	Kab. Tasikmalaya	Pansela Jawa Barat	2	0	1	1	1	5
12	Kab. Ciamis	Pansela Jawa Barat	2	0	1	1	0	4

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian di atas, kawasan prioritas untuk **fokus pertanian** adalah kawasan pertanian di **(1) Kabupaten Bekasi, (2) Kabupaten Karawang, (3) Kabupaten Subang, (4) Kabupaten Indramayu, (5) Kabupaten Sukabumi,** dan **(6) Kabupaten Cianjur**.

C. Pariwisata & Industri Kreatif

Parameter penilaian untuk fokus pariwisata adalah sebagai berikut.

Tabel 6.29 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata

Kode	Parameter	Penilaian		
		0	1	2
A	Jarak dari metropolitan terdekat	> 100 km	50-100 km	< 50 km
B	Kedekatan dengan hub (bandara, stasiun, pelabuhan)	> 40 km	20-40 km	< 20 km
C	RIPPARNAS	Tidak tercantum dalam RIPPARNAS	Tercantum dalam RIPPASNAS sebagai KPPN	Tercantum dalam RIPPASNAS sebagai KSPN
D	Kunjungan wisatawan per tahun	< 1 juta orang/tahun	1-2 juta orang/tahun	> 2 juta orang/tahun
E	Lama tinggal (*length of stay*) wisatawan	< 1,5 hari	1,5-1,7 hari	> 1,7 hari
F	RTRW Nasional	Tidak termasuk dalam Kawasan Andalan	Termasuk dalam Kawasan Andalan	-

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Parameter tersebut kemudian digunakan untuk menilai lokasi kawasan pariwisata yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.30.

Tabel 6.30 Penilaian Kawasan Fokus Pariwisata

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter						Total
			A	B	C	D	E	F	
1	KSPN Halimun dsk.	Bandung-Halimun-Ciletuh	1	1	2	1	1	0	6
2	KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk.	Bodebekkar	2	0	2	2	1	0	7
3	KSPN Ciwidey dsk.	Jawa Barat Selatan	2	1	2	2	0	0	7
4	KSPN Tangkuban Perahu dsk.	Cekungan Bandung	2	1	2	2	0	0	7
5	KSPN Bandung Kota dsk.	Cekungan Bandung	2	2	2	2	2	1	11

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter						Total
			A	B	C	D	E	F	
6	KSPN Pangandaran dsk.	Jawa Barat Selatan	0	2	2	1	1	1	7
7	KPPN Puncak-Gede-Pangrango dsk.	Bodebekkar	1	0	1	2	1	0	5
8	KPPN Bogor-Ciawi dsk.	Bodebekkar	1	0	1	2	1	0	5
9	KPPN Gn. Halimun dsk.	Bandung-Halimun-Ciletuh	1	1	1	2	1	0	6
10	KPPN Pelabuhan Ratu dsk.	Bandung-Halimun-Ciletuh	1	2	1	2	1	0	7
11	KPPN Bandung Kota dsk.	Cekungan Bandung	2	2	1	2	2	1	10
12	KPPN Tangkuban Perahu dsk.	Cekungan Bandung	2	1	1	2	1	0	7
13	KPPN Lembang dsk.	Jawa Barat Selatan	2	1	1	1	1	0	6
14	KPPN Ciwidey dsk.	Cekungan Bandung	2	1	1	2	1	0	7
15	KPPN Tasikmalaya dsk.	Jawa Barat Selatan	0	2	1	0	0	0	3
16	KPPN Pangandaran dsk.	Jawa Barat Selatan	1	2	1	1	1	1	7

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian di atas, kawasan prioritas untuk **fokus pariwisata** adalah kawasan pariwisata di **(1) KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk., (2) KSPN dan KPPN Ciwidey dsk., (3) KSPN dan KPPN Tangkuban Perahu dsk., (4) KSPN dan KPPN Bandung Kota dsk., (5) KSPN dan KPPN Pangandaran dsk.,** dan **(6) KPPN Pelabuhan Ratu dsk.**

D. Pelayanan Dasar

Parameter penilaian untuk fokus pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

Tabel 6.31 Parameter Penilaian Fokus Pelayanan Dasar

Kode	Parameter	Penilaian		
		0	1	2
A	Beban perkotaan berdasarkan ukuran kota	< 1 juta penduduk	1-5 juta penduduk	> 5 juta penduduk
B	Kepadatan penduduk	< 10 jiwa/Ha	10-20 jiwa/Ha	> 20 jiwa/Ha
C	Fungsi pelayanan perkotaan	PKL	PKW	PKN
D	Kontribusi PDRB terhadap Jawa Barat	< 2%	2-4%	> 4%
E	Akses air minum perpipaan	< 15%	15-30%	> 30% (target RPJMN 2020-2024)
F	Akses sanitasi layak	< 60%	60-90%	> 90% (target RPJMN 2020-2024)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Parameter tersebut kemudian digunakan untuk menilai lokasi kawasan pelayanan dasar yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.32**.**

Tabel 6.32 Penilaian Kawasan Fokus Pelayanan Dasar

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter						Total
			A	B	C	D	E	F	
1	PKN Cekungan Bandung	Cekungan Bandung	2	2	2	2	2	1	11
2	PKN Cirebon	Rebana	1	2	2	2	2	2	11
3	PKW Sukabumi	Bandung-Halimun-Ciletuh	1	2	1	1	0	0	5
4	PKW Cikampek-Cikopo	Bodebekkar	2	1	1	2	1	1	8

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Parameter						Total
			A	B	C	D	E	F	
5	PKW Pelabuhan Ratu	Bandung-Halimun-Ciletuh	1	0	1	1	0	1	4
6	PKW Indramayu	Rebana	1	0	1	2	1	1	6
7	PKW Kadipaten	Rebana	1	1	1	0	0	1	4
8	PKW Tasikmalaya	Jawa Barat Selatan	1	2	1	0	0	0	4
9	PKW Pangandaran	Jawa Barat Selatan	0	0	1	1	1	1	4
10	PKW Cidaun	Bodebekkar	1	0	1	0	0	0	2

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian di atas, kawasan prioritas untuk **fokus pelayanan dasar** adalah **(1) PKN Cekungan Bandung** dan **(2) PKN Cirebon**.

E. Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil *multicriteria analysis* yang telah dilakukan, terdapat 4 kawasan prioritas di Provinsi Jawa Barat dengan masing-masing fokus perencanaan. Terdapat kawasan prioritas yang memiliki lebih dari satu fokus perencanaan, yaitu Kawasan Rebana, karena memiliki fungsi ganda pada kawasan tersebut. Sebagai contoh, sektor pertanian pada Kawasan Rebana berada di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka, sedangkan sektor industri berada di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Kawasan prioritas Provinsi Jawa Barat beserta fokus perencanaannya terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 6.33 Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat

No	Kawasan Prioritas	Fokus
1	Cekungan Bandung	Pelayanan Dasar
2	Rebana	Pertanian, Industri
3	DPP Bandung-Halimun-Ciletuh	Pariwisata
4	Jawa Barat Selatan	Pariwisata

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.3.2. Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas

Pengembangan kawasan prioritas dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2025-2029 bagi kawasan prioritas terpilih sesuai dengan hasil *multicriteria analysis*. Sementara itu, bagi kawasan prioritas lainnya pengembangan dilakukan setelah tahun 2030-2034. Keterangan lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.34.

Tabel 6.34 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034
	Industri			
1	Bekasi International Industrial Estate	Bodebekkar		
2	MM2100 Industrial Town	Bodebekkar		
3	Kawasan Industri Jababeka	Bodebekkar		
4	East Jakarta Industrial Park	Bodebekkar		
5	Kawasan Industri Lippo Cikarang	Bodebekkar		

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034
6	Greenland International Industrial Center	Bodebekkar		
7	KIT Indonesia China	Bodebekkar		
8	KI SKI	Bodebekkar		
9	KI Cilamaya	Bodebekkar		
10	KI Indotaisei	Bodebekkar		
11	KI Kujang Cikampek	Bodebekkar		
12	Karawang International Industrial City	Bodebekkar		
13	Podomoro Industrial Park Karawang	Bodebekkar		
14	Karawang Jabar Industrial Estate	Bodebekkar		
15	Cibinong Center Industrial Estate	Bodebekkar		
16	KI Sentul	Bodebekkar		
17	Cipali West Subang	Rebana		
18	Butom	Rebana		
19	Tukdana	Rebana		
20	Patrol	Rebana		
21	Cipali East Subang (KIT Subang)	Rebana		
22	Losarang	Rebana		
23	Cirebon	Rebana		
24	Kertajati	Rebana		
25	Cipali Indramayu	Rebana		
26	Krangkeng	Rebana		
27	Balongan	Rebana		
28	Patimban	Rebana		
29	Jatiwangi	Rebana		
30	KI Sukabumi	DPP Bandung-Halimun-Ciletuh		
31	Kota Bukit Indah Industrial City Purwakarta			
32	KI Rancaekek	Cekungan Bandung		
33	Kawasan Industri Gobel	Bodebekkar		
34	Bekasi Fajar Industrial Estate	Bodebekkar		
35	GT Tech Park - Karawang	Bodebekkar		
36	Artha Industrial Hill	Bodebekkar		
37	Suryacipta City of Industri	Bodebekkar		
38	Marunda Center	Bodebekkar		
	Pertanian			
1	Kabupaten Bekasi	Bodebekkar		
2	Kabupaten Bogor	Bodebekkar		
3	Kabupaten Karawang	Bodebekkar		
4	Kabupaten Subang	Rebana		
5	Kabupaten Indramayu	Rebana		
6	Kabupaten Cirebon	Rebana		
7	Kabupaten Majalengka	Rebana		
8	Kabupaten Sukabumi	Pansela Jawa Barat		
9	Kabupaten Cianjur	Pansela Jawa Barat		
10	Kabupaten Garut	Pansela Jawa Barat		
11	Kabupaten Tasikmalaya	Pansela Jawa Barat		
12	Kabupaten Ciamis	Pansela Jawa Barat		
	Pariwisata			
1	KSPN Halimun dsk.	Bandung-Halimun-Ciletuh		
2	KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk.	Bandung-Halimun-Ciletuh		
3	KSPN Ciwidey dsk.	Jawa Barat Selatan		
4	KSPN Tangkuban Perahu dsk.	Cekungan Bandung		
5	KSPN Bandung Kota dsk.	Cekungan Bandung		
6	KSPN Pangandaran dsk.	Jawa Barat Selatan		
7	KPPN Puncak-Gede-Pangrango dsk.	Bandung-Halimun-Ciletuh		

No	Lokasi Spesifik	Kawasan Prioritas	Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034
8	KPPN Bogor-Ciawi dsk.	Bodebekkar		
9	KPPN Gn. Halimun dsk.	DPP Bandung-Halimun-Ciletuh		
10	KPPN Pelabuhan Ratu dsk.	DPP Bandung-Halimun-Ciletuh		
11	KPPN Bandung Kota dsk.	Cekungan Bandung		
12	KPPN Tangkuban Perahu dsk.	Cekungan Bandung		
13	KPPN Lembang dsk.	Jawa Barat Selatan		
14	KPPN Ciwidey dsk.	Cekungan Bandung		
15	KPPN Tasikmalaya dsk.	Jawa Barat Selatan		
16	KPPN Pangandaran dsk.	Jawa Barat Selatan		
	Perkotaan			
1	PKN Cekungan Bandung	Cekungan Bandung		
2	PKN Cirebon	Rebana		
3	PKW Sukabumi	DPP Bandung-Halimun-Ciletuh		
4	PKW Cikampek-Cikopo	Bodebekkar		
5	PKW Pelabuhan Ratu	DPP Bandung-Halimun-Ciletuh		
6	PKW Indramayu	Rebana		
7	PKW Kadipaten	Rebana		
8	PKW Tasikmalaya	Jawa Barat Selatan		
9	PKW Pangandaran	Jawa Barat Selatan		
10	PKW Cidaun	Jawa Barat Selatan		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

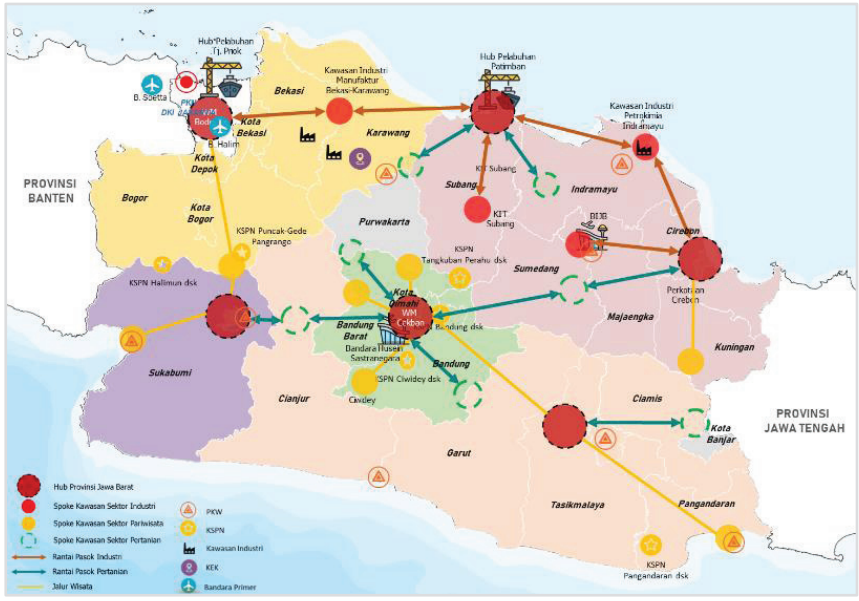
Berdasarkan analisis pada subbab 6.3.1, diperoleh kawasan prioritas untuk masing-masing fokus pengembangan yang ditentukan berdasarkan indikator: kesiapan kawasan, dukungan infrastruktur, dukungan kebijakan, serta kontribusi ekonomi yang signifikan. Kawasan prioritas dari setiap fokus pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Fokus pengembangan industri berada di wilayah utara Provinsi Jawa Barat yang berada di Kawasan Bodebekkar (Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang) serta Kawasan Rebana (Cipali West Subang, Losarang, Cirebon, Kertajati, Cipali Indramayu, Krangkeng, Balongan, dan Patimban);
2. Fokus pengembangan pertanian berada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur;
3. Fokus pengembangan pariwisata berada di wilayah KSPN Puncak-Gede-Pangrango dsk, KSPN dan KPPN Ciwidey dsk, KSPN dan KPPN Tangkuban Perahu dsk, KSPN dan KPPN Bandung Kota dsk, KPPN Pelabuhan Ratu dsk, serta KSPN dan KPPN Pangandaran dsk;
4. Fokus pengembangan perkotaan berada di wilayah metropolitan yang berada di PKN Cekungan Bandung dan PKN Cirebon.

Setiap kawasan memiliki hirarki pusat pengembangan yang ditentukan berdasarkan gambaran arus logistik komoditas unggulan baik untuk sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata. Pembanguan *hub* dan *spoke* untuk Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. *Hub* PKW Sukabumi dengan *spoke* PKW Pelabuhan Ratu, Cianjur, dan Bogor yang dikembangkan dengan sektor unggulan pertanian;
2. *Hub* PKN Cekungan Bandung dengan *spoke* Padalarang, Lembang, Ciwidey, dan Garut dengan sektor unggulan pariwisata;
3. *Hub* Patimban dengan *spoke* KIT Subang, PKW Cikampek-Kopo, dan PKW Indramayu dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
4. *Hub* Cirebon dengan *spoke* Kuningan, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, dan Sumedang dengan sektor unggulan pertanian; dan
5. *Hub* PKW Tasik dengan *spoke* PKW Pangandaran dan Kota Banjar yang dikembangkan dengan sektor unggulan pariwisata dan pertanian.

Rumusan kawasan prioritas dan tahapan pengembangannya dapat dilihat dalam Gambar 6.6.



Gambar 6.6 Tahap Pengembangan Kawasan Prioritas di Provinsi Jawa Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Berdasarkan analsis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan industri prioritas penanganan hingga tahun 2029 di Provinsi Jawa Barat yaitu Kawasan Cekungan Bandung, Kawasan Rebana, Kawasan DPP Bandung-Halimun-Ciletuh, dan Kawasan Jawa Barat Selatan.

7.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah

Subbab ini akan menjelaskan mengenai proyeksi kebutuhan infrastruktur masa mendatang berdasarkan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kawasan, dan perkembangan sektor prioritas, yang dibandingkan dengan ketersediaan masa kini sehingga menghasilkan gap kebutuhan pembangunan infrastruktur.

7.1.1. Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Jawa Barat

1) Infrastruktur SDA Provinsi Jawa Barat

Total kapasitas tampung di Jawa Barat berupa bendungan/waduk adalah sebesar 4.066.525.705 m3 sedangkan kapasitas tampung embung sebesar 11.319.618 m3, sehingga total kapasitas tampung di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.077.845.323 m3. Dengan jumlah penduduk sebesar 51.576.095 jiwa, kapasitas tampung yang ada sebesar 79,1 m3/capita/tahun. Saat ini telah ada beberapa waduk/bendungan di Jawa Barat yang direncanakan dibangun hingga 2034 yaitu:

Tabel 7.1 Bendungan Konstruksi dan Rencana di Provinsi Jawa Barat

Bendungan	Kabuapaten/Kota	Tahun Selesai	Volume Tampungan (m3)
Eksisting Infrastruktur SDA			
Seluruh Bendungan/Waduk	Jawa Barat	-	4.066.525.705
Seluruh Embung	Jawa Barat	-	11.319.618
Total Tampugan Eksisting			**4.077.845.323**
Rencana Infrastruktur SDA			
Cibeet	Bogor	2028	63.000.000
Cipamingkis	Bogor	2023	142.338.816
Leuwikeris	Ciamis	2023	45.350.000
Cijurey	Bogor	2028	11.864.721
Kadumanik	Majalengka	2029	65.000.000
Total Tampungan Infrastruktur SDA			**327.553.537**
Total Tampungn Tahun 2034			**4.405.398.860**
GAP Kebutuhan Air Baku			
GAP 2022 – 2029		Total: 76,3 Target: 70	6,3
GAP 2022 – 2034		Total: 70,4 Target: 115	-44,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dengan selesai dibangunnya waduk/bendungan di atas maka kapasitas tampung di Jawa Barat pada tahun 2034 berkurang menjadi 70,4 m3/capita/tahun. Hasil tersebut disebabkan karena jumlah bendungan/waduk yang terbangun tidak sebanding dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Untuk mencapai target 115 m3/capita/tahun, diperlukan pembangunan tampungan air baku lagi dengan kapasitas total sebesar 2.795.089.516 m3. Gap yang dihasilkan hingga tahun 2034 adalah sebesar 8,7 m3/capita/tahun.

2) Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat

Pengukuran konektivitas jalan diukur melalui waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu yang diperlukan (dalam jam) untuk menempuh perjalanan sepanjang 100 km. Waktu tempuh terbagi dalam dua kategori yaitu waktu tempuh lintas utama dan waktu tempuh perkotaan. Waktu tempuh lintas utama diukur pada koridor jalan yang telah ditentukan dalam dokumen Renstra Ditjen Bina Marga, dimana terdapat 9 koridor jalan utama di Provinsi Jawa Barat. Koridor dan waktu tempuh tersebut terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2 Waktu Tempuh Lintas Utama di Provinsi Jawa Barat

Ruas Lintas Utama	Jarak (Km)	Waktu Tempuh (Menit)	Kecepatan (jam/100km)	GAP Kecepatan (2029)	GAP Kecepatan (2034)
Jakarta-Cikampek	72	55	1,3	0,4	0,3
Jakarta-Sukabumi	73,7	64	1,4	0,3	0,2
Cikampek-Cirebon	115	88,5	1,3	0,4	0,3
Cikampek-Bandung	69,5	74	1,8	-0,1	-0,2
Sukabumi-Bandung	104	215	3,4	-1,7	-1,8
Bandung-Tasikmalaya	102	160,5	2,6	-0,9	-1,0
Cirebon-Tasikmalaya	97,9	173,5	3,0	-1,3	-1,4
Cirebon-Semarang	226	167,5	1,2	0,5	0,4
Tasikmalaya-Yogyakarta	292	397	2,3	-0,6	-0,7

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Target waktu tempuh lintas utama pada tahun 2029 adalah sebesar 1,7 dan meningkat menjadi 1,6 pada 2034. Dari data di atas yang masih belum mencapai target waktu tempuh adalah koridor jalan Sukabumi-Bandung, Bandung-Tasikmalaya, Cirebon-Tasikmalaya, Tasikmalaya-Yogyakarta. Waktu tempuh koridor Sukabumi-Bandung diproyeksikan akan membaik dengan dibangunnya keseluruhan Jalan Tol Sukabumi-Bandung hingga 2034. Koridor Bandung-Tasikmalaya dan Tasikmlaya-Yogyakarta juga diproyeksikan akan mengalami perbaikan waktu tempuh setelah Jalan Tol Bandung-Tasikmalaya-Cilacap selesai dibangun pada tahun 2034. Kondisi terparah di koridor Cirebon-Tasikmalaya diperkirakan waktu tempuhnya akan membaik setelah beroperasi seluruhnya ruas Tol Bandung-Dawuan selesai pada tahun 2024 yang akan mengurangi waktu tempuh cukup signifikan.

Waktu tempuh perkotaan dihitung pada ruas-ruas jalan perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Waktu tempuh perkotaan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3 Waktu Tempuh di Perkotaan di Provinsi Jawa Barat

Ruas Lintas Utama	Jarak (Km)	Waktu Tempuh (Menit)	Kecepatan (jam/100km)	GAP Kecepatan (2029)	GAP Kecapatan (2034)
Kota Bogor	1,9	7,5	6,6	-3,8	-4,1
Kota Bandung	20,4	56,5	4,6	-1,8	-2,1
Karawang	6,9	17	4,1	-1,3	-1,6
Kota Bekasi	13,3	26	3,3	-0,5	-0,8
Subang	23,9	40,5	2,8	0	-0,3
Indramayu	6,1	13,5	3,7	-0,9	-1,2
Kota Cirebon	7,6	20	4,4	-1,6	-1,9
Garut	4,8	14	4,9	-2,1	-2,4
Sukabumi	35,5	88	4,1	-1,3	-1,6
Pangandaran	5,1	10	3,3	-0,5	-0,8

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Target waktu tempuh di perkotaan pada tahun 2029 adalah sebesar 2,8 dan meningkat menjadi 2,5 pada 2034. Ruas yang terpilih adalah ruas pada Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pelayanan jalan tinggi terutama pada kawasan perkotaan/pusat kota. Dari data di atas, hanya ruas jalan perkotaan di Kabupaten Subang saja yang memenuhi target target waktu tempuh. Waktu tempuh yang cenderung lama ini bisa bisa disebabkan karena arus yang bertumpuk antara arus lokal dan arus menerus. Oleh karena itu, dengan adanya pemabangunan jalan tol hingga tahun 2034 berpotensi mengurangi kepadatan jalan perkotaan.

3) Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat

Kebutuhan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di kawasan permukiman dibutuhkan diantaranya adalah akses air minum perpipaan, akses sanitasi aman, akses pengolahan sampah, dan penataan kawasan kumuh.

A. Air Minum

Air minum perpipaan dimanfaatkan untuk memeuhi kebutuhan masyarakt agar tidak menggunakan air tanah. Baseline yang digunakan dalam menghitung kebutuhan air minum ini berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU (1996), tingkat konsumsi air rumah tangga bergantung pada kategori kota, kebutuhan air non domestri didasari pada Permen PUPR 18/2007 (kebutuhan air nondomestik adalah 15% dari kebutuhan air domestik), dan perhitungan jam puncak serta faktor kebocoran air berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, faktor jam puncak (fpuncak) berada dalam rentang 1,15–3. Pada dokumen ini, digunakan fpuncak 1,2. Tingkat kebutuhan air secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.4 Proyeksi Penyediaan Air Minum Perkotaan di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Kebutuhan Air Minum (lt/dtk)			
	2023	2025	2029	2034
Bogor	13.467	14.070	14.916	16.171
Sukabumi	5.103	5.356	5.714	6.561
Cianjur	4.677	4.910	5.238	6.014
Bandung	7.915	8.308	8.863	10.177
Garut	5.446	5.717	6.099	7.003
Tasikmalaya	3.022	3.172	3.384	4.663
Ciamis	2.069	2.171	2.316	3.192
Kuningan	1.871	1.964	2.095	2.887
Cirebon	4.564	4.791	5.111	5.869
Majalengka	2.084	2.188	2.334	3.216
Sumedang	1.987	2.086	2.225	3.066
Indramayu	2.991	3.140	3.349	4.615
Subang	2.776	2.914	3.108	4.283
Purwakarta	1.506	1.581	1.686	2.581
Karawang	4.897	5.140	5.483	6.296
Bekasi	8.054	8.454	9.019	10.356
Bandung Barat	3.543	3.719	3.967	4.555
Pangandaran	622	653	697	1.066
Kota Bogor	2.910	3.054	3.258	2.993
Kota Sukabumi	569	598	637	878
Kota Bandung	6.481	6.803	7.258	6.667
Kota Cirebon	832	874	932	856
Kota Bekasi	6.353	6.669	7.114	8.169
Kota Depok	6.414	6.733	7.183	6.598
Kota Cimahi	1.282	1.345	1.435	1.648
Kota Tasikmalaya	1.143	1.200	1.280	1.764
Kota Banjar	284	298	318	487
Prov. Jawa Barat	**102.864**	**107.908**	**115.019**	**132.635**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara keseluruhan, kebutuhan air minum di Provinsi Jawa Barat cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk hingga tahun 2034. Kabupaten Bogor memiliki kebutuhan air terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, tingkat pelayanan air minum perpipaan di Provinsi Jawa Barat masih belum memeuhi target pembangunan infrastruktur air minum perpipaan tahun 2025 sebesar 39%. Untuk target tahun 2034 sebesar 75% secara keseluruhan kabupaten/kota cenderung memiliki defisit. Secara lebih rinci, tingkat pelayanan air minum perpipaan seperti tabel berikut.

Tabel 7.5 Proyeksi Penyediaan Air Minum Perkotaan di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Kebutuhan Air Minum	Pelayanan						GAP 2022-2029	GAP 2022-2034
	2022	Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
	lt/dtk	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	lt/dtk
Bogor	13.467	3.640	27,0	7.661	51,36	12.128	75,0	-4.021	-8.488
Sukabumi	5.103	631	12,4	2.935	51,36	4.921	75,0	-2.303	-4.290
Cianjur	4.677	436	9,3	2.690	51,36	4.511	75,0	-2.254	-4.075
Bandung	7.915	1.954	24,7	4.552	51,36	7.633	75,0	-2.598	-5.679
Garut	5.446	556	10,2	3.132	51,36	5.252	75,0	-2.576	-4.696
Tasikmalaya	3.022	77	2,6	1.738	51,36	3.498	75,0	-1.661	-3.420
Ciamis	2.069	375	18,1	1.190	51,36	2.394	75,0	-815	-2.019
Kuningan	1.871	556	29,7	1.076	51,36	2.166	75,0	-520	-1.610
Cirebon	4.564	420	9,2	2.625	51,36	4.402	75,0	-2.205	-3.981
Majalengka	2.084	564	27,1	1.199	51,36	2.412	75,0	-635	-1.848
Sumedang	1.987	272	13,7	1.143	51,36	2.300	75,0	-870	-2.027
Indramayu	2.991	943	31,5	1.720	51,36	3.461	75,0	-777	-2.518

Prov. Jawa Barat	Kebutuhan Air Minum	Pelayanan						GAP 2022-2029	GAP 2022-2034
	2022	Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
	lt/dtk	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	lt/dtk
Subang	2.776	578	20,8	1.596	51,36	3.212	75,0	-1.019	-2.635
Purwakarta	1.506	195	13,0	866	51,36	1.936	75,0	-671	-1.741
Karawang	4.897	903	18,5	2.816	51,36	4.722	75,0	-1.913	-3.819
Bekasi	8.054	1.629	20,2	4.632	51,36	7.767	75,0	-3.003	-6.138
Bandung Barat	3.543	124	3,5	2.037	51,36	3.416	75,0	-1.913	-3.292
Pangandaran	622	68	11,0	358	51,36	800	75,0	-289	-731
Kota Bogor	2.910	2.425	83,3	1.673	51,36	2.245	75,0	751	180
Kota Sukabumi	569	56	9,8	327	51,36	659	75,0	-272	-603
Kota Bandung	6.481	2.917	45,0	3.728	51,36	5.000	75,0	-810	-2.083
Kota Cirebon	832	666	80,0	479	51,36	642	75,0	187	23
Kota Bekasi	6.353	704	11,1	3.654	51,36	6.127	75,0	-2.950	-5.423
Kota Depok	6.414	1.100	17,2	3.689	51,36	4.949	75,0	-2.589	-3.849
Kota Cimahi	1.282	149	11,6	737	51,36	1.236	75,0	-588	-1.087
Kota Tasik	1.143	152	13,3	657	51,36	1.323	75,0	-506	-1.171
Kota Banjar	284	50	17,5	163	51,36	365	75,0	-114	-315
Jawa Barat	**102.864**	**22.141**	**21,55**	**51.759**	**51,36**	**99.476**	75,0		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sementara itu, secara keseluruhan tingkat layanan air minum perpipaan di Provinsi Jawa Barat sebesar 21,55%. Beberapa wilayah yang sudah melampaui target layanan cenderung berada di wilayah perkotaan seperti Kota Bogor (83,3%), Kota Bandung (45,0%), dam Kota Cirebon 80,0%). Untuk wilayah lainnya masih berada dibawah target layanan dengan Kabupaten Tasikmalaya (2,6%), Kabupaten Bandung Barat (3,5%), dan Kabupaten Cirebon (9,2%) sebagai wilayah dengan tingkat layanan terendah. Pembangunan SPAM diarahkan kabupaten yang masih memiliki layanan air minum perpipaan dibawah target (30%).

B. Air Limbah

Sanitasi aman digunakan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Baseline yang digunakan dalam menghitung timbulan air limbah ini berdasarkan Buku A Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T Kementerian PUPR (2018), persentase timbulan air limbah domestik adalah 60–80% dari pemakaian air minum. Dalam dokumen ini, digunakan angka 80% dalam perhitungan. Timbulan air limbah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.6 Proyeksi Timbulan Air Limbah di Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Timbulan Air Limbah (lt/dtk)			
	2022	2025	2029	2034
Bogor	10.005	11.256	10.986	12.937
Sukabumi	4.059	4.285	4.457	5.249
Cianjur	3.721	3.928	4.086	4.811
Bandung	6.296	6.646	6.914	8.142
Garut	4.333	4.574	4.758	5.603
Tasikmalaya	2.404	2.538	2.640	3.731
Ciamis	1.646	1.737	1.807	2.553
Kuningan	1.489	1.571	1.635	2.310
Cirebon	3.631	3.833	3.987	4.695
Majalengka	1.658	1.750	1.821	2.573
Sumedang	1.581	1.669	1.736	2.453

Wilayah Jawa Barat	Timbulan Air Limbah (lt/dtk)			
	2022	2025	2029	2034
Indramayu	2.380	2.512	2.613	3.692
Subang	2.208	2.331	2.425	3.427
Purwakarta	1.198	1.264	1.315	2.065
Karawang	3.895	4.112	4.277	5.037
Bekasi	6.407	6.763	7.035	8.285
Bandung Barat	2.818	2.975	3.095	3.644
Pangandaran	495	522	543	853
Kota Bogor	2.315	2.444	2.542	2.395
Kota Sukabumi	453	478	497	703
Kota Bandung	5.156	5.443	5.662	5.334
Kota Cirebon	662	699	727	685
Kota Bekasi	5.054	5.335	5.550	6.535
Kota Depok	5.103	5.386	5.603	5.279
Kota Cimahi	1.020	1.076	1.119	1.318
Kota Tasikmalaya	909	960	998	1.411
Kota Banjar	226	238	248	389
Provinsi Jawa Barat	**81.123**	**86.326**	**89.074**	**106.108**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara keseluruhan, kabupaten/kota sudah telayani akses sanitasi aman, namun persentase layanan masih tergolong rendah terutama pada wilayah kabupaten seperti pada tabel berikut.

Tabel 7.7 Proyeksi Layanan Air Limbah di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Timbulan air limbah 2022	Pelayanan						GAP 2022-2029	GAP 2022-2034
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
	lt/dtk	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	%	lt/dtk	lt/dtk
Bogor	10.005	613	5,69	1.647	30	7.115	55	-2.967	-6.503
Sukabumi	4.059	118	2,90	668	30	2.887	55	-1.253	-2.769
Cianjur	3.721	98	2,62	612	30	2.646	55	-1.159	-2.548
Bandung	6.296	457	7,21	1.037	30	4.478	55	-1.670	-4.021
Garut	4.333	68	1,55	713	30	3.081	55	-1.396	-3.014
Tasikmalaya	2.404	30	1,24	396	30	2.052	55	-782	-2.022
Ciamis	1.646	40	2,39	271	30	1.404	55	-516	-1.365
Kuningan	1.489	30	1,98	245	30	1.270	55	-473	-1.241
Cirebon	3.631	202	5,53	598	30	2.582	55	-1.025	-2.380
Majalengka	1.658	54	3,21	273	30	1.415	55	-507	-1.361
Sumedang	1.581	52	3,30	260	30	1.349	55	-482	-1.297
Indramayu	2.380	247	10,32	391	30	2.031	55	-557	-1.784
Subang	2.208	107	4,80	363	30	1.885	55	-639	-1.778
Purwakarta	1.198	58	4,84	197	30	1.136	55	-346	-1.077
Karawang	3.895	301	7,68	641	30	2.770	55	-1.015	-2.470
Bekasi	6.407	957	14,86	1.055	30	4.557	55	-1.207	-3.599
Bandung Barat	2.818	50	1,78	464	30	2.004	55	-902	-1.954
Pangandaran	495	21	4,22	81	30	469	55	-146	-448
Kota Bogor	2.315	196	8,40	381	30	1.317	55	-586	-1.121
Kota Sukabumi	453	18	4,02	74	30	386	55	-135	-368
Kota Bandung	5.156	822	15,86	849	30	2.934	55	-919	-2.111
Kota Cirebon	662	161	24,11	109	30	377	55	-63	-216
Kota Bekasi	5.054	1.229	24,18	832	30	3.595	55	-478	-2.366
Kota Depok	5.103	675	13,15	840	30	2.903	55	-1.049	-2.228
Kota Cimahi	1.020	69	6,72	167	30	725	55	-275	-656
Kota Tasikmalaya	909	64	7,03	149	30	776	55	-243	-712
Kota Banjar	226	17	7,67	37	30	214	55	-59	-197
Prov. Jawa Barat	**82.291**	**6.675**	**7,31**	**27.605**	**30**	**58.359**	**55**		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Target layanan sanitasi aman pada tahun 2029 sebesar 30% dan meningkat pada tahun 2034 menjadi 55%. Sementara itu, secara keseluruhan tingkat layanan sanitasi aman di Provinsi Jawa Barat sebesar 7,31%. Belum ada wilayah yang melampaui target layanan sanitasi hingga tahun 2034, akan tetapi terdapat beberapa wilayah yang sudah memiliki layanan sanitasi yang tinggi dan cenderung berada di wilayah perkotaan seperti Kota Cirebon (24,11%), Kota Bandung (15,86%), dam Kota Bekasi (24,18%). Untuk wilayah lainnya masih masih berada dibawah target layanan dengan layanan sanitasi terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya (1,24%), Kabupaten Garut (1,55%), dan Kabupaten Bandung Barat (1,78%). Pembangunan beberapa fasilitas pengolahan limbah cair diarahkan pada kabupaten yang masih memiliki layanan sanitasi aman dibawah target (15%).

C. Persampahan

Layanan persampahan diharapkan tidak hanya menampung sampah saja akan tetapi juga terdapat pengolahan sampah. *Baseline* yang digunakan dalam menghitung timbulan sampah ini berdasarkan SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia. Tingkat timbulan sampah secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.8 Sampah Terkelola di Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)			
	2022	2025	2029	2034
Bogor	3.459	3.630	3.873	4.199
Sukabumi	1.403	1.473	1.571	1.704
Cianjur	1.637	1.718	1.833	1.987
Bandung	2.770	2.908	3.102	3.363
Garut	1.362	1.429	1.525	1.653
Tasikmalaya	907	952	1.015	1.101
Ciamis	745	782	834	904
Kuningan	561	589	629	682
Cirebon	1.141	1.198	1.278	1.385
Majalengka	750	788	840	911
Sumedang	787	826	881	955
Indramayu	718	754	804	872
Subang	1.166	1.224	1.306	1.415
Purwakarta	502	527	562	609
Karawang	1.347	1.413	1.508	1.635
Bekasi	2.014	2.114	2.255	2.444
Bandung Barat	1.240	1.302	1.388	1.505
Pangandaran	207	218	232	252
Kota Bogor	466	489	521	565
Kota Sukabumi	171	179	191	207
Kota Bandung	1.296	1.361	1.452	1.574
Kota Cirebon	166	175	186	202
Kota Bekasi	1.747	1.834	1.956	2.121
Kota Depok	1.411	1.481	1.580	1.713
Kota Cimahi	352	370	395	428
Kota Tasikmalaya	377	396	422	458
Kota Banjar	104	109	117	126
Provinsi Jawa Barat	**25.348**	**30.237**	**32.256**	**34.970**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Secara keseluruhan, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah telayani akses pengelolaan sampah, namun persentase layanan masih tergolong rendah terutama pada wilayah kabupaten. Tingkat layanan akses pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.9 Sampah Terkelola di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Timbulan Sampah 2022	Pelayanan						GAP 2022-2029	GAP 2022-2034
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
	ton/ hari	ton/ hari	%	ton/ hari	%	ton/ hari	%	ton/ hari	ton/ hari
Bogor	3.459	1.735	50,17	1.472	38	2.519	60	-854	-1.902
Sukabumi	1.403	883	62,93	597	38	1.704	100	-301	-1.407
Cianjur	1.637	611	37,35	697	38	1.192	60	-128	-624
Bandung	2.770	1.705	61,54	1.179	38	3.363	100	-478	-2.662
Garut	1.362	371	27,25	579	38	992	60	-464	-877
Tasikmalaya	907	440	48,54	386	38	660	60	-162	-437
Ciamis	745	273	36,68	317	38	542	60	-228	-453
Kuningan	561	301	53,55	239	38	409	60	44	-126
Cirebon	1.141	188	16,45	486	38	831	60	-45	-390
Majalengka	750	379	50,54	319	38	911	100	130	-462
Sumedang	787	507	64,46	335	38	573	60	316	78
Indramayu	718	434	60,51	305	38	872	100	-261	-828
Subang	1.166	579	49,63	496	38	849	60	565	212
Purwakarta	502	259	51,54	214	38	366	60	321	169
Karawang	1.347	473	35,10	573	38	1.635	100	477	-585
Bekasi	2.014	724	35,94	857	38	1.467	60	232	-378
Bandung Barat	1.240	766	61,79	528	38	1.505	100	667	-311
Pangandaran	207	84	40,70	88	38	151	60	87	24
Kota Bogor	466	351	75,42	198	38	565	100	-4	-371
Kota Sukabumi	171	128	74,93	73	38	207	100	-37	-171
Kota Bandung	1.296	1.132	87,30	552	38	1.574	100	-119	-1.141
Kota Cirebon	166	162	97,09	71	38	202	100	-37	-169
Kota Bekasi	1.747	1.121	64,14	743	38	2.121	100	-573	-1.951
Kota Depok	1.411	1.126	79,78	600	38	1.713	100	-262	-1.374
Kota Cimahi	352	295	83,72	150	38	428	100	-71	-349
Kota Tasikmalaya	377	286	75,80	160	38	458	100	-61	-359
Kota Banjar	104	80	76,45	44	38	126	100	67	-15
Provinsi Jawa Barat	**25.348**	**15.391**	**57,75**	**12.257**	**38**	**27.463**			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tingkat layanan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat sudah tergolong baik sebesar 57,75% sampah terkelola dan sudah melampaui target sampah terkelola tahun 2029 sebear 38%, akan tetapi masih berada dibawah target tahun 2034 sebesar 60%. Kawasan perkotaan sudah memiliki tingkat layanan pengelolaan sampah yang tinggi (lebih dari 70%), oleh karena itu target pelayanan hingga tahun 2034 ditingkatkan menjadi 100% agar seluruh kawasan perkotaan terlayani akses persampahan. Hal tersebut menyebabkan, pelayanan menjadi defisit sehingga perlu penanganan pada kawasan perkotaan terutama pada WM seperti Cekungan Bandung dan Cirebon Raya.

Masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki tingkat pengelolaan sampah rendah diantaranya Kabuapten Garut (27,25%), Kabupaten

Cirebon (16,45%), dan Kabupaten Karawang (35,10%). Sementara itu, tingkat daur ulang sampah di Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah dengan rata-rata 8,3% dari total timbulan sampah terangkut (kurang dari target tahun 2034 sebesar 25%). Perlu direncanakan beberapa TPST terutama pada permukiman padat penduduk untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah di Provinsi Jawa Barat.

4) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Perumahan Provinsi Jawa Barat

Kebutuhan infrastruktur perumahan dibutuhkan diantaranya adalah ketersediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Target yang ditentukan hingga tahun 2029 sebesar 79%.

A. Kepemilikan Rumah Pribadi (Backlog)

Kepemilikan rumah di Provinsi Jawa Barat sudah memenuhi target infrastruktur (80,9%) di tahun 2029 akan tetapi belum memenuhi target tahun 2034. Kepemilikan rumah pribadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.10 Kepemilikan Rumah Pribadi di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Jumlah KK 2022	Kepemilikan Rumah						GAP 2022-2029	GAP 2022-2034
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		KK	%	KK	%	KK	%	KK	KK
Bogor	1.563.270	1.320.791	84,0	1.285.038	73,0	1.641.275	86,0	35.753	-320.484
Sukabumi	634.276	513.151	80,5	521.387	73,0	665.925	86,0	-8.235	-152.774
Cianjur	581.410	462.810	79,2	477.930	73,0	610.421	86,0	-15.119	-147.611
Bandung	983.812	805.601	81,4	808.712	73,0	1.032.903	86,0	-3.111	-227.302
Garut	677.007	549.254	80,7	556.513	73,0	710.789	86,0	-7.258	-161.534
Tasikmalaya	450.812	364.729	80,5	370.576	73,0	473.307	86,0	-5.847	-108.578
Ciamis	308.556	250.326	80,7	253.639	73,0	323.952	86,0	-3.313	-73.626
Kuningan	279.135	243.324	86,7	229.454	73,0	293.063	86,0	13.870	-49.739
Cirebon	567.366	401.206	70,3	466.385	73,0	595.676	86,0	-65.179	-194.470
Majalengka	310.873	241.038	77,1	255.543	73,0	326.385	86,0	-14.505	-85.346
Sumedang	296.421	237.895	79,8	243.664	73,0	311.212	86,0	-5.769	-73.317
Indramayu	446.168	352.832	78,6	366.759	73,0	468.431	86,0	-13.926	-115.599
Subang	414.060	342.689	82,3	340.365	73,0	434.721	86,0	2.324	-92.032
Purwakarta	249.551	205.909	82,1	205.136	73,0	262.003	86,0	774	-56.094
Karawang	608.668	507.547	82,9	500.337	73,0	639.040	86,0	7.211	-131.492
Bekasi	1.001.147	887.721	88,2	822.962	73,0	1.051.103	86,0	64.759	-163.382
Bandung Barat	440.354	343.536	77,6	361.980	73,0	462.327	86,0	-18.443	-118.791
Pangandaran	137.455	116.211	84,1	112.990	73,0	108.235	86,0	3.221	7.976
Kota Bogor	289.360	241.401	83,0	237.859	73,0	303.799	86,0	3.541	-62.398
Kota Sukabumi	84.911	67.758	79,4	69.799	73,0	89.148	86,0	-2.041	-21.390
Kota Bandung	644.517	522.822	80,7	529.805	73,0	676.677	86,0	-6.983	-153.855
Kota Cirebon	82.762	60.513	72,7	68.032	73,0	86.892	86,0	-7.520	-26.380
Kota Bekasi	789.742	709.889	89,4	649.183	73,0	829.149	86,0	60.706	-119.261
Kota Depok	637.862	567.992	88,5	524.335	73,0	669.691	86,0	43.657	-101.698
Kota Cimahi	159.298	128.882	80,5	130.946	73,0	167.246	86,0	-2.064	-38.364
Kota Tasik	170.491	131.979	77,0	140.147	73,0	178.998	86,0	-8.168	-47.020
Kota Banjar	47.066	36.427	77,0	38.689	73,0	49.414	86,0	-2.262	-12.987
Prov. Jawa Barat	**12.856.351**	**10.614.235**	**80,9**	**10.568.163**	**73,0**	**13.461.783**	**86,0**		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kepemilikan rumah pribadi di Provinsi Jawa Barat masih berada dibawah target hingga tahun 2034. Kabupaten yang membutuhkan banyak penanganan dalam pemenuhan kepemilikan hunian adalah

Kabupaten Cirebon (194.470 KK), Kabupaten Bandung (227.302 KK), dan Kabupaten Bogor (320.484 KK). Kepemilikan rumah yang rendah cenderung banyak berada di kawasan perkotaan karena harga tanah yang cenderung tinggi sehingga sulit untuk memiliki rumah pribadi.

B. Rumah Layak

Perumahan layak di Provinsi Jawa Barat dengan persentase mencapai 79,1% masih berada dibawah target tahun 2034 (86,0%). Hanya terdapat 7 kota/kabupaten sudah memiliki jumlah hunian layak diatas target pengembangan infrastruktur. Ketersediaan rumah hunian layak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.11 Ketersediaan Rumah Layak di Provinsi Jawa Barat

Prov. Jawa Barat	Jumlah Rumah 2022	Rumah Layak						GAP 2022-2029	GAP 2022-2034
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2029			
		KK	%	KK	%	KK	%	KK	KK
Bogor	1.320.791	1.099.884	83	938.078	73	1.411.496	86	161.807	-311.612
Sukabumi	513.151	298.982	58	380.612	73	572.696	86	-81.630	-273.713
Cianjur	462.810	296.691	64	348.889	73	524.962	86	-52.198	-228.271
Bandung	805.601	637.537	79	590.360	73	888.296	86	47.177	-250.760
Garut	549.254	332.547	61	406.254	73	611.278	86	-73.707	-278.731
Tasikmalaya	364.729	246.785	68	270.521	73	407.044	86	-23.736	-160.259
Ciamis	250.326	183.965	74	185.156	73	278.599	86	-1.191	-94.634
Kuningan	243.324	201.092	83	167.502	73	252.035	86	33.590	-50.943
Cirebon	401.206	316.972	79	340.461	73	512.281	86	-23.489	-195.309
Majalengka	241.038	189.690	79	186.547	73	280.691	86	3.143	-91.001
Sumedang	237.895	179.628	76	177.875	73	267.643	86	1.753	-88.015
Indramayu	352.832	262.616	74	267.734	73	402.851	86	-5.118	-140.235
Subang	342.689	257.425	75	248.466	73	373.860	86	8.958	-116.435
Purwakarta	205.909	166.730	81	149.749	73	225.323	86	16.981	-58.593
Karawang	507.547	385.058	76	365.246	73	549.574	86	19.813	-164.516
Bekasi	887.721	772.579	87	600.762	73	903.948	86	171.817	-131.369
Bandung Barat	343.536	264.213	77	264.245	73	397.602	86	-32	-133.388
Pangandaran	116.211	91.775	79	82.483	73	93.082	86	9.292	-1.308
Kota Bogor	241.401	208.504	86	173.637	73	261.267	86	34.867	-52.763
Kota Sukabumi	67.758	56.744	84	50.953	73	76.667	86	5.791	-19.923
Kota Bandung	522.822	477.716	91	386.758	73	581.942	86	90.958	-104.227
Kota Cirebon	60.513	53.194	88	49.664	73	74.727	86	3.530	-21.533
Kota Bekasi	709.889	640.020	90	473.904	73	713.068	86	166.117	-73.048
Kota Depok	567.992	508.779	89	382.764	73	575.934	86	126.015	-67.155
Kota Cimahi	128.882	116.832	91	95.590	73	143.832	86	21.242	-27.000
Kota Tasik	131.979	107.278	81	102.307	73	153.939	86	4.971	-46.660
Kota Banjar	36.427	29.820	82	28.243	73	42.496	86	1.577	-12.676
Jawa Barat	**13.113.409**	**8.383.057**	**79,1**	**7.714.759**	**73**	**11.577.133**	**86**		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keberadaan rumah layak di Provinsi Jawa Barat belum merata di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten yang membutuhkan banyak penanganan dalam penyediaan rumah layak huni adalah Kabupaten Bogor (311.612 KK), Kabupaten Garut (278.731 KK), dan Kabupaten Sukabumi (273.713 KK).

7.1.2. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri

Berdasarkan analsis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan industri prioritas penanganan hingga tahun 2029 di Provinsi Jawa Barat adalah KI Cipali West Subang, KI Cipali Indramayu, KI Cirebon, KI Losarang, KI Krangkeng, dan KI Balongan pada Kawasan Industri Rebana, serta KI Bekasi Industrial Estate, KI MM 2100, KI Jababeka, KI East Jakarta Industrial Park, KI Lippo Cikarang, dan KI Cibinong Industrial Estate pada Kawasan Industri Bodebek. Perhitungan kebutuhan infrastruktur Kawasan Industri Bodebek tidak dilakukan karena kawasan tersebut dijelaskan pada dokumen RPIW Jabodetabek Tahun 2029-2034.

1) Kawasan Industri

Kawasan Rebana ditetapkan dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 sebagai pusat pengembangan industri di wilayah timur Provinsi Jawa Barat, dengan kontribusi PDRB provinsi 13,7%. Tingginya kontribusi ekonomi tersebut didukung oleh keberadaan 3 (tiga) kawasan strategis yaitu Kawasan Industri Subang, Pelabuhan Patimban, dan *Aerocity* Kertajati.

Dalam pengembangannya, industri di kawasan rebana terbagi menjadi 5 klaster pengembangan, yaitu: Subang sebagai klaster industri pengolahan makanan dan minuman, logam, transportasi, dan manufaktur, Indramayu sebagai klaster industi perikanan, petrokimia, perkapalan, dan plastik, Majalengka sebagai klaster industri pertahanan, logistik, dan dirgantara, Cirebon sebagai klaster industri furnitur, bahan bangunan, dan perikanan.

Tabel 7.12 Kawasan Industri Prioritas di Kawasan Strategis Rebana

No	Lokasi	Kecamatan	Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Kabupaten Subang	Kecamatan Purwadadi	- Logam, mesin, dan elektronik - Pengolahan makanan - Karton dan kertas	10.408
2	Kabupaten Majalengka	Kecamatan Kertajati	- Penerbangan - Kargo/logistik - Industri pertahanan - Industri elektronika, sensor, robotika - Industri alat angkut elektrik - Industri tekstil - Industri resin sintetik dan plastik	1.415
3	Kabupaten Indramayu	Kecamatan Terisi, Losarang, Krangkeng, Balongan, dan Jatinyuat	- Kimia hulu & bahan penolong - Pengolahan ikan dan makanan - Kimia migas dan batubara - Kimia berbahan minyak & gas - Hulu agro dan petrokimia - Resin sintetik & bahan plastik - Metal stamping - *Knitting* dan garmen - Ban dalam dan luar motor - Perkapalan	15.159
4	Kabupaten Cirebon	Kecamatan Mundu dan Losari	- Pengolahan makanan - Furnitur - Perkapalan - Pakan	1.815

No	Lokasi	Kecamatan	Jenis Industri	Luas (Ha)
			- Bahan galian non-logam - Pengolahan garam - Bahan bangunan dan pengolahan *hotmix* dan beton	
Total Luas				**27.454**

Sumber: Badan Pengelola Rebana diolah BPIW, 2023

2) Analisis Kebutuhan Air Baku Kawasan Industri

Perhitungan kebutuhan air baku untuk kawasan industri didasarkan pada luasan kawasan industri yang telah terokupansi. Pada tahun 2023, okupansi Kawasan Industri di Kabupaten Subang dan Indramayu masing-masing masih mencapai 3,8% (400 Ha) dan 20% (3.017 Ha) secara berurutan. Berdasarkan Perpres 87/2021, okupansi Kawasan Rebana diproyeksikan sudah mencapai 100% pada tahun 2030 dan dapat beroperasi penuh pada tahun 2034, sehingga pada tahun 2029 okupansi kedua KI ini diproyeksikan dapat mencapai 80% - 90% dengan penambahan okupansi 13% per tahun. Sementara itu, okupansi tahun 2023 untuk Kawasan Industri lainnya di Kawasan Rebana seperti Kabupaten Cirebon 848 Ha (47%) dan Kabupaten Majalengka (31%). Secara lengkap, proyeksi okupansi KI dapat dilihat pada Tabel 7.13.

Tabel 7.13 Proyeksi Okupansi KI Prioritas di Kawasan Rebana

No	Kabupaten /Kota	Luas Total (Ha)	Proyeksi Okupansi Kawasan Industri (Ha)			
			2023	2025	2029	2034
1	Subang	10.408	400	3.063	8.384	10.408
2	Majalengka	1.415	442	766	1.102	1.415
3	Cirebon	1.815	848	1.110	1.634	1.815
4	Indramayu	15.159	3.017	6.220	12.628	15.159
Total		**28.797**	**4.707**	**11.242**	**24.061**	**28.797**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Okupansi KI yang telah diproyeksikan kemudian dijadikan dasar dalam menghitung kebutuhan air industri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, kebutuhan air kawasan industri adalah 0,55–0,75 L/detik/ha. Dalam dokumen ini, digunakan standar 0,55 L/detik/ha dalam perhitungan. Hasil perhitungan kebutuhan air industri di Kawasan Strategis Rebana dapat dilihat pada Tabel 7.14.

Tabel 7.14 Proyeksi Kebutuhan Air Industri KI Prioritas di Kawasan Rebana

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Industri (L/detik)			
		2023	2025	2029	2034
1	Subang	220	1.685	4.611	5.724
2	Majalengka	243	421	606	778
3	Cirebon	466	611	899	998
4	Indramayu	1.659	3.421	6.945	8.337
Total		**2.589**	**6.138**	**13.061**	**15.838**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selain pertambahan luas okupansi, pertumbuhan kawasan industri juga menyebabkan pertumbuhan tenaga kerja. Berdasarkan Permenperin

Nomor 40 Tahun 2016, per hektar lahan di kawasan industri dapat menyerap 100 tenaga kerja.

Tabel 7.15 Pertumbuhan Tenaga Kerja KI di Kawasan Rebana

No	Kabupaten/ Kota	Proyeksi Pertumbuhan Tenaga Kerja (Ribu Jiwa)			
		2023	2025	2029	2034
1	Subang	40	306	838	1.041
2	Majalengka	44	77	110	141
3	Cirebon	85	111	163	181
4	Indramayu	302	622	1.263	1.516
Total		**471**	**1.116**	**2.375**	**2.879**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pertumbuhan tenaga kerja ini selain meningkatkan aktivitas, juga meningkatkan kebutuhan air kawasan industri. Berdasarkan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU (1996), standar kebutuhan air minum perkotaan adalah 90 L/orang/hari. Hasil proyeksi kebutuhan air tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 7.16.

Tabel 7.16 Proyeksi Kebutuhan Air Tenaga Kerja KI di Kawasan Rebana

No	Kabupaten /Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Tenaga Kerja (L/detik)			
		2023	2025	2029	2034
1	Subang	68	519	1.421	1.765
2	Majalengka	75	130	187	240
3	Cirebon	144	188	277	308
4	Indramayu	512	1.055	2.141	2.570
Total		**798**	**1.892**	**4.026**	**4.882**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil proyeksi kebutuhan air industri dan tenaga kerja kemudian dijumlahkan seperti dalam Tabel 7.17.

Tabel 7.17 Proyeksi Kebutuhan Air KI di Kawasan Rebana

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Tenaga Kerja (L/detik)			
		2023	2025	2029	2034
1	Subang	288	2.204	6.033	7.489
2	Majalengka	318	551	793	1.018
3	Cirebon	610	799	1.176	1.306
4	Indramayu	2.171	4.476	9.086	10.908
Total		**3.387**	**8.030**	**17.088**	**20.721**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari segi penyediaan air, Kawasan Rebana disuplai oleh berbagai sumber air baku. Sumber air baku untuk Kawasan Rebana sebagian besar berasal dari Waduk Sadawarna, Waduk Jatigede, Waduk Cipunagara, dan SPAM Cipanas. Terdapat 4 kawasan industri di Kawasan Rebana yang sudah teraliri air baku dari berbagai sumber. Kawasan Industri di Kabupaten Subang mendapatkan air baku dari Waduk Sadawarna, PDAM Kabupaten Subang Unit Purwadadi (8 L/dtk), PDAM Kabupaten Subang Unit Subang 684 L/dtk, dan Waduk Cipunegara 3.000 L/dtk. Kawasan Industri di Kabupaten Cirebon mendapatkan air baku dari Waduk Jatigede dan PDAM Cirebon (550,8 L/dtk). Kawasan Industri di Kabupaten Indramayu mendapatkan air dari Waduk Sadawarna, Waduk Jatigede, dan Waduk Cipanas. Sementara

untuk Kawasan Industri di Majalengka mendapatkan air dari Waduk Jatigede dan SPAM Cipanas 850 L/dtk.

3) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Kegiatan industri menimbulkan bangkitan lalu lintas, terutama dari kawasan industri menuju outletnya (pelabuhan). Bangkitan lalu lintas industri dihitung berdasarkan Permenperin 40/2016 dimana diasumsikan bangkitan lalu lintas sebesar 5,5 smp/hari/hektar. Luas kawasan yang dihitung adalah luas kawasan yang telah terokupansi dengan perkiraan waktu efektivitas pekerja industri dalam sehari selama 10 jam. Proyeksi bangkitan lalu lintas berasal dari kawasan industri prioritas di Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 7.18 Proyeksi Bangkitan Lalulintas dari KI di Kawasan Rebana

No	Kabupaten/ Kota	Proyeksi Bangkitan Lalulintas (smp/hari)			
		2023	2025	2029	2034
1	Subang	220	1.685	4.611	5.724
2	Majalengka	243	421	606	778
3	Cirebon	466	611	899	998
4	Indramayu	1.659	3.421	6.945	8.337
Total		**2.589**	**6.138**	**13.061**	**15.838**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Proyeksi bangkitan kendaraan terbesar di Kawasan Rebana terjadi akibat perkembangan kawasan industri yang relatif sudah berkembang dan terkelola baik yaitu di KI di Kabupaten Indramayu dengan bangkitan mencapai 1.659 smp/hari, diikuti dengan KI di Kabupaten Cirebon (466 smp/hari). Perkembangan kawasan industri dengan komoditas petrokimia, plastik, logam, transportasi dan elektronik yang berorientasi ekspor mengakibatkan tingginya bangkitan arus logistik dari kawasan industri menuju ke Pelabuhan Patimban.

Selain dari dalam wilayah Rebana, bangkitan logistik ditimbulkan juga dari kawasan industri pengguna Pelabuhan Patimban terutama di wilayah Bekasi dan Karawang. Menghitung lasan industri di Kabupaten Bekasi sebesar 8.800 hektar dan Kabupaten Karawang sebesar 16.368 hektar, diproyeksikan akan terjadi peningkatan arus logistik dari dua kabupaten tersebut sebesar 48 ribu smp/hari (Kabupaten Bekasi) dan 90 ribu smp/hari (Kabupaten Karawang). Bangkitan kendaraan dari luar wilayah Rebana menjadi faktor penting dikarenakan Pelabuhan Patimban merupakan satu-satunya pelabuhan internasional di Provinsi Jawa Barat yang akan mengubah orientasi ekspor industri yang sebelumnya melalui DKI Jakarta menjadi melalui kawasan Rebana.

Tabel 7.19 Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan Kawasan Rebana (2029)

No Ruas	Nama Ruas	Panjang	AADT	Lebar	LHR 2020	VCR 2020	LOS 2020	Prakiraan Beban	Prakiraan VCR 2034	LOS 2034
004	Bts. Kota Cikarang–Bts.Kota Karawang	9,44	21.327	14	888,63	0,94	E	10.903,41	1,42	F
004.12	Jln. Pangkal Perjuangan (Karawang)	1,14	13.242	13,052	551,75	0,34	A	6.319,75	0,50	A
004.15	Lingkar Karawang	11,50	8.527	14,225	355,29	0,4	A	6.123,29	0,69	B
005	Bts. Kota Karawang–Bts. Kota Cikampek	11,27	17.497	14,172	729,04	0,45	A	6,497,04	0,62	B
005.12	Jln. Raya Dawuan (Cikampek)	2,06	17.686	14,124	736,92	0,44	A	6.504,92	0,60	B
005.13	Jln. Jend. A. Yani (Cikampek)	4,90	16.620	14,157	692,50	1	F	6.460,50	1,39	F
006	Bts. Kota Cikampek–Bts. Kab. Subang	6,90	19.821	14,19	825,88	0,26	A	6.593,88	0,35	A
006.11	Jln. Jend. Sudirman (Cikampek)	2,57	18.213	14,126	758,88	0,25	A	10.473,88	0,39	A
006.12	Jln. Raya Jatisari (Cikampek)	2,72	18.129	14,123	755,38	0,21	A	10.470,38	0,33	A
007	Bts. Kab. Subang/Karawang–Bts. Kota Pamanukan	30,69	21.189	14,15	882,88	0,49	A	10.597,88	0,74	C
007.11	Jln. Eyang Tirtayasa (Pamanukan)	1,43	22.352	14,191	931,33	0,48	A	10.646,33	0,71	C
008	Bts. Kota Pamanukan–Sewo	11,13	25.718	14,189	1071,58	0,44	A	10.786,58	0,62	B
008.11	Jln. H. Syahbana (Pamanukan)	0,47	25.718	14,121	1071,58	0,44	A	10.786,58	0,62	B
009	Sewo–Lohbener	42,51	24.367	14,193	1015,29	0,56	A	10.730,29	0,81	D
010	Lohbener–Jatibarang	7,91	9.641	14,201	401,71	0,49	A	4.152,71	0,70	B
011	Jatibarang–Langut	8,15	17.180	14,217	715,83	0,06	A	4.466,83	0,08	A
012.11	By Pass Jatibarang	2,95	18.288	14,171	762,00	0,31	A	4.513,00	0,39	A
013	Jatibarang–Bts. Kab. Cirebon/ Indramayu	11,85	18.633	14,202	776,38	0,45	A	3.945,25	0,55	A
014	Bts. Kab. Indramayu/Crb (Cadang Pinggan)	16,17	17.695	11,228	737,29	0,42	A	1.883,29	0,46	A
014.11	Jln. Raya Palimanan 2 (Palimanan)	1,09	17.684	14,218	736,83	0,64	B	1.882,83	0,71	C
015	Bts. Kota Palimanan–Bts Kota Cirebon	8,79	18.754	14,259	781,42	0,89	D	1.927,42	0,98	E
015.11	Jln. Raya Palimanan I (Palimanan)	0.24	18635	14.174	776,46	0,31	A	2.266,46	0,35	A
015.12	Jln. Raya Jamblang (Cirebon)	1.30	18660	14.223	777,50	0,91	E	2.267,50	1,02	F
015.13	Jln. Raya Klangenan (Cirebon)	0.78	18458	14.164	769,08	0,81	D	2.259,08	0,91	E
015.14	Jln. Brigjen. Darsono (Cirebon)	2.65	15928	14.183	663,67	0,9	E	2.153,67	1,02	F
015.15	Jln. Jend. A. Yani (Cirebon)	3.60	17153	14.186	714,71	0,65	B	2.204,71	0,73	C
015.16	Jln. Pilangsari (Cirebon)	2.58	13474	6.991	561,42	0,54	A	2.051,42	0,62	B
015.17	Jln. Slamet Riyadi (Cirebon)	0.44	13785	14.154	574,38	0,34	A	2.064,38	0,39	A

No Ruas	Nama Ruas	Panjang	AADT	Lebar	LHR 2020	VCR 2020	LOS 2020	Prakiraan Beban	Prakiraan VCR 2034	LOS 2034
015.18	Jln. Siliwangi (Cirebon)	0.20	13539	14.25	564,13	0,11	A	2.742,13	0,13	A
016	Lohbener–Bts. Kota Indramayu	6.09	10233	6.764	426,38	0,49	A	3.148,07	0,64	B
016.11	Jln. Soekarno-Hatta (Indramayu)	1.66	7660	6.813	319,17	0,48	A	3.040,86	0,67	B
017	Lingkar Indramayu (Indramayu)–Karangam	9.75	7809	13.942	325,38	0,27	A	3.047,07	0,38	A
017.11	Jln. Mulia Asri (Indramayu)	9.83	7156	13.919	298,17	0,3	A	3.019,86	0,43	A
018	Karangampel–Bts. Kab. Cirebon/ Indramayu	9.92	9785	14.265	407,71	0,3	A	3.129,40	0,40	A
019	Bts.Kab.Cirebon/Indramayu (Singakerta)	17.90	11984	14.183	499,33	0,23	A	2.677,33	0,28	A
019.11	Jln. Raya Panyindangan (Cirebon)	0.31	19217	14.165	800,71	0,58	A	2.978,71	0,67	B
019.12	Jln. Diponegoro (Cirebon)	0.56	19166	14.172	798,58	0,13	A	2.976,58	0,15	A
019.13	Jln. Kapten Samadikun (Cirebon)	1.32	19429	14.146	809,54	0,15	A	2.987,54	0,17	A
019.14	Jln. Sisingamangaraja (Cirebon)	0.90	19836	14.144	826,50	0,3	A	3.004,50	0,35	A
019.15	Jln. Benteng (Cirebon)	0.42	20111	13.124	837,96	0,25	A	3.015,96	0,29	A
019.16	Jln. Yos Sudarso (Cirebon)	0.65	20114	14.185	838,08	0,16	A	3.016,08	0,18	A
020	Bts. Kota Cirebon–Losari (Bts. Prov. Jawa Tengah)	27.68	20243	14.253	843,46	0,39	A	3.021,46	0,45	A
020.11	Jln. Kasunean (Cirebon)	0.68	21071	14.174	877,96	0,2	A	3.055,96	0,23	A
020.12	Jln. Kalijaga (Cirebon)	2.39	20360	14.167	848,33	0,3	A	3.026,33	0,34	A

Sumber: Hasil Analisis, 2023

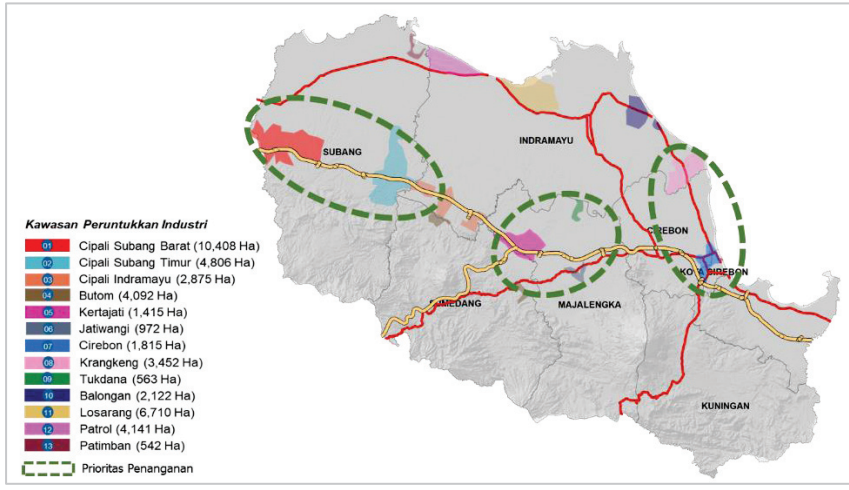
4) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Perumahan

Berdasarkan perhitungan proyeksi pertumbuhan tenaga kerja yang disajikan pada Tabel 7.15, bertambahnya jumlah pekerja diasumsikan terdiri dari 70% warga pendatang dan 30% merupakan warga lokal. Warga pendatang tersebut tentu membutuhkan tempat hunian. Penyediaan hunian bagi pekerja industri disediakan secara kolaborasi oleh pengelola kawasan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan swasta. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menyediakan hunian industri dengan pembangunan rumah susun. Penyediaan rumah susun dilakukan dengan mengasumsikan bahwa hanya 1% dari pekerja pendatang yang akan dilayani rumah susun. Tipe rumah susun yang dibangun adalah rumah susun 4 lantai (96 unit/*tower*) dengan komposisi 1 unit dialokasikan untuk 2 orang. Hasil proyeksi kebutuhan rumah susun pekerja di KI Prioritas Kawasan Rebana dapat dilihat pada Tabel 7.20.

Tabel 7.20 Proyeksi Kebutuhan Rusun Pekerja KI di Kawasan Rebana

No	Kabupaten /Kota	Proyeksi Tahun 2034				
		Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Pendatang	Jumlah Tenaga Kerja Terlayani	Kebutuhan Unit	Kebutuhan Tower
1	Subang	838.400	728.560	7.286	3.643	38
2	Majalengka	110.218	99.050	991	495	5
3	Cirebon	163.400	127.050	1.271	635	7
4	Indramayu	1.262.800	1.061.130	10.611	5.306	55
Total		**2.374.818**	**2.015.790**	**20.158**	**10.079**	**105**

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 7.1 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Perumahan di Kawasan Rebana 2034

Sumber: Hasil Analisis 2023

7.1.3. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pertanian

Berdasarkan analsis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan pertanian prioritas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Jawa Barat adalah kawasan pertanian di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bekasi. Pada kawasan pertanian di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak dilakukan perhitungan karena kawasan tersebut dijelaskan pada dokumen RPIW Jabodetabek Tahun 2025-2034.

1) Kawasan Pertanian

Jawa Barat bagian utara terutama pada Kawasan Rebana merupakan kawasan lumbung padi dengan produksi padi mencapai 9,08 juta ton (16% dari produksi nasional). Kabupaten Indramayu merupakan penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan produktivitas 60,24 kuintal/Ha diikuti dengan Subang mencapai 60,33 kuintal/Ha. Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Pertanian diperkirakan luas lahan pertanian akan menurun dari 928.000 Ha menjadi 773.000 Ha (2034). Lahan pertanian di Kawasan Rebana mencapai 284.095 Ha. Tantangan yang dihadapi adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman

2) Layanan Irigasi Teknis

Total luas lahan sawah di Kawasan Rebana mencapai 382.466 Hektar, 373.642 Hektar diantaranya merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dengan kebijakan LP2B tersebut diharapkan dapat mempertahankan lahan pertanian di Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

Dari total 284.095 Hektar LP2B, 76,03% sudah teraliri irigasi teknis baik melalui daerah irigasi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten. Sementara 23,97% LP2B merupakan sawah tadah hujan dan sawah irigasi nonteknis.

Tabel 7.21 Luas Daerah Irigasi di Kawasan Pertanian Prioritas Jawa Barat

Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)	Luas Sawah (Ha)	Luas LP2B (Ha)	Luas Daerah Irigasi (Ha)	Luas LP2B yang belum teririgasi (Ha)	Luas LP2B yang belum teririgasi (%)
Subang	216.814	90.531	88.423	70.062	18.361	20,76
Indramayu	205.768	122.920	118.679	99.783	18.896	15,92
Cirebon	105.172	53.396	52.236	47.797	4.439	8,50
Majalengka	131.149	56.161	52.345	31.629	20.716	39,58
Sumedang	156.343	31.166	28.858	10.006	18.852	65,33

Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)	Luas Sawah (Ha)	Luas LP2B (Ha)	Luas Daerah Irigasi (Ha)	Luas LP2B yang belum teririgasi (Ha)	Luas LP2B yang belum teririgasi (%)
Kuningan	121.477	28.016	27.388	24.711	2.677	9,77
Kota Cirebon	3.531	272	229	107	122	53,28
Total	940.254	382.462	368.158	284.095	84.063	30,45

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3) Analisis Kebutuhan Air Irigasi

Ketersediaan air untuk irigasi pertanian di Kawasan Rebana disediakan oleh 2 wilayah sungai yaitu WS Cimanuk-Cisanggarung yang melayani Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka serta WS Citarum yang melayani Kabupaten Subang dan sebagian Kabupaten Indramayu. Total kebutuhan air untuk sektor pertanian di Kawasan Rebana pada tahun 2022 sebesar 156.930 l/det, sementara suplai air baku melalui irigasi teknis baru mencapai 75,46%. Hingga tahun 2034 diproyeksikan terjadi peningkatan kebutuhan air irigasi yang dilakukan untuk mempercepat waktu panen terutama pada masa kemarau/kering. Standar kebutuhan air irigasi pada tahun 2021 sebesar 0,5 lt/dtk/ha direncanakan bertambah menjadi 0,83 lt/dtk/ha pada tahun 2029 dan 1 lt/dtk/ha pada tahun 2034 sehingga kebutuhan air irigasi sebagai berikut.

Tabel 7.22 Proyeksi Kebutuhan Air Kawasan Rebana

Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi (lt/dtk)			
	2023	2025	2029	2034
Subang	44.373	49.043	58.385	70.062
Indramayu	63.196	69.848	83.153	99.783
Cirebon	30.271	33.458	39.831	47.797
Majalengka	20.032	22.140	26.358	31.629
Sumedang	6.337	7.004	8.338	10.006
Kuningan	15.650	17.298	20.593	24.711
Kota Cirebon	68	75	89	107
Total	**179.927**	**198.867**	**236.746**	**284.095**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4) Risiko Banjir terhadap Pertanian

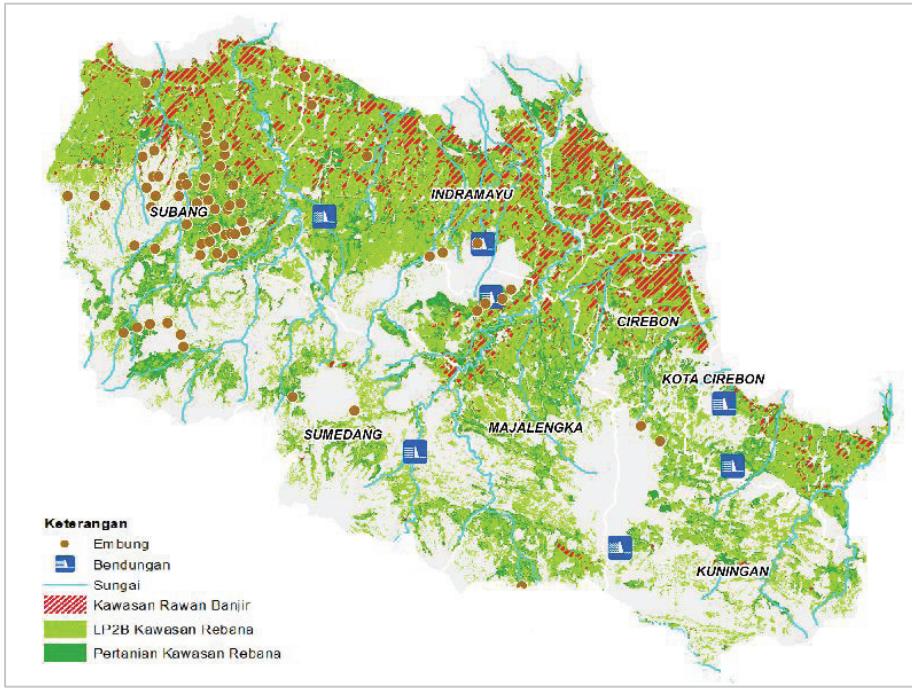
Pertanian di Kawasan Rebana memiliki risiko banjir. Risiko banjir tertinggi berada di Kabupaten Indramayu, dimana risiko banjir mencakup 57% kawasan pertanian. Sementara di Cirebon risiko banjir sebesar 52% dan Subang sebesar 45%. Risiko banjir ini membuat berkurangnya jumlah penanaman padi dalam setahun. Di beberapa wilayah yang seharusnya bisa panen 2 kali pertahun menjadi hanya 1 kali pertahun. Penanganan banjir diperlukan guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Tabel 7.23 Luasan Kawasan Pertanian Berisiko Banjir di Kawasan Rebana

Bencana	Kabupaten	Kelas Risiko Bencana	Luas LP2B berisiko (ha)	Luas LP2B berisiko (%)
Banjir	Subang	Tinggi	39.633	44,82
	Indramayu	Tinggi	70.874	57,08
	Cirebon	Tinggi	27.310	52,28
	Majalengka	Tinggi	11.951	22,83
	Sumedang	Tinggi	3.507	12,15
	Kuningan	Tinggi	1.881	6,87
	Kota Cirebon	Tinggi	94	40,94

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Di kabupaten Indramayu daerah aliran sungai yang beriso banjir pada pertanian berada pada DAS Cimanuk dan DAS Cipanas. Di Subang DAS utama yang berisiko banjir adalah DAS Cipunagara, sedangkan di Cirebon kawasan pertanian berisiko banjir berada di DAS Cisanggarung.



Gambar 7.2 Sebaran Kawasan Pertanian dengan Risiko Banjir Tinggi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

7.1.4. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan pariwisata prioritas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Jawa Barat adalah Geopark Ciletuh dan KSPN Pangandaran.

1) Daya Tarik Wisata

Daya Tarik Wisata Unggulan di Provinsi Jawa Barat berada pada Kawasan Prioritas DPP Bandung-Halimun-Ciletuh dan Jawa Barat Selatan yang ditandai dengan keberadaan beberapa KSPN dan destinasi wisata internasional seperti Geopark Ciletuh dan KSPN Pangandaran.

A. Geopark Ciletuh

Terdapat kurang lebih 156 daya tarik wisata (DTW) yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, dimana dibagi menjadi 3 (tiga) tema pengembangan yaitu tema Pergeseran Jalur Magnetik, Plato Jampang, dan Fosil Subduksi. Geopark Ciletuh telah diusulkan ke UNESCO untuk menjadi warisan geologi dan *geosite* sebagai bagian dari Geopark Ciletuh. Usulan tersebut diajukan pada 21 Jnui 2016 mencakup 8 (delapan) kecamatan yaitu Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Waluran, Ciracap, dan Surade, dengan luas wilayah 126 ribu ha atau 30,3% dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi.



Gambar 7.3 Administrasi Geopark Ciletuh dan Sebaran DTW
Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah BPIW, 2023

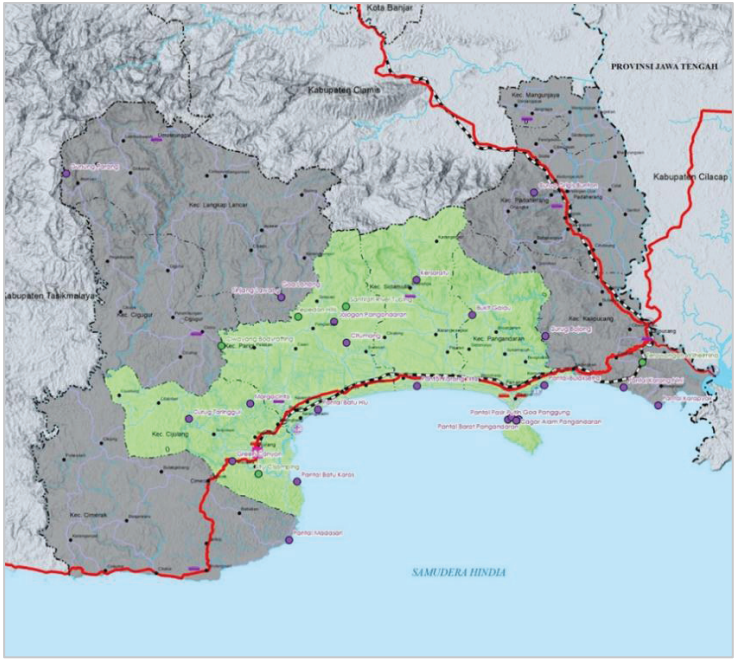
Kunjungan wisata ke Geopark Ciletuh sebelum terjadinya pandemi Covid-19 mencapai angka 3,6 juta jiwa per tahun. Dari total jumlah tersebut, kunjungan dari wisatawan nusantara mendominasi angka kunjungan dengan kontribusi 97% terhadap kunjungan total, sedangkan wisatawan mancanegara berkontribusi 3% terhadap kunjungan total.

Pengembangan jalur geowisata tematik menjadi prioritas pembangunan di Geopark Ciletuh-Palabuhanratu sebagai upaya untuk memadukan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya dalam satu tema terkait sebagai faktor utama dalam pembangunan geopark. Selain itu, diharapkan juga dapat memadukan upaya konservasi serta pendidikan dan penelitian dengan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pariwisata yang lebih berkualitas.

B. Jawa Barat Selatan (KSPN Pangandaran)

Pada Kawasan Jawa Barat Selatan terdapat lingkup pariwisata unggulan berupa KSPN Pangandaran yang dindalamnya memuat 5 objek wisata dengan tingkat kunjungan paling tinggi, yaitu: Pantai Karapyak, Pantai Batukaras, Green Canyon, Batu Hiu, dan Pantai Pangandaran.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019, baik dari dalam maupun luar negeri, mencapai 3,2 juta pengunjung. Jumlah kunjungan wisatawan ke DTW yang paling banyak adalah Pantai Pangandaran yang mencapai 2,7 juta pengunjung pada tahun 2018. Hal ini didukung oleh Kabupaten Pangandaran yang berperan sebagai pusat kegiatan, akomodasi, dan pusat pemerintahan. Terdapat 3 objek wisata dengan tingkat kunjungan wisatawan asing paling tinggi, yaitu Green Canyon 2.880 orang, Batukaras 1.456 orang, dan Pantai Pangandaran 1.223 orang.



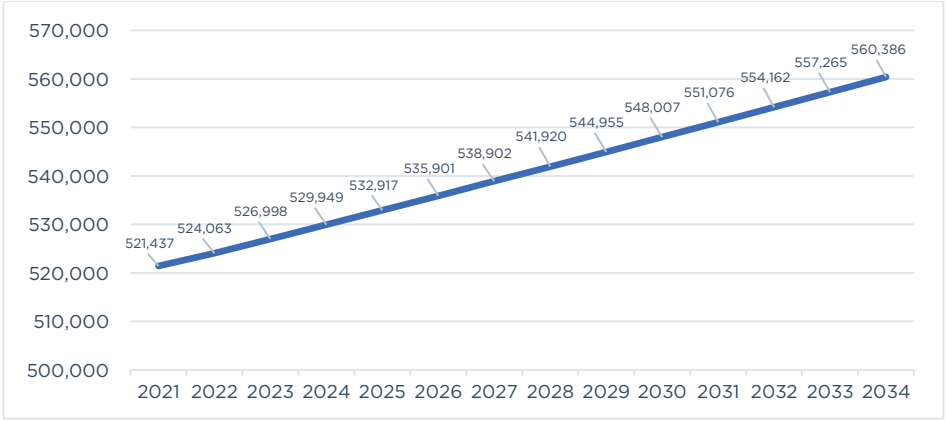
Gambar 7.4 Administrasi KSPN Pangandaran dan Sebaran DTW
Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah BPIW, 2023

2) Proyeksi Penduduk dan Wisatawan

Pariwisata dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang akan memberikan dukungan sektor ekonomi kepada kawasan pariwisata prioritas terutama pada Geopark Ciletuh dan KPSN Pangandaran.

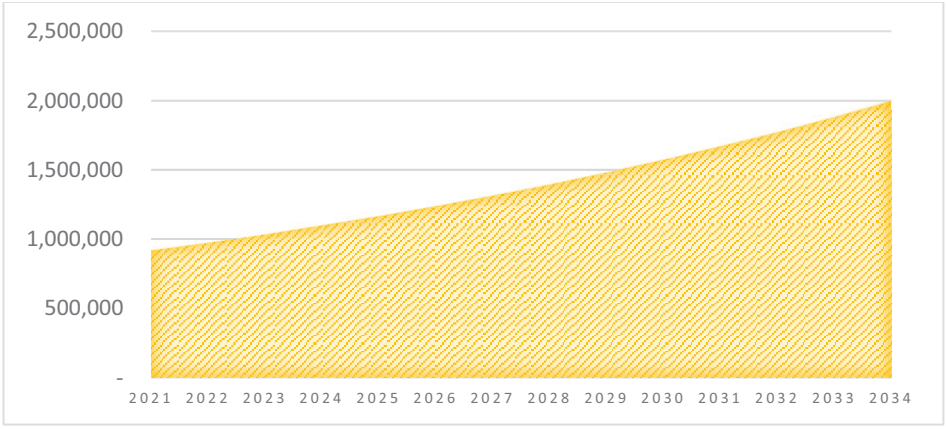
1) Geopark Ciletuh

Perkiraan jumlah penduduk alami Geopark Ciletuh pada tahun 2034 sebesar 560.386 jiwa dengan kepadatan 521,1 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk tahunan di Geopark Ciletuh sebesar 0,56%. Dengan rasio tersebut terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun awal (2020) sebesar 41.561 jiwa.



Gambar 7.5 Proyeksi Jumlah Penduduk Geopark Ciletuh
Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, diolah BPIW, 2023

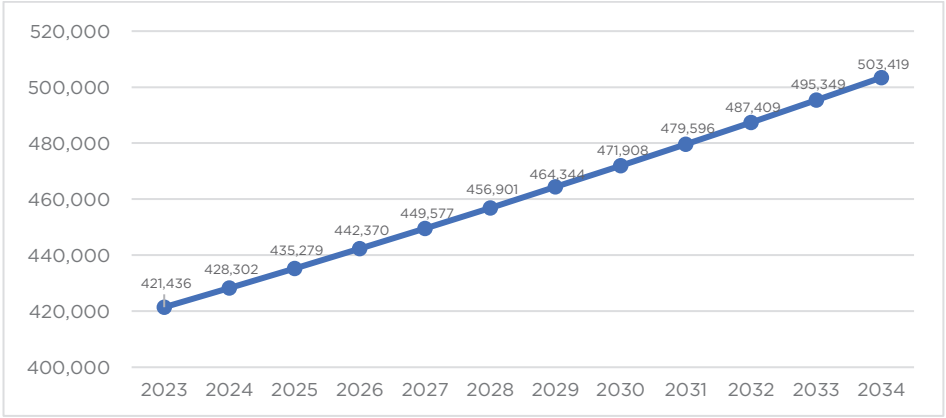
Selain pertambahan penduduk, jumlah wisatawan Geopark Ciletuh juga diperkirakan akan bertambah. Pada tahun 2034, jumlah wisatawan diproyeksikan dapat mencapai 1,9 juta jiwa.



Gambar 7.6 Proyeksi Jumlah Wisatawan Geopark Ciletuh
Sumber: BPS Kab Sukabumi 2020, diolah BPIW, 2023

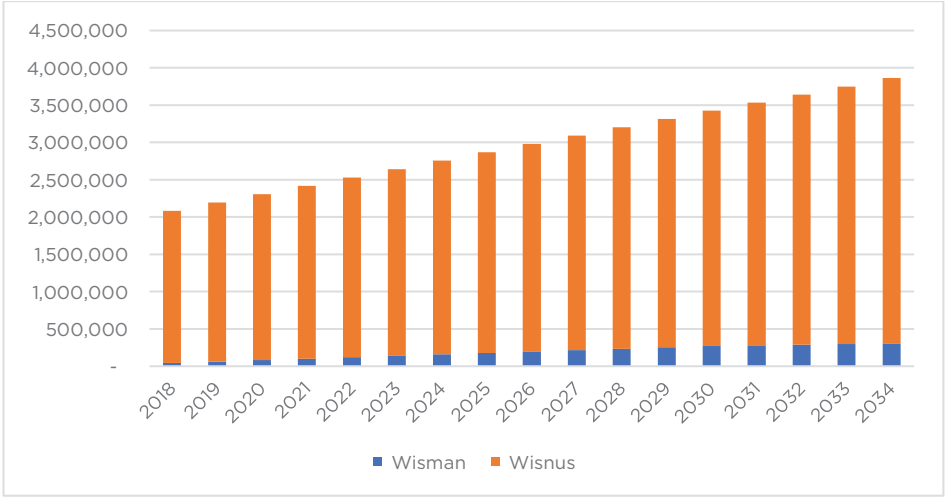
2) Jawa Barat Selatan (KSPN Pangandaran)

Perkiraan jumlah penduduk alami KSPN Pangandaran pada tahun 2034 adalah sebesar 503.419 jiwa penduduk. Dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan di KSPN Pangandaran sebesar 1,63%, terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun 2020 sebesar 401.493 jiwa.



Gambar 7.7 Proyeksi Jumlah Penduduk KSPN Pangandaran
Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, diolah BPIW, 2023

Selain pertambahan penduduk, jumlah wisatawan KSPN Pangandaran juga diperkirakan akan bertambah. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan mencapai 3.629.983 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebesar 3.356.452 jiwa dan wisatawan asing 273.452 jiwa. Sementara hingga tahun 2034 diperkirakan jumlah wisatawan nusantara akan mencapai 6,3 juta dan wisatawan asing sebesar 1,6 juta.



Gambar 7.8 Proyeksi Jumlah Wisatawan KSPN Pangandaran
Sumber: BPS 2019 diolah BPIW, 2023

3) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Akses menuju *Geopark* Ciletuh dikategorikan cukup jauh, karena tidak adanya *hub* transportasi yang dekat dengan Kabupaten Sukabumi. Akses terdekat *Geopark* Ciletuh dari *hub* transportasi adalah melalui Stasiun Bogor dan Stasiun Sukabumi. Selain itu, terdapat alternatif menuju *Geopark* Ciletuh dari Tol Bogor–Ciawi-Sukabumi. Mayoritas jalan di sekitar kawasan *Geopark* Ciletuh–Pelabuhan Ratu dalam kondisi mantap. Namun, ada beberapa jalan yang memiliki kondisi ketidakmantapan sebesar >50%, yaitu Ruas Nomor 49 dan 52.11. Seluruh jalan Provinsi di sekitar kawasan Geopark Ciletuh–Pelabuhan Ratu dalam kondisi mantap dengan tingkat kemantapan 97–100%.

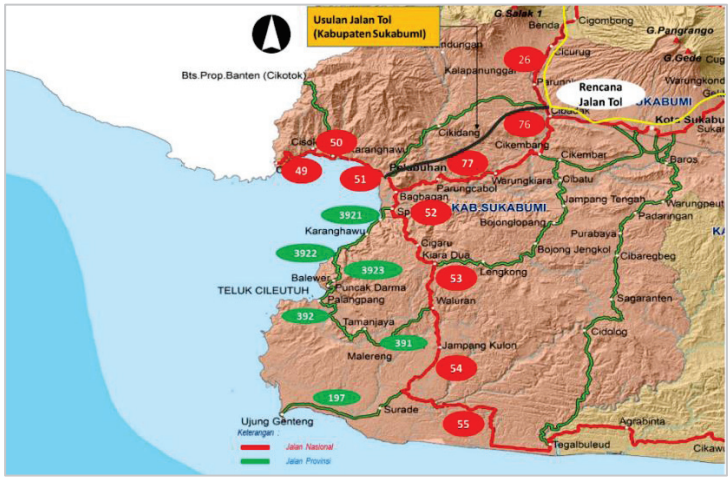
Tabel 7.24 Proyeksi LHRT dan VCR Geopark Ciletuh

No Ruas	Nama Ruas Jalan Nasional	Kapasitas	Proyeksi Penambahan Kendaraan*) (smp/jam)			VCR		
			2025	2029	2034	2025	2029	2034
22026	Benda - Bts. Kota Cibadak	3121	3.790	4.737	6.266	1,21	1,52	2,01
2202611	Jln. Siliwangi (Cicurug)	2714	3.664	4.586	6.075	1,35	1,69	2,24
2202612	Jln. Siliwangi (Parungkuda)	2719	3.671	4.594	6.085	1,35	1,69	2,24
2207611	Jln. Perintis Kemerdekaan (Cibadak)	1523	1.682	2.195	3.052	1,10	1,44	2,00
22076	Bts. Kota Cibadak - Cikembang	2381	1.494	1.968	2.765	0,63	0,83	1,16
22077	Cikembang - Bagbagan	2376	1.341	1.783	2.532	0,56	0,75	1,07
22049	Bts. Prov. Banten (Cibareno) - Cisolok	2370	1.997	2.575	3.532	0,84	1,09	1,49
22050	Cisolok - Sp. Kr. Hawu	2352	1.924	2.486	3.420	0,82	1,06	1,45
2205111	Jln. Raya Cisolok (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	2353	1.925	2.488	3.422	0,82	1,06	1,45
2205112	Jln. Raya Citepus (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	2711	2.050	2.639	3.613	0,76	0,97	1,33
2205113	Jln. Kidang Kencana (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu	3028	2.419	3.084	4.176	0,80	1,02	1,38
2205114	Jln. Siliwangi (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	3045	1.816	2.356	3.257	0,60	0,77	1,07
2205211	Jln. Raya Pel. Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan)	2713	1.777	2.309	3.197	0,65	0,85	1,18
22053	Bagbagan - Jampangkulon	1504	675	979	1.516	0,45	0,65	1,01
22054	Jampangkulon - Surade	2389	1.589	2.082	2.910	0,66	0,87	1,22
22055	Surade - Tegalbuleud (Cibuni)	1500	522	795	1.282	0,35	0,53	0,85

Sumber: Hasil Analisis, 2023

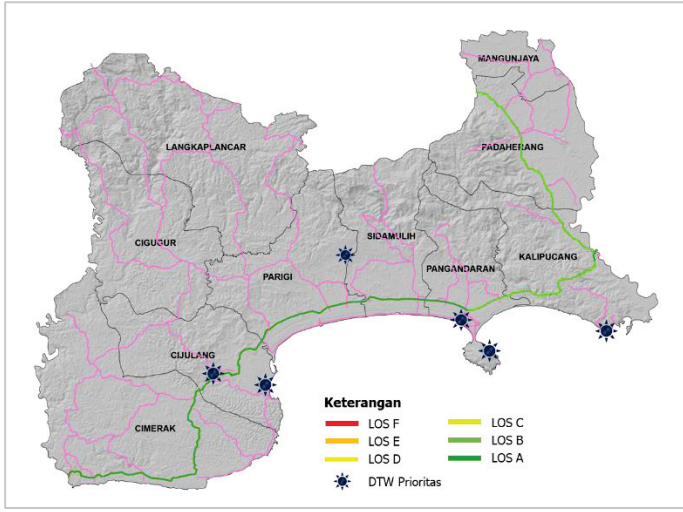
*) Proyeksi penambahian kendaraan = proyeksi penduduk + proyeksi wisatawan

Lebar rata-rata jalan nasional menuju *Geopark* Ciletuh mencapai 6,7 m dengan VCR rata-rata yang hampir mencapai 0,5 atau setara dengan LOS B. Meskipun mempunyai VCR rendah, di beberapa titik masih ditemukan kemacetan akibat terdapat pabrik. Oleh karena itu, diperlukan penanganan pada beberapa titik kemacetan pada jalan menuju *Geopark* Ciletuh untuk untuk memperpendek waktu tempuh, seperti pengaturan lalu lintas.



Gambar 7.9 *Relevant Road* Menuju *Geopark* Ciletuh
Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah BPIW, 2023

Sementara itu, akses menuju KSPN Pangandaran saat ini hanya menempuh Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten. Penambahan jumlah wisatawan hingga tahun 2029 berdampak terhadap daya tampung Jalan Nasional yang dilalui. Penambahan jumlah kendaraan yang akan melintas sebanyak 5.000 smp/hari terbagi pada beberapa ruas jalan.



Gambar 7.10 Proyeksi Tingkat Pelayanan Jalan di Kawasan Jawa Barat Selatan 2034
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Terdapat 2 ruas jalan yang terdampak pada penurunan tingkat pelayanan jalan (nilai VCR >0,6) diantaranya Ruas Pangandaran–Kali Pucang dan Ruas Batas Kota Banjar–Kali Pucang. Untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kawasan Pantai Selatan Jawa Barat ini telah

direncanakan pembangungan Jalan Tol Gedebage-Tasimalaya yang dapat mempercepat waktu tempuh menuju Pangandaran.

Tabel 7.25 Proyeksi LHRT dan VCR KSPN Pangandaran (Setelah Tol Getaci)

No Ruas	Nama Ruas Jalan Nasional	LHRT 2020	Kapasitas	Proyeksi Penambahan Kendaraan*) (smp/jam)		VCR		
				2029	2034	2029 *	2029 **	2034
22065	Kalapagenep–Cimerak	880	14.667	1.040	1.068	0,07	0,07	0,07
22068	Kali Pucang–Bts. Provinsi Jateng	2.190	4.761	2.589	2.659	0,54	0,38	0,39
22096	Bts. Kota Banjar–Kali Pucang	3.707	7.269	4.382	4.500	0,60	0,42	0,43
2209615	Jln. Raya Pangandaran (Pangandaran)	5.640	29.684	6.666	6.847	0,22	0,16	0,16
22067	Pangandaran–Kali Pucang	3.412	6.319	4.033	4.142	0,64	0,64	0,64
2206611	Jln. Merdeka (Pangandaran)	1.862	15.517	2.201	2.261	0,14	0,14	0,14
22066	Cimerak–Bts. Kota Pangandaran	2.440	12.200	2.884	2.962	0,24	0,24	0,24

Sumber: Hasil Analisis, 2023

(VCR Tahun 2029 jika Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap belum selesai*

*(** VCR Tahun 2029 jika Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sudah selesai*

Tabel 7.26 *Relevant Road* Jalan Nasional *Geopark* Ciletuh

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	Total Kemantapan				Lebar (m)
			Mantap		Tidak Mantap		
			km	%	km	%	
22026	Benda - Bts. Kota Cibadak	19,00	17,33	91,19	1,67	8,81	8,2
2202611	Jln. Siliwangi (Cicurug)	1,38	0,99	71,39	0,40	28,61	7,79
2202612	Jln. Siliwangi (Parungkuda)	1,13	0,88	78,56	0,24	21,44	7,79
2207611	Jln. Perintis Kemerdekaan (Cibadak)	7,74	5,42	70,09	2,31	29,91	5,75
22076	Bts. Kota Cibadak - Cikembang	1,96	1,96	100,00	0,00	0,00	6,46
22077	Cikembang - Bagbagan	35,20	24,35	69,15	10,86	30,8	5,82
22049	Bts. Prov. Banten (Cibareno) - Cisolok	10,20	1,84	18,08	8,36	81,92	5,95
22050	Cisolok - Sp. Kr. Hawu	5,52	5,52	100,00	0,00	0,00	5,97
2205111	Jln. Raya Cisolok (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	3,01	2,61	86,50	0,41	13,50	6,46
2205112	Jln. Raya Citepus (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	4,17	3,74	89,81	0,42	10,19	6,98
2205113	Jln. Kidang Kencana (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu	1,89	1,68	88,91	0,21	11,09	8,7
2205114	Jln. Siliwangi (Sp. Kr. Hawu - Pelabuhan Ratu)	1,18	0,97	82,50	0,21	17,50	8,76
2205211	Jln. Raya Pel. Ratu (Pelabuhan Ratu - Bagbagan)	3,75	1,24	32,94	2,51	67	7,42
22053	Bagbagan - Jampangkulon	51,80	44,22	85,37	7,58	14,63	5,1
22054	Jampangkulon - Surade	6,61	6,41	96,87	0,21	3,13	6,05
22055	Surade - Tegalbuleud (Cibuni)	38,51	25,36	65,86	13,15	34,14	5,5

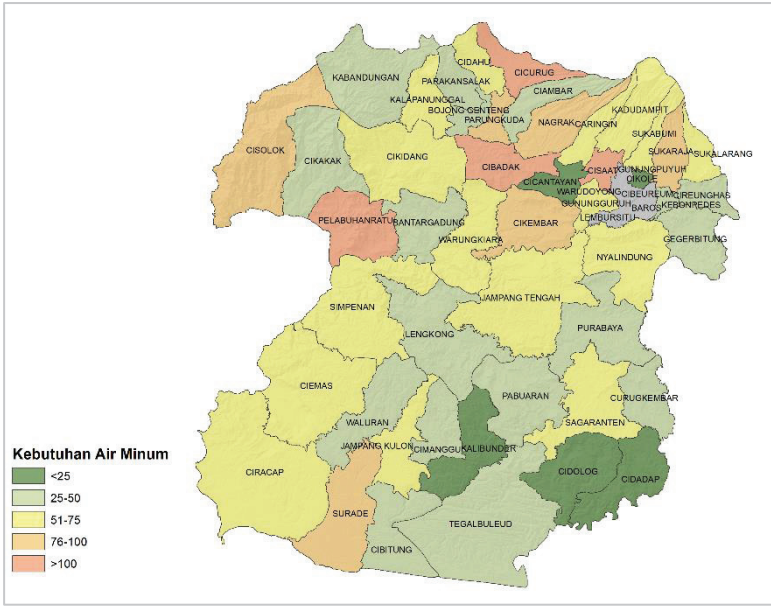
Sumber: Dirjen Bina Marga, diolah BPIW, 2023

4) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Kebutuhan air baku Kabupaten Sukabumi saat ini dipenuhi dari Sungai Cimandiri dengan debit maksimum 14,87 m^3/detik pada musim penghujan dan debit minimum 2,15 m^3/detik pada musim kemarau, Sungai Ciletuh (DAS Ciletuh), air tanah (swadaya), dan Pamsimas yang bersumber dari mata air (debit 1-2 liter/detik). Kebutuhan air minum dipenuhi oleh beberapa Instalasi Pengolah Air Minum (IPA) Cisolok 100 liter/detik, IPA Pelabuhan Ratu 100 liter/detik, IPA Pelabuhan Ratu II 50 liter/detik, IPA Simpenan 100 liter/detik, IPA Ciracap 50 liter/detik, dan IPA Surade 50 liter/detik. Persampahan *Geopark* Ciletuh diolah pada 2 TPA, yaitu TPA Cimenteng dengan kapasitas 3.250.000 m^3 dan TPA Kadaleman dengan kapasitas 440.000 m^3.

A. Perhitungan Kebutuhan Air Minum

Kebutuhan air minum Kabupaten Sukabumi bertambah hingga tahun 2029 seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah wisatawan. Sebesar 78% wilayah Kab. Sukabumi menjadi daerah pelayanan jaringan air minum perpipaan, tetapi penduduk yang terlayani hanya 9,6%. Jika diproyeksikan, terjadi peningkatan pelayanan air minum perpipaan sebesar 22,62% hingga tahun 2034, dengan sisa kapasitas produksi sebesar 5 liter/detik yang dapat dimanfaatkan.



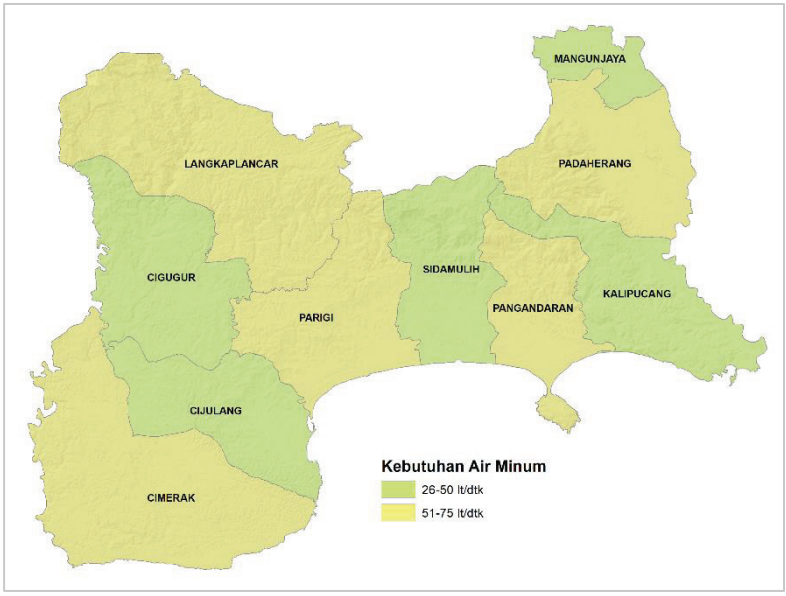
Gambar 7.11 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan DPP Bandung-Halimun-Ciletuh 2034

Sumber: Hasil Analisis 2023

Penyediaan air minum diprioritaskan pada kawasan pariwisata terutama sekitar Geopark Ciletuh (Kec. Ciemas, Kec. Cikakak, Kec. Ciracap, Kec.

Cisolok, dan Kec. Pelabuhanratu) untuk menunjang sarana dan prasarana pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan PDAM, direncanakan adanya optimalisasi jaringan perpipaan SPAM dengan kapasitas sumber 14,87 liter/detik. Kapasitas SPAM ini belum memberikan dampak yang optimal karena cakupan pelayanan yang diberikan hanya sedikit. Oleh karena itu, Kawasan Prioritas Geopark Ciletuh membutuhkan peningkatan kapasitas air minum karena suplai air tidak cukup seiring bertambahnya penduduk dan jumlah wisatawan (2034).

Sementara itu, akses air minum layak Kabupaten Pangandaran sebesar 98%, dengan jumlah penduduk yang terlayani jaringan air minum perpipaan sebesar 18,3% pada wilayah pelayanan. Ketersediaan jaringan perpipaan terutama berada di Kecamatan Pangandaran yang memiliki konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi tertinggi serta pesisir Kabupaten Pangandaran bagian selatan untuk menunjang sarana dan prasarana pariwisata yang berkembang.



Gambar 7.12 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kawasan Jawa Barat Selatan 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.27 Proyeksi Tingkat Pelayanan Air Minum Terhadap Kabupaten Sukabumi

Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Sukabumi				
Capacity Eksisting = 703 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2023	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	90	90	90	90
Baseline Kebutuhan Air Wisatawan (lt/bed/hari)	150	150	150	150
Rata-Rata Menginap (LOS)	0,69	0,69	0,69	0,69
Kebutuhan Tempat Tidur (bed)	1.954	2.202	2.797	3.772
Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	3	4	5	7
Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk)	2.480	2.505	2.555	2.620
Kebutuhan Air Total (lt/dtk)	2.484	2.509	2.560	2.626
Tingkat Kebocoran (%) *)	21,81%	21,01%	19,41%	17,41%
Beban Puncak	1,8	1,8	1,8	1,8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	3.025	3.036	3.057	3.084
Peningkatan Pelayanan (%) **)	11,62%	13,62%	17,62%	22,62%
GAP (lt/dtk)	**351**	**290**	**164**	**5**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.28 Proyeks Tingkat Pelayanan Air Minum KSPN Pangandaran

Pelayanan Air Minum Kabupaten Pangandaran				
Capacity Eksisting = 125 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2023	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	90	90	90	90
Baseline Kebutuhan Air Wisatawan (lt/bed/hari)	150	150	150	150
Rata-Rata Menginap (LOS)	1,52	1,52	1,52	1,52
Kebutuhan Tempat Tidur (bed)	5.866	6.072	6.512	7.075
Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	10	11	11	12
Kebutuhan Air Domestik (lt/dtk)	447	452	463	477
Kebutuhan Air Total (lt/dtk)	457	463	475	490
Tingkat Kebocoran (%)	28,28%	27,88%	27,08%	26,08%
Beban Puncak	1,8	1,8	1,8	1,8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	586	592	603	617
Peningkatan Pelayanan (%)	18,13%	20,13%	24,13%	29,13%
GAP (lt/dtk)	**19**	**6**	**- 21**	**-55**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Potensi produksi timbulan sampah pada Kawasan Ciletuh mencapai 1.264.474 m^3/tahun yang sudah dipengaruhi faktor kompaksi sampah 0,4. Penanganan sampah saat ini sebesar 22,6% dengan sampah terangkut 159.933 m^3/tahun dan akan penuh pada tahun 2024 dengan tingkat pelayanan yang bertambah menjadi 33,3%.

Terdapat gap timbulan sampah sebesar 3.247.862 m^3/tahun atau 2.190 ton/hari hingga tahun 2029. Penanganan persampahan diprioritaskan pada kawasan pariwisata. Dibutuhkan TPA dengan metode 3R di pusat-pusat kegiatan wisata: Kec. Pelabuhanratu, Kec. Ciemas, dan Kec. Ciracap. Pelayanan TPA diutamakan pada kawasan prioritas pariwisata karena memiliki timbulan sampah yang bertambah seiring berkembangnya kawasan pariwisata.

Sementara itu, timbulan sampah di Kabupaten Pangandaran 62% (2021) dihasilkan dari kegiatan pariwisata. Perkembangan permukiman menghasilkan timbulan sampah yang lebih tinggi pada tahun 2029 dengan 66% sampah domestik. Kabupaten Pangandaran dilayani oleh TPA Lokal yang mampu melayani 20,4% dari keseluruhan timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2021. Adanya peningkatan pelayanan TPA menjadi 36,4% pada 2029 yang dilakukan secara bertahap menyebabkan TPA yang diperkirakan penuh (tahun 2028). Dibutuhkan adanya penambahan tempat pengolahan sampah untuk mengatasi timbulan sampah yang bertambah hingga tahun 2029.

TPA Purbahayu akan mengalami kelebihan kapasitas pada tahun 2026 dengan *gap* timbulan sampah sebesar 5.854 m^3/tahun atau 4 ton/hari yang akan bertambah hingga 238.304 m^3/tahun atau 161 ton/hari pada tahun 2029.

Tabel 7.29 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Ciletuh

Tahun	2023	2025	2029	2034
Domestik (ton/tahun)	705.935	713.006	727.363	745.716
Wisata (ton/tahun)	571	643	817	1.101
Timbulan Sampah (ton/tahun)	708.528	715.674	730.209	748.851
Timbulan Sampah (m^3/tahun)	2.878.395	2.907.427	2.966.473	3.042.208
Faktor Kompaksi	0,4	0,4	0,4	0,4
Timbulan Akhir (m^3/tahun)	1.151.358	1.162.971	1.186.589	1.216.883

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.30 Proyeksi Persentase Pelayanan TPA di Kawasan Ciletuh

TPA	2023	2025	2029	2034
TPA Cimenteng	27,44%	31,44%	39,44%	49,44%
TPA Kadaleman	3,35%	4,35%	6,35%	8,85%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.31 Proyeksi Timbulan Sampah Terlayani TPA di Kawasan Ciletuh

TPA	Proyeksi Pelayanan TPA (m^3/tahun)			
	2023	2025	2029	2034
TPA Cimenteng	315.948	365.638	467.991	601.627
TPA Kadaleman	38.571	50.589	75.348	107.694
GAP Kapasitas TPA (m^3/tahun)				
TPA Cimenteng	-475.868	-1.182.202	-2.899.395	-5.637.677
TPA Kadaleman	12.191	-82.948	-346.899	-820.045

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.32 Proyeksi Timbulan Sampah KSPN Pangandaran

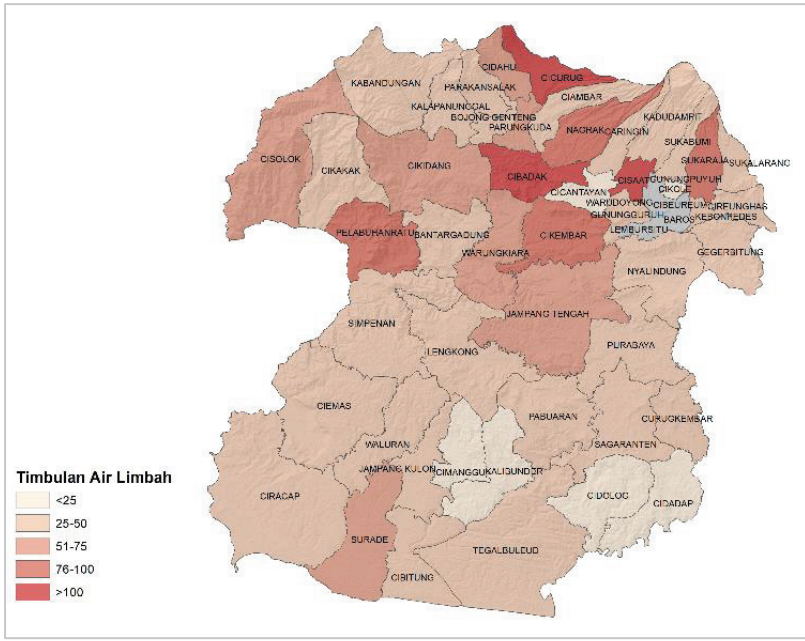
TPA Purbahayu Pangandaran				
Rekapitulasi	2023	2025	2029*)	2034
Timbulan Sampah Total (ton/hari)	348	352	361	458.262
Timbulan Sampah (m^3/hari)	1.414	1.431	1.467	1.698.831
Timbulan Sampah (m^3/tahun)	515.952	522.324	535.320	1,52
Timbulan Sampah Setelah Kompaksi (m^3/tahun)	206.381	208.929	214.128	367
Kapasitas TPA Sisa (m^3)	239.227	125.770	- 156.079	6
Pelayanan	26,4%	30,4%	38,4%	372
Timbulan Sampah Terangkut	54.485	63.515	82.225	1.512
GAP (m^3)	184.743	62.256	- 238.304	552.006

Sumber: Hasil Analisis, 2023

*)TPA ditutup dengan usia 24 Tahun

C. Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Sanitasi

Saat ini Geopark Ciletuh belum mempunyai IPLT, sehingga kawasan ini membutuhkan sistem pengelolaan air limbah, karena saat ini beberapa pembuangan air limbah masih dibuang langsung dari rumah warga ke sungai terdekat**.** Potensi produksi air limbah pada wilayah pengembangan dan sekitarnya (2029) adalah sebesar 2.048 liter/detik dan mengalami penambahan hingga tahun 2034 menjadi 2.101 liter/detik, sehingga dibutuhkan infrastruktur pengelolahan air limbah terutama untuk kawasan pariwisata serta kecamatan yang masih banyak belum memiliki sistem sanitasi *onsite*.



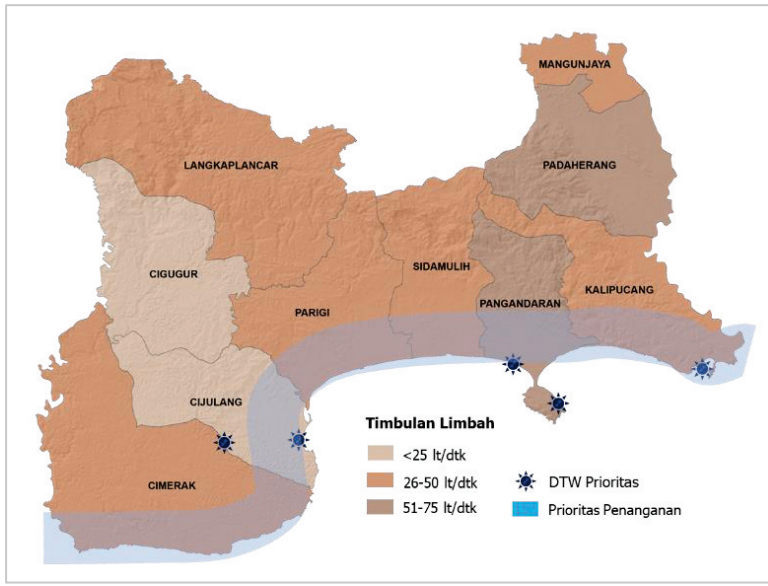
Gambar 7.13 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Limbah di Kawasan DPP Bandung-Halimun-Ciletuh 2034

Sumber: Hasil Analisis 2023

Sementara itu, penduduk di Kabupaten Pangandaran sebesar 88,2% sudah memiliki fasilitas tempat pembungan air limbah sendiri dan 81,5% di antaranya sudah termasuk sebagai akses sanitasi yang layak. Sementara itu, tingkat sanitasi aman masih kurang dari 4%. Belum terdapat IPAL atau tempat pengolahan limbah terpusat di Kabupaten Pangandaran. Proyeksi timbulan limbah KSPN Pangandaran pada tahun 2029 adalah sebesar 3.027 liter/detik (domestik 271 liter/detik dan pariwisata 2.656 liter/detik) dan pada tahun 2034 sebesar 3.596 liter/detik (domestik 377 liter/detik dan pariwisata 3.219 liter/detik).

Berkembangnya jumlah wisatawan menyebabkan dibutuhkannya tempat pengolahan limbah yang diprioritaskan pada kawasan

pariwisata. Sementara untuk pertumbuhan jumlah rumah tangga, diarahkan untuk memiliki tanki *septictank* masing-masing dengan ketentuan yang aman dan layak.



Gambar 7.14 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Limbah di Jawa Barat Selatan 2034

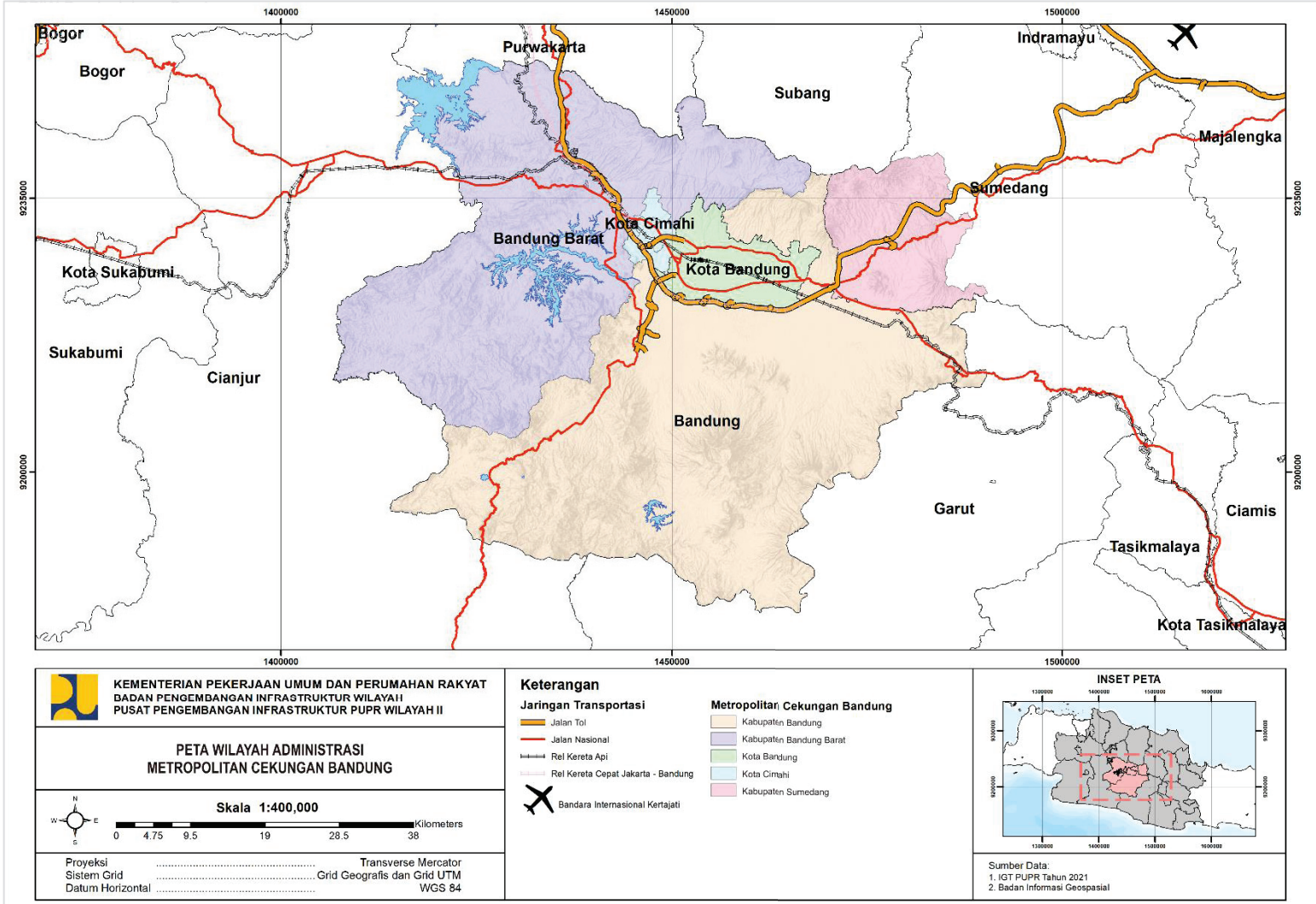
Sumber: Hasil Analisis, 2023

7.1.5. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Kawasan Perkotaan

Berdasarkan analsis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan perkotaan prioritas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Jawa Barat adalah Metropolitan Cekungan Bandung dan PKN Cirebon.

1) Metropolitan Cekungan Bandung

Metropolitan Cekungan Bandung adalah kawasan perkotaan yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 sebagai satu dari dua Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang ada di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi.



Peta 7.1 Wilayah Administrasi Metropolitan Cekungan Bandung

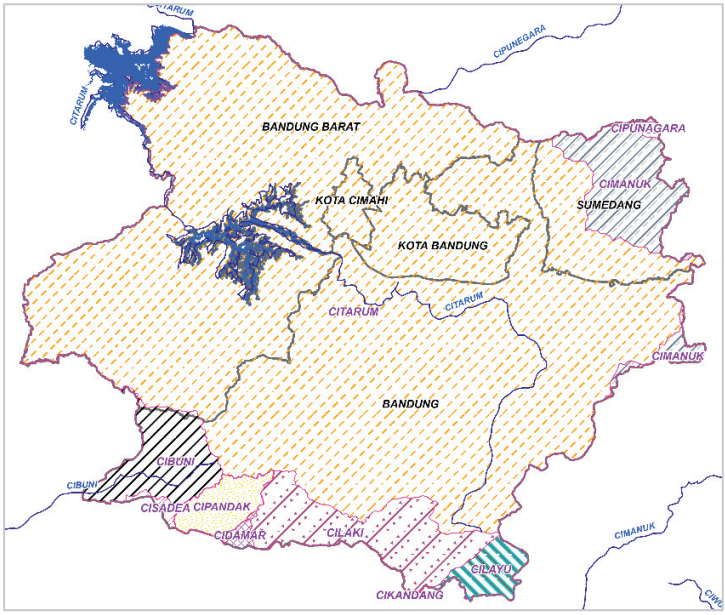
Hal ini cukup wajar mengingat kontribusi ekonomi Cekungan Bandung yang sangat besar, yaitu mencapai 3,3% dari total PDB Nasional dan memberikan kontribusi 24% terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Kontribusi yang besar ini diakibatkan posisi Cekungan Bandung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat sekaligus pusat kegiatan ekonomi jasa, pendidikan, dan pariwisata dengan industri kreatif sebagai sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan pesat (1,7% per tahun). Sebagai salah satu kawasan metropolitan, Cekungan Bandung memiliki beberapa permasalahan yang harus ditangani seperti kemacetan kawasan perkotaan, banjir, penurunan muka tanah, serta penanganan limbah yang sudah mengalami kelebihan kapasitas tampung dan minimnya pengolahan. Secara lebih jelas, pembagian administrasi metropolitan Cekungan Bandung dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**.

A. Analisis Kebutuhan Infrastruktur SDA

Analisis ini mencakup wilayah sungai, sumber air baku, banjir, perhitungan kebutuhan infrastruktur SDA.

a) Analisis Wilayah Sungai dan Sumber Air Baku

Kawasan Cekungan Bandung terbagi menjadi dua Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Citarum dan WS Cimanuk-Cisanggarung. Sebagian besar Cekungan Bandung merupakan WS Citarum, sementara WS Cimanuk-Cisanggarung meliputi Kabupaten Sumedang.



Gambar 7.15 DAS Metropolitan Cekungan Bandung

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sungai Citarum merupakan sungai utama yang melitas di Cekungan Bandung dan bermuara di kawasan utara sekaligus melintasi 3 waduk/bendungan utama yaitu Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Sungai ini menjadi sumber air baku utama untuk Metropolitan Cekungan Bandung dan juga menjadi sumber bencana banjir di Kota dan Kabupaten Bandung. Hal tersebut menjadikan kedua kota dan kabupaten memiliki urgensi penanganan bencana banjir tinggi meskipun berada pada kawasan hulu sungai. Tingginya risiko banjir disebabkan tingginya sedimentasi sungai serta minimnya kawasan resapan air pada kawasan hulu.

Kebutuhan air baku domestik, industri, dan pariwisata sebesar 49.983 liter/detik pada tahun 2034 di Cekungan Bandung yang mengalami peningkatan sebesar 11.735 liter/detik mulai tahun 2021. Ketersediaan air pada WS Citarum mencapai 12,95 miliar m^3/tahun dengan 7,65 miliar m^3/tahun yang termanfaatkan. Saat ini, peruntukan sumber air baku untuk kebutuhan air baku domestik, industri, dan pariwisata hanya 8% yang masih terpenuhi hingga 2029 (meningkat menjadi 12,2%).

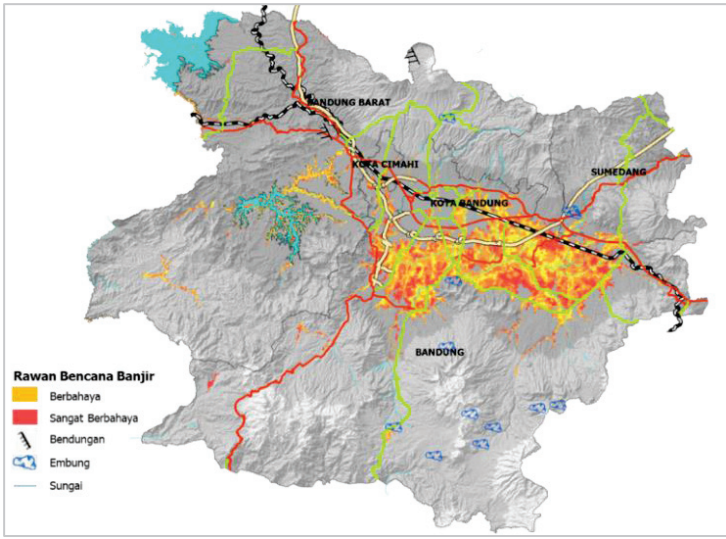
b) Analisis Banjir

Wilayah Cekungan Bandung yang berada di cakupan DAS Citarum Hulu dan merupakan daerah rawan banjir. Hal ini diakibatkan topografi yang berbentuk cekungan sehingga air akan berkumpul pada wilayah cekungan terendah terutama di Kecamatan Baleendah, Banjaran, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Katapang, Majalaya, dan Soreang. Keterbatasan daya tampung Sungai Citarum Hulu yang memiliki kapasitas tampung rata-rata 550 m^3/detik dengan Q20 sebesar 650 m^3/detik juga menjadi penyebab tinggi risiko banjir. Keterbatasan daya tampung diakibatkan oleh tingginya sedimentasi (8,2 juta m^3/tahun) karena sebagian hulu sungai memiliki tingkat erosi berat akibat berkembangnya agrowisata dan kawasan permukiman di daerah resapan air dan kawasan lindung.



Gambar 7.16 Skema Makro Pengendalian Banjir Citarum Hulu
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dengan sudah terlaksananya sebagian besar program Citarum Harum (program rehabilitasi sungai, peningkatan kapasitas sungai, pembangunan tanggul dan pengendali banjir, serta pembangunan polder dan *floodway*), kondisi banjir saat ini memiliki waktu genangan yang berkurang dengan ketinggian 40-80 mm. Masih terjadinya genangan di beberapa tempat diakibatkan belum maksimalnya pengelolaan drainase perkotaan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar tersumbat maupun rusak karena kurangnya pemeliharaan dan menumpuknya sampah di drainase perkotaan.



Gambar 7.17 Kawasan Rawan Banjir di Cekungan Bandung
Sumber: Hasil Analisis, 2023

c) Analisis Kebutuhan Air Baku Perkotaan

Kebutuhan penyediaan air baku di Cekungan Bandung terutama untuk memenuhi kebutuhan air permukiman, industri, dan jasa pariwisata dengan total kebutuhan saat ini 40.756 liter/detik dan bertambah menjadi 44.627 liter/detik (2029) serta 53.275 liter/detik (2034).

Tabel 7.33 Kebutuhan Air Domestik Kawasan Cekungan Bandung

Kab/Kota	Kebutuhan Air (lt/dtk)			Kebocoran Air (%)			Total Kebutuhan Air (lt/dtk)		
	2021	2029	2034	2021	2029	2034	2021	2029	2034
Kota Bandung	5.229	5.799	6.185	45,6	43,8	40,0	13.705	15.009	15.587
Kota Cimahi	920	1.020	1.360	26,6	24,8	20,0	2.096	2.291	2.937
Bandung	6.298	6.983	9.311				14.351	15.687	20.113
Bandung Barat	3.032	3.362	4.483				6.910	7.553	9.684
Sumedang	520	577	770				1.186	1.296	1.662
TOTAL	**16.000**	**17.741**	**22.110**				**38.248**	**41.837**	**49.983**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

*) Air Minum Kota Inti 150 lt/dt, air minum Kota Sekitar 120 lt/dt
**) Faktor jam Puncak 1,8

Tabel 7.34 Kebutuhan Air Wisatawan Kawasan Cekungan Bandung

Provinsi Jawa Barat	Proyeksi Wisatawan (ribu orang/tahun)		Kebutuhan Tempat Tidur		Kebutuhan Air Wisatawan (lt/dtk)	
	2029	2034	2029	2034	2029	2034
Kota Bandung	9.449	15.054	54.183	85.505	94,07	148,45
Kota Cimahi	31	51	136	218	0,24	0,38
Bandung	100	161	485	774	0,84	1,34
Bandung Barat	86	139	398	639	0,69	1,11
Sumedang	8	13	34	55	0,06	0,09
TOTAL					**95,90**	**151,37**

Sumber: Analisis BPIW, 2023

*) Baseline kebutuhan air (liter/bed/hari)

Tabel 7.35 Total Kebutuhan Air Kawasan Cekungan Bandung

Kab/Kota	Total Kebutuhan Air Cekungan Bandung											
	Rumah Tangga			Industri			Pariwisata			TOTAL		
	2021	2029	2034	2021	2029	2034	2021	2029	2034	2021	2029	2034
Kota Bandung	13.705	15.009	15.587	1.096	1.201	1.247	94,1	148,4	197,5	14.896	16.358	17.032
Kota Cimahi	2.096	2.291	2.937	168	183	235	0,2	0,4	0,5	2.264	2.475	3.173
Bandung	14.351	15.687	20.113	1.148	1.255	1.609	0,8	1,3	1,8	15.501	16.943	21.723
Bandung Barat	6.910	7.553	9.684	-	-	-	0,7	1,1	1,5	6.911	7.554	9.686
Sumedang	1.186	1.296	1.662	-	-	-	0,1	0,1	0,1	1.186	1.297	1.662
TOTAL	**38.248**	**41.837**	**49.983**	**2.412**	**2.639**	**3.091**	**95,9**	**151,4**	**201,4**	**40.756**	**44.627**	**53.276**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Jalan

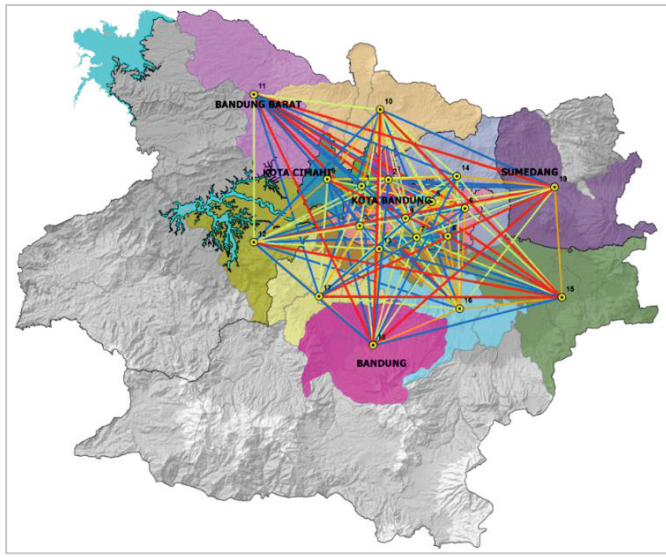
Analisis kebutuhan infrastruktur jalan meliputi analisis jaringan jalan, pergerakan, jumlah kendaraan, bangkitan lalu lintas, dan perhitungan kebutuhan infrastrukur jalan.

a) Analisis Jaringan Jalan

Kecepatan rata-rata jalan nasional di Cekungan Bandung adalah 25 km/jam berada jauh di bawah standar layanan jalan perkotaan rata-rata kecepatan Provinsi Jawa Barat 40 km/jam. Terdapat 20 ruas jalan perkotaan utama yang memiliki tingkat kepadatan tinggi yang ditandai dengan rata-rata kecepatan kendaraan 15 km/jam yang disebabkan banyakanya simpang sebidang perlintasan kereta api, tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata, serta peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan peningkatan panjang jalan. Lalu lintas harian rata-rata di Kawasan Cekungan Bandung mencapai 162.469 kendaraan/hari dengan LHRT tertinggi berada pada ruas Jalan Cibiru (Kota Bandung) yang mencapai 9.494 kendaraan/hari. Tantangan yang dihadapi adalah dengan peningkatan ekonomi dan pariwisata di Cekungan Bandung akan meningkatkan volume lalu lintas di beberapa ruas.

b) Analisis Pergerakan

Asal dan tujuan pergerakan di dalam Cekungan Bandung tertinggi adalah Kabupaten Bandung-Kota Bandung mencapai 71 juta orang/tahun begitupun sebaliknya mencapai 69 juta orang/tahun. Pergerakan yang tinggi tersebut menyebabkan kemacetan pada beberapa ruas jalan nasional salah satunya ruas Jalan Cibiru yang mengubungkan Kota Bandung (Cileunyi) dengan Kabupaten Bandung. Pergerakan yang tinggi menuju dan keluar Kota/Kabupaten Bandung ini disebabkan oleh kegiatan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi pada hari kerja maupun hari libur.



Gambar 7.18 *Origin Destination* Metropolitan Cekungan Bandung
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pergerakan keluar Cekungan Bandung tertinggi yaitu menuju dan dari Jakarta mencapai 23 juta orang/tahun, selain itu pergerakan menuju dan dari Jawa Tengah tergolong sedikit hanya mencapai 9,5 juta orang/tahun. Pergerakan dari dan keluar Cekungan Bandung sudah didukung oleh infrastruktur yang memadai. Pelaku perjalanan dapat memilih antara jalan bebas hambatan (jalan tol) maupun jalan nasional.

c) Perhitungan Kendaraan

Jumlah kepemilikan sepeda motor mendominasi sebesar 74,77%, diikuti kepemilikan mobil 22,67% dari total jumlah kendaraan 5,2 juta unit (2021). Pertumbuhan kendaraan Cekungan Bandung sebesar 11%/tahun, dimana mayoritas penduduk menggunakan kendaraan pribadi (97,44%) dibandingkan kendaraan umum (2,56%).

Beban jalan terbesar berada di Kota Bandung dimana menampung hampir setengah dari total kendaraan di Cekungan Bandung (49,02%).

Sementara itu, panjang jalan di Kota Bandung hanya mencapai 49,31 km, sehingga kemacetan di Kota Bandung tidak dapat dielakkan. Penyebab kemacetan dikarenakan tidak maksimalnya kapasitas jalan perkotaan karena adanya parkir liar, pedagang kaki lima, tingginya volume kendaraan, aktifitas ekonomi, dan perlintasan kereta api.

Tabel 7.36 Proyeksi Jumlah Kendaraan di Metropolitan Cekungan Bandung

Kota/ Kabupaten	Jumlah Kendaraaan (dalam ribu)			
	2023	2025	2029	2034
Bandung	956	1.036	1.218	1.491
Sumedang	180	195	230	281
Bandung Barat	552	598	703	861
Kota Bandung	3.604	3.908	4.594	5.624
Kota Cimahi	421	457	537	658
TOTAL	**7.736**	**8.219**	**9.311**	**10.949**

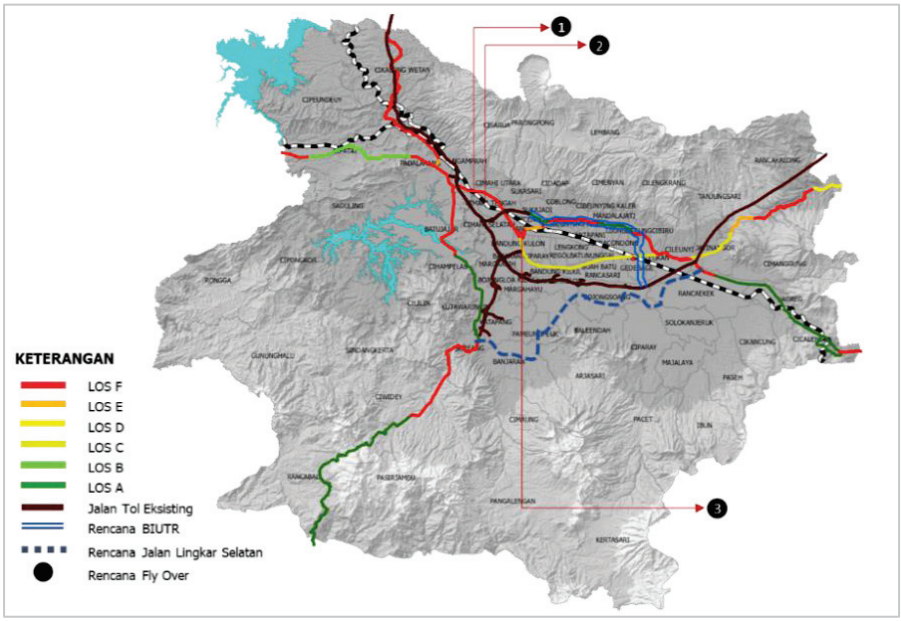
Sumber: Hasil Analisis, 2023

d) Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Kawasan Cekungan Bandung sebagai salah satu kawasan Metropolitan tidak lepas dari permasalahan kemacetan. Penyebab kemacetan utama adalah tidak maksimalnya kapasitas jalan perkotaan yang disebabkan karena adanya parkir liar, PKL, tingginya volume kendaraan, tingginya aktivitas ekonomi, dan perlintasan kereta api. Selain itu, pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 11%/tahun tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan dengan nilai 1,2%/tahun. Perhitungan kebutuhan infrastruktur jalan dapat digambarkan dalam skenario penanganan, yaitu:

i. Skenario Bangkitan 1

Keterbatasan dalam peningkatan jalan perkotaan Cekungan Bandung mengakibatkan tidak sebandingnya peningkatan lalu lintas harian (LHR) dengan peningkatan panjang jalan. Skenario ini mengusulkan pembangunan jalan lingkar selatan, Bandung Inter Urban Toll Road (BIUTR), jalan tol Sukabumi–Padalarang, dan peningkatan jalan Soreang–Ciwidey.

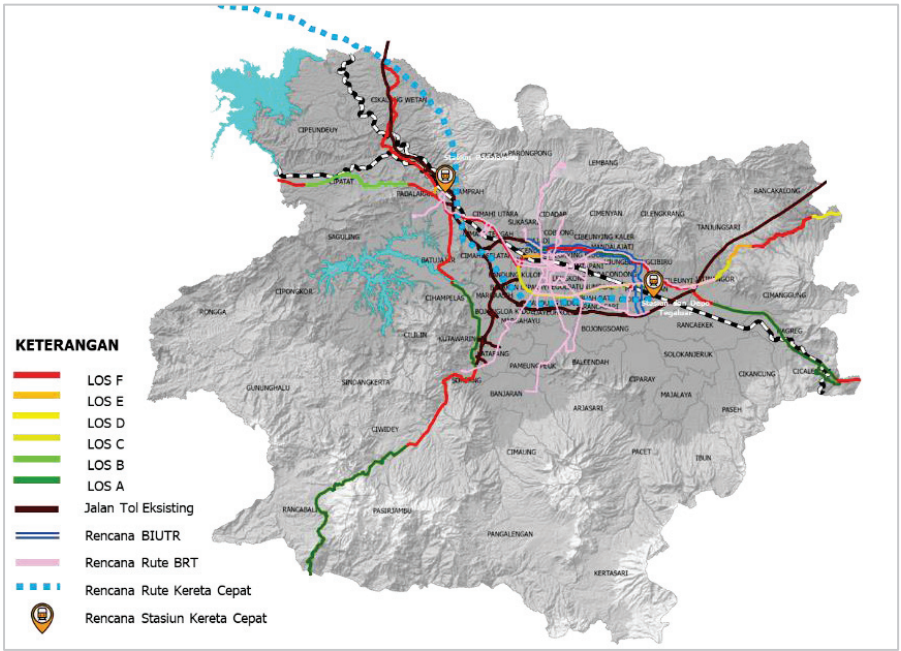


Gambar 7.19 Skenario 1 Proyeksi Bangkitan Cekungan Bandung 2034
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hingga tahun 2034 mendatang, akan tetap terjadi peningkatan arus lalu lintas yang tidak dapat ditangani dengan total bangkitan 232.253 smp diantaranya pada koridor Cianjur–Padalarang (Jl. Raya Rajamandala), koridor Purwakarta–Padalarang (Cisomang–Batas Kota Padalarang), koridor wisata KSPN Ciwidey (Jl. Lingkar Selatan Soreang–Ciwidey), koridor Padalarang–Cimahi (Jl. Rajawali Barat), koridor Bandung–Cileunyi (Jl. Cibiru dan Cinunuk–Cileunyi Kulon). Secara lebih jelas, skenario bangkitan kendaraan yang terjadi di Metropolitan Cekungan Bandung apabila tanpa mengembangkan transportasi publik dapat dilihat pada Gambar 7.19.

ii. Skenario Bangkitan 2

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan terdapat bangkitan 232.253 smp/hari yang meskipun terdapat peningkatan jalan, sehingga diperlukan perpindahan moda menggunakan transportasi publik di koridor utama Padalarang–Cimahi–Kota Bandung, Soreang–Luewipanjang, Elang–Gedebage, Jatinangor–Cileunyi–Kota Bandung, Banjaran–Bojongsoang–Kota Bandung. Pengembangan transportasi publik dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan tingkat pergeseran penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum dengan tahapan mulai dari pengembangan BRT, LRT, dan *Commuter Line*.



Gambar 7.20 Skenario 2 Proyeksi Bangkitan Cekungan Bandung 2034
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Rencana pengembangan transportasi publik dapat menampung 238.272 orang perhari dengan asumsi jam puncak pukul 06.30–09.00 dan 17.00–20.00. Skenario ini direkomendasikan karena dapat mengurangi beban jalan perkotaan yang sulit ditingkatkan karena keterbatasan lahan. Secara lebih jelas, skenario bangkitan kendaraan yang terjadi di Metropolitan Cekungan Bandung apabila mengembangkan transportasi publik dapat dilihat pada Gambar 7.20.

Tabel 7.37 Proyeksi LHRT dan VCR Cekungan Bandung pada Skenario 1

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	Lebar (m)	LHRT				VCR			
				2021	2025	2029	2034	2021	2025	2029	2034
22031	Citarum–Rajamandala–Bts. Kota Padalarang	15,041	7,82	3.266	3.940	4.753	6.008	1,14	1,37	1,66	2,10
2203111	Jln. Raya Padalarang (Padalarang)	3,084	8,337	1.958	2.361	2.848	3.602	0,60	0,72	0,87	1,10
22032	Eks Toll Rajamandala	4,577	7,615	2.699	3.255	3.927	4.965	0,94	1,13	1,37	1,73
2203211	Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala)	0,894	10,82	2.114	2.550	3.076	3.889	0,57	0,69	0,83	1,05
22033	Bts. Kota Padalarang–Bts. Kota Bandung	4,08	9,32	7.957	9.599	11.579	14.637	2,22	2,68	3,23	4,08
2203311	Jln. Raya Padalarang (Padalarang)	1,845	9,424	3.181	3.837	4.628	5.851	0,89	1,07	1,29	1,64
2203312	Jln. Raya Cimahi (Cimahi)	2,488	9,729	10.071	12.148	14.654	18.525	2,81	3,39	4,09	5,17
2203313	Jln. Raya Cibabat (Cimahi)	1,957	13,68	2.730	3.293	3.973	5.022	0,71	0,86	1,03	1,31
2203314	Jln. Cibeureum (Bandung)	2,8	15,28	2.600	3.136	3.783	4.783	0,68	0,82	0,98	1,25
2203315	Jln. Sudirman (Bandung)	1,23	15,18	2.576	3.107	3.748	4.739	0,67	0,81	0,97	1,23
2203316	Jln. Rajawali Barat (Bandung)	0,97	9,624	4.727	5.702	6.878	8.695	1,32	1,59	1,92	2,43
2203317	Jln. Nurtanio (Bandung)	1,2	11,61	6.148	7.416	8.946	11.309	1,60	1,93	2,33	2,94
2203318	Jln. Abdul Rahman Saleh (Bandung)	1,04	15,77	2.548	3.073	3.707	4.687	0,66	0,80	0,96	1,21
2203319	Jln. Pajajaran (Bandung)	1,06	14,79	2.017	2.434	2.936	3.710	0,52	0,63	0,76	0,96
220331A	Jln. Pasir Kaliki (Bandung)	0,71	16,03	1.478	1.783	2.151	2.719	0,38	0,46	0,56	0,70
2203411	Jln. Sukarno–Hatta (Bandung)	18,35	28,2	4.788	5.776	6.967	8.807	1,25	1,50	1,81	2,30
2203511	Jln. Gede Bage (Bandung)	0,458	7,504	1.103	1.331	1.605	2.029	0,29	0,35	0,42	0,53
2203611	Cinunuk–Cileunyi Kulon (Jalan Laboratorium)	1,211	6,614	1.755	2.117	2.553	3.228	0,46	0,55	0,66	0,85
22037	Bts. Kota Bandung–Bts. Kota Cileunyi	3,636	11,23	10.336	12.468	15.040	19.013	2,69	3,24	3,91	4,95
2203711	Jln. Layang Pasupati (Gajibu–Ciampedes Bandung)	1,8	9,366	3.149	3.799	4.582	5.793	0,82	0,99	1,19	1,51
2203712	Jln. Pasteur–Dr. Djundjunan (Bandung)	2,77	16,76	6.793	8.194	9.884	12.496	1,77	2,13	2,57	3,26
2203713	Jln. Surapati (Bandung)	1,8	14,58	3.777	4.556	5.496	6.948	0,98	1,19	1,43	1,80
2203714	Jln. Khp Hasan Mustopa / Suci (Bandung)	2,372	14,14	2.998	3.617	4.363	5.515	0,78	0,94	1,13	1,43
2203715	Jln. Raya Sindanglaya (Bandung)	4,185	12,92	6.744	8.135	9.813	12.405	1,75	2,12	2,55	3,22
2203716	Jln. Raya Ujung Berung (Bandung)	2,88	13,55	2.011	2.425	2.926	3.699	0,52	0,63	0,76	0,96
2203717	Jln. Raya Cipadung (Bandung)	1,45	12,75	2.027	2.445	2.949	3.729	0,53	0,64	0,77	0,97
2203718	Jln. Cibiru (Bandung)	0,55	15,37	3.547	4.279	5.162	6.525	0,92	1,11	1,34	1,69

No Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	Lebar (m)	LHRT				VCR			
				2021	2025	2029	2034	2021	2025	2029	2034
2203719	Bts. Kota Cileunyi–Nagreg (Rancaekek–Cileunyi–Cicalengka/Parakan Muncang)	18,14	15,51	4.374	5.277	6.365	8.046	1,14	1,37	1,66	2,10
2203720	Jln. Raya Cipacing (Cileunyi)	1,099	19,92	5.448	6.571	7.927	10.022	1,42	1,71	2,06	2,61
2203721	Jln. Raya Rancaekek (Rancaekek)	1,954	20,22	1.647	1.987	2.396	3.030	0,43	0,52	0,62	0,79
2203722	Nagreg–Bts. Kab. Bandung/Garut	2,335	4,86	1.849	2.230	2.690	3.401	0,48	0,58	0,70	0,88
2203723	Cisomang–Bts. Kota Padalarang	23,279	7,287	882	1.064	1.284	1.622	0,23	0,28	0,33	0,42
2203724	Jln. Raya Purwakarta (Padalarang)	0,94	6,512	788	951	1.147	1.450	0,20	0,25	0,30	0,37
2203725	Jln. Raya Cileunyi (Cileunyi) / Cileunyi–Jatinangor	0,579	14,86	1.349	1.627	1.962	2.481	0,35	0,42	0,51	0,64
2203726	Jatinangor–Bts. Kota Sumedang	9,537	7,201	1.068	1.288	1.554	1.965	0,28	0,34	0,40	0,52
2203727	Jln. Raya Jatinangor (Jatinangor)	6,469	8,852	2.460	2.968	3.580	4.525	0,64	0,77	0,93	1,18
2203728	Jln. Raya Tanjungsari (Tanjungsari)	3,352	6,175	4.524	5.457	6.583	8.322	1,18	1,42	1,71	2,17
2203729	Jln. Pangeran Kornel (Sumedang)	4,369	7,358	1.103	1.331	1.605	2.029	0,29	0,35	0,42	0,53
2203730	Jln. Palasari (Sumedang)	1,275	7,366	1.103	1.331	1.605	2.029	0,29	0,35	0,42	0,53
2203731	Bts. Kota Sumedang–Cijelag	26,716	6,575	2.344	2.827	3.411	4.312	0,61	0,74	0,89	1,12
2203732	Jln. Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Sumedang)	4,281	7,072	1.906	2.299	2.773	3.506	0,50	0,60	0,72	0,92
2203733	Cijelag–Kadipaten	4,618	6,825	585	706	851	1.076	0,15	0,18	0,22	0,28
2203734	Lingkar Nagreg	4,8	9,049	3.742	4.514	5.445	6.883	0,97	1,17	1,42	1,78
2203735	Cimareme–Batujajar	8,21	5,933	2.962	3.573	4.310	5.449	0,77	0,93	1,12	1,42
2203736	Batujajar–Soreang	13,07	7,4	2.508	3.025	3.649	4.613	0,65	0,79	0,95	1,20
2203737	Jln. Lingkar Selatan Soreang–Ciwidey	11,691	8,662	1.021	1.232	1.486	1.878	0,27	0,32	0,39	0,50
2203738	Jln. Raya Ciwidey	1,94	6,323	1.408	1.698	2.048	2.590	0,37	0,44	0,53	0,68
2203739	Jln. Bhayangkara	0,87	6,614	1.343	1.621	1.955	2.470	0,35	0,42	0,51	0,64
2203740	Ciwidey–Rancabali	14,63	6,173	1.385	1.670	2.015	2.548	0,36	0,43	0,52	0,66
2203741	Rancabali–Bts. Bandung/Cianjur	14,8	5,032	102	123	148	188	0,03	0,03	0,04	0,06

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.38 Proyeksi LHRT dan VCR Cekungan Bandung pada Skenario 2

No Ruas	Nama Ruas	VCR	Kapasitas Jalan	GAP LHRT (BIUTR)				VCR			
				2021	2025	2029	2034	2021	2025	2029	2034
2203211	Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala)	0,45	3701	756	149	-584	-1.716	1,03	1,24	1,49	1,89
2203311	Jln. Raya Padalarang (Padalarang)	0,58	3587	-802	-1707	-2799	-4.486	1,53	1,85	2,23	2,81
2203313	Jln. Raya Cibabat (Cimahi)	0,84	3845	-3185	-4636	-6385	-9.087	2,45	2,96	3,57	4,51
2203314	Jln. Cibeureum (Bandung)	0,47	3845	783	151	-611	-1.788	1,07	1,29	1,55	1,96
2203315	Jln. Sudirman (Bandung)	0,73	3845	-2228	-3481	-4992	-7.327	2,12	2,55	3,08	3,89
2203316	Jln. Rajawali Barat (Bandung)	0,93	3587	-3479	-4937	-6695	-9.411	2,46	2,97	3,58	4,53
2203317	Jln. Nurtanio (Bandung)	0,57	3845	36	-750	-1698	-3.162	1,33	1,60	1,93	2,44
220331A	Jln. Pasir Kaliki (Bandung)	0,49	3845	321	-406	-1283	-2.638	1,23	1,48	1,79	2,26
2203611	Cinunuk–Cileunyi Kulon (Jln Laboratorium)	0,90	2496	-1078	-1815	-2704	-4.078	1,25	1,50	1,81	2,29
22037	Bts. Kota Bandung–Bts. Kota Cileunyi	0,48	3845	135	-630	-1553	-2.979	1,29	1,56	1,88	2,38
2203711	Jln. Layang Pasupati (Gajibu–Ciampedes Bandung)	0,65	3587	-1150	-2127	-3305	-5.126	1,65	1,99	2,40	3,04
2203713	Jln. Surapati (Bandung)	0,62	3845	-572	-1484	-2583	-4.281	1,54	1,86	2,24	2,83
2203714	Jln. Khp Hasan Mustopa / Suci (Bandung)	0,44	3845	519	-166	-994	-2.272	1,16	1,40	1,69	2,13
2203716	Jln. Raya Ujung Berung (Bandung)	0,55	3845	-705	-1644	-2776	-4.525	1,59	1,91	2,31	2,92
2203717	Jln. Raya Cipadung (Bandung)	0,54	3845	-601	-1518	-2624	-4.333	1,55	1,87	2,25	2,85
2203718	Jln. Cibiru (Bandung)	1,05	3845	-4800	-6583	-8734	-12.057	3,01	3,63	4,38	5,54
2203811	Jln. Raya Cipacing (Cileunyi)	0,79	3845	-910	-1890	-3073	-4.901	1,66	2,00	2,41	3,05
2203812	Jln. Raya Rancaekek (Rancaekek)	0,55	3845	519	-167	-995	-2.273	1,16	1,40	1,69	2,13
22039	Nagreg–Bts. Kab. Bandung/Garut	0,79	1607	-529	-969	-1500	-2.321	0,74	0,90	1,08	1,37
2208511	Jln. Raya Jatinangor (Jatinangor)	0,79	3271	-1174	-2091	-3197	-4.905	1,55	1,87	2,25	2,85
2208611	Jln. Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Sumedang)	0,49	2869	134	-430	-1111	-2.162	0,95	1,15	1,39	1,75
22104	Cimareme–Batujajar	0,46	1607	61	-257	-642	-1.236	0,51	0,65	0,78	0,99
2210612	Jln. Raya Ciwidey	0,38	2496	442	18	-493	-1.282	0,72	0,86	1,04	1,32
2210613	Jln. Bhayangkara	0,37	2496	495	82	-416	-1.186	0,70	0,84	1,02	1,28

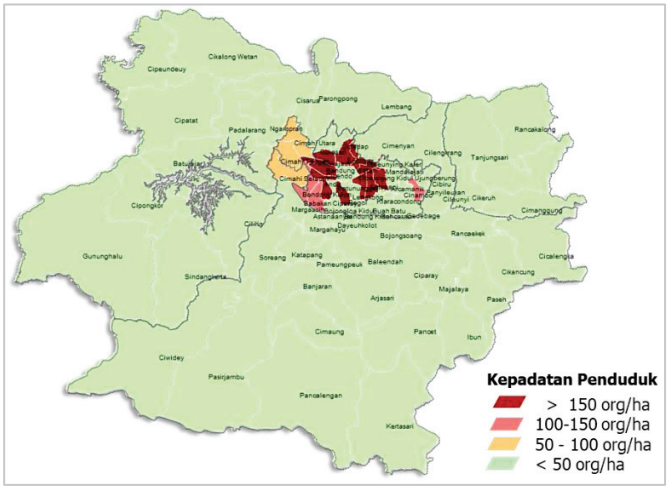
Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

Analisis ini mencakup proyeksi pertumbuhan kawasan dan proyeksi kebutuhan infrastruktur permukiman, berupa air minum, perpipaan, persampahan, dan air limbah.

a) Proyeksi Pertumbuhan Kawasan

Wilayah Perkotaan Bandung dan Cimahi merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi dan akan semakin meningkat dalam 10 tahun. Oleh karena itu, membutuhkan dukungan infrastruktur permukiman yang memadai. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berdasarkan menurut SNI 03-1733-2004 berada di Kecamatan Bojongloa Kaler (385 jiwa/ha), Regol (191 jiwa/ha), Antapani (251 jiwa/ha), Kiaracondong (214 jiwa/ha), Batununggal (226 jiwa/ha), Andir (243 jiwa/ha), Cicendo (150 jiwa/ha), Cibeuying Kidul (192 jiwa/ha), Cibeuying Kaler (149 jiwa/ha), dan Sukajadi (256 jiwa/ha).



Gambar 7.21 Proyeksi Kepadatan Penduduk Cekungan Bandung 2034
Sumber: Hasil Analisis, 2023

b) Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Air Minum

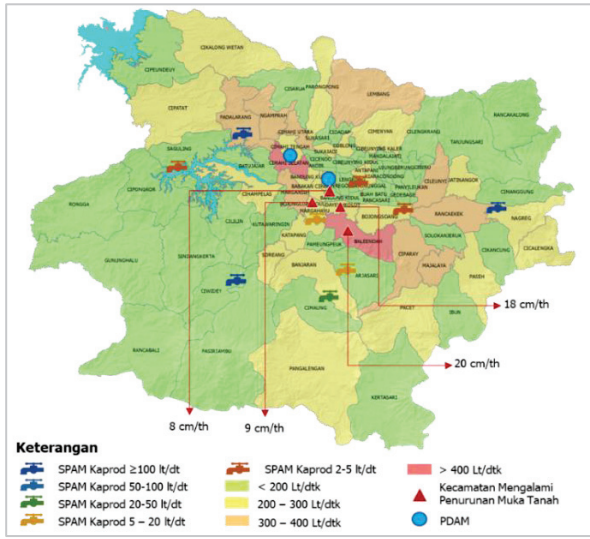
Tingkat pelayanan air minum perpipaan Cekungan Bandung rata-rata sebesar 14,6% atau di bawah target air minum perpipaan sebesar 30%. Peningkatan jaringan air minum perpipaan terutama pada kawasan dengan kepadatan tinggi sangat penting karena tingginya penggunaan air tanah yang mengakibatkan penurunan muka tanah terutama di Dayeuhkolot (18 cm/tahun), Baleendah (20 cm/tahun), serta Bandung Kidul dan Margahayu (8-9 cm/tahun).

Tingkat pelayanan air perpipaan terendah berada di Kabupaten Bandung Barat dengan tingkat layanan sebesar 5,5%. Sedangkan tingkat pelayanan tertinggi berada di Kota Bandung dengan tingkat

layanan sebesar 27,4%. Selain belum maksimalnya tingkat layanan perpipaan, perluasan jaringan perlu memperhatikan pada lokasi terutama yang mengalami penurunan muka tanah terbesar yaitu di daerah kawasan industri dan permukiman dengan kepadatan tinggi. Apabila target pelayanan air minum perkotaan minimal mencapai 30%, maka dibutuhkan tambahan air instalasi pengolahan air dengan kapasitas mencapai 2.742 lt/detik.

Akan tetapi rencana peningkatan jaringan perpipaan terkendala dengan tingkat pelayanan eksisting yang belum optimal. Dimana seluruh sistem pelayanan air minum masih memlliki tingkat idle yang tinggi. Tingkat pelayanan air minum perpipaan oleh PDAM Tirta Wening/Kota Bandung (2.729 lt/dt) dengan *idle capacity* 657 lt/dt dan Tirta Raharja/Kab. Bandung (1.012 lt/dt) dengan *idle capacity* 93 lt/dt. Selain idle capacity yang tinggi, terdapat permasalahan tingginya tingkat kebocoran PDAM, dimana kebocoran tertinggi berada di wilayah PDAM Tirta Wening Kota Bandung.

Dengan proyeksi kebutuhan air minum kawasan perkotaan sebesar 150 lt/org/hari, maka tingkat kebutuhan air minum perpipaan terbesar berada di Kec Bojongloa Kaler, Kec. Regol, Kec. Antapani, Kec. Kiaracondong, Kec. Batununggal, Kec. Andir, Kec. Cicendo, Kec. Cibeuying Kidul, Kec. Cibeuying Kaler, dan Kec. Sukajadi. Berdasarkan prioritisasi pengembangan jaringan perpipaan, pengembangan pada kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan kecamatan yang mengalami land subsidence seperti Kecamatan Baleendah (jaringan perpipaan 28%), Dayeuhkolot (jaringan perpipaan 22%), dan Bandung Kidul (jaringan perpipaan 32%).



Gambar 7.22 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Cekungan Bandung 2034
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.39 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kota Bandung

Pelayanan PDAM Tirta Wening Terhadap Kota Bandung				
Capacity Eksisting = 810 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2023	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	150	150	150	150
Kebutuhan Total (lt/dtk)	3.733	3.831	4.034	4.303
Tingkat Kebocoran (%) *)	45,20%	44,80%	44,00%	43,00%
Beban Puncak	1,8	1,8	1,8	1,8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	5.420	5.547	5.809	6.153
Peningkatan Pelayanan (%) **)	18,8%	20,8%	24,8%	29,8%
GAP (lt/dtk)	**- 209**	**- 344**	**-631**	**-1.024**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.40 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kota Cimahi

Pelayanan PDAM Tirta Raharja Terhadap Kota Cimahi				
Capacity Eksisting = 213 lt/dtk	Proyeksi Kebutuhan			
	2023	2025	2029	2034
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	150	150	150	150
Kebutuhan Total (lt/dtk)	299	307	323	345
Tingkat Kebocoran (%) *)	26,20%	25,80%	25,00%	24,00%
Beban Puncak	1,8	1,8	1,8	1,8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	377	386	404	427
Peningkatan Pelayanan (%) **)	11,6%	13,6%	17,6%	22,6%
GAP (lt/dtk)	**178**	**171**	**156**	**116**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

*) Tingkat kebocoran diproyeksikan mengalami penurunan 0,2%/tahun
**) Tingkat pelayanan diproyeksikan mengalami peningkatan 1%/tahun

Tabel 7.41 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bandung

Pelayanan PDAM Tirta Raharja Terhadap Kab. Bandung				
Capacity Eksisting = 160 lt/dtk	**Proyeksi Kebutuhan**			
	2023	**2025**	**2029**	**2034**
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	120	120	120	120
Kebutuhan Total (lt/dtk)	5.620	5.767	6.072	6.478
Tingkat Kebocoran (%) *)	26,20%	25,80%	25,00%	24,00%
Beban Puncak	1,8	1,8	1,8	1,8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	7.092	7.254	7.591	8.032
Peningkatan Pelayanan (%) **)	9,4%	11,4%	15,4%	20,4%
GAP (lt/dtk)	**- 507**	**- 667**	**- 1.009**	**-1.479**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.42 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Bandung Barat

Pelayanan PDAM Tirta Raharja Terhadap Bandung Barat				
Capacity Eksisting = 135 lt/dtk	**Proyeksi Kebutuhan**			
	2023	**2025**	**2029**	**2034**
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	120	120	120	120
Kebutuhan Total (lt/dtk)	131	135	142	151
Tingkat Kebocoran (%) *)	26,20%	25,80%	25,00%	24,00%
Beban Puncak	1,8	1,8	1,8	1,8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	166	169	177	188
Peningkatan Pelayanan (%) **)	3,5%	5,5%	9,5%	14,5%
GAP (lt/dtk)	**129**	**126**	**118**	**108**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

*) Tingkat kebocoran diproyeksikan mengalami penurunan 0,2%/tahun
**) Tingkat pelayanan diproyeksikan mengalami peningkatan 1%/tahun

Tabel 7.43 Proyeksi Pelayanan PDAM Terhadap Kabupaten Sumedang

Pelayanan PDAM Terhadap Sumedang				
Capacity Eksisting = 100 lt/dtk	**Proyeksi Kebutuhan**			
	2023	**2025**	**2029**	**2034**
Baseline Kebutuhan Air (lt/org/hari)	120	120	120	120
Kebutuhan Total (lt/dtk)	464	477	502	535
Tingkat Kebocoran (%) *)	26,20%	25,80%	25,00%	24,00%
Beban Puncak	1,8	1,8	1,8	1,8
Kebutuhan + Kebocoran (lt/dtk)	586	600	627	664
Peningkatan Pelayanan (%) **)	3,8%	5,8%	9,8%	14,8%
GAP (lt/dtk)	**78**	**65**	**39**	**2**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

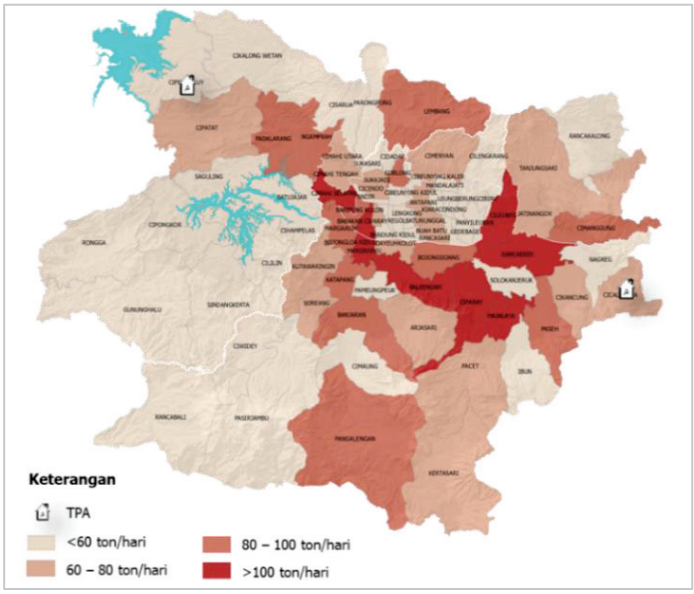
*) Tingkat kebocoran diproyeksikan mengalami penurunan 0,2%/tahun
**) Tingkat pelayanan diproyeksikan mengalami peningkatan 1%/tahun

c) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Wilayah Cekungan Bandung memiliki tingkat pelayanan sampah mencapai 50,23% dari total timbulan sampah 1.959 ton/hari. Tingkat pelayanan tersebut tergolong tinggi mengingat kondisi fasilitas pengolahan sampah yang belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan sudah overcapacity-nya TPA sarimukti dengan total ketinggian timbunan mencapai 50 meter dari batas maksimal 15 meter.

Dengan adanya TPA Legok Nangka diharapkan dapat mengatasi masalah timbulan sampah di Cekungan Bandung dengan kapasitas 2.000 ton/hari yang dapat menangani sampah terutama di perkotaan hingga 100%. Secara pembagian kuota pengolahan sampah, Kota Bandung akan mendapatkan kuota pengiriman tertinggi sebesar 960 ton/hari, diikuti dengan Kabupaten Bandung (450 ton/hari), Kota Cimahi (250 ton/hari), Bandung Barat (160 ton/hari) dan Sumedang (8,86 ton/hari). Akan tetapi dengan masih berprosesnya KPBU untuk TPA Legok Nangka, dipastikan baru dapat beroperasi paling cepat pada tahun 2026, maka saat ini harus memaksimalkan TPA Sarimukti.

Tingkat pelayanan persampahan 50,23% dari total timbunan sampah 1.959 ton/hari yang terlayani oleh TPA Sarimukti. TPA Sarimukti sudah melebihi kapasitas dan TPA Legok Nangka belum bisa beroperasi karena menunggu pengelola dari pemerintah daerah. TPA Sarimukti direncanakan mengalami perluasan sebesar 18 Ha dengan perluasan tahap I seluas 5,8 Ha yang dapat memperpanjang umur TPA Sarimukti hingga 22 Bulan dengan kapasitas TPA menjadi 3.500 ton/hari.



Gambar 7.23 Kebutuhan Penanganan Sampah Cekungan Bandung 2034
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.44 Proyeksi Timbulan Sampah Kawasan Strategis Cekungan Bandung

Tahun	2023	2025	2029	2034
Jumlah Penduduk (Jiwa)	9.272.898	9.515.561	10.020.102	10.688.565
Timbulan Sampah (kg/hari)	5.245.628	5.382.900	5.668.317	6.046.462
Timbulan Sampah (ton/hari)	5.245,63	5.382,90	5.668,32	6.046,46
Timbulan Sampah Reduksi (m^3/hari)	19.528	20.086	21.245	22.782
Timbulan Sampah Reduksi (ton/hari)	4.806,95	4.944,23	5.229,64	5.607,79
Timbulan Sampah Setelah Kompaksi (m^3/hari)	4.608	5.164	6.221	7.435
Penduduk Terlayani (jiwa)	3.572.830	3.666.371	3.860.772	4.118.332
Proyeksi Sampah Terangkut (m^3/hari)	10.238	11.476	13.824	16.521
Proyeksi Sampah Terangkut (m^3/tahun)	3.737.226	4.188.889	5.045.784	6.030.402

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.45 GAP Sampah Terlayani Tanpa Penanganan Pada TPA Sarimukti

Kab/Kota	Timbulan[1)]	Kapasitas TPA (2026)[2)]	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)				Proyeksi Sampah Terangkut (%)				GAP Penanganan (ton/hari)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Kota Bandung	0,66	499	1.510	1.569	1.593	1.616	97,95	100	100	100	-979	-1.070	-1.093	-1.117
Kota Cimahi	0,4	66	197	204	212	220	86,46	88,14	90,35	92,56	-104	-113	-125	-137
Bandung	0,55	626	525	594	664	736	25,52	28,23	30,94	33,65	492	459	421	379
Bandung Barat	0,4	219	213	239	266	293	46,82	49,51	52,21	54,91	120	101	81	58
Sumedang	0,69	65	75	83	91	99	36,55	39,40	42,26	45,12	38	32	27	20
TOTAL			**2.520**	**2.689**	**2.825**	**2.964**								

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.46 GAP Sampah Terlayani Skenario Beroperasinya TPA Legok Nangka

Kab/Kota	Timbulan[1)]	Kapasitas TPA[2)]	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)			Persentase Sampah Masuk Landfill (Metode RDF)	Proyeksi Sampah Terangkut (%)	GAP Penanganan (ton/hari)		
			2026	2029	2034			2026	2029	2034
Kota Bandung	0,66	960	1.616	1.689	1.154	55%	84%	9.362	8.649	2.885
Kota Cimahi	0,4	250	220	248	2.045		79%	2.438	2.252	1.459
Bandung	0,55	450	735	962	272		18%	4.388	4.054	792
Bandung Barat	0,4	160	293	378	449		21%	1.560	1.441	166
Sumedang	0,69	8,86	98	124	146		31%	86	80	-337
TOTAL			**2.962**	**3.401**	**4.066**					

Sumber: Hasil Analisis, 2023

[1)]kg/orng/hari
[2)]ton/hari

d) Analisis Kebutuhan Infrastruktur Limbah

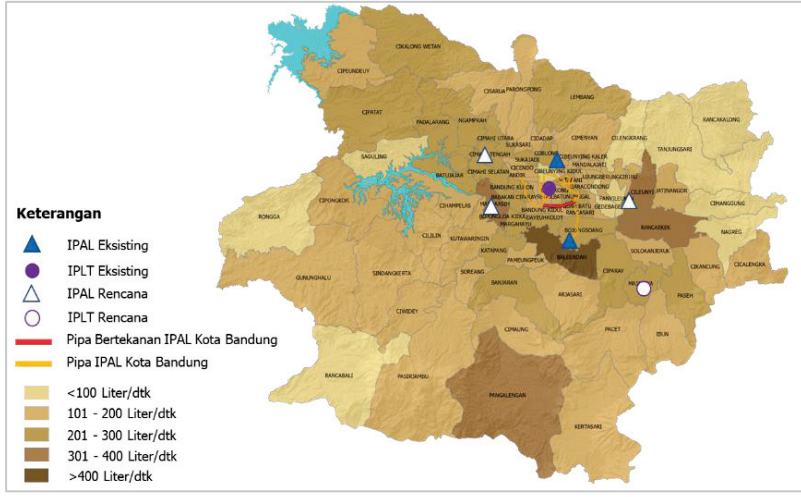
Tingkat sanitasi aman di Cekungan Bandung masih di bawah standar nasional dengan Kota Bandung baru sebesar 15,8%, diikuti dengan Kabupaten Bandung (7,21%), Kota Cimahi (6,72%), dan Kabupaten Bandung Barat (1,78%). Bila ditinjau per kecamatan, setiap tahunnya tidak terdapat peningkatan layanan sanitasi yang signifikan dengan total penanganan air limbah di Cekungan Bandung pada tahun 2020 sebesar 311 ribu lt/dtk. Kecamatan Baleendah dengan jumlah penduduk terbanyak, memiliki tingkat timbulan air limbah yang tinggi sebesar 314,7 lt/dtk dan mengalami peningkatan 112 lt/dtk sejak tahun 2020.

Tabel 7.47 GAP Proyeksi Penanganan Air Limbah Cekungan Bandung

Kecamatan Prioritas	Air Limbah 2020	Kapasitas 2020	Air Limbah 2029	Kapasitas 2029	Air Limbah 2034
Bojongloa Kaler	162,1	926 lt/dtk	182,1	1.319 lt/dtk	194,2
Kiara Condong	181,9		204,3		218,0
Batununggal	158,1		177,6		189,4
Astana Anyar	89,7		100,8		107,5
Andir	125,4		140,9		150,3
Bandung Kulon	209,2		235		250,7
Bandung Wetan	40,6		45,6		48,7
TOTAL	**967,1**		**1.086,3**		**1.158,8**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penanganan air limbah sudah diarahkan pengembangannya dalam program Citarum Harum, tetapi belum siapnya pemerintah daerah dalam membangun instalasi pengolahan tersebut menyebabkan belum ada instalasi yang terbangun. Saat ini, instalasi yang terbangun baru berada pada IPAL Bojongsoang yang hanya dapat menampung hingga 926 lt/dtk dan diprioritaskan pada 7 kecamatan yang mencakup 9 kelurahan dengan tingkat kepadatan tinggi di Kota Bandung.



Gambar 7.24 Kebutuhan Penanganan Limbah Cekungan Bandung 2034
Sumber: Hasil Analisis, 2023

7.2. Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Analisis keterpaduan infrastruktur merumuskan keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dengan memperhatikan kaidah urutan fungsi infrastruktur sebagai suatu sistem.

Pada Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, keterpaduan infrastruktur dapat dilihat pada pembangunan penyediaan air baku Metropolitan Cekungan Bandung yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan SPAM Bandung Selatan, SPAM Bandung Timur, dan SPAM Bandung Barat yang ditargetkan pada tahun 2029 keseluruhan SPAM dapat beroperasi. Selain itu, pembangunan polder pengendali banjir oleh SDA pada tahun 2025 perlu diterpadukan dengan peningkatan kapasitas drainase perkotaan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Kawasan Rebana, pembangunan Bendungan Sadawarna yang sudah diresmikan tahun 2022 harus ditindaklanjuti dengan peningkatan daerah irigasi Kuningan, Seseupan, dan Cikeusik menandakan keterpaduan pembangunan untuk mendukung kawasan lumbung pangan khususnya di bagian utara Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terdapat pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang ditargetkan beroperasi tahun 2024 sebagai akses Bandara Kertajati. Sama halnya dengan pembangunan Akses Tol Cipali-Patimban yang ditargetkan selesai tahun 2024 sebagai akses Pelabuhan Patimban yang saat ini berperan menjadi gerbang ekspor-impor baru di Provinsi Jawa Barat.

Pada Kawasan Bandung-Halimun-Ciletuh, penataan kawasan pada DTW Prioritas yang ditargetkan selesai tahun 2029 harus ditindaklanjuti dengan pembangunan TPST, Shelter Tsunami, dan Jalur Evakuasi Bencana untuk menciptakan kawasan kepariwisataaan yang terpadu. Selain itu, terdapat juga pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang ditargetkan beroportasi tahun 2025 harus ditindaklanjuti dengan pelebaran jalur vertikal Cibadak-Cikidang-Pelabuhan Ratu dan tol Sukabumi-Padalarang agar pada tahun 2029 seluruh ruas dapat beroperasi untuk mendukung aksesibilitas menuju kawasan pariwisata.

Pada Kawasan Pariwisata Jawa Barat Selatan, pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap yang ditargetkan selesai tahun 2029 harus ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur permukiman seperti SPAM Perkotaan Pangandaran, IPLT Purbahayu, dan TPA Sampah Bojongsari. Peningkatan akses jalan yang dilakukan tersebut untuk mendukung perkembangan kawasan pariwisata dan berpotensi menimbulkan pertumbuhan baru.

Tabel 7.48 Analisis Keterpaduan Infrastruktur

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
1	Bendungan Jatigede (2006-2013)	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2014	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	2023	SPAM Regional Jatiegde (Intake Tahap I)	2023 – 2025	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung keberadaan Kawasan Industri Sumedang yang termasuk dalam Kawasan Rebana serta Lumbung Pangan Provinsi Jawa Barat	Penyediaan layanan listrik tenaga air (PLTA) sebesar 110 MW oleh PT. PLN Indonesia Power. Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai Cimanuk dan Cisanggarung oleh KLHK	Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk membentuk lembaga pengelola SPAM Regional yang melibatkan Kota Cirebon, Kab. Cirebon, dan Kab. Indramayu. Kewenanangan Pemerintah Kab. Indramayu dan Cirebon untuk mengendalikan alih fungsi lahan.
		Pengendali Banjir	Pengendalian Banjir DAS Cisanggarung, Citaal, Cijangkelok, Cibatu, Cipanundan	2025 – 2029			SPAM Regional Jatiegde (Intake Tahap II)	2028 – 2029					
		Irigasi	Jaringan Irigasi DI Rentang	Saluran tersier (2026)									
2	Bendungan Kuningan (2013-2020)	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2020	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kabupaten Kuningan	2029 - 2029	SPAM Kuningan (300 lt/dtk)	2025	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung Kawasan Industri Rebana serta Lumbung Pangan	Penyediaan layanan listrik tenaga minihidro (PLTM) sebesar 0,5 MW oleh Kemen ESDM. Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai	Kewenangan PDAM Kab. Kuningan membangun jaringan distribusi dan sambungan rumah. Kewenangan Pemerintah Kab. Kuningan untuk mengendalika
		Pengendali Banjir	Pengendalian Banjir DAS Cisanggarung, Citaal, Cijangkelok, Cibatu, Cipanundan	2025 – 2029									

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
		Irigasi	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cileuweung	2024 – 2025							Provinsi Jawa Barat	Cisanggarung oleh KLHK.	n alih fungsi lahan pertanian.
			Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Seusepan	2024 - 2025			Peningkatan jaringan perpipaan Kabupaten Kuningan	2025 – 2029					
			Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cikeusik	2024 - 2025									
3	Bendungan Sadawarna (2018-2022)	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2022	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	2022 – 2024	SPAM Subang (Manyingsal)	2025 – 2029	Penyediaan Rumah Susun Pekerja Subang	2025 – 2029	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya, dan Perumahan dalam mendukung keberadaan Kawasan Industri Subang yang termasuk dalam Kawasan Rebana serta Lumbung Pangan Provinsi Jawa Barat	Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai Cipunagara oleh KLHK.	Kewenangan PDAM Kab. Subang membangun jaringan distribusi dan sambungan rumah.
		Pengendali Banjir	Pengendalian Banjir Kab. Subang	2025 – 2026	Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Pamanukan–Pangaden–Subang	2029 - 2029	Pembangunan TPST Kabupaten Subang	2025 - 2029					

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
4	Bendungan Leuwikeris (2016-2023)	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2016 (On going)	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur)	2024 - 2029	-	-	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung Kawasan Pariwisata dan Pertanian di Jawa Barat Selatan	Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai Citanduy oleh KLHK.	Kewenangan PDAM Kota Tasik, Kab. Ciamis, dan Kab. Pangandaran membangun jaringan distribusi dan sambungan rumah.
		Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lakbok Utara	2025 – 2029									
5	Bendungan Cipanas (2018-2023	Penyediaan Air Baku	Unit Produksi Air Baku: Intake Air Baku	2018 (On going)	Pembangunan Akses Jalan Tol Pelabuhan Patimban	2022 – 2024	SPAM Cipanas	2029 – 2029	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung keberadaan Kawasan Industri Subang yang termasuk dalam Kawasan Rebana serta Lumbung Pangan Provinsi Jawa Barat	Pengendalian alih fungsi lahan di hulu sungai Cimanuk oleh KLHK.	Kewenangan PDAM Kab. Sumedang dan Kab. Majalengka membangun jaringan distribusi dan sambungan rumah.
		Pengendali Banjir	Pengendalian Banjir Kab. Indramayu	2025 – 2026	-								
6	Terowongan Nanjung (2017-2019)	Pengendali Banjir	Pembangunan Kolam Retensi Babakan Jeruk	2024 – 2025	Pembangunan FO Persimpangan dan Perlintasan Kereta Api	2025 – 2029	Rehabilitasi IPLT Cibeet	2024 – 2024	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam	Keterpaduan dengan KLHK dalam melakukan konservasi DAS	Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
			Pembangunan Kolam Retensi Citepus	2025 – 2029	Pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR)	2025 – 2029	Pembangunan SPAM Bandung Barat (SPAM Sinumbra)	2025 – 2029			mendukung keberadaan Kawasan Metropolitan Cekungan Banddung yang memiliki kepadatan penduduk tinggi serta rawan terjadi banjir		untuk membangun drainase perkotaan. Kewenangan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan Flood Early Warning System.
			Pembangunan Kolam Retensi Cikutra	2025 – 2029			Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan	2026 – 2029					
			Pembangunan Waduk Sukawana	2026 – 2029	Pembangunan Tol Lingkar Selatan Bandung	2025 – 2029	Peningkatan SPAM Regional Bandung Timur (SPAM Kertasari)	2027 – 2029					
7	Sudetan (Floodway) Cisangkuy (2015-2020)		Pembangunan Waduk Cipanengah	2025 – 2029			Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM Bandung Selatan	2028 – 2029					
			Pembangunan Waduk Cikapundung	2026 – 2029	Peningkatan Kapasitas Jalan Perkotaan Cekungan Bandung	2025 – 2029	Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM Bandung Timur	2029 – 2029					
			Pembangunan Waduk Rancaekek	2025 – 2029									
			Peningkatan Kapasitas Drainase Perkotaan	2024 – 2025	Pembangunan Jalan Akses Stasiun Gedebage	2024 – 2024	Rehabilitasi IPAL Perkotaan	2030 – 2029					
8	Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Padalarang	Peningkatan Aksesibilitas	Penyediaan Air Baku	2028 – 2029	Pelebaran Jalur Vertikal Cibadak–Cikidang–	2024 – 2025	Peningkatan Kapasitas SPAM	2025 – 2026	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga,	Keterpaduan dengan Kemenpar untuk	Pemerintah Kab. Sukabumi untuk peningkatan

No	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
	(seksi I&II 2020-2026)				Pelabuhan Ratu		Pelabuhan Ratu				dan Cipta Karya dalam mendukung Kawasan Pariwisata di Kawasan DPP Bandung-Halimun-Ciletuh	mengembangkan destinasi wisata di DPP Bandung-Halimun-Ciletuh	kapasitas jalan pada Perkotaan Sukabumi dan Jalan Surade-Ujunggenteng
					Peningkatan Jalan Pelabuhan Ratu–Cisolok	2025 – 2027	Pembangunan TPST Pada DTW Prioritas	2025 – 2029					
					Peningkatan Jalan Surade–Ujung Genteng	2025 – 2027							
8	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (seksi I&II 2022-2024)	Peningkatan Aksesibilitas	-	-	Peningkatan Kapasitas Jalan Nagrek–Garut	2024 – 2029	Peningkatan Kapasitas SPAM Pelabuhan Ratu	2025 – 2026	-	-	Keterpaduan Infrastruktur Antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya dalam mendukung Kawasan Pariwisata di Kawasan Jawa Barat Selatan	Keterpaduan dengan Kemenpar untuk mengembangkan destinasi wisata di KSPN Pangandaran dan KPPN Priangan TImur	Pemerintah Kab. Garut dan Kota. Tasikmalaya untuk peningkatan kapasitas jalan pada Perkotaan
					Jalan Lingkar Malangbong	2025 – 2027							
					Jalan Lingkar Tasikmalaya	2024 – 2025	Pembangunan TPST Pada DTW Prioritas	2025 – 2029					
					Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur)	2024 – 2029							

Sumber: Hasil Analisis 2023

BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Rencana aksi (*action plan*) disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Pada bab ini memuat rencana aksi pembangunan infrastruktur yang diturunkan dari *grand strategy* dan dijabarkan ke dalam program pembangunan infrastruktur. Rencana aksi tersebut merupakan pendetailan dari program yang dilaksanakan dalam kurun waktu dari tahun 2025 hingga tahun 2034 mendatang.

8.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang keempat sektor yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, yaitu sektor industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Yang mana pembangunannya dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab dari semua pihak terkait, tentunya Kementerian PUPR mempunyai tugas dan tanggung jawab besar dalam mewujudkannya. Selanjutnya pada subbab ini dijelaskan rencana aksi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh keempat Unit Organisasi (UNOR) di lingkup Kementerian PUPR yaitu: Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga (BM), Cipta Karya (CK), dan Perumahan (P), yang biasa disebut ABCP.

Dalam tabel rencana aksi infrastruktur bidang PUPR ini dijelaskan tentang program-program (kegiatan) dari masing-masing UNOR, dengan cakupan kerja pada kawasan prioritas dan lokasi spesifik di kabupaten/kota yang dimaksud, dilengkapi dengan justifikasi/tujuan dan deskripsi kegiatan, kesiapan Readiness Criteria (dilihat dari kondisi tahun 2023 ini), asal sumber dana yang dibutuhkan, dan periode rencana tahun pelaksanaan (sejak dimulai sampai dengan selesai) dari masing-masing program di kawasan prioritas.

8.1.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur SDA

Rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur SDA dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.1 Rencana Aksi Infrastruktur SDA Provinsi Jawa Barat

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rupiah)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	06 - DJSDA	Pembangunan Waduk Sukawana (dari Sungai Cimahi)	Cekungan Bandung	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang	- Sungai inflow untuk waduk Sukawana adalah sungai Cimahi. - Dapat menyediakan air baku 0,43 m3/dt - Aliran air dari sungai Cimahi bermuara di sungai Citarum. - Secara administrasi waduk Sukawana ini terletak di Kampung Sukawana, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung - Waduk Sukawana merupakan waduk multiguna yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air minum, irigasi, industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Agar diper-siapkan		718 ribu m3	100 Milyar	APBN	2029	2029
2	06 - DJSDA	Pembangunan Waduk Cipanengah	Cekungan Bandung	Cimenyan	- Dapat menyediakan air baku 1,55 m3/dt - Tingkat pelayanan eksisting rata-rata 15,6% dengan *idle capacity* 3 700 lt/dtk. - Mendukung pelayanan air minum pada permukiman padat penduduk di Cekungan Bandung. - Kepadatan tinggi (>150 org/ha) yang berada di Kec Bojongloa Kaler, Kec. Regol, Kec. Antapani, Kec. Kiaracondong, Kec. Batununggal, Kec. Andir, Kec. Cicendo, Kec. Cibeuying Kidul, Kec. Cibeuying Kaler, dan Kec. Sukajadi	Agar diper-siapkan		4,68 juta m3	450 Milyar	APBN	2029	2029
3	06 - DJSDA	Pembangunan Waduk Rancaekek	Cekungan Bandung	Kab. Bandung	- Dapat menyediakan air baku 4,54 m3/dt	Agar diper-siapkan		1 Unit	5 Milyar	APBN	2029	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rupiah)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	06 - DJSDA	Pembangunan Kolam Retensi (Cikutra) dalam Mendukung Program Citarum Harum	Cekungan Bandung	Kab. Bandung	- Sungai Citarum Hulu memiliki kapasitas terbatas dengan daya tampung rata-rata 550 m3/detik dengan Q20 sebesar 650 m3/detik. - Terdapat target pengurangan genangan sebesar 394,15 ha s.d. 2025, dimana tahun 2022 terdapat pengurangan sebesar 50% - Daerah selatan yang memiliki topografi cekungan, terutama di wilayah Bandung Selatan genangan air sulit mengalir ke drainase primer. - Berdasarkan Master Plan Citarum Harum, direncanakan polder pengendali banjir dan kolam retensi yang merupakan kewenangan Pemda untuk menuntaskan banjir. - Sudah terdapat penanganan dari Ditjen SDA berupa peningkatan kapasitas sungai dan kolam retensi, sehingga ketinggian banjir berkurang (2 m menjadi 30-50 cm). - Merupakan Program Citarum Harum	Agar diper-siapkan		1 Unit	30 Milyar	APBN	2029	2029
5	06 - DJSDA	Pembangunan Kolam Retensi Babakan Jeruk	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Drainase atau saluran air di Babakan Jeruk, Jalan Djundjunan atau sekitarnya belum memadai, sehingga membuat banjir di sekitar jalan tersebut dan Jalan Pasteur. - Banjir kurang lebih setinggi satu meter disebabkan bukan hanya drainase yang belum memadai namun juga akibat tingkat sedimentasi pada drainase tinggi	Agar diper-siapkan		1 Unit	30 Milyar	APBN	2029	2029
6	06 - DJSDA	Pembangunan Kolam Retensi Citepus	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Diperlukan untuk mengatasi permasalahan di Jalan Pagarsih yang mengalami banjir karena meluapnya aliran dari Sungai Citepus yang merupakan anak Sungai Citarum - Hasil pemodelan kolam retensi didapat bahwa Q20 pada sungai Citepus yaitu 19.8 m3/det. Setelah adanya pengaruh kolam retensi Sirnaraga I, routing sungai, dan	Agar diper-siapkan		1 Unit	30 Milyar	APBN	2026	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rupiah)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					subbasin Sirnaraga II diperoleh debit Q20 yaitu 18.4 m3/det.							
7	06 - DJSDA	Peningkatan Kapasitas Drainase Perkotaan	Cekungan Bandung	Kec. Dayeuh-kolot, Kec. Sapan, Kec. Margaasih, Kec. Baleendah	- Telah adanya pembangunan polder yang berada di Bojongsoang, Cienteung, Cipalasari, Cijambe Barat, Cijambe Timur, dan Polder Cisangkuy oleh Kementerian PUPR. - Masih terjadi genangan karena belum optimalnya penanganan 66 lokasi jaringan drainase perkotaan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. - Kondisi saat ini drainase dalam kondisi tersumbat karena sampah. - Membutuhkan pengerukan dan pemeliharaan drainase rutin oleh Pemda.	Agar diper-siapkan		4 Lokasi	160 Milyar	APBD	2025	2026
8	06 - DJSDA	Pembangunan Waduk Cipunagara	Rebana	Subang	- Penyedia air untuk mendukung Kawasan Industri Subang yang diperkirakan dapat menimbulkan pertumbuhan jumlah pekerja mencapai 2,8 ribu jiwa dengan kebutuhan air mencapai 20,7 ribu liter/detik. - Pembangunan waduk ini menunggu inisiasi dari Kemenperin terhadap perkembangan Kawasan Industri Subang.	Agar diper-siapkan		8,25 m3/dtk	325 Milyar	APBN	2027	2029
9	06 - DJSDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cileuweung	Rebana	Kab. Kuningan	- Sumber air DI Cileuweung berasal dari Bendungan Kuningan dengan debit 3.608 lt/dtk - DI Cileuweng direncanakan akan mengaliri dari 1.024 Ha sawah di Kab. Kuningan dan 2.000 Ha di Kab. Brebes - Kontribusi produksi beras Kabupaten Kuningan sebesar 161.790 ton/tahun atau 3,01% terhadap Provinsi Jawa Barat dengan Indeks Pertanaman 2,14.	Agar diper-siapkan		3.608 ha	47 Milyar	APBN, APBD	2025	2028
10	06 - DJSDA	Rehabilitasi Jaringan	Rebana	Kab. Kuningan	- Bendung Seuseupan memiliki debit air masuk 3.000 lt/dtk dengan debit limpasan	Agar diper-		4.011 ha	388 Milyar	APBN	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rupiah)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Irigasi DI Seusepan			1.000 lt/dtk, sumber air dari Sungai Cijuray yang sering kering di musim kemarau. - Melayani 3.800 Ha sawah pada 7 kecamatan di Kab. Cirebon Saluran Irigasi Seuseupan mengalami sedimentasi dengan ketinggian lebih dari 2 meter. - Kawasan Rebana memiliki kontribusi produksi beras terbesar se Jawa Barat, produksi 2,2 juta ton/tahun (42%). - Kontribusi produksi beras Kabupaten Cirebon sebesar 272.723 ton/tahun atau 5,07% terhadap Provinsi Jawa Barat dengan Indeks Pertanaman 1,73	siapkan						
11	06 - DJSDA	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cikeusik	Rebana	Kab. Cirebon	- Sedang dibangun Bendung Cikeusik yang akan selesai tahun 2023 dengan debit 6.889 lt/dtk dengan sumber air DI Cikeusik berasal dari Sungai Cisanggarung - Bendung akan meningkatkan luasan DI Cikeusik dari 1.400 Ha menjadi 6.000 Ha di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 - Kawasan Rebana memiliki kontribusi produksi beras terbesar se Jawa Barat, produksi 2,2 juta ton/tahun (42%). - Kontribusi produksi beras Kabupaten Cirebon sebesar 272.723 ton/tahun atau 5,07% terhadap Provinsi Jawa Barat dengan Indeks Pertanaman 1,73.	Agar diper-siapkan		5.812 ha	84 Milyar	APBN	2025	2029
12	06 - DJSDA	Pengendalian Banjir Sungai Cisanggarung	Rebana	Kab. Kuningan dan Kab. Cirebon	- Saat ini sudah terdapat Bendungan Kuningan (beroperasi 2021) yang bisa menangani kawasan banjir pada 3 kecamatan di Kabupaten Kuningan - DAS aliran sungai Cisanggarung memiliki kapasitas terbatas dengan daya tampung rata-rata 734,6 m3/detik dengan Q10 sebesar 1.040,8 m3/detik.	Siap		0,5 Km	32 Milyar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rupiah)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Penyebab banjir adalah pendangkalan karena adanya sedimentasi tinggi dari erosi di hulu sungai mencapai 39.448 ton/tahun. - Luas risiko bencana banjir saat ini di Kabupaten Kuningan mencapai 6.300 Ha, jiwa terpapar sebanyak 114.000 jiwa.							
13	06 - DJSDA	Pengendalian Banjir Kab. Subang	Rebana	Kab. Subang	- Sedang dibangun Waduk Sadawarna (selesai tahun 2022) yang dapat mengatasi banjir di Sungai Cipunagara dengan kapasitas tampung 71 juta m3. - Sungai Cipunagara memiliki kapasitas terbatas, daya tampung rata-rata 302 m3/detik dengan Q25 sebesar 524 m3/dtk sehingga perlu peningkatan kapasitas Sungai Cipunagara. - Sebgai hilir sungai, Kabupaten Subang menerima aliran sungai dari Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Garut. - Penyebab banjir adalah pendangkalan karena adanya sedimentasi tinggi dari erosi di hulu serta terjadinya penyempitan aliran sungai pada hilir akibat permukiman di sempadan sungai.	Agar diper-siapkan		0,3 Km	25 Milyar	APBN	2025	2026
14	06 - DJSDA	Pembangunan Bendungan Kadumanik	Rebana	Kab. Majalengka	- Penyedia air irigasi DI Cilutung untuk 9 ribu Ha di Kabupaten Majalengka yang bersumber dari sungai Cimanuk. - Kawasan Rebana memiliki kontribusi produksi beras terbesar se-Provinsi Jawa Barat, produksi 2,2 juta ton/tahun (42%). - Kontribusi produksi beras Kabupaten Cirebon sebesar 272.723 ton/tahun atau 5,07% terhadap Provinsi Jawa Barat dengan Indeks Pertanaman 1,73.	Agar diper-siapkan		65 juta m3	1,3 Triliun	APBN	2027	2029
15	06 – DJSDA	Rehabilitasi jaringan irigasi Lakbok Utara	Jawa Barat Selatan	Kab. Ciamis	- Tingkat layanan jaringan irigasi 30,9% dengan total 9.685 Ha	Agar diper-siapkan		8,75 Km	8,75 Milyar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rupiah)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Peningkatan layanan jaringan irigasi menjadi 52% dengan total 16.285 Ha terlayani memanfaatkan Bendungan Leuwikeris							
16	06 - DJSDA	Pembangunan jaringan irigasi Cikalong	Jawa Barat Selatan	Kab. Tasikmalaya	- Tingkat layanan jaringan irigasi 20,5% dengan total 9.254 Ha - Peningkatan layanan jaringan irigasi menjadi 27,1% dengan total 12.254 Ha terlayani	Agar diper-siapkan		3000 Ha	360 Milyar	APBN	2027	2029
17	06 - DJSDA	Pembangunan jaringan irigasi Parigi dan Cimerak	Jawa Barat Selatan	Kab. Pangandaran	- Tingkat layanan jaringan irigasi 63,3% dengan total 11.185 Ha - Peningkatan layanan jaringan irigasi menjadi 80,2% (total 14.185 Ha terlayani).	Agar diper-siapkan		3000 Ha	20 Milyar	APBD	2026	2029
19	06 - DJSDA	Pembangunan Bendung Cikalong	Jawa Barat Selatan	Kab. Tasikmalaya	- Penyedia air irigasi untuk jaringan irigasi Cikalong yang melayani Kab. Tasikmalaya dan Pangandaran	Agar diper-siapkan		1 Unit	200 Milyar	APBN	2027	2029
20	06 - DJSDA	Pembangunan Bendungan Cipanundan	Rebana	Kab. Kuningan	- Memiliki luas genangan sebesar 78,98 Ha. - Penyedia air untuk jaringan irigasi teknis dan ½ teknis seluas 1.168,6 Ha - Penyedia air baku sebesar 61 lt/dtk	Agar diper-siapkan		1 Unit	3,4 Triliun	APBN	2027	2029
21	06 - DJSDA	Pembangunan Kolam Retensi Sungai Cilember dan Cibeureum	Cekungan Bandung	Kab. Bandung	- Debit banjir Sungai Cilember mencapai 90,7 m3/detik (Q25). - Debit banjir Sungai Cibeureum mencapai 60,2 m3/detik (Q25). - Ketinggian banjir saat ini mencapai 1 meter.	Agar diper-siapkan		1 Unit	50 Milyar	APBN	2026	2029
22	06 - DJSDA	Penyediaan Air Baku Kertasari	Cekungan Bandung	Kab. Bandung	- Untuk mendukung SPAM Kertasari yang akan melayani kawasan Metropolitan Cekungan Bandung - Lahan untuk SPAM Kertasari sudah disiapkan PDAM Tirta Raharja	Agar diper-siapkan		1,95 Km	75 Milyar	APBN	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana Implementasi	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya (Rupiah)		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	06 - DJSDA	OP Sungai dan drainase secara berkelanjutan serta normalisasi Sungai Citarum	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Total sedimentasi diperkirakan mencapai 16,9 juta ton/tahun - Sedimentasi terjadi dibeberapa aliran Sungai Citarum seperti pada Citarum-Nanjung (1,38 juta ton/tahun), Citarum-Dayeuhkolot (600 ribu ton/tahun), Citarum-Majalaya (98 ribu ton/tahun), dan Cikapundung-Maribaya (22 ribu ton/tahun) - Sedimentasi terjadi karena sebagian hulu Sungai Citarum memiliki tingkat erosi berat (31,4% dari total DAS).	Agar diper-siapkan		4 Lokasi		APBN	2026	2029
24	06 - DJSDA	OP dan normalisasi Sungai Ciliwung	Ciletuh	Kota Bogor dan Kota Depok	- Sedimentasi di WS Ciliwung-Cisadane disebabkan tingkat erosi berat dan sangat berat (>18 ton/ha/tahu) mencapai 52.816,15 Ha (15,2% dari total luas WS) - Kapasitas tampung Sungai Ciliwung 500 m3/dtk tidak bisa menampung debit limpasan yang mencapai 600 m3/dtk - Normalisasi juga diperlukan pada kawasan Metropolitan Jakarta (hilir) karena sedimentasi yang terbawa dari hulu sebagai akibat dari degradasi DAS.	Agar diper-siapkan		8,1 Km		APBN	2026	2029

Sumber: Rencana Penyusun dan Diskusi antar Unor, 2022

8.1.2. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur jalan dan jembatan dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.2 Rencana Aksi Infrastruktur Bina Marga Provinsi Jawa Barat

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	04 - DJBM	Pembangunan Flyover Jl. Soekarno Hatta dengan VCR 1,13	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Rute flyover dari persimpangan Jalan Soekarno Hatta -Jalan Ibrahim Adjie hingga persimpangan Batununggal - Pertemuan antara Jalan Soekarno Hatta, Jalan BTS. Kota Bandung-BTS. Kota Cileunyi, Jalan Pasteur-Djunjunan - Diproyeksikan ketiga ruas tersebut memiliki bangkitan kendaraan >= 9.000 smp/jam. - Saat ini lebar rata-rata ketiga ruas sudah lebih dari 11 meter akan tetapi sebagai simpang pertemuan arus kendaraan, seing terjadi kepadatan pada saat jam sibuk.	Agar diper-siapkan		1,96 Km	1,2 Triliun	APBN	2029	2029
2	04 - DJBM	Pembangunan Flyover Jl. Bts. Kota Bandung-Bts. Kota Cileunyi dengan VCR 2,45	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Penanganan simpang pada jalur utama Kota Bandung menuju Kota Cimahi dan Kota Bandung menuju Kab. Garut - Pertemuan antara Jalan Soekarno Hatta, Jalan BTS. Kota Bandung-BTS. Kota Cileunyi, Jalan Pasteur-Djunjunan - Diproyeksikan ketiga ruas tersebut memiliki bangkitan kendaraan >= 9.000 smp/jam. - Saat ini lebar rata-rata ketiga ruas sudah lebih dari 11 meter akan tetapi sebagai simpang pertemuan arus kendaraan, seing terjadi kepadatan pada saat jam sibuk.	Agar diper-siapkan		1 Buah FO	300 Milyar	APBD	2029	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	04 - DJBM	Pembangunan Flyover Jl. Pasteur-Dr. Djunjunan dengan VCR 1,6	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Penanganan simpang pada jalur utama Kota Bandung menuju Kota Cimahi dan Kota Bandung menuju Kab. Garut - Pertemuan antara Jalan Soekarno Hatta, Jalan BTS. Kota Bandung-BTS. Kota Cileunyi, Jalan Pasteur-Djunjunan - Diproyeksikan ketiga ruas tersebut memiliki bangkitan kendaraan hingga 9.000 smp/jam. - Saat ini lebar rata-rata ketiga ruas sudah lebih dari 11 meter akan tetapi sebagai simpang pertemuan arus kendaraan, seing terjadi kepadatan pada saat jam sibuk.	Agar diper-siapkan		1 Buah FO	300 Milyar	APBN, APBD	2029	2029
4	04 - DJBM	Peningkatan Kapasitas Jalan Perkotaan Cekungan Bandung	Cekungan Bandung	Kota/Kab. Bandung	- Jalur utama menuju dan keluar Kota Bandung menuju perkotaan skitar dan kawasan pariwisata. - Jalan yang membutuhkan penanganan berupa peningkatan kapasitas diantaranya: - Jl. Surapati dengan VCR 1,6 - Jl. Bts. Kota Cileunyi-Nagreg VCR 1,04 - Jl. Raya Cipacing dengan VCR 1,29 - Diproyeksikan ketiga ruas tersebut memiliki bangkitan kendaraan >= 9.000 smp/jam. - Saat ini lebar rata-rata ketiga ruas sudah lebih dari 14 meter akan tetapi terjadi kepadatan pada pertemuan anatara ruas Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten/Kota serta kendaraan umum yang berhenti untuk menurunkan penumpang	Siap		21,04 Km	231,44 Milyar	APBD	2025	2029
5	04 - DJBM	Pembangunan FO perlintasan KA Gedebage-Sukarno Hatta	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Stasiun Gedebage akan beroperasi dengan selesainya jalur Kereta Api Cepat pada tahun 2024. - Saat ini akses stasiun dilayani oleh Jalan Nasional dengan lebar 7,5 meter. - Diproyeksikan penumpang Kereta Api Cepat mencapai 31.000 orang/hari.	Agar diper-siapkan		1 Buah FO	38,5 Milyar	APBD	2025	2026

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	04 - DJBM	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (KA) Jl. Gedebage (Bandung)	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Terjadi waktu antrian kendaraan yang cukup lama pada persimpangan perlintasan KA. - Tingkat pelayanan Jalan rendah (VCR 1,6). - Diproyeksikan pada ruas ini terjadi bangkitan kendaraan 8.946 smp/jam. - Keberadaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan menyebabkan semakin seringnya pergerakan yang menyebabkan semakin sering terjadinya penutupan ruas jalan	Siap		270 meter	84,3 Milyar	APBN	2025	2025
7	04 - DJBM	Pembangunan FO Perlintasan Kereta Api Jl. Sunda	Cekungan Bandung	Kota Cimahi	- Terjadi waktu antrian kendaraan yang cukup lama pada persimpangan sebidang perlintasan kereta api menyebabkan kemacetan dan tingkat pelayanan rendah. - Keberadaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan menyebabkan semakin seringnya pergerakan yang menyebabkan akan semakin sering terjadinya penutupan ruas jalan (per 15 menit)	Agar diper-siapkan		1 Buah Fo	300 Milyar	APBD	2026	2029
8	04 - DJBM	Pembangunan FO Perlintasan Kereta Api Jl. Ahmad Yani	Cekungan Bandung	Kota Cimahi	- Terjadi waktu antrian kendaraan yang cukup lama pada persimpangan sebidang perlintasan kereta api menyebabkan kemacetan dan tingkat pelayanan rendah. - Keberadaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan menyebabkan semakin seringnya pergerakan yang menyebabkan akan semakin sering terjadinya penutupan ruas jalan (per 15 menit)	Agar diper-siapkan		1 Buah Fo	300 Milyar	APBD	2026	2029
9	04 - DJBM	Pembangunan FO Perlintasan Kereta Api Jl. Laswi	Cekungan Bandung	Kota Cimahi	- Terjadi waktu antrian kendaraan yang cukup lama pada persimpangan sebidang perlintasan kereta api menyebabkan kemacetan dan tingkat pelayanan rendah. - Keberadaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan menyebabkan semakin seringnya pergerakan yang menyebabkan akan semakin sering terjadinya penutupan ruas jalan (per 15 menit)	Agar diper-siapkan		1 Buah Fo	300 Milyar	APBD	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	04 - DJBM	Pembangunan Bandung *Intra Urban Toll Road* (BIUTR)	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Jalan lingkar utara Kota Bandung menjadi akses utama dari/menuju Kota Cimahi dan perkotaan Jatinangor. - Memiliki kepadatan kendaraan yang tinggi karena menjadi akses kagiatan pariwisata dan pendidikan terutama pada akhir pekan. - Tingkat pelayanan jalan rendah VCR > 1,02. - Kemacetan terjadi karena kepadatan kendaraan pada simpang yang bersinggungan dengan jalan perkotaan (status jalan kewenangan Kab/Kota). - Penanganan kemacetan harus didukung pengembangan transportasi massal. - Terdapat pengerjaan beberapa kegiatan untuk mengatasi kemacetan diantaranya pembangunan Fly Over Jl. Soekarno Hatta, penanganan simpang tidak sebidang Jalan Bts. Kota Bandung-Bts. Kota Cileunyi, dan Jln. Pasteur-Dr. Djundjunan.	Agar diper-siapkan		27,3 km	3,5 Triliun	KPBU	2026	2029
11	04 - DJBM	Pembangunan Tol Lingkar Selatan Bandung	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Jalan Soekarno–Hatta sebagai jalan lingkar selatan Kota Bandung memiliki tingkat pelayanan rendah VCR 1,13. - Terdapat kota sekitar: Padalarang, Cimahi, Soreang, Tegalluar, Cileunyi yang sudah berkembang sebagai permukiman berskala besar dan kegiatan ekonomi. - Diperlukan jalan lingkar baru untuk mengurangi beban jalan eksisting yang saat ini dilalui arus menerus dari Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Garut	Agar diper-siapkan		51,10 Km	20 Triliun	KPBU	2026	2029
12	04 - DJBM	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kabupaten Kuningan	Rebana	Kab. Kuningan	- Kondisi ruas jalan saat ini memiliki lebar < 7 meter dan sudah menjadi akses utama dari Kota Banjar, Ciamis, dan Pangandaran menuju Kota Cirebon (Pelabuhan Cirebon). - Bangkitan pergerakan saat ini mencapai 32.605 smp/jam terutama pada ruas Batas Kab.	Siap		10 Km	110 Milyar	APBD	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kuningan/Cirebon–Kota Kuningan (Jalan Utama) dengan VCR 1,16. - Tingginya tingkat kepadatan jalan diakibatkan menumpuknya arus menerus (kendaraan > 2 sumbu) dan arus lokal di Kabupaten Kuningan serta tingginya hambatan samping pada kawasan perkotaan Kuningan. - Ruas ini melanjutkan ruas eksisting yang sudah terbangun yaitu Jalan Lingkar Timur-Utara yang sudah bisa mengurangi tingkat kepadatan jalan utama. - Sudah masuk SBSN 2025.							
13	04 - DJBM	Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Pamanukan–Pangaden–Subang	Rebana	Kab. Subang	- Kondisi ruas jalan saat ini memiliki lebar <6 meter dan sudah menjadi akses utama dari perkotaan Subang menuju Jalan Nasional Pantura terutama bagi kendaraan logistik. - Proyeksi bangkitan kendaraan logistik 3.953 smp/jam yang ditimbulakan dari kawasan industri Subang (perkiraan luas 1.453 Ha). - Pelabuhan Patimban sudah beroperasi dengan luas 60 Ha (Tahap I), melayani kegiatan peti kemas dan terminal kendaraan. - Setelah Pelabuhan Patimban beroperasi penuh menyebabkan rendahnya pelayanan jalan ke Pelabuhan Patimban (VCR 0,71)	Agar diper-siapkan		36 Km	396 Milyar	APBD	2029	2029
14	04 - DJBM	Pembangunan Jalan Tol Akses Cipali–Patimban	Rebana	Kab. Subang	- Mendukung akses menuju Pelabuhan Patimban yang memiliki proyeksi bangkitan kendaraan logistik hingga 11.899 smp/jam dan 7,5 juta TEUs yang ditimbulakan dari kawasan industri Karawang, Bekasi, dan Rebana. - Pelabuhan Patimban beroperasi dengan luas 60 Ha (Tahap I), melayani kegiatan peti kemas dan terminal kendaraan. - Setelah Pelabuhan Patimban beroperasi penuh menyebabkan rendahnya pelayanan jalan ke Pelabuhan Patimban (VCR 1,6)	Siap		37,05 Km	74,8 Milyar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	04 - DJBM	Pelebaran Jalur Vertikal Cibadak–Cikidang–Pelabuhan Ratu	Ciletuh	Kab. Sukabumi	- Kondisi Jalan Nasional Cikembang-Bagbagan sebagai akses menuju Pelabuhan Ratu memiliki tingkat pelayanan tinggi VCR 0,39 - Akses alternatif menuju Kawasan Pelabuhan Ratu menjadi DTW unggulan Kab. Sukabumi. - Proyeksi peningkatan wisatawan mencapai 1,7 juta (2029) akan berpengaruh terhadap bangkitan kendaraan yang menyebabkan Jalan Nasional Cikembang-Bagbagan mengalami penurunan tingkat pelayanan jalan VCR 0,78 (2029).	Siap		38,8 Km	280 Milyar	APBD	2025	2026
16	04 - DJBM	Peningkatan Jalan Surade–Ujung Genteng	Ciletuh	Kab. Sukabumi	- Berperan tourism relevant road dan akses menuju DTW Ujung Genteng yang termasuk dalam Sub KTA Ciletuh-Ujung Genteng - Pertambahan jumlah wisatawan yang berkunjung 1,7 juta jiwa (2029) yang diantaranya 123.005 jiwa pada tahun 2029 (7% dari total wisatawan di Kabupaten Sukabumi) merupakan wisatawan menuju Ujung Genteng. - Diperkirakan kondisi jalan saat ini (jalan provinsi) akan menampung bangkitan kendaraan hingga 2.152 smp/jam	Agar diper-siapkan		20 Km	220 Milyar	APBD	2025	2027
17	04 - DJBM	Pembangunan Tol Sukabumi–Padalarang	Ciletuh	Sukabumi, Cianjur, Padalarang	- Meningkatkan aksesibilitas Sukabumi–Metropolitan Cekungan Bandung yang 70% ruas Jalan Nasional memiliki tingkat pelayanan jalan rendah mencapai VCR 1,64. - Tingginya hambatan samping pada Jalan Nasional terutama pada ruas Jl. Raya Padalarang (VCR 1,2) akibat adanya kegiatan perdagangan dan jasa (kecepatan kendaraan rata-rata 26 km/jam). - Bertemunya arus menerus dan arus lokal dari adanya kegiatan setempat menyebabkan tingkat kemacetan	Agar diper-siapkan		56,6 Km	59 Triliun	KPBU	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Perkiraan terjadi bangkitan kendaraan menuju Padalarang dari arah Sukabumi/Cianjur sebesar 32.210 smp/jam (2029). - Dapat mempercepat waktu tempuh Pelabuhan Ratu–Metropolitan Cekungan Bandung menjadi 2,5 jam - Sudah tercantum dalam Rencana Umum Jalan Bebas Hambatan dengan rencana pengerjaan tahun 2025 - 2029							
18	04 - DJBM	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Seg. Timur)	Jawa Barat Selatan	Kab. Bandung Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangan-daran, dan Kab. Ciamis	- Menghubungkan antara PKL Perdesaan Ciwidey Kabupaten Bandung hingga Kertahayu Kabupaten Ciamis. - Sebagai jalur alternatif untuk pergerakan logistik antar pusat kegiatan local yang dapat mempersingkat waktu perjalanan jadi 3 jam	Agar diper-siapkan		240,7 Km	2 Triliun	APBN/ KPBU	2025	2029
19	04 - DJBM	Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap segmen 1 dan 2 (Gedebage–Tasikmalaya)	Jawa Barat Selatan	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Garut dan Kab. Tasik-malaya	- Jalan Nasional memiliki pelayanan rendah VCR 1,09 terutama pada ruas Jalan Malangbong dan Jalan Raya Indihiyang (Tasikmalaya). - Kondisi jalan yang berkontur dan bertemunya arus menerus dan arus lokal menyebabkan terhambatnya arus laju kendaraan sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama. - Dapat mengurangi waktu tempuh Metropolitan Bandung–KSPN Pangandaran semula 3,5 jam menjadi 32 jam. - Sudah tercantum dalam Rencana Umum JBH dengan pengelaksanaan tahun 2020 – 2029 - Masih dalam proses pembebasan lahan.	Agar diper-siapkan		206,65 Km	56 Triliun	KPBU	2025	2029
20	04 – DJBM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Bts. Kota Cibadak - Bts. Kota Sukabumi	Pansela Jabar	Kota Sukabumi	- Mengatasi peramasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Sukabumi dengan Kawasan Pariwisata Ciletuh dan PKW Pelabuhan Ratu (tingkat pelayanan jalan rendah VCR 1,12).	Agar dipersia pkan		1 Buah Fo	150 Milyar	APBN	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Kepadatan kendaraan terjadi pada titik perbatasan Kota Cibadak – Kota Sukabumi disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.							
21		Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Rajapolah (Rajapolah) II	Pansela Jabar	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi peramasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,76. - Kepadatan kendaraan terjadi pada titik bertemunya 2 jalur utama yaitu Jalan Raya Rajapolah dan Rajapolah-Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis. Tundaan kendaraan juga disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar dipersiapkan		1 Buah Fo	150 Milyar	APBN	2028	2029
22		Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Slamet Riyadi (Cirebon)	Rebana	Kota Cirebon	- Mengatasi peramasalahan macet pada ruas jalan utama yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Cirebon (PKN Cirebon) yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan 0,7. - Kepadatan kendaraan terjadi karena pergerakan kawasan perekotaan yang tinggi serta adanya perlintasan kereta yang menyebabkan kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar dipersiapkan		1 Buah Fo	150 Milyar	APBN	2025	2025
23		Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Ciawi (Ciawi)	Pansela Jabar	Kab. Tasikmalaya	- Mengatasi peramasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,91. - Kepadatan kendaraan terjadi karena tingginya pergerakan menuju Kawasan Pariwisata di Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung. Tundaan kendaraan juga disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar dipersiapkan		1 Buah Fo	150 Milyar	APBN	2028	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24		Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Rajapolah IV	Pansela Jabar	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi peramasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,88. - Kepadatan kendaraan terjadi disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar dipersiapkan		1 Buah Fo	150 Milyar	APBN	2028	2029
25		Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Rajapolah III	Pansela Jabar	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi peramasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,88. - Kepadatan kendaraan terjadi disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan cenderung melamban.	Agar dipersiapkan		1 Buah Fo	150 Milyar	APBN	2028	2029
26		Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Raya Indihiang (Indihiang) I	Pansela Jabar	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi peramasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 1,03. - Kepadatan kendaraan terjadi karena tingginya pergerakan menuju Kawasan Pariwisata di Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung disertai tingginya pergerakan didalam PKW Tasikmalaya. Tundaan kendaraan juga disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan melamban.	Agar dipersiapkan		1 Buah Fo	150 Milyar	APBN	2028	2029
27		Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Moch Hatta (Tasikmayala)	Pansela Jabar	Kota Tasikmalaya	- Mengatasi peramasalahan macet pada ruas jalan utama yang menghubungkan Kawasan Pansela Jawa Barat dengan Metropolitan Cekungan Bandung yang saat memiliki tingkat pelayanan jalan rendah VCR 0,72. - Kepadatan kendaraan terjadi karena tingginya pergerakan menuju Kawasan Pariwisata di Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan	Agar dipersiapkan		1 Buah Fo	150 Milyar	APBN	2028	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Bandung disertai tingginya pergerakan didalam PKW Tasikmalaya. Tundaan kendaraan juga disebabkan perlintasan kereta sehingga kecepatan kendaraan melamban.							
28		Preservasi Jln. Jln. Raya Jamblang (Cirebon) – Jln. Jend. A. Yani (Cirebon) – Bts. Kota Cirebon – Losari (Bts. Provinsi Jawa Tengah)	Rebana	Kota Cirebon	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Rebana dari Provinsi Jawa Tengah maupun Metropolitan Cekungan Bandung. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Raya Jamblang (Cirebon) 0,101 Km; 2) Jln. Jend. A. Yani (Cirebon) 0,071 Km; 3) Bts. Kota Cirebon – Losari (Bts. Prov. Jateng) 0,1 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		0,272 Km	2,17 Milyar	APBN	2025	2029
29		Preservasi Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga – Jln. Raya Jasinga (Jasinga) – Bts. Kota Leuwiliang – Bts. Kota Bogor dan Bts. Depok/Bogor – Bogor, Ciawi - Puncak	Ciletuh	Kabupaten Bogor dan Kota Bogor	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Ciletuh dari Provinsi Banten dan Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Cigelung (Bts.Prov. Banten) - Bts. Kota Jasinga 0,404 Km; 2) Jln. Raya Jasinga (Jasinga) 0,203 Km; 3) Bts. Kota Jasinga - Bts. Kota Leuwiliang 0,484 Km; 4) Bts. Kota Leuwiliang - Bts. Kota Bogor 0,508 Km; 5) Bts. Depok/Bogor – Bogor 0,201 Km; 6) Ciawi – Puncak 0,1 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		1,9 Km	15,2 Milyar	APBN	2025	2029
30		Preservasi Ciawi – Benda - Bts. Kota Cibadak - Jln. Siliwangi (Cicurug) - Jln.	Ciletuh	Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Ciletuh dari Metropolitan Cekungan Bandung dan Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Ciawi - Benda 0,1 Km;	Agar dipersiapkan		2,12 Km	16,92 Milyar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Suryakencana (Cibadak) - Jln. Raya Siliwangi (Cibadak) - Bts. Kota Sukabumi - Jln. Raya Cibolang (Cisaat) - Gekbrong (Bts. Kabupaten)			2) Benda - Bts. Kota Cibadak 0,403 Km; 3) Jln. Siliwangi (Cicurug) 0,102 Km; 4) Jln. Suryakencana (Cibadak) 0,201 Km; 5) Bts. Kota Cibadak - Bts. Kota Sukabumi 0,301 Km; 6) Jln. Raya Siliwangi (Cibadak) 0,304 Km; 7) Jln. Raya Cibolang (Cisaat) 0,201 Km; 8) Bts. Kota Sukabumi - Gekbrong (Bts. Kabupaten) 0,603 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.							
31		Preservasi Jln. Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan (Cianjur) - Bts. Kota Cianjur – Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang- Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala) dan Jln. Dr. Muwardi (Cianjur)	Pansela Jabar	Kabupaten Cianjur	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Ciletuh dari Metropolitan Cekungan Bandung. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Pasir Hayam - Sp.3 Perint. Kemerdekaan (Cianjur) 0,103 Km; 2) Bts. Kota Cianjur – Citarum 0,202 Km; 3) Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang 0,605 Km; 4) Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala) 0,101 Km; 5) Jln. Dr. Muwardi (Cianjur) 0,404 Km - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		2,52 Km	20,2 Milyar	APBN	2025	2029
32		Preservasi Jln. Nurtanio (Bandung) - Bts. Kota Cileunyi - Nagreg (Rancaekek - Cileunyi - Cicalengka/Parakan Muncang) -	Cekungan Bandung	Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung dari Metropolitan Jakarta dan Kawasan Ciletuh. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Nurtanio (Bandung) 0,099 Km; 2) Bts. Kota Cileunyi - Nagreg (Rancaekek - Cileunyi - Cicalengka/Parakan Muncang) 1,203 Km; 3) Nagreg - Bts. Kab. Bandung/Garut 0,2 Km;	Agar dipersiapkan		1,9 Km	15,2 Milyar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Nagreg - Bts. Kab. Bandung/Garut - Bts. Kab. Bandung/Garut - Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut - Jln. Raya Limbangan (Limbangan) dan Lingkar Nagreg			4) Bts. Kab. Bandung/Garut - Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut 0,1 Km; 5) Jln. Raya Limbangan (Limbangan) 0,2 Km; 6) Lingkar Nagreg 0,101 Km - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.							
33		Preservasi Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut – Rajapolah – Ancol - Bts. Kota Ciamis - Jln. Raya Ciamis (Tasikmalaya)	Pansela Jabar	Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung dan Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Bts. Kab. Tasikmalaya/Garut - Rajapolah 0,908 Km; 2) Bts. Kab. Tasikmalaya/Ciamis - Ancol 0,303 Km; 3) Ancol - Bts. Kota Ciamis 0,201 Km; 4) Jln. Raya Ciamis (Tasikmalaya) 0,101 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		1,51 Km	12,1 Milyar	APBN	2025	2029
34		Preservasi Bts. Prov. Banten (Cibareno) – Cisolok - Sp. Kr. Hawu - Bagbagan – Jampangkulon – Surade - Tegalbuleud (Cibuni) - Argabinta – Sindangbarang	Pansela Jabar	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung, Metropolitan Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Bts. Prov. Banten (Cibareno) – Cisolok 0,704 Km; 2) Cisolok - Sp. Kr. Hawu 0,707 Km; 3) Bagbagan – Jampangkulon 2,114 Km; 4) Jampangkulon - Surade 0,506 Km; 5) Surade - Tegalbuleud (Cibuni) 3,624 Km;	Agar dipersiapkan		11,1 Km	88,7 Milyar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		– Cidaun - Cisela – Cilaki - Rancabuaya – Cijayana - Pameungpeuk – Cikaengan – Cipatujah – Kalapagenep – Cimerak - Bts. Kota Pangandaran			6) Tegalbuleud (Cibuni) - Argabinta – Sindangbarang 0,907 Km; 7) Sindangbarang – Cidaun 0,1 Km; 8) Cidaun - Cisela – Cilaki 0,202 Km; 9) Cilaki - Rancabuaya – Cijayana 0,403 Km; 10) Pameungpeuk – Cikaengan 0,201 Km; 11) Cikaengan – Cipatujah 0,1 Km; 12) Cipatujah – Kalapagenep 0,804 Km; 13) Kalapagenep – Cimerak 0,1 Km; 14) Cimerak - Bts. Kota Pangandaran 0,6 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.							
35		Preservasi Jln. Perintis Kemerdekaan (Cibadak) - Bts. Kota Cibadak – Cikembang - Bagbagan	Cietuh	Kabupaten Sukabumi	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Pansela Jabar dari Metropolitan Cekungan Bandung dan Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Perintis Kemerdekaan (Cibadak) 0,1 Km; 2) Bts. Kota Cibadak – Cikembang 0,202 Km; 3) Cikembang – Bagbagan 2,327 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		2,63 Km	21,03 Milyar	APBN	2025	2029
36		Preservasi Jln. Jend. A. Yani (Purwakarta) - Jln. Ir.H.Juanda (Cikampek) - Jln. Ibrahim (Purwakarta) - Sadang - Bts. Kota Purwakarta – Cisomang - Bts. Kota Padalarang	-	Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung dari Metropolitan Jakarta. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Jend. A. Yani (Purwakarta) 0,302 Km; 2) Jln. Ir.H.Juanda (Cikampek) 0,102 Km; 3) Jln. Ibrahim (Purwakarta) 0,283 Km; 4) Sadang - Bts. Kota Purwakarta 0,101 Km; 5) Bts. Kota Purwakarta – Cisomang 1,307 Km; 6) Cisomang - Bts. Kota Padalarang 0,605 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		2,7 Km	21,6 Milyar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37		Preservasi Jln. Raya Jatinangor (Jatinangor) - Bts. Kota Sumedang - Jln. Pangeran Kornel (Sumedang) - Jln. Palasari (Sumedang) - Bts. Kota Sumedang – Cijelag - Jln. Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Sumedang) - Bts. Kab. Majalengka/Cirebon (Prapatan) - Bts. Kota Palimanan	Rebana	Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Rebana dari Metropolitan Cekungan Bandung dan Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Jln. Raya Jatinangor (Jatinangor) 0,101 Km; 2) Jatinangor - Bts. Kota Sumedang 0,915 Km; 3) - Jln. Pangeran Kornel (Sumedang) 0,50 Km; 4) Jln. Palasari (Sumedang) 0,08 Km; 5) Bts. Kota Sumedang – Cijelag 1,819 Km; 6) Jln. Prabu Gajah Agung/P. Sugih (Sumedang) 0,172 Km; 7) Bts. Kab. Majalengka/Cirebon (Prapatan) - Bts. Kota Palimanan 0,501 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		4,1 Km	32,8 Milyar	APBN	2025	2029
38		Preservasi Bts. Kab. Kuningan/Cirebon - Kota Kuningan - Jln. Pangeran Sang Adipati (Kuningan) - Jln. Raya Sukamulya (Kuningan) - Bts. Kota Kuningan - Bts. Kab. Kuningan/Majalengka (Cipasung)	Rebana	Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Rebana dari Kawasan Pansela Jabar dan Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Bts. Kab. Kuningan/Cirebon - Kota Kuningan 0,471 Km; 2) Jln. Pangeran Sang Adipati (Kuningan) 0,301 Km; 3) Jln. Raya Sukamulya (Kuningan) 0,1 Km; 4) Bts. Kota Kuningan - Bts. Kab. Kuningan/Majalengka (Cipasung) 0,401 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		1,3 Km	10,4 Milyar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39		Preservasi Bts. Kab. Ciamis/Majalengka (Cageur) - Bts. Kota Ciamis - Bts. Kota Banjar - Kali Pucang	Pansela Jabar	Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Pansela Jabar dari Kawasan Rebana dan Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Bts. Kab. Ciamis/Majalengka (Cageur) - Bts. Kota Ciamis 1,715 Km; 2) Bts. Kota Banjar - Kali Pucang 0,1 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		1,82 Km	14,6 Milyar	APBN	2025	2029
40		Preservasi Cimareme – Batujajar – Soreang - Jln. Raya Ciwidey - Rancabali - Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul - Cidaun	Cekungan Bandung	Kota Bandung dan Kabupaten Bandung	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung dari Kawasan Pansela Jabar. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Cimareme – Batujajar 0,201 Km; 2) Batujajar – Soreang 0,201 Km; 3) Jln. Raya Ciwidey 0,1 Km; 4) Rancabali - Bts. Bandung/Cianjur 1,206 Km; 5) Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul – Cidaun 2,006 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		3,7 Km	29,6 Milyar	APBN	2025	2029
41		Preservasi Lingkar Indramayu (Indramayu) – Karangampel - Jln. Mulia Asri (Indramayu)	Rebana	Kabupaten Indramayu	- Mendukung aksesibilitas menuju Kawasan Rebana Bandung dari Provinsi Jawa Tengah. - Ruas jalan terdiri dari: 1) Lingkar Indramayu (Indramayu) – Karangampel 1,503 Km; 2) Jln. Mulia Asri (Indramayu) 1,103 Km; - Ruas tersebut memiliki kondisi rusak ringan (nilai IRI 8 – 12) dan membutuhkan penanganan preservasi jalan.	Agar dipersiapkan		2,6 Km	20,8 Milyar	APBN	2025	2029

Sumber: Hasil Analisis dan Diskusi antar Unor, 2022

8.1.3. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Rencana aksi pembangunan infrastruktur permukiman ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur permukiman dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.3 Rencana Aksi Infrastruktur Cipta Karya Provinsi Jawa Barat

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	05 - DJCK	Rehabilitasi IPLT Cibeet	Cekungan Bandung	Kabupaten Bandung	- Saat ini kondisi IPLT Cibeet rusak karena lama tidak difungsikan. Tidak beroperasi karena terkendala operasional, peraturan tarif pembuangan, dan jarak tempuh. - IPLT Cibeet berfungsi untuk melayani pengolahan air limbah Kabupaten Bandung yang saat ini memiliki akses sanitasi layak baru sebesar 63% dan aman 7,21%. - DED Revitalisasi dan penyelidikan tanah sedang dibuat oleh konsultan lingkungan - Sudah ada sertifikat kepemilikan tanah oleh Pemda di lokasi, sedang diproses ke Bidang pertanahan dan aset Kab. Bandung. - Sesuai Rencana Aksi Citarum harum diperlukan penanganan limbah domestik sebesar 14.990 KK untuk memperbaiki kualitas DAS Citarum.	Siap		10 m3/hari	7 Milyar	APBN	2026	2026
2	05 - DJCK	Pembangunan SPAM Bandung Barat (SPAM Sinumbra)	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- SPAM Sinumbra direncanakan melayani 15 Kecamatan di Kab. Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi (kapasitas 1.000 lt/dtk untuk 76.158 penduduk). - Tingkat pelayanan air minum aman penduduk perkotaan ini saat ini 25,9%. - Prioritas penanganan pada Kecamatan Bandung Kulon dan Babakan Ciparay karena akan memiliki kepadatan lebih 150 jiwa/Ha.	Siap		1.000 lt/dtk	883 Milyar	KPBU	2026	2026

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	05 - DJCK	Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Kapasitas PDAM Bandung sebesar 717 lt/dt dengan idle capacity sebesar 153 lt/dt yang dapat dioptimalkan untuk melayani 317.000 SL. Kapasitas PDAM Kota Bandung sebesar 2.914 lt/dt dengan idle capacity sebesar 657 lt/dt yang dapat dioptimalkan untuk melayani 356.000 SL. - Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan di Kabupaten Bandung (kapasitas 150 lt/dtk) dan Kota Bandung (kapasitas 100 lt/dtk) direncanakan melayani 12 Kec. dengan total terlayani 28.000 SL (target awal 10.000 SL). - Tingkat pelayanan air minum penduduk perkotaan ini saat ini 13,2% yang akan meningkat menjadi 19,2% (2029) dengan adanya peningkatan kapasitas. - Peningkatan pelayanan untuk Kabupaten Bandung dilaksanakan tahun 2025 dengan pemasangan pipa Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Pipa Pelayanan (JDL). - Prioritas penanganan pada Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, dan Regol yang akan memiliki kepadatan hingga >150 jiwa/Ha serta Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot mengalami *land subsidence*.	Siap		100 lt/dtk	17 Milyar	KPBU	2027	2029
4	05 - DJCK	Peningkatan SPAM Regional Bandung Timur (SPAM Kertasari)	Cekungan Bandung	Kabupaten Bandung	- SPAM Kertasari direncanakan melayani 8 Kecamatan pada Kabupaten dan Kota Bandung dengan kapasitas 700 lt/dtk yang bisa dimanfaatkan untuk 2.500 SL. - Tingkat pelayanan air minum aman penduduk perkotaan ini saat ini 15,6% yang akan meningkat menjadi 21,6% - Pembangunan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Pipa Pelayanan (JDL) dimulai antara tahun 2025 atau 2026. - Prioritas penanganan pada Kecamatan Bojongsoang dan Gedebage sebagai pusat	Siap		700 lt/dtk	118 Milyar	KPDBU	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					kegiatan pemerintahan dan TOD Kereta Cepat Jakarta - Bandung.							
5	05 - DJCK	Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM Bandung Selatan	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- Kapasitas Jaringan PDAM Kab Bandung sebesar saat ini melayani 52.397 sambungan langsung (SL). Dengan adanya penggunaan idle capacity sebesar 153 lt/dt. - Kapasitas Jaringan PDAM Kota Bandung sebesar saat ini melayani 176.943 sambungan langsung (SL)-Dengan adanya penggunaan idle capacity sebesar 657 lt/dt. - Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan di Kabupaten Bandung (150 lt/dtk) dan Kota Bandung (100 lt/dtk). - Total kapasitas yang bisa dimanfaatkan sebesar 152.640 SL - Peningkatan pelayanan untuk Kab. Bandung - dilaksanakan tahun 2025 dengan pemasangan pipa Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Pipa Pelayanan (JDL). - Prioritas penanganan pada Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, dan Regol yang akan memiliki kepadatan hingga >150 jiwa/Ha serta Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot yang mengalami *landsubsidence*.	Agar diper-siapkan		150.000 SR	1,2 Triliun	KPBU	2026	2029
6	05 - DJCK	Peningkatan Jaringan Distribusi SPAM Bandung Timur (SPAM Kertasari)	Cekungan Bandung	Kota Bandung	- SPAM Kertasari direncanakan melayani 8 Kecamatan pada Kabupaten dan Kota Bandung dengan kapasitas 700 lt/dtk yang bisa dimanfaatkan untuk 100.800 SL. - Tingkat pelayanan air minum aman penduduk perkotaan ini saat ini 15,6% yang akan meningkat menjadi 21,6% - Pembangunan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Pipa Pelayanan (JDL) dimulai antara tahun 2025 atau 2026. - Prioritas penanganan pada Kecamatan Bojongsoang dan Gedebage sebagai pusat	Agar diper-siapkan		100.000 SR	800 Milyar	KPDBU	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					kegiatan pemerintahan dan TOD Kereta Cepat Jakarta - Bandung."							
7	05 - DJCK	Rehabilitasi IPAL Perkotaan	Cekungan Bandung	Kec. Bojong-soang, Kec. Cimahi Selatan, Kec. Cileunyi	- Saat ini terdapat IPAL Bojongsoang dengan kapasitas 926 lt/dtk yang baru melayani 7 kecamatan di Kota Bandung. - Pelayanan pengelolaan limbah eksisting 8%. - Penanganan limbah diperlukan agar limbah tidak mencemari Sungai Citarum yang mayoritas dari limbah domestik (50%).	Agar diper-siapkan		3 unit	15 Milyar	APBD	2025	2027
8	05 - DJCK	Pembangun an SPAM Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	Rebana	Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, dan Kab. Indramayu	- Mendukung pelayanan air minum diprioritas pada permukiman Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Indramayu. - Tingkat pelayanan air minum perpipaan eksisting (3 Kabupaten: Majalengka, Indramayu, dan Cirebon) 16,04%. Idle capacity ketiga kabupaten tersebut sebesar 443 lt/dtk yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya hingga tahun 2024 dengan peningkatan pelayanan hingga 17,04%. - Adanya SPAM Jatigede Tahap I akan meningkatkan pelayanan jaringan air perpipaan menjadi total 29,8% (2024). Dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air pada Bandara Kertajati sebesar 18,39 lt/dtk (tahun 2025). - SPAM Jatigede Tahap I diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan air 1.000 lt/dtk.	Siap		1.500 lt/dtk	2, 03 Triliun	KPBU	2025	2029
9	05 - DJCK	Pembangun an SPAM Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II	Rebana	Kab. Cirebon	- Mendukung pelayanan air minum pada permukiman di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Indramayu dengan take off pada masing-masing kabupaten/kota yang melayani kebutuhan air untuk 1.440.000 jiwa. - Lanjutan SPAM Jatigede Tahap I total terbangun 2.500 lt/dtk.	Siap		1.500 lt/dtk	2,1 Triliun	KPBU	2028	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Tingkat pelayanan air minum perpipaan eksisting 21,2% yang akan ditingkatkan menjadi 45,9% (2029). - SPAM Jatigede tahap I diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan air minum 1.500 lt/dtk							
10	05 - DJCK	Pembangunan SPAM Cipanas	Rebana	Kab. Subang	- Bendungan Cipanas sudah dibangun dengan kapasitas 850 lt/dtk. - Mendukung pelayanan air minum pada permukiman Kabupaten Subang. - Tingkat pelayanan air minum perpipaan eksisting 12,30% yang dengan idle capacity saat ini sebesar 151 lt/dtk yang dapat dimanfaatkan hingga tahun 2028 dengan peningkatan pelayanan yang dilakukan secara bertahap menjadi 17,3%.	Agar diper-siapkan		300 lt/dtk	50 Milyar	KPDBU	2028	2029
11	05 - DJCK	Pembangunan SPAM Subang (Manyingsal)	Rebana	Kec. Cipu-nagara	- Mendukung pelayanan air minum pada Kawasan Industri Subang (15.214 Ha) yang akan menimbulkan pertumbuhan jumlah penduduk sebagai pekerja (penambahan 1.260.000 pekerja pada tahun 2029) dengan kepadatan 19 jiwa/Ha. - Tingkat pelayanan air minum perpipaan eksisting 11,30% akan ada penambahan kebutuhan air minum perpipaan seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pekerja (700 ribu pada tahun 2029) dengan peningkatan pelayanan mencapai 18,30%. - Pembangunan infrastruktur pendukung menunggu kepastian lahan KIT Subang yang masih dalam sengketa (lahan bebas 50 Ha). - SPAM KIT Subang diperkirakan dapat melayani hingga 1.000 SL.	Siap		1.000 lt/dt	370 Milyar	KPDBU	2029	2029
12	05 - DJCK	Pembangunan TPST Kabupaten Subang	Rebana	Kabupaten Subang	- Penanganan sampah tahun 2022: 51,54% - Dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,1%, terdapat peningkatan timbulan sampah 3392.099 ton/tahun (2024) dan 409.854	Agar diper-siapkan		3085 m3/hari	33 Milyar	APBD	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					ton/tahun (2029) sehingga layanan persampahan 2029 menjadi 45,3% - Dibutuhkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah 277.175 ton/tahun untuk mengatasi sampah sesuai SPM"							
13	05 - DJCK	Pembangunan TPPAS Cirebon Raya	Rebana	Kec. Gempol	- Melayani Metropolitan Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kab. Cirebon, dan Kab. Indramayu) dengan rata-rata tingkat pelayanan eksisting 25%. - Mengurangi beban TPA Gunungsantri (Cirebon) yang memiliki usia TPA 35 tahun dan sudah ditutup pada tahun 2021 dan TPA pada kabupaten/kota lain yang sudah melebihi kapasitas. - Kondisi saat ini, rencana TPPAS Cirebon Raya masih pada tahap penyusunan FS, dan lahan yang digunakan merupakan hutan produksi milik Kementerian LHK (dalam proses pinjam). Akan ada penambahan timbulan sampah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pekerja (436.000 pada tahun 2029) dengan total timbulan sampah mencapai 6 juta m3/tahun. - Dengan adanya TPPAS Cirebon Raya berpotensi meningkatkan pelayanan sampah mencapai 48,30% (kapasitas 1.200 m3/hari). - Direncanakan akan menggunakan metode pengolahan sampah 3R.	Agar diper-siapkan		1.200 m3/hari	3,5 Triliun	KPBU	2025	2029
14	05 - DJCK	Peningkatan jaringan perpipaan Kabupaten Kuningan	Rebana	Kuningan	- Tingkat pelayanan jaringan perpipaan 9,21% - Dibutuhkan peningkatan layanan untuk mencapai 45% layanan jaringan perpipaan tahun 2029.	Agar diper-siapkan		800 lt/dtk	125 Milyar	APBD	2025	2029
15	05 - DJCK	Peningkatan jaringan	Rebana	Kuningan	- Tingkat pelayanan jaringan perpipaan 1,98%	Agar diper-siapkan		600 lt/dtk	6,5 Milyar	APBD	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		pengolahan limbah Kab. Kuningan			- Dibutuhkan peningkatan layanan untuk mencapai 35% layanan pengolahan limbah tahun 2029.							
16	05 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Pelabuhan Ratu	Ciletuh	Kabupaten Sukabumi	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 43% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 14% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 1,2% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 41,5 lt/dtk	Agar diper-siapkan		50 lt/dtk	15 Milyar	APBD	2025	2026
17	05 - DJCK	Pembangun an TPST Pada DTW Prioritas	Ciletuh	Kec. Pelabuhan Ratu	- TPA Cimenteng (pelayanan 25,44%) sudah mengalami defisit kapasitas (1.182.202 m3/tahun) dan direncanakan ditutup pada tahun 2025 (peningkatan pelayanan 31,44%). TPA Kadaleman (pelayanan 2,85%) mengalami defisit kapasitas sebesar 32.359 m3/tahun (2024) hingga 346.899 m3/tahun (2029) dengan pelayanan menjadi 6,35%. - Peningkatan timbulan sampah dari kegiatan domestik dan pariwisata hingga 2,9 juta m3/tahun (2029) sehingga perlu Tempat Pengolahan Sampah baru dengan mengerapkan metode 3R dengan jumlah diperkirakan 5 buah. - Penanganan sampah tahun 2022: 49,63% - Dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,4%, terdapat peningkatan timbulan sampah 529.009 ton/tahun (2024) dan 573.526 ton/tahun (2029) sehingga layanan persampahan 2029 menjadi 37% - Dibutuhkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah 277.984 ton/tahun untuk mengatasi sampah sesuai SPM	Agar diper-siapkan		5 unit	32,5 Milyar	APBD	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	05 - DJCK	Pembangunan Shelter Tsunami dan Jalur Evakuasi di Pelabuhan Ratu	Ciletuh	Kec. Pelabuhan Ratu	- Risiko bencana tsunami sedang-tinggi pada kawasan pariwisata pesisir pantai karena Kabupaten Sukabumi aktivitas Zona Megathrust Selat Sunda atau MSS. - Bencana Tsunami diperkirakan akan menimbulkan kerugian fisik mencapai 540 miliar. Secara historis bencana tsunami dengan tinggi gelombang hingga 1 meter pada Kecamatan Pelabuhan Ratu	Agar diper-siapkan		1 unit	23 Milyar	APBD	2025	2029
19	05 - DJCK	Penataan Pantai Cibangban, Kec. Pelabuhan Ratu	Ciletuh	Kec. Pelabuhan Ratu	- Meningkatkan pelayanan dasar (persampahan yang belum terkendali) untuk kegiatan pariwisata yang Cisolok dengan mempertimbangkan keberadaan Pantai Cibangban dalam Sub-KTA Pelabuhan Ratu. - Menata DTW Cibangban yang saat ini sudah terdapat permukiman di pesisir pantai (melanggar sempadan pantai). - Jalur Wisata Geotrail yang terdapat didalamnya antara lain Lanskap Budaya dan Sesar Cimandiri.	Agar diper-siapkan		1 kawasan	80 Milyar	APBD	2025	2029
20	05 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kabupaten Cianjur	Jawa Barat Selatan	Kabupaten Cianjur	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 39% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 9,73% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 5,27% pada tahun 2029. - Dibutuhkan peningkatan Kapasitas IPA sebesar 168 lt/dtk	Agar diper-siapkan		200 lt/dtk	60 Milyar	APBD	2026	2029
21	05 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kabupaten Garut	Jawa Barat Selatan	Kabupaten Garut	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 43% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 14% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 1,5% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 7 lt/dtk	Agar diper-siapkan		50 lt/dtk	15 Milyar	APBD	2026	2029
22	05 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM	Jawa Barat Selatan	Kabupaten Tasikmalaya	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 43% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 13% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 2,3% pada tahun 2029.	Agar diper-siapkan		60 lt/dtk	18 Milyar	APBD	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kabupaten Tasikmalaya			- Butuh peningkatan Kapasitas IPA 53 lt/dtk							
23	05 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kota Sukabumi	Jawa Barat Selatan	Kota Sukabumi	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 39% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 9,6% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 5,4% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 30 lt/dtk	Agar diper-siapkan		30 lt/dtk	9 Milyar	APBD	2025	2029
24	05 - DJCK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kota Banjar	Jawa Barat Selatan	Kota Banjar	- SPAM Pelabuhan Ratu melayani 44% penduduk. - Terdapat surplus pelayanan perpipaan 14,8% pada tahun 2024 dan terdapat defisit pelayanan perpipaan 0,2% pada tahun 2029. - Butuh peningkatan Kapasitas IPA 1 lt/dtk	Agar diper-siapkan		5 lt/dtk	1,5 Milyar	APBD	2026	2029
25	05 - DJCK	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Pangandaran	Jawa Barat Selatan	Kabupaten Pangandaran	- Pelayanan air minum aman perkotaan ini saat ini 18,3%. SPAM Perkotaan Pangandaran direncanakan melayani 10 Kecamatan pada Kabupaten Pangandaran dengan kapasitas 1.000 lt/dtk untuk 76.158 penduduk. - Prioritas penanganan pada Kecamatan Pangandaran yang memiliki Daya Tarik Wisata utama di Pangandaran. - Bisa mengalami peningkatan pelayanan hingga 24,13%, tetapi mengalami defisit kapasitas air 21 lt/dtk (2029).	Agar diper-siapkan		1.000 lt/dtk	883 Milyar	KPDBU	2025	2027
26	05 - DJCK	Pembangunan TPST Kabupaten Garut	Jawa Barat Selatan	Kabupaten Garut	- Penanganan sampah tahun 2022 (30%) - Dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,4%, terdapat peningkatan timbulan sampah 423.803 ton/tahun (2024) dan 448.805 ton/tahun (2029) sehingga layanan persampahan 2029 menjadi 27% - Dibutuhkan peningkatan kapasitas pengolahan sampah 303.590 ton/tahun untuk mengatasi sampah sesuai SPM	Agar diper-siapkan		3.379 m3/hari	36,7 Milyar	APBD	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27	05 - DJCK	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bojongsari	Jawa Barat Selatan	Kec. Padaherang	- Timbulan sampah domestik dan pariwisata mencapai 214.128 m3/tahun (tingkat pelayanan sampah 20%). - Jumlah wisatawan diperkirakan mencapai 1,5 juta pada tahun 2029 menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan wisata. - Peningkatan pelayanan hingga 38% menyebabkan TPA eksisting diperkirakan tutup (2029) karena melebihi kapasitas. Dibutuhkan TPA baru dengan metode 3R.	Agar diper-siapkan		534 m3/hari	15 Milyar	APBD	2025	2029
28	05 - DJCK	Peningkatan jaringan perpipaan Kabupaten Purwakarta	-	Kab. Purwakarta	- Tingkat pelayanan jaringan perpipaan 18,45% - Dibutuhkan peningkatan layanan untuk mencapai 45% layanan jaringan perpipaan tahun 2029.	Agar diper-siapkan		500 lt/dtk	80 Milyar	APBD	2026	2029
29	05 - DJCK	Peningkatan jaringan pengolahan limbah Kabupaten Purwakarta	-	Kab. Purwakarta	- Tingkat pelayanan jaringan perpipaan 4,84% - Dibutuhkan peningkatan layanan untuk mencapai 35% layanan pengolahan limbah tahun 2029.	Agar diper-siapkan		600 lt/dtk	5,5 Milyar	APBD	2026	2029

Sumber: Hasil Analisis dan Diskusi antar Unor, 2022

8.1.4. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur perumahan ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur perumahan dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.4 Rencana Aksi Infrastruktur Perumahan Provinsi Jawa Barat

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	07 - DJP	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPS)	Rebana	Kab. Sumedang	- Berdasarkan SK Dirjen Perumahan yang disampaikan kepada BPIW, total terdapat 55.900 BSPS pada 1.941 lokus - Dipilih lokus dengan BSPS ≥ 50 - RTLH terbanyak dan terklaster (terklaster = sebaran BSPS < 2 km) - Kondisi infrastruktur permukiman terparah (kondisi sanitasi, air bersih, jalan lingkungan, dan terdapat isu kebencanaan) - Berada di: Desa Banjarsari, Cimungkal, Ganjaresik, Cilengkrang, Banyuresmi, Citali, Cigendel, Sukamanah, Kirisik, Sukajadi, Mekarsari, Nanggerang, Sindangsari, Sukasirnarasa, Sukasari, Cibunar	Agar diper-siapkan		800 unit	12 Milyar	APBN	2025	2029
2	07 - DJP	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPS)	Rebana	Kab. Majalengka	- Berdasarkan SK Dirjen Perumahan yang disampaikan kepada BPIW, total terdapat 55.900 BSPS pada 1.941 lokus - Dipilih lokus dengan BSPS ≥ 50 - RTLH terbanyak dan terklaster (terklaster = sebaran BSPS < 2 km) - Kondisi infrastruktur permukiman terparah (kondisi sanitasi, air bersih, jalan lingkungan, dan terdapat isu kebencanaan) - Berada di: Desa Malausma, Kalapadua, Kepuh	Agar diper-siapkan		100 unit	1,5 Milyar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Dana	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Biaya		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	07 - DJP	Penyediaan Rumah Susun Pekerja Subang	Rebana	Kabupaten Subang	- Pertumbuhan industri menyebabkan adanya jumlah tenaga kerja baru sebanyak 800 ribu jiwa untuk kawasan industri Rebana - Rumah susun diperkirakan melayani 10% dari jumlah pekerja pendatang.	Agar diper-siapkan		83 unit	6 Triliun	APBD	2025	2029

Sumber: Hasil Analisis dan Diskusi antar Unor, 2022

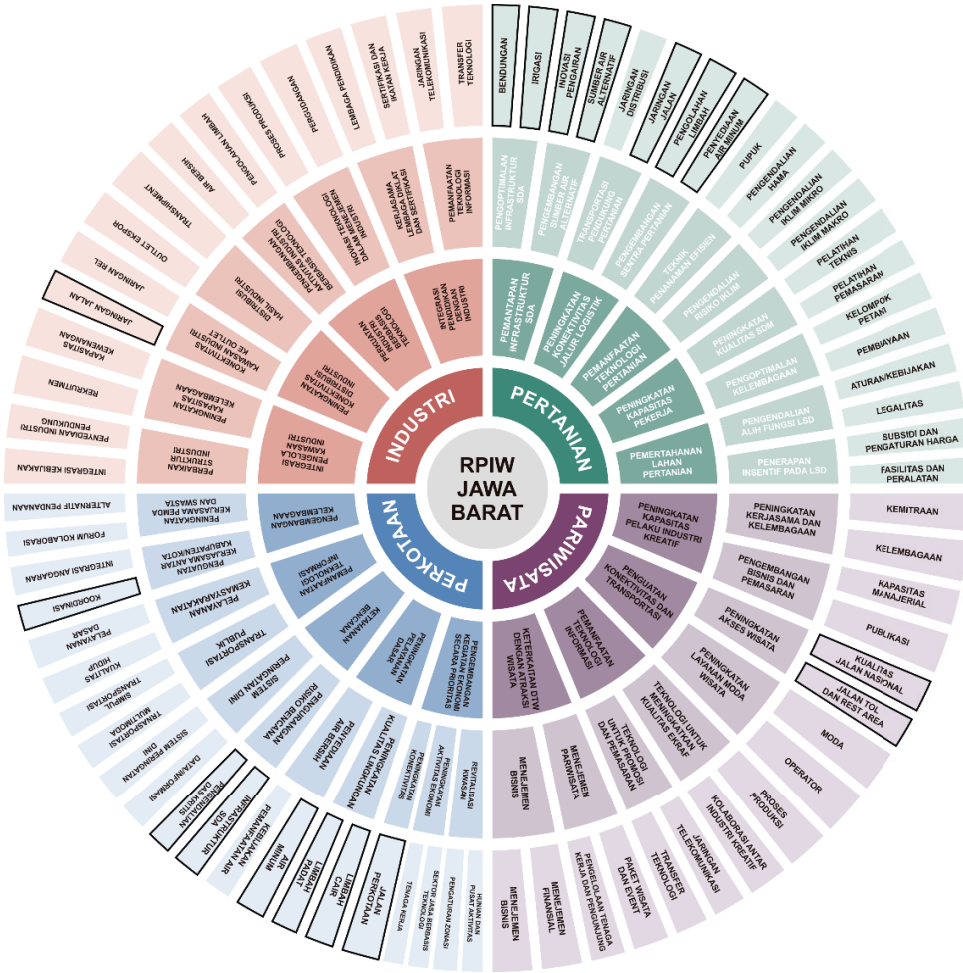
8.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur

Dalam rencana aksi yang telah dirumuskan, terdapat 4 fokus pengembangan yaitu industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan, yang dijabarkan dalam 18 *grand strategy* (fokus industri 4 *grand strategy*, fokus pertanian 5 *grand strategy*, fokus pariwisata 4 *grand strategy*, dan fokus pelayanan dasar 5 *grand strategy*). Dari 18 grand strategi tersebut dirinci menjadi 37 program dan 241 rencana aksi (45 sektor PUPR dan 196 non-PUPR). Ringkasan mengenai strategi, program, dan rencana aksi masing-masing fokus adalah sebagai berikut:

1. Fokus Industri, terdiri dari 4 *grand strategy*, 8 program dan 60 rencana aksi (2 kegiatan sektor PUPR dan 58 non-PUPR);
2. Fokus pertanian, terdiri dari 5 *grand strategy*, 10 program, dan 60 rencana aksi (16 kegiatan sektor PUPR dan 75 non-PUPR);
3. Fokus pariwisata, terdiri dari 4 *grand strategy*, 8 program, dan 50 rencana aksi (7 kegiatan sektor PUPR dan 43 non-PUPR); dan
4. Fokus pelayanan dasar, terdiri dari 5 *grand strategy*, 11 program, dan 71 rencana aksi (20 kegiatan sektor PUPR dan 51 non-PUPR)

Rencana aksi pembangunan infrastruktur terpadu lintas sektor akan diuraikan pada subbab 8.2. Berdasarkan subbab 8.2 tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi dan pendetailan secara khusus untuk infrastruktur PUPR. Rekapitulasi infrastruktur PUPR tersebut diuraikan berdasarkan kawasan prioritas pada subbab 8.2 untuk mempermudah integrasi penanganan kawasan prioritas dan rekapitulasi berdasarkan sub sektor di Kementerian PUPR pada subbab 8.3 dalam rangka mempermudah koordinasi internal.

Secara lengkap ringkasan rencana aksi kebutuhan infrastruktur dapat dilihat pada Gambar 8.1.


RPIW JAWA BARAT
INDUSTRI
PERTANIAN
PARIWISATA
PERKOTAAN
BENDUNGAN
IRIGASI
INOVASI PENGAIRAN
SUMBER AIR ALTERNATIF
JARINGAN DISTRIBUSI
JARINGAN JALAN
PENGELOLAAN LIMBAH
PENYEDIAAN SDA MEDIUM
TRANSFER TEKNOLOGI
JARINGAN TELEKOMUNIKASI
SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN
LEMBAGA PENYULUHAN
PENGEMBANGAN SDM
PUPUK
PENGENDALIAN HAMA
PENGENDALIAN IKLIM MIKRO
PENGENDALIAN IKLIM MAKRO
PELATIHAN TEKNIS
PELATIHAN PEMASARAN
KELOMPOK PETANI
PEMBIAYAAN
ATURAN/KEBIJAKAN
LEGALITAS
SUBSIDI DAN PENGATURAN HARGA
FASILITAS DAN PERALATAN
KEMITRAAN
KELEMBAGAAN
KAPASITAS MANAJERIAL
PUBLIKASI
KUALITAS JALAN NASIONAL
JALAN TOL DAN REST AREA
MODA
OPERATOR
PROSES PRODUKSI
KOLABORASI ANTAR INDUSTRI KREATIF
PANET WISATA DAN EVENT
MENEJEMEN BISNIS
MENEJEMEN FINANSIAL
PENGELOLAAN TENAGA KERJA DAN PENINGKATAN
PERAN PELAKU
PUSAT AKTIVITAS
SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI
PENGATURAN ZONASI
TEKNOLOGI RENDAH
JALAN PERAN
AIR MINUM
LIMBAH CAIR
LIMBAH PADAT
PENGELOLAAN SDA
PEMANFAATAN AIR
PENGELOLAAN SDA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA
SISTEM PENGAIRAN DINI
TRANSPORTASI PUBLIK
PELAYANAN KESEHATAN
PENGELOLAAN SEMPADAN
PENGELOLAAN KAWASAN
PEMANFAATAN LAHAN
PENGEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI SECARA PRIORITAS
KETERKAITAN DTW DENGAN AKSI WISATA
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN TRANSPORTASI
PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU INDUSTRI KREATIF
PENINGKATAN KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN BISNIS DAN PEMASARAN
PENINGKATAN AKSES WISATA
PENINGKATAN LAYANAN MODA WISATA
TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS ENKAF
TEKNOLOGI UNTUK PROSES PRODUKSI DAN PEMASARAN
MENGELOLA KAWASAN
MENGELOLA AKTIVITAS EKONOMI
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
REVITALISASI KAWASAN
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTUMBUHAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTAHANAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTAMBANGAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERHUTANAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERINDUSTRIAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERJASA
PENGEMBANGAN KAWASAN PERPARIWISATAAN
PENGEMBANGAN KAWAS

8.2.1. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri

Industrialisasi (usaha menggalakkan industri) di Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan sinergi dari semua unsur yang terlibat di dalamnya, terutama dengan kementerian/lembaga non-PUPR. Keterpaduan dalam mengembangkan fokus industri dilakukan dengan: (1) Integrasi pengelolaan kawasan industri melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan badan pengelola dalam pengembangan aktivitas ekonomi industri, (2) Peningkatan konektivitas dan distibusi logistik untuk memperkuat keterkaitan antar industri dan kemudahan proses pemasaran, (3) Peningkatan kualitas tenaga kerja industri melalui kerjasama dengan lembaga diklat dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi informasi (4) Perkuatan struktur industri berbasis teknologi dalam pelaksanaan aktivitas industri maupun inovasi manajemen industri.

Tabel 8.5 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S3-O4 Integrasi pengelolaan kawasan industri melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah serta penguatan kapasitas kelembagaan badan pengelola dalam pengembangan aktivitas ekonomi industri	Perbaikan Struktur Industri	Kolaborasi	Integrasi Kebijakan	Penetapan Regulasi Terkait Kemudahan Perizinan, Larangan Eksport Bahan Mentah, serta Insentif Pengembangan Industri Turunan	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD					X
				Sinkronisasi kebijakan pengembangan industri	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD					X
				Pembentukan forum komunikasi lintas sektor	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD					X
			Penyediaan Industri Pendukung	Kepastian Pasar bagi Penyerapan Hasil Industri	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD					X
				Kerjasama Pendanaan oleh Industri Utama kepada Industri Pendukung	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X				
				Meningkatkan Keterkaitan Antar Industri Utama dan Turunannya	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
	Peningkatan kapasitas kelembagaan	SDM	Rekrutmen	Peningkatan mekanisme rekruitmen pegawai badan pengelola	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Pelatihan dan sertifikasi pegawai badan pengelola	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
				Peningkatan Keterlibatan Profesional dalam Struktur Organisasi Badan Pengelola	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Kapasitas kewenangan	Penyempurnaan aturan terkait peran badan pengelola	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
				Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pembagian kewenangan dalam pengembangan kawasan industri	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
S1-S4-O2-O3 Peningkatan konektivitas dan distibusi logistik untuk memperkuat keterkaitan antar industri dan kemudahan proses pemasaran	Konektivitas kawasan industri menuju outlet	Transportasi Multimoda	Jaringan Jalan	Pembangunan Akses Tol Patimban	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	BINA MARGA					
				Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Pamanukan - Pangaden - Subang	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	BINA MARGA					X
				Optimalisasi Rute Kendaraan Pengiriman	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD					X
			Jaringan Rel	Pembangunan Rel KA Pelabuhan Patimban	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Peningkatan Modashare Angkutan Barang Melalui Jaringan Kereta Api	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Kerjasama Pengelola Kawasan dengan Penyedia Layanan KA untuk Pengembangan *Dry Port*	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
	Distribusi hasil industri	Distribusi	Outlet Ekspor	Peningkatan Kapasitas Tampung Pelabuhan Patimban	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Optimalisasi Bandara Kertajati Sebagai Outlet Ekspor Industri Dirgantara, Pertahanan, dan Manufaktur	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Pengembangan Sistem Kepabeanan Berbasis Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Standardisasi Tingkat *Dwelling Time Optimal*	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
			Transhipment	Optimalisasi Kerjasama Antara Pelabuhan dan Bandara dengan Kawasan Industri	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENHUB/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengadaan *automatic sorting machine*	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
S2-S3-O1 Peningkatan kualitas tenaga kerja industri melalui kerjasama dengan lembaga diklat dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi informasi	Kerjasama Lembaga Diklat dan Sertifikasi	Fasilitas Pendidikan & Sertifikasi	Lembaga Pendidikan	Pengembangan Politeknik sesuai Kebutuhan Industri	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Lembaga Diklat Bidang Industri	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Lembaga Keahlian Berbasis Teknologi	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X	X	X	X
			Sertifikasi & Ikatan Kerja	Sertifikasi Keahlian Sesuai dengan Kebutuhan Industri	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X		
				Penyediaan Ikatan Kerja Lulusan Sekolah Kejuruan	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Penyediaan Pusat Penelitian Industri Bekerjasama dengan Universitas	Kawasan Prioritas Rebana	KEMEN DIKBUD-RISTEK	TBD			X	X	X
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tele-komunikasi	Jaringan Telekomuni-kasi	Peningkatan Kapasitas Jaringan Internet untuk Mempermudah Pertukaran Informasi	Kawasan Prioritas Rebana	KOMINFO	TBD	X	X	X	X	X
				Peningkatan Sistem Database Industri untuk Meningkatkan Kerjasama antar Unit Usaha	Kawasan Prioritas Rebana	KOMINFO	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Pusat Informasi Berbasis Online	Kawasan Prioritas Rebana	KOMINFO	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
			Transfer Teknologi	Peningkatan Transfer Teknologi antara Industri Utama dengan Industri Turunannya	Kawasan Prioritas Rebana	KEMENPERIN	TBD	X	X			
				Peningkatan Sirkulasi Tenaga Kerja antar Pelaku Usaha untuk Mengurangi Gap Informasi	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Insentif bagi Perusahaan yang Melakukan Alih Teknologi kepada Industri Domestik	Kawasan Prioritas Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
S1-O3-O5 Perkuatan struktur industri berbasis teknologi dalam pelaksanaan aktivitas industri maupun inovasi manajemen industri	Pengembangan Aktivitas Industri Berbasis Teknologi	Infra-struktur Dasar	Air Bersih	Penyediaan Air Bersih melalui Sistem *Water Recycling System*	Kawasan Prioritas Rebana	SWASTA	TBD	X	X	X		
				Peningkatan Jaringan Distribusi yang Mengantisipasi Permukiman di Sekitar Kawasan Industri	Kawasan Prioritas Rebana	SWASTA	TBD	X	X	X		
				Pelarangan Penggunaan Air Tanah untuk Kegiatan Industri	Kawasan Prioritas Rebana	SWASTA	TBD	X	X	X		
			Pengolahan Limbah	Penyediaan Sistem Pengolahan Limbah berbasis MBBR	Kawasan Prioritas Rebana	SWASTA	TBD	X	X	X		
				Penyediaan Sistem Pengolahan Sampah berbasis RDF	Kawasan Prioritas Rebana	SWASTA	TBD	X	X	X		
				Penegakan Standar Emisi secara Ketat dalam Aktivitas Industri	Kawasan Prioritas Rebana	KLHK	TBD	X	X	X		
	Inovasi Teknologi dalam Manajemen Industri	Manajemen Industri	Proses Produksi	Pemberian Insentif Penyediaan Barang Modal Berbasis Teknologi untuk Industri dalam Negeri	Kawasan Prioritas Rebana	KEMEN PERIN	TBD	X	X	X		
				Otomasi Sistem *Fullfilment and Warehouse*	Kawasan Prioritas Rebana	KOMINFO/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X		

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Pengembangan Sistem Aplikasi dalam Mendukung Proses Transaksi	Kawasan Prioritas Rebana	KOMINFO	TBD	X	X	X		
			Pergudangan	Pengembangan *Dry Port* pada masing-masing Kawasan untuk Meningkatkan Skala Distribusi	Kawasan Prioritas Rebana	SWASTA	TBD	X				
				Penerapan *Warehouse Management System*	Kawasan Prioritas Rebana	SWASTA	TBD	X	X			
				Integrasi Sistem Distribusi Berbasis *Vessel Traffic Management System*	Kawasan Prioritas Rebana	SWASTA	TBD	X	X			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2.2. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian

Integrasi dari seluruh bidang yang terkait (kementerian/lembaga) terutama dengan pihak non-PUPR sangat dibutuhkan kerja sama yang harmonis dalam pengembangan sektor pertanian, karena menyangkut roda kehidupan masyarakat. Pengembangan sektor pertanian dilakukan dengan: (1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja pertanian untuk mendorong efektifitas pengelolaan sektor pertanian, (2) Pemertahanan lahan pertanian melalui pengendalian alih fungsi dan pemberian insentif lahan LSD, (3) Pemantapan kualitas infrastruktur sumber daya air melalui pengoptimalan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Air alternatif, (4) Pemanfaatan teknologi melalui inovasi teknik penanaman dan adaptasi terhdap perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan pertanian (5 Peningkatan konektivitas dan jalur logistik untuk efisiensi distribusi dan transportasi hasil pertanian.

Tabel 8.6 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S4-O4 Peningkatan kapasitas tenaga kerja pertanian untuk mendorong efektifitas pengelolaan sektor pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan	Pelatihan Teknis	Pelatihan Aplikasi Teknologi Digital Kepada Petani Lokal	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KOMINFO	TBD		X	X	X	
				Alih Pengetahuan Penggunaan Teknologi *Harvester*	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN/ KOMINFO	TBD			X	X	X
				Penambahan Tenaga Ahli Muda Lokal	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD		X	X	X	X
			Pelatihan Pemasaran	Sosialisasi Penggunaan Teknologi Informasi kepada Petani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KOMINFO	TBD			X	X	X
				Fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
					Jawa Barat Selatan							
				Pendirian pusat-pusat pembelajaran jarak jauh	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN DIKBUD-RISTEK	TBD	X	X	X	X	X
	Pengoptimalan Kelembagaan	Kelembagaan	Kelompok Petani	Pembentukan/Pengoptimalan Kelompok Usaha Tani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Sistem Informasi Data Realtime Harga dan Produksi Hasil Pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KOMINFO	TBD		X	X	X	X
				Pengembangan Program Transfer Teknologi kepada Kelompok Usaha Tani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KOMINFO	TBD			X	X	X
			Pembiayaan	Peningkatan kerjasama Kelompok Usaha dengan Lembaga Pembiayaan	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD		X	X	X	X
				Peningkatan akses perlindungan usaha pertanian melalui asuransi	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Pemberian kredit mikro	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	BADAN USAHA (PERBANKAN)	TBD	X	X	X	X	X
S5-O3 Pemertahanan lahan pertanian	Pengendalian Alih Fungsi LSD	Pengendalian	Aturan/ Kebijakan	Penetapan aturan lahan sawah dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan	ATR/BPN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
melalui pengendalian alih fungsi dan pemberian insentif lahan LSD					Jawa Barat Selatan							
				Sosialisasi peraturan penetapan lahan sawah dilindungi	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD			X	X	X
				Penegakan aturan terkait lahan sawah yang dilindungi	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD				X	X
			Legalitas	Percepatan Penerbitan Sertifikat Lahan Petani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X	X	
				Registrasi Penambahan Areal Lahan Petani	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X	X	X
				Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X		
	Penerapan Insentif pada LSD	Penerapan Insentif	Subsidi dan Pengaturan Harga	Peningkatan Skema Kredit bagi Petani di LSD	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENKEU	TBD	X	X	X	X	X
				Pengadaan, distribusi serta pengawasan pupuk bersubsidi di Lahan LSD	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Pemberian Sertifikasi Hijau bagi Petani yang Menerapkan Sistem Produksi Berkelanjutan	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
			Fasilitas dan Peralatan	Penyediaan bangunan pengolahan hasil pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD				X	X
				Pengembangan peralatan dan mesin pengolahan hasil pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X			
				Pengembangan teknologi mesin pengolah hasil pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD		X	X	X	X
S1-O1-O3 Pemantapan kualitas infrastruktur sumber daya air melalui pengoptimalan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Air alternatif	Pengoptimalan Infrastruktur SDA	Infra-struktur SDA	Bendungan	Pengoptimalan Bendungan untuk Irigasi	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	SDA			X	X	X
				Pengendalian Banjir Kabupaten Subang	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	SDA	X	X			
				Pembangunan Bendungan Kadumanik	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	SDA			X	X	X
			Irigasi	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cileuweung	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	SDA	X				
				Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Seusepan	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	SDA	X				
				Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cikeusik	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	SDA	X				
			Inovasi Pengairan	*Rain harvesting* pada wilayah yang rawan kekeringan	Kawasan Prioritas Rebana,	PUPR/ PEMDA	SDA		X	X	X	

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
	Pengembangan Sumber Air Alternatif	Sistem Pengelo-laan SDA			Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan							
				Penerapan sistem tata air mikro untuk efisiensi penggunaan air pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD			X	X	X
				Penerapan sistem irigasi *intermittent* dan *alternate wetting and drying* (AWD).	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENTAN	TBD			X	X	X
			Sumber Air Baku Alternatif	Pengembangan Situ pada Kawasan Kritis Air	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	SDA	X	X	X	X	
				Pengembangan Embung pada Kawasan Kritis Air	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	SDA	X	X			
				Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah pada Kawasan Kritis Air	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	SDA					
S3-S5-O1 Pemanfaatan teknologi melalui inovasi teknik penanaman dan adaptasi terhdap perubahan iklim	Pengembangan Teknik Penanaman yang Efisien	Inovasi Teknik Penanaman	Pupuk	Penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Larangan penggunaan pupuk dari bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
untuk meningkatkan ketahanan pertanian				Penggunaan pupuk disesuaikan dengan karakter tanah sawah	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
			Pengendalian Hama	Penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara inovatif	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Bibit Unggul Tahan Hama	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD	X	X	X	X	X
				Penerapan Pola Diversifikasi Tanam untuk Mengurangi Risiko Hama	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMENTAN	TBD					X
	Pengendalian Risiko Perubahan Iklim	Sistem Ketahanan	Pengendalian Iklim Mikro	Penanaman Tanaman Keras untuk Meningkatkan Keragaman Ekosistem	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD			X	X	X
				Teknologi modifikasi cuaca pada kondisi ekstrim	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	BMKG	TBD	X	X	X	X	X
				Penggunaan Sistem Green House pada Komunitas Rentan Perubahan Iklim	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	BMKG	TBD	X	X	X	X	X
			Pengendalian Iklim Makro	Penggunaan sistem informasi perubahan iklim dan peringatan dini bencana (SIG)	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	BMKG	TBD			X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Peningkatan Luas Kawasan Berfungsi Lindung Kabupaten Minimal 30%	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan *Buffer Zone* sebagai Pemisah antara Kawasan Pertanian dengan Kawasan Perkotaan/Industri	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	ATR/BPN	TBD	X	X	X		
S2-S5-O2-O5 Peningkatan konektivitas dan jalur logistik untuk efisiensi distribusi dan transportasi hasil pertanian	Infrastruktur Transportasi Pendukung Pertanian	Transpor-tasi	Jaringan Distribusi	Pembangunan Area Kumpul Angkutan Barang	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X			
				Pembangunan Pergudangan Hasil Pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD				X	X
				Penyediaan angkutan hasil pertanian	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD			X	X	X
			Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Kuningan	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	BINA MARGA					X
				Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS)	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PUPR	BINA MARGA	X	X	X	X	X
				Peningkatan jalur distribusi hasil pertanian dari tempat pengumpulan menuju pasar	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ PUPR	BINA MARGA	X	X	X	X	X
		Pengem-bangan	Pengolahan Limbah	Penyediaan TPS3R	Kawasan Prioritas Rebana,	PUPR	CIPTA KARYA		X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
	Pengembangan Sentra Pertanian	Pusat Kegiatan Lokal			Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan							
				Penyediaan SPALD-T	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	CIPTA KARYA	X	X			
				Penyediaan Bank Sampah	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	*TBD*	X	X	X	X	X
			Penyediaan Air Minum	Penyediaan SPAM IKK	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	*TBD*	X	X			
				Penyediaan PAMSIMAS	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	CIPTA KARYA	X				
				Penyediaan Jaringan Distribusi Air Minum Perpipaan	Kawasan Prioritas Rebana, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	*TBD*	X	X	X	X	X

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2.3. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu andalan perkembangan ekonomi berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga saling terkait dengan berbagai kementerian/lembaga lain yang menanganinya (non-PUPR). Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan: (1) Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri kreatif melalui peningkatan kerjasama dan kelembagaan serta pengembangan bisnis dan pemasaran, (2) Penguatan konektivitas dan transportasi untuk mendukung peningkatan pergerakan wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan moda transportasi wisata, (3) Peningkatan keterkaikan destinasi pariwisata melalui manajemen bisnis dan destinasi wisata untuk mengakomodasi minat wisatawan, dan (4) Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk memperkuat kualitas industri dan pangsa pasar pariwisata berbasis ekonomi kreatif.

Tabel 8.7 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S1-S3-O4-O5 Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri kreatif melalui peningkatan kerjasama dan kelembagaan serta pengembangan bisnis dan pemasaran	Peningkatan Kerjasama dan Kelembagaan	Kelompok Wisata	Kemitraan	Penetapan Regulasi untuk Pengamanan Aset Masyarakat di Destinasi Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD	X	X	X	X	
				Pembentukan Jaringan Kerjasama antara pelaku usaha dengan brand internasional	Kawasan Prioritas Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan *Tourism Development Center*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD	X				
			Kelembagaan	Pembentukan Kelompok usaha kreatif untuk Pendukung Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan	KEMEN PAREKRAF	TBD		X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
					Jawa Barat Selatan							
				Peningkatan Keterlibatan Kelompok Wisata dalam Kalender Event Pariwisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD					X
				Pembentukan Kelompok Wisata sebagai Lembaga Hukum untuk Meningkatkan Akses terhadap Program Pemerintah dan Investasi Swasta	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD		X	X	X	X
	Pengembangan Bisnis dan Pemasaran	Business Plan & Pemasaran	Kapasitas Menejerial	Sertifikasi Keahlian untuk Menciptakan Standar Produk Wisata yang Berkualitas	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD	X	X	X	X	X
				Kemudahan Akses Finansial bagi Pelaku Usaha	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA/ KEMEN PAREKRAF	TBD	X				
				Program Magang berbayar untuk jalur menuju pekerjaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD		X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
			Publikasi	Penciptaan Branding Wisata dan Produk Ekonomi Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Sharing konten media sosial yang relevan dengan *Brand*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Build Up Brand Filter Pemasaran Atraksi Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMEN PAREKRAF	TBD			X	X	X
S2-O1-O2 Penguatan konektivitas dan transportasi untuk mendukung peningkatan pergerakan wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan moda transportasi wisata	Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata	Aksesibi-litas	Kualitas Jalan Nasional	Pelebaran Jalur Vertikal Cibadak-Cikidang – Pelabuhan ratu	Kawasan Prioritas Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	BINA MARGA	X	X	X		
				Peningkatanan Jalan Pelabuhan Ratu-Cisolok	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PUPR	BINA MARGA	X	X	X		
				Peningkatan Jalan Surade-Ujung Genteng	Kawasan Prioritas Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	BINA MARGA	X	X	X		
			Jalan Tol dan Rest Area	Pembangunan Jalan Tol yang didukung pintu gerbang menuju kawasan wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	BINA MARGA	X	X	X		

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Pembangunan Rest Area Jalan Tol sebagai tempat promosi produk dan destinasi wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	
				Peningkatan Akses dari pintu gerbang menuju destinasi wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PUPR	BINA MARGA	X	X	X	X	
	Peningkatan Layanan Moda Transportasi Wisata	Kinerja Angkutan Massal	Moda	Pembangunan Jalan Tol Sukabumi - Padalarang	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Ciletuh	PUPR	BINA MARGA	X	X	X	X	X
				Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Jawa Barat Selatan	PUPR	BINA MARGA	X	X	X	X	X
				Peningkatan Layanan Transportasi Publik hingga ke Destinasi Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
			Operator	Pengembangan pusat transit antarmoda yang mengakomodasi transportasi wisatawan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Penentuan Rute dan Simulasi Layanan *Direct Service/ Zona*	Kawasan Prioritas Cekungan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
					Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan							
				Penentuan Klaster Destinasi Wisata Yang Dilayani Angkutan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
S1-S4-O2-O3 Peningkatan keterkaikan destinasi pariwisata melalui manajemen bisnis dan destinasi wisata untuk mengakomodasi minat wisatawan	Manajemen Pariwisata	Destinasi	Paket Wisata dan Event	Pengembangan Paket Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Sinkronisasi Informasi Agenda Pariwisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Sinkronisasi Pelaksanaan antar Event (Skala Lokal hingga Nasional)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
			Pengelolaan Tenaga Kerja dan Pengunjung	Legislasi Agen Tenaga Kerja Untuk Aktivitas Pariwisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Pengembangan *Analog Visitor Management System* Wisman	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Sistem *Single Sign On* Berbasis Nomor NIK	Kawasan Prioritas Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD		X	X	X	X
	Manajemen Bisnis	Finansial dan Bisnis	Manajemen Finansial	Pengaturan Harga Tiket Masuk DTW	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
				Pengaturan Harga Tiket Transportasi Antar DTW	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X				
				Pengaturan Kompensasi SDM Pariwisata	Kawasan Prioritas Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
			Manajemen Bisnis	Menjalin Kerjasama Pengelola Kawasan dengan Swasta untuk Pengembangan Destinasi Wisata	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X			
				Menjalin Kerjasama antara Pengelola Kawasan/Akomodasi dengan Agen Perjalanan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
					Jawa Barat Selatan							
				Mengembangkan Strategi Multiproduk untuk Meningkatkan Ketahanan terhadap Krisis Global	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	KEMENHUB	TBD	X	X	X	X	X
S5-O2-O3 Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk memperkuat kualitas industri dan pangsa pasar pariwisata berbasis ekonomi kreatif	Pengembangan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Ekonomi Kreatif	Teknologi Produksi Industri Kreatif	Proses Produksi	Pemberian Insentif Penyediaan Barang Modal Berbasis Teknologi untuk Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Otomasi Sistem *Fullfilment* dan *Warehouse*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X				
				Pengembangan Sistem Aplikasi dalam Mendukung Proses Transaksi Pemesanan Produk Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X			
			Kolaborasi Antar Industr Kreatif	Kepastian Pasar untuk Penyerapan Hasil Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Penegakan Kekayaan Intelektual untuk Meningkatkan Insentif Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
					Jawa Barat Selatan							
				Pengembangan Jaringan Kerjasama dengan Industri Kreatif Global	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD		X	X	X	
	Pemanfaatan Teknologi untuk Promosi dan Kegiatan Pasar	Tele-komunikasi	Jaringan Tele-komunikasi	Peningkatan Kapasitas Jaringan Internet untuk Mempermudah Promosi Hasil Industri Kreatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Peningkatan Sistem Database Industri untuk Meningkatkan Kerjasama antar Unit Usaha	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Pengembangan Pusat Informasi Berbasis Online	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung, Ciletuh, dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Transfer Teknologi	Peningkatan Transfer Teknologi antara Industri Kreatif dengan Perusahaan Kreatif Global	Kawasan Prioritas Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X				
				Peningkatan Sirkulasi Tenaga Kerja antar Pelaku Usaha untuk Mengurangi Gap Informasi	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Insentif bagi Perusahaan yang Melakukan Alih Teknologi kepada Industri Domestik	Kawasan Prioritas Ciletuh dan Jawa Barat Selatan	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.2.4. Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar

Infrastruktur dan fasilitas kota merupakan aspek yang mendasar dalam pembentukan suatu perkotaan terutama dari segi pelayan dasar, maka dibutuhkan program-program keterpaduan infrastruktur antara PUPR dengan kementerian/lembaga non-PUPR. Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar dapat dilakukan dengan: (1) Pengembangan permukiman secara polisentris melalui revitalisasi Kawasan dan ekonomi bernilai tambah, (2) Peningkatan layanan dasar melalui penyediaan infrastruktur permukiman dengan sistem pengelolaan terpusat dan teknologi ramah lingkungan, (3) Peningkatan ketahanan terhadap bencana malalui sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana, (4) Pemanfaatan Layanan Transportasi Publik dan Kemasyarakatan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta (5) Pengembangan Integrasi Pengelolaan melalui penguatan Kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 8.8 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
S4-S5-T1-T3 Pengembangan permukiman secara polisentris melalui revitalisasi Kawasan dan ekonomi bernilai tambah	Revitalisasi Kawasan	Penataan Pusat Kegiatan	Hunian dan Pusat Aktivitas	Pengembangan Hunian Vertikal dengan Prinsip *Mix Used Building*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	SWASTA/ PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kawasan Padat Penduduk	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Penerapan Konsolidasi Lahan sesuai dengan Rencana Pengembangan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X			
			Pengaturan Zonasi	Penetapan pusat kegiatan sebagai pusat ekonomi dan hub transport	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Penetapan radius pengembangan yang dapat diakses pejalan kaki	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
				Pengembangan Jalur hijau dan jalur biru untuk mendukung sirkulasi pejalan kaki	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
	Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Ekonomi Bernilai Tambah	Sektor Jasa berbasis teknologi	Pengembangan jasa sebagai sektor unggulan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Penyediaan Ruang usaha mengakomodasi perkembangan perusahaan teknologi	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
				Pengembangan Kegiatan Ekonomi yang mengakomodasi *Work From Anywhere*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X			
			Tenaga Kerja	Pengembangan pusat pelatihan berbasis teknologi	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENPERIN	TBD		X	X	X	X
				Peningkatan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pelaku usaha	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMEN DIKBUD/ KEMENPERIN	TBD	X	X	X		
				Pengembangan Sistem Pelatihan berbasis online sesuai kebutuhan industri	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KOMINFO	TBD	X	X	X	X	

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
	Peningkatan Konektivitas antar Pusat	Jalan Lingkar dan Radial	Jalan Perkotaan	Pembangunan Jalan Akses Stasiun Gedebage	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PUPR	BINA MARGA					
				Pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PUPR	BINA MARGA	X	X	X	X	X
				Pembangunan Tol Lingkar Selatan Bandung	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PUPR	BINA MARGA	X	X	X	X	X
				Jalan Lingkar Malangbong	Kawasan Jawa Barat Selatan	PUPR	BINA MARGA	X	X	X		
				Pembangunan Fo Perlintasan Kereta Api di Jl. Cimindi, Jl. Sunda, Jl. Ahmad Yani, dan Jl. Laswi	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PUPR	BINA MARGA	X	X	X	X	X
S2-S3-T2-T3 Peningkatan layanan dasar melalui penyediaan infrastruktur permukiman dengan sistem pengelolaan terpusat dan teknologi ramah lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pengolahan Limbah	Limbah Cair	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PUPR	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X
				Pengembangan *Command Centre* untuk pemantauan kualitas sungai dan drainse	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Pembentukan Satgas Pengendalian Kualitas Sungai	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X			
			Limbah Padat	Pembangunan Sistem Pengolahan Sampah *Waste to Energy*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PUPR	CIPTA KARYA	X	X	X		
				Peningkatan Sistem 3R dengan melibatkan penduduk perkotaan	Kawasan Prioritas Cekungan	PEMDA	TBD		X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
					Bandung dan Rebana							
				Peningkatan Kerjasama dengan industri terkait pemanfaatan limbah	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
	Penyediaan Air Bersih	Pengolahan Air Minum	Air Minum	Pembangunan SPAM Bandung Barat (SPAM Sinumbra)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PUPR	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X
				Peningkatan SPAM Regional Bandung Selatan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PUPR	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X
				Peningkatan SPAM Regional Bandung Timur (SPAM Kertasari)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung	PUPR	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X
				Pembangunan SPAM Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	CIPTA KARYA	X	X			
				Pembangunan SPAM Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	CIPTA KARYA			X	X	X
				Pembangunan SPAM KIT Subang (Manyingsal)	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR	CIPTA KARYA					X
				Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Pangandaran	Kawasan Prioritas Jawa Barat Selatan	PUPR	CIPTA KARYA	X	X	X	X	X
				Pembangunan Jaringan Perpipaan terutama pada kawasan kritis air	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PUPR	CIPTA KARYA	X	X	X		
				Pengembangan kolam retensi dan embung sebagai sumber air alternatif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PUPR	SDA	X	X			

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
			Kebijakan Pemanfaatan Air	Regulasi Pembatasan Penggunaan Air Tanah	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Regulasi Pengeboran Sumur	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
				Pemanfaatan idle capacity SPAM regional di kawasan perkotaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
S2-T5 Peningkatan ketahanan terhadap bencana malalui sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Infra-struktur Pengendali Banjir	Infrastruktur SDA	Peningkatan Kapasitas Sungai di wilayah DAS Citarum	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PUPR	SDA	X	X	X	X	X
				Peningkatan Kapasitas Drainase Perkotaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Peningkatan luasan RTH untuk mengurangi *run-off*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	ATR/BPN/ PEMDA	TBD	X	X			
			Pengendalian DAS Kritis	Pengendalian tutupan lahan pada bagian hulu sungai	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	ATR/BPN/ PEMDA	TBD	X	X	X		
				Peningkatan Kapasitas Sungai di wilayah DAS Cimanuk	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PUPR/ PEMDA	SDA		X	X	X	X
				Penanganan Banjir Rob pada Kawasan Perkotaan di Pesisir	Kawasan Prioritas Rebana	PUPR/ PEMDA	SDA				X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
	Sistem Peringatan Dlni	Teknologi Informasi	Data/ Informasi	Pengembangan Pusat Informasi Kebencanaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pengembangan Teknologi Untuk Meningkatkan Akurasi Prediksi Bencana	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KOMINFO/ BNPB	TBD	X	X	X		
				Pengembangan Sistem Integrasi Data Iklim *Real Time*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	BMKG	TBD	X	X			
			Sistem Peringatan Dini	Pengembangan Riset dan Penelitian Terkait Kebencanaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMEN DIKBUD/ BNPB	TBD	X	X	X		
				Pengembangan Sistem Peringatan Dini	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	BNPB	TBD		X	X	X	X
				Edukasi Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Bencana	Kawasan Prioritas Rebana	BNPB/ PEMDA	TBD				X	X
S1-T5 Pemanfaatan Layanan Transportasi Publik dan Kemasyarakatan dengan memanfaatkan	Transportasi Publik	Sistem Trans-portasi Massal	Transportasi Multimoda	Pengembangan Rute dan Trayek Transportasi Massal Berbasis Rel	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENHUB	TBD				X	X
				Pengembangan *Traffic Management System*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENHUB	TBD		X	X	X	

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
teknologi informasi				Pengembangan Transportasi berbasis listrik dan nonmotoris sebagai moda utama	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENHUB	TBD			X	X	X
			Simpul Transportasi Antarmoda	Pembangunan Fasilitas *Transit* Antar Moda Transportasi	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMENHUB	TBD		X	X		
				Pembangunan pusat aktivitas ekonomi terintegrasi dengan *Transit Hub*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD			X	X	X
				Penerapan Sistem Elektronik dalam Pemanfaatan Transportasi Publik	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
	Pelayanan Kemasyarakat-an	Sosial dan Ekonomi	Kualitas Hidup	Pengembangan sistem pelayanan kesehatan berbasis *online*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KOMINFO	TBD				X	X
				Peningkatan Jaringan digital untuk meningkatkan akses telekomunikasi	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KOMINFO	TBD			X	X	X
				Integrasi Pelayanan Ketenagakerjaan melalui Sistem *Online*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	
			Pelayanan Dasar	Pemasangan fasilitas keamanan (CCTV; Tombol Darurat)	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
				Pengembangan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis *online*	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		
				Pengembangan sistem pengaduan berbasis elektronik	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
S4-T4 Pengembangan Integrasi Pengelolaan melalui penguatan Kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan	Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Antar Kab/Kota	Koordinasi dan Pendanaan	Koordinasi	Pembentukan Forum Komunikasi Perkotaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Pembentukan Skema sharing pembangunan antarkawasan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X				
				Pembangunan Infrastruktur Regional secara kolektif	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
			Integrasi Anggaran	Pengembangan Skema Pendanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Pemberian Insentif dan Disisentif dalam mendukung pembangunan antarkawasan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD				X	X
				Mendorong Pengembangan Infrastruktur Melalui Pendanaan KPBU	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X		

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	SEKTOR	TAHAP I				
								2025	2026	2027	2028	2029
	Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Pemda dan Badan Usaha	Keter-libatan Pemangku Kepen-tingan	Forum Kolaborasi	Pengembangan Forum Masyakarat	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	
				Pengembangan Sistem Komunikasi online antara masyarkat dan pemerintah	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X				
				Pengembangan Kerjasama lembaga pendidikan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	KEMEN DIKBUD-RISTEK	TBD					X
			Alternatif Pendanaan	Bantuan CSR Untuk Pengembangan Infrastruktur	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X	X	X	X	X
				Insentif Pengelolaan CBD kepada pengembang swasta	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD		X	X	X	X
				Pengembangan Fasilitas Umum sebagai Syarat Perizinan	Kawasan Prioritas Cekungan Bandung dan Rebana	PEMDA	TBD	X				

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

9.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang–Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam menyiapkan dokumen RPIW, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*).

9.2. Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan untuk:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/ implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW

berdasarkan output (infrastruktur terbangun), outcome (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), benefit (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), impact (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3. Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW:
   a. Pemantauan tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW (Rencana Aksi Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Wilayah per tahun).
   b. Pemantauan lima (5) tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW (Rencana Aksi Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Wilayah per 5 tahun).

2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW:
   a. Evaluasi tahunan (*output* dan *outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.
   b. Evaluasi lima (5) tahunan (*benefit*, *impact*, dan keberlanjutan) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.

PUPR

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

www.pu.go.id